KONSEP KOSMOPOLITAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

(Relevansi Kekinian dan Implementasi Dalam Dunia Pendidikan Islam)

ADI HARYANTO, M.Pd
HERMAWANSYAH, M.Pd.I

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

Sunan Giri

BIMA – NUSA TENGGARA BARAT

www.stitbima.ac.id

KONSEP KOSMOPOLITAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

(Relevansi Kekinian dan Implementasi Dalam Dunia Pendidikan Islam)

ADI HARYANTO, M.Pd
HERMAWANSYAH, M.Pd.I

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KONSEP KOSMOPOLITAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

(Relevansi Kekinian dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan Islam)

Adi Haryanto
Hermawansyah

Diva! Pustaka

KONSEP KOSMOPOLITAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (Relevansi Kekinian dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan Islam)

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Diva Pustaka
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Mei 2025
15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-8795-76-5

Penulis : Adi Haryanto
Hermawansyah
Desain Cover : Dwi Prasetyo
Tata Letak : Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh : CV. Diva Pustaka

Anggota IKAPI : No. 222/JTE/2021

E-mail : divapustaka@gmail.com
Website : www.divapustaka.co.id
Whatsapp : 0813-3144-1992

Perum Mutiara Regency 2 Blok D7
Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah 53318

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan ilmu dan kebijaksanaan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkeadaban. Dengan rahmat dan izin-Nya, buku ini, *Konsep Kosmopolitan Abdurrahman Wahid (Implementasi dalam Dunia Pendidikan Islam)*, akhirnya dapat diselesaikan dan disajikan kepada para pembaca sekalian.

Buku ini lahir dari dorongan untuk memahami dan menggali lebih dalam pemikiran besar KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Islam yang kosmopolitan. Pemikiran beliau, sebagaimana tertuang dalam buku "Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan" yang diterbitkan oleh The Wahid Institute pada tahun 2007, menjadi landasan utama dalam penulisan ini. Gus Dur merupakan sosok pemikir yang memahami Islam secara tekstual dan kontekstual. Ia melihat Islam sebagai agama yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, serta selalu mampu beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa kehilangan esensinya. Konsep kosmopolitanisme yang dikembangkan oleh Gus Dur mencerminkan pemahaman Islam yang terbuka, moderat, dan inklusif. Dalam dunia pendidikan Islam, konsep ini sangat relevan untuk dikaji dan diterapkan, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, menghargai perbedaan, dan berwawasan luas. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai kosmopolitanisme diharapkan menghasilkan generasi yang menguasai ilmu agama dan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan global.

Sebagaimana yang telah dirintis oleh Gus Dur, dunia pendidikan Islam tidak boleh eksklusif dan tertutup dari peradaban zaman. Justru pendidikan Islam harus bersifat adaptif, mengakomodasi berbagai perubahan, serta membangun dialog yang konstruktif dengan kebudayaan lain. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana konsep kosmopolitanisme dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam, baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, maupun pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembahasannya, buku ini mengulas bagaimana nilai-nilai kosmopolitanisme dalam Islam dapat diterapkan dalam pendidikan, mulai dari aspek inklusivitas, toleransi, hingga penerimaan terhadap

keberagaman. Dengan pendekatan yang kontekstual, diharapkan buku ini memberikan wawasan baru bagi para pendidik, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami menerapkan konsep kosmopolitanisme dalam kehidupan sehari-hari.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap fakta bahwa pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menanamkan sikap keterbukaan dan toleransi di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pendidikan yang intelektual dan membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal. Islam dan kebudayaan lokal dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Hal ini menjadi prinsip dasar dalam membangun pendidikan Islam yang menghargai kearifan lokal, sekaligus terbuka terhadap pemikiran global. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat berkembang menjadi sistem dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman.

Selain itu, buku ini juga menyoroti bagaimana konsep pendidikan Islam yang berbasis kosmopolitanisme dapat diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam menjadi kekuatan yang mampu mencetak generasi unggul secara akademik, juga memiliki kesadaran moral sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dalam proses penyusunan buku ini, penulis sangat terbantu oleh berbagai referensi yang memberikan pemahaman mendalam tentang pemikiran Gus Dur. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, serta memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang pemikiran Gus Dur serta implementasinya dalam dunia pendidikan Islam. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan dalam menjalankan amanah keilmuan ini. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID ... 13
A. Biografi Singkat Abdurrahman Wahid 13
B. Latar Belakang Intelektual Dan Pendidikan 15
C. Pengaruh Gus Dur Dalam Dunia Pendidikan Islam 28
D. Kosmopolitanisme dalam Pemikiran Gus Dur: Persektif Filosofis dan Teologis 34

BAB III KONSEP KOSMOPOLITANISME ABDURRAHMAN WAHID 43
A. Definisi Kosmopolitanisme 43
B. Kosmopolitanisme Dalam Perspektif Islam 48
C. Nilai-Nilai Pluralisme Dan Toleransi Dalam Kosmopolitanisme 55
D. Pemikiran Gus Dur Tentang Multikulturalisme 86
E. Hubungan Kosmopolitanisme Dengan Pembangunan Masyarakat Madani 90

BAB IV IMPLEMENTASI PEMIKIRAN KOSMOPOLITAN GUS DUR DALAM PENDIDIKAN ISLAM 95
A. Pendidikan Islam Inklusif 95
B. Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi 115
C. Pendidikan Islam Egaliter 122
D. Pendidikan Islam Pembebasan 126
E. Pendidikan Islam Berbasis Kerjasama 130
F. Pendidikan Islam Moralitas 137
G. Nilai Pluralisme Dalam Kurikulum Pendidikan Islam 139
H. Penerapan Nilai-Nilai Pemikiran Gus Dur Di Lembaga Pendidikan Islam 142
I. Tantangan dan Peluang Implementasi Pemikiran Kosmopolitanisme Gus Dur dalam Pendidikan Islam 156

BAB V PERAN GURU DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI KOSMOPOLITAN 179
A. Sebagai pendidik multikultural dan inklusif 180
B. Penjembatan Pengetahuan Global dan Lokal 183
C. Teladan dalam Sikap 184

BAB VI RELEVANSI PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER 187
A. Toleransi dalam Era Digital 188
B. Kebebasan Berpendapat 192
C. Pendidikan Literasi Digital 194
D. Perlawanan terhadap Intoleransi 195

BAB VII PENUTUP 197

DAFTAR PUSTAKA 199
PROFIL PENULIS 205

BAB I

PENDAHULUAN

Mari kita mengenal seorang tokoh karismatik yang tak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga pernah menorehkan sejarah sebagai pemimpin tertinggi negeri ini. Dialah KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur seorang kiai, cendekiawan, dan pejuang demokrasi yang berhasil menempatkan namanya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia.

Gus Dur dikenal luas karena pemikirannya yang terbuka, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Sebagai seorang kiai, ia membawa nuansa baru dalam kepemimpinan nasional menggabungkan kebijaksanaan pesantren dengan tantangan pemerintahan modern. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama. Ia harus turun dari kursi kepresidenan karena berbagai faktor, di antaranya dinamika politik yang tidak stabil, konflik antar-lembaga negara, serta tekanan dari parlemen yang membuat posisinya kian terjepit.

Meski demikian, Gus Dur tetap dikenang sebagai tokoh yang berani, jenaka, dan penuh kebijaksanaan. Warisannya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan demokrasi masih terasa hingga kini. Gus Dur bukan hanya Presiden, tapi juga Bapak Bangsa yang tulus mencintai rakyatnya.

Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai seorang pemikir, politisi, dan pemimpin agama, pemikiran Gus Dur mencerminkan pandangan cosmopolitan berorientasi pada inklusivitas dan pluralisme. Konsep kosmopolitan yang diusungnya menawarkan pendekatan baru dalam memahami hubungan antar-budaya dan agama, yang sangat relevan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Kosmopolitanisme

secara umum merujuk pada ideologi yang menganggap setiap individu, dari latar belakang budaya atau nasionalitas, memiliki hak yang sama. Ini mengandung prinsip bahwa identitas lokal tidak harus menghalangi pengakuan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Dalam konteks Gus Dur, kosmopolitanisme berarti pendekatan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap pluralitas.

Gus Dur dikenal karena pandangannya progresif mengenai pluralisme. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman etnis dan agama, harus mempromosikan toleransi dan menghormati perbedaan. Pemikirannya ini bertumpu pada ajaran agama Islam yang mendukung perdamaian dan saling menghargai. Pada masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia, masyarakat Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan terkait perbedaan etnis, agama, dan budaya. Gus Dur mengusulkan kebijakan dan pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi konflik sosial dan politik melalui dialog dan pemahaman bersama. Gus Dur tidak hanya berperan dalam ranah politik, juga kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kosmopolitan, yaitu dengan membuka ruang bagi berbagai perspektif dan mendorong pemahaman lintas budaya. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki tradisi yang kaya, namun seringkali terjebak dalam pola pikir yang eksklusif. Gus Dur menekankan perlunya reformasi dalam pendidikan Islam untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada keragaman (Panji Purnomo, 2021:9).

Reformasi pendidikan Islam memang sangat perlu untuk menjawab berbagai probelamatika manusia global. Apalagi era sekarang dikenal dengan generasi beta, sejak 1 januari 2025 telah lahir generasi beta, mereka ini hidup ditengah pusaran dunia global penuh dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang dikenal dengan AI, AR (Augmented Reality) dan VR (Virtual Reality), dan Sebagian besar penduduk dunia telah mengaplikasikan. Tetapi berbeda dengan cara pandang Seyyed Hossein Nasr justru memberikan kritikan terhadap pendidikan yang kebarat-baratan. Mestinya pendidikan Islam memperkuat tardisionalisme Islam bukan berarti perkembangan sains modern di barat dibiarkan. Namun, perlu diintegrasikan antara prinsip tradisional Islam yang menjadi fondasi utama dengan sains modern. Kritikan Hossein Nasr ini, sebagai upaya agar umat Islam

tidak terserabut dari ajaran tradisionalisme Islam (Afith Akhwanudin, 2013:6-7).

Pemikiran Hossein Nasr ini, memang relevan dengan perkembangan teknologi masa kini, pemikirannya berupaya membendung generasi Islam dari kecenderungan mereka terhadap sains modern. Apabila kajian-kajian keilmuan budaya barat menjadi prioritas maka, sangat mungkin umat Islam sendiri akan kehilangan ruh spiritualitas sebagai muslim sejati, pendalam ilmu agama yang merupakan keharusan bagi umat Islam bisa saja bergeser, karena kecanduan teknologi modern. Hossein Nasr sendiri sangat mengkhawatirkan keadaan umat Islam yang cenderung kebaratan, maka Hossein Nasr mengkritik modernisasi pendidikan Islam yang terlalu meniru sistem barat. Tariq Ramadan dalam karyanya Radical Reform: *Islamic Ethics and Liberation*, justru menawarkan sebuah pemikiran yang dikenal dengan *tajdid ad-din* (pembaharuan dalam agama). Dalam ungkapanya bahwa dunia telah tumbuh semakin kompleks, praktik-praktik lokal terhubung dengan tatanan global, semua bidang tindakan manusia saling bergantung dan saling terhubung, dan mustahil bagi para ilmuwan masa kini untuk memahami kompleksitas ini dengan keyakinan yang sama seperti para ilmuwan terdahulu. Pemikiran ini menuntut reformasi pendidikan Islam yang searah dengan kemajuan zaman (Ahmad Nabil Amir & Tasnim Abdul Rahman, 2022:52).

Tuntutan zaman yang sangat kompleks di era digital ini, memungkinkan terobosan baru dalam praktik pendidikan Islam yang lebih banyak memainkan peran teknologi. Pemikiran Tariq Ramadan sangat searah dengan kebutuhan zaman, bukan berarti pemikiran Hossein Nasr tidak merespon kemajuan zaman. Keduanya mesti di implementasikan dalam pendidikan Islam yakni penguatan ruh spiritualitas agama dan responsif terhadap teknologi kekinian. Kita juga mesti menyoroti bagaimana Fazlur Rahman menggagas salah satu konsep yang disebut "*double movement*". Konsep ini, ibarat sebuah tombak kedua ujungnya sama-sama tazam, maksudnya adalah Fazlur Rahman dalam upaya mengusung modernisasi Pendidikan, perlu penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan meninjau situasi yang Tengah dihadapi dengan situasi saat wahyu itu turun, demikian sebaliknya meninjau kondisi saat wahyu turun kemudian dikontekskan pada situasi terkini. Kajian ini menarik, karena ada Upaya untuk mengeluarkan umat Islam dari pola pikir klasik kepada

kajian kontekstualitas modern (Muhammad Umair & Hasani Ahmad Said, 2023:3).

Muncul pertanyaan, apakah pemikiran yang ditawarkan oleh Hossein Nasr, Tariq Ramadan dan Fazlur Rahman relevan dengan Pendidikan Islam saat ini? relevan atau tidaknya kita perlu menkajinya. Pertama, Pemikiran Seyyed Hossein Nasr sangat relevan apabila kajian ini dikhusus pada penguatan spiritual umat Islam dalam menjaga spiritualitas di era digital dan modernitas yang semakin sekuler. Namun, pendekatan yang terbangun terlalu klasik, sehingga kurang bisa memberikan solusi praktis bagi Generasi Beta yang hidup di era teknologi tinggi. Jika Generasi Beta hanya mengikuti tradisionalisme Islam ala Nasr tanpa adaptasi, mereka bisa kesulitan berkompetisi dalam dunia serba cepat dan berbasis teknologi.

Konsep ini akan sangat relevan jika impelementasinya dilakukan di pondok pesantren, karena hanya pesantren lah yang masih intens mewarisi tradisionalisme Islam. Kajian-kajian keIslaman masih sangat kental di pondok-pondok pesantren. Kedua, Tariq Ramadan mengajarkan bahwa Islam harus tetap otentik dan mampu berdialog dengan dunia modern. Hal ini sejalan dengan tantangan Generasi Beta, yang hidup di dunia globalisasi dan digitalisasi. Nilai-nilai Islam yang diperbarui dan mampu berinteraksi dengan dunia digital dapat membantu Generasi Beta memahami agama tanpa harus terjebak dalam konservatisme sempit atau sekularisme total. Generasi Beta yang tumbuh dengan akses informasi tak terbatas mungkin akan lebih tertarik pada model keberagamaan yang berbasis pemikiran independen dan terbuka, sebagaimana yang ditawarkan oleh konsep tajdīd versi Ramadan.

Pada sisi lain Ramadan sering mengkritik ekstremisme dan konservatisme, tetapi tidak memberikan metode konkret bagaimana *tajdīd ad-dīn* dapat diimplementasikan terutama dalam Pendidikan Islam. Generasi Beta, yang terbiasa dengan pendekatan berbasis data dan sistematis, mungkin akan menganggap gagasannya terlalu normatif dan tidak cukup operasional. Ramadan juga tidak secara mendalam membahas bagaimana Islam beradaptasi dengan kecerdasan buatan (AI), realitas virtual, dan otomatisasi isu yang akan sangat dominan dalam kehidupan Generasi Beta. Konsep tajdīd-nya mungkin kurang relevan jika tidak mencakup aspek teknologi yang berkembang pesat.

Ketiga, *Double Movement* menawarkan pendekatan fleksibel dalam memahami Islam, cocok untuk Generasi Beta yang tumbuh dengan teknologi canggih dan perubahan sosial cepat. Generasi ini membutuhkan pemahaman agama yang adaptif tanpa kehilangan substansi, Generasi Beta akan menghadapi tantangan baru seperti kecerdasan buatan (AI), etika digital, dan *bioengineering* hal-hal yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik Islam. *Double Movement* memungkinkan reinterpretasi prinsip-prinsip Islam menyesuaikan hukum terhadap tantangan modern. Pemikiran Rahman mendorong *ijtihad* berbasis rasionalitas. Ini sangat cocok dengan Generasi Beta yang lebih mandiri dalam mengakses informasi keagamaan dari internet, dibanding hanya bergantung pada otoritas ulama tradisional.

Teori Rahman lebih banyak dikembangkan dalam ranah akademik dan memerlukan pemahaman mendalam tentang sejarah dan tafsir. Generasi Beta yang lebih terbiasa dengan informasi instan mungkin merasa pendekatan ini terlalu rumit dan kurang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun *Double Movement* menawarkan cara berpikir yang menarik dalam memahami Al-Qur'an, Fazlur Rahman tidak memberikan panduan konkret mengenai bagaimana metodologi ini harus diterapkan dalam fiqh Islam atau kebijakan hukum negara. Akibatnya, pendekatan ini sering dianggap terlalu abstrak dan sulit diimplementasikan secara praktis.

Dalam kajian pemikiran Fazlur Rahman yang dibahas oleh Saleh Mudin dalam Zoom Meeting pada 19 April 2025, ditekankan bahwa siapa pun yang ingin memasuki arena hermeneutik Islam harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan pemahaman mendalam terhadap tradisi keilmuan Islam. Hal ini penting karena pendekatan hermeneutik Rahman berakar pada teks-teks klasik dan menuntut pembacaan yang kontekstual dan kritis. Hermeneutik sendiri berasal dari konsep Dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang dulunya dipercaya sebagai penyampai pesan ilahi. Ketika peran itu hilang, manusia mulai mencari makna melalui teks, dan dari sinilah hermeneutik sebagai metode penafsiran berkembang.

Teori *double movement* Fazlur Rahman sendiri bertujuan menjembatani masa lalu dengan masa kini. Metode ini terdiri dari dua gerakan: *pertama*, kembali ke konteks sejarah pewahyuan untuk memahami makna orisinal teks; *kedua*, membawa pemahaman itu ke masa kini dan menerapkannya pada persoalan kontemporer. Dengan

pendekatan ini, Rahman ingin menjadikan Al-Qur'an tetap relevan tanpa melepaskan akarnya dari nilai-nilai Islam.

Namun, Fazlur Rahman kerap dianggap mengabaikan tradisi tafsir ulama klasik dalam menggali makna Al-Qur'an. Hal ini menimbulkan jarak dengan kelompok Muslim yang masih kuat keterikatannya pada otoritas keagamaan tradisional. Bagi sebagian orang, pendekatannya dinilai terlalu radikal dan kurang memberi ruang pada dimensi spiritualitas dalam Islam.

Ketiga konsep yang ditawarkan oleh para pemikir tersebut adalah cakupan dari kajian kosmopolitan. Pemikiran gus dur tentang kosmopolitan mencakup kajian-kajian yang kompleks termasuk perbedaan cara pandang terhadap manusia dan pola pikir yang terbentuk dari sistem klasik sampai struktur kehidupan modern. Mengimplementasikan konsep kosmopolitan dalam pendidikan Islam, perlu adanya integrasi nilai-nilai universal yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat global dalam kurikulum, pedagogi, dan budaya sekolah. Seperti pengajaran tentang toleransi, pluralisme, hak asasi manusia, inovasi pendidikan, tanggungjawab dan peduli terhadap lingkungan, kerjasama, menjaga perdamaian, kejujuran dan itengritas. Cita-cita besar ini, menjadi dambaan seluruh manusia dari belahan dunia manapun. Namun, dalam situasi yang lain banyak kasus mengkhawatirkan kenyamana, keamanan, kesejahteraan dan stabilitas hidup, dunia yang disebut kosmos ini disebahagian telah datang kegelapan. Di wilayah timur tengah genosida terjadi antara zionis dengan palestina, rusia dengan ukraina, amerika dengan china. Kegentingan yang terjadi di wilayah timur tengah dan negara-negara barat kiat menjadi perbincangan serius. Di dalam negeri, indonesia menghadapi berbagai bentuk perang dingin.

Sejak tahun 2023 hingga Maret 2025, Indonesia menghadapi berbagai kasus yang menguji implementasi nilai-nilai kosmopolitan seperti toleransi, pluralisme, hak asasi manusia, inovasi pendidikan, tanggung jawab terhadap lingkungan, kerja sama, perdamaian, kejujuran, dan integritas. Kasus Pelarangan Ibadah Natal di Kabupaten Bogor (Desember 2024). Jemaat GPDI Tegar Beriman dilarang melaksanakan ibadah perayaan Natal di Perumahan Cipta Graha Permai, Kabupaten Bogor, dengan alasan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai rumah tinggal, bukan tempat ibadah. Pelarangan ini mencerminkan krisis toleransi dan diskriminasi terhadap minoritas agama (TrimbunNews.com). Tindakan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kebebasan ber-

agama yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi dialog antarumat beragama dan memastikan hak beribadah terlindungi tanpa diskriminasi. Pelarangan Acara Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah di Kuningan (Desember 2024) Pemerintah Kabupaten Kuningan melarang acara tahunan Jemaah Ahmadiyah dengan alasan menjaga kondusivitas. Larangan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama (detikcom). Pelarangan ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keragaman dan perbedaan keyakinan. Negara seharusnya melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya dan mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Kasus Pemerasan oleh Polisi di Jakarta (Desember 2024). Dalam sebuah acara rave di Jakarta, puluhan warga negara asing ditahan dan diduga dipaksa membayar sejumlah besar uang untuk pembebasan mereka. Sebanyak 18 petugas polisi ditahan terkait insiden ini, yang menyoroti masalah korupsi dalam penegakan hukum Indonesia (Kompas.com). Kasus ini mencerminkan lemahnya integritas dan transparansi dalam institusi kepolisian. Diperlukan reformasi menyeluruh untuk memberantas korupsi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Amandemen Undang-Undang Militer (Maret 2025). Parlemen Indonesia mengesahkan revisi undang-undang militer yang memungkinkan lebih banyak perwira militer menduduki jabatan sipil. Langkah ini dikritik oleh kelompok sipil karena dikhawatirkan mengembalikan dominasi militer dalam urusan sipil, mirip dengan era Orde Baru (Kompas.com). Amandemen ini berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, yang dapat mengancam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemisahan yang jelas antara keduanya penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan supremasi sipil.

Ekspansi proyek penambangan nikel di Raja Ampat mengancam salah satu wilayah laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Aktivitas penambangan menyebabkan deforestasi, polusi air, dan gangguan ekosistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata dan perikanan (Binus University, 6 Maret 2025). Pemerintah dan perusahaan terkait harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dari aktivitas penambangan. Diperlukan penegakan regulasi yang ketat dan penerapan praktik penambangan berkelanjutan untuk

melindungi ekosistem vital dan kesejahteraan masyarakat lokal. Data JPPI Tahun 2024. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 573 kasus kekerasan di sekolah dan pesantren sepanjang tahun 2024, meningkat lebih dari 100% dibandingkan 285 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan Indonesia (Kompas.com). Lonjakan signifikan ini mencerminkan kurangnya efektivitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Data KPAI Tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sekitar 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023, dengan hampir separuhnya terjadi di lembaga Pendidikan (Suara Surabaya). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi tempat rawan terjadinya perundungan. Perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan siswa. Program pendidikan karakter yang efektif perlu diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Realitas memang tidak searah dengan harapan, padahal kita tahu bahwa konsep cosmopolitan yang ditawarkan Gus dur itu, memiliki filosofi yang sangat mendalam menyangkut kemanusiaan. Pertanyaan kita sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Tidak akan ada asap tanpa ada api, dalam teori kausalitas tentu ada sebab ada akibat. Gus dur dalam sebuah wawancara di MetroTV Bersama Kick Andy, beliau berkata "bangsa ini pengecut kerna tidak mau bertindak kepada yang bersalah, semuanya di biarkan begitu saja (https://youtu.be/0PVEygFYydg?si=_eM3Y-kuW1nWpiwc).

Ucapan tersebut terbukti sekarang, contoh pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024 menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mengkritik keputusan tersebut, mempertanyakan etika politik dan potensi pembentukan dinasti politik dalam keluarga Presiden Joko Widodo. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang bagi Gibran untuk mencalonkan diri juga menimbulkan kontroversi. Beberapa pengamat menilai bahwa proses tersebut mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hak politik Gibran dan sebagai

orang tua, beliau mendukung pilihan anaknya (https://youtu.be/g4AcvUS0D_U).

Apabila dilandaskan dalam nilai cosmopolitan yang mengedepankan moralitas, kebangsaan yang egaliter, dan penghormatan terhadap sistem hukum yang adil. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menimbulkan dugaan kuat adanya kepentingan politik yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang sehat. Dalam kajian kosmopolitanisme sangat menolak eksklusivitas kekuasaan yang hanya berputar di lingkaran elite tertentu. Dinasti politik yang terbentuk dalam kasus ini mengabaikan prinsip meritokrasi dan menciptakan ketimpangan kesempatan bagi generasi muda yang tidak memiliki akses ke kekuasaan. Jika dibiarkan, praktik ini akan mempersempit ruang demokrasi dan melanggengkan kepentingan segelintir elite, bertentangan dengan cita-cita Gus Dur tentang keadilan sosial dan keterbukaan dalam politik.

Sebenarnya apa yang hilang dari kita dalam kehidupan berbangsa ini, sehingga begitu banyak kasus yang terjadi. Sedikit mengulas apa yang pernah di ucap Gus dur, Ketika itu beliau menyampaikan sebuah syair dari seorang arab yang hidup 500 tahun sebelum Nabi Muhammad, ia berkata "kamu bukanlah orang pertama yang menyakiti saudaramu, sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini, artinya kita perlu berhati-hati dengan moralitas, banyak orang yang bicara moralitas belum tentu ia bermoral" (https://youtube.com/shorts/uMbr5LhYj9o?si=wg3zCezLs7Wo0w88).

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi krisis moral yang semakin nyata, terlihat dari maraknya korupsi, ketidakadilan hukum, politik dinasti, hingga lunturnya budaya saling menghormati. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Dur melalui syair Arab kuno, banyak orang berbicara tentang moralitas, tetapi mereka sendiri belum tentu bermoral. Fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diagungkan dengan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Sumber utama dari runtuhnya moralitas ini melemahnya kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Padahal, Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan nasional mencetak manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sayangnya, implementasi nilai-nilai ini masih terhambat oleh sistem sosial yang lebih

mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kesejahteraan bersama.

Bila ditelisik lebih mendalam dari akar berdirinya bangsa, cita-cita besar bangsa Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita ini sejalan dengan gagasan kosmopolitanisme Gus Dur, yang menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun, realitas justru bertolak belakang, politik transaksional, segregasi sosial, serta polarisasi identitas semakin memperlemah semangat persatuan dan kemanusiaan.

Membangun kembali moralitas bangsa, pendidikan Islam harus menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan Islam harus mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan keterbukaan. Dialog antarbudaya juga penting membangun pemahaman dan mengurangi konflik. Pendidikan Islam harus mengajarkan siswa berkomunikasi dan berdialog dengan orang dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Kosmopolitanisme dalam pendidikan Islam juga berfokus pada pengembangan karakter. Termasuk membentuk sikap terbuka, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial budaya.

Meskipun konsep pendidikan Islam inklusif dan berbasis nilai-nilai kosmopolitan seperti toleransi, keadilan, dan keterbukaan sangat ideal, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak lembaga pendidikan Islam masih terjebak dalam pendekatan eksklusif, menitikberatkan aspek normatif dan doktrinal tanpa memberikan ruang cukup untuk dialog lintas budaya dan agama. Salah satu permasalahan utama masih adanya kurikulum yang kurang menekankan pemahaman pluralisme. Dalam banyak sekolah berbasis Islam, interaksi dengan kelompok berbeda masih minim, bahkan ada yang masih terpenjara dan eksklusiv dari keberagaman pemikiran. Contohnya, kasus Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang (2021), di Sumatera Barat, sekolah negeri mewajibkan semua siswi, termasuk yang non-Muslim, memakai jilbab (Kompas.com). Hal ini menunjukkan toleransi dan pemahaman keberagaman belum

diterapkan secara konsisten, bahkan di daerah dengan mayoritas Muslim.

Beberapa pesantren di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mendorong interaksi lintas budaya efektif di kalangan santri mereka. Penelitian di Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum Banyuputih, Lumajang, meskipun santri berasal dari berbagai latar belakang budaya, proses komunikasi antarbudaya di sana menghadapi hambatan, seperti perbedaan bahasa dan persepsi yang menghambat adaptasi budaya (Solehati Ilmaniya & Rio Febriannur Rachman, 2020:73-76). Demikian pula, studi di Pondok Pesantren Rubat Mbalong Ell Firdaus, Kedungreja, Cilacap, santri dari suku yang berbeda mengalami kesulitan beradaptasi dan cenderung membentuk kelompok budaya asal mereka, mengindikasikan kurangnya interaksi lintas budaya yang efektif (Lisa Rahmawati, 2023:78-83). Namun, penting dicatat bahwa beberapa pesantren telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan literasi lintas budaya. Misalnya, Pondok Pesantren As'adiyah berperan aktif dalam konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya, menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pendidikan dan pemahaman lintas budaya.

Di tingkat perguruan tinggi, tantangan juga muncul polemik Kajian Feminisme di UIN Yogyakarta (2019), Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebuah kajian tentang feminisme Islam sempat mendapat tantangan dari kelompok mahasiswa konservatif dianggap bertentangan dengan ajaran Islam (Ahmad Zainal Abidin, 2019:15). Hal ini mencerminkan keterbukaan terhadap pemikiran kritis dan modernisasi Islam masih mendapat hambatan dari kelompok yang cenderung eksklusif. Reaksi terhadap Wacana Studi Agama di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), Beberapa PTKIN masih menolak gagasan membuka ruang studi lintas agama yang memungkinkan dialog antarumat beragama lebih terbuka.

Kasus demikian terjadi hanya dibeberapa lingkungan yang masih menggunakan cara pandang ekslusif dan praktik hidup yang berpegang pada prinsip idealis. Studi komparatifnya kita tidak bisa abaikan bahwa di sebahagian Lembaga dan institusi Pendidikan sangat merespon terhadap meradaban modern, beberapa institusi pendidikan di Indonesia telah mengimplementasikan pendekatan kosmopolitan dalam kurikulum mereka pada tahun 2023-2024. Misalnya, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta meng-integrasikan nilai-nilai keIslaman kosmopolitan dan kebangsaan

dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Laporan kinerja UII 2023 menyebutkan penguatan nilai-nilai tersebut dimulai sejak mahasiswa baru bergabung, melalui pembinaan keagamaan yang terstruktur (Fathul Wahid, 2024:2-6).

Meskipun konsep kosmopolitan menawarkan banyak manfaat, implementasinya dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini termasuk resistensi terhadap perubahan, perbedaan interpretasi agama, dan kurangnya sumber daya. Beberapa institusi pendidikan Islam di Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan kosmopolitan dengan memasukkan pelajaran tentang toleransi dan pluralisme. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan dapat dilakukan meskipun memerlukan usaha dan dukungan signifikan. Implementasi nilai-nilai kosmopolitan dalam pendidikan Islam memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Termasuk terciptanya generasi yang lebih toleran, terbuka, dan siap menghadapi tantangan global dengan sikap yang positif.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kosmopolitan dalam pendidikan Islam. Kebijakan yang mendukung reformasi pendidikan dan promosi nilai-nilai inklusif dapat mempercepat perubahan yang diinginkan. Keterlibatan komunitas juga penting dalam proses implementasi. Melalui dialog dan kolaborasi, komunitas dapat membantu membentuk lingkungan mendukung nilai-nilai kosmopolitan dalam pendidikan. Evaluasi berkala terhadap implementasi konsep kosmopolitan dalam pendidikan Islam diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Penyesuaian strategi dan pendekatan diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Konsep kosmopolitan pemikiran Abdurrahman Wahid menawarkan pendekatan inovatif untuk reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan dialog antarbudaya, pendidikan Islam dapat menjadi lebih relevan diarena global dan mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Singkat Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau tumbuh besar di lingkungan Pondok Pesantren yang diasuh oleh kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Syamsuri. Menariknya, meskipun Gus Dur selalu merayakan ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, kelahiran beliau yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan kalender Hijriah, bertepatan dengan 4 Sya'ban 1360 H, yang dalam penanggalan Masehi jatuh pada 7 September 1940 (Nurhidayah, 2022:365). Gus Dur merupakan anak pertama dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Nyai Solichin. Beliau adalah cucu dari K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keluarganya memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam di tanah air, dan Gus Dur mewarisi semangat perjuangan dan pemikiran cerdas para pendahulunya dalam merawat dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia.

Pada tahun 1944, ketika Gus Dur berusia empat tahun, ayahnya membawanya pindah ke Jakarta. Mereka tinggal di Menteng, Jakarta Pusat, di mana Gus Dur berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis, seperti Mohammad Hatta. Salah satu kenangan yang sangat berkesan dalam hidupnya adalah pertemuan dengan Tan Malaka, seorang pemimpin komunis, yang sering datang ke rumah mereka setiap malam untuk berbincang dengan ayah Gus Dur. Peristiwa ini mengajarkan Gus Dur untuk terbuka terhadap

berbagai pandangan, dan mengembangkan sikap kritis serta keberanian untuk berdialog dengan berbagai pihak, meskipun dengan latar belakang ideologi yang berbeda.

Setelah tiga setengah tahun di Jakarta, Gus Dur dan keluarga kembali ke kampung halaman mereka pada tahun 1948. Namun, pada 1949, ayahnya kembali dipanggil ke Jakarta untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dalam lima kabinet berbeda, jabatan yang beliau emban hingga 1952. Selama di Jakarta, Gus Dur selalu mendampingi ayahnya dalam berbagai pertemuan penting dengan tokoh-tokoh bangsa. Ayahnya memiliki ambisi besar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Gus Dur, agar ia bisa mengikuti jejak para pejuang dan pemimpin bangsa. Dari sinilah, Gus Dur bertemu dengan berbagai tokoh besar, salah satunya adalah Willem Iskander, seorang musisi klasik, yang memperkenalkan alat musik klasik kepada Gus Dur. Setiap pulang sekolah, Gus Dur sering dikirim untuk belajar alat musik tersebut (Siswanto, 2020:21-23).

Gus Dur menjalani hidup dengan penuh tantangan, namun beliau tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Beliau dikenal sebagai seorang pemikir yang gigih dalam memperjuangkan pluralisme, kebebasan beragama, serta hak-hak asasi manusia. Gus Dur juga dikenal dengan sikap humoris dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan politik yang dihadapi Indonesia.

Gus Dur wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18:45 WIB, di usia 69 tahun. Selama hidupnya, beliau menderita berbagai penyakit, seperti gangguan penglihatan, diabetes, dan masalah ginjal. Beliau juga sering menjalani proses cuci darah untuk mengatasi gangguan kesehatannya. Meskipun demikian, perjuangan dan dedikasi Gus Dur terhadap kemanusiaan dan keadilan tetap dikenang oleh banyak orang, dan namanya tetap hidup dalam setiap langkah perubahan yang telah beliau ciptakan (Abd. Rahman Said Al-Qadri, 2020:12).

Dapat dipahami bahwa Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, adalah sosok ulama sekaligus aktivis yang menginspirasi banyak orang, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pemikirannya yang terbuka, moderat, dan inklusif menjadikannya simbol keberagaman dalam Islam. Sebagai pemimpin, ia tidak hanya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Presiden Indonesia keempat, tetapi juga sebagai seorang intelektual yang memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Keberanian-

nya dalam menegakkan nilai-nilai pluralisme sering kali menempatkannya dalam posisi yang kontroversial, namun ia tetap teguh dalam membela prinsip-prinsip yang diyakininya. Tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai "Guru Bangsa" karena kontribusinya yang luar biasa dalam membangun harmoni antarumat beragama dan memperjuangkan hak minoritas.

Kecerdasan dan kebijaksanaan Gus Dur tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari pendidikan kuat sejak kecil. Orang tuanya, terutama sang ayah, Wahid Hasyim, yang merupakan Menteri Agama pertama Indonesia, memiliki peran besar dalam membentuk pola pikirnya. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan diskusi intelektual dan pemikiran Islam progresif. Ibunya, Nyai Solichah, juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian dan keberanian dalam dirinya. Selain belajar di pesantren, Gus Dur juga memperluas wawasannya dengan membaca banyak buku dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sastra, dan sejarah. Pendidikan yang ia terima dari keluarga dan lingkungannya inilah yang kemudian menjadikannya seorang pemikir brilian yang mampu menyatukan nilai-nilai keIslaman dengan semangat kemanusiaan universal.

B. Latar Belakang Intelektual Dan Pendidikan

1. Pendidikan Keluarga

Gus Dur, sejak kecil, sudah hidup dalam lingkungan yang mendalam dengan nilai-nilai agama dan pendidikan. Ia dibesarkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, yang diasuh oleh kakeknya, Kiai Haji Bisri Syamsuri, seorang ulama terkemuka dan pemimpin agama yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Islam. Di pesantren tersebut, Gus Dur diajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, seperti kebiasaan di banyak pondok pesantren. Kakeknya, selain sebagai seorang pendidik, juga merupakan tokoh yang sering dikunjungi oleh para pemimpin politik dan tokoh besar pada zamannya, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Kehidupan Gus Dur di pesantren memperkenalkan beliau pada nilai-nilai agama yang kuat serta pentingnya pendidikan bagi perkembangan peradaban Islam.

Pada usia 13 tahun, Gus Dur mengikuti ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, yang saat itu diangkat menjadi Menteri Agama Indonesia. Gus Dur menjadi saksi hidup dari dinamika politik Indonesia pasca-

kemerdekaan, di mana ia berinteraksi dengan banyak tokoh nasional. Namun, di usia yang sangat muda, Gus Dur harus mengalami kehilangan yang mendalam, yakni kematian ayahnya pada tahun 1953. Ayahnya meninggal dunia tragis akibat kecelakaan mobil ketika sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah rapat NU di Sumedang. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir karena hujan deras dan menabrak truk. K.H. Wahid Hasyim terluka parah di bagian kepala dan hanya bertahan satu hari di rumah sakit. Kepergian sang ayah yang masih sangat muda, 38 tahun, meninggalkan Gus Dur sebagai anak yatim piatu. Meskipun begitu, peran sang ayah dan pendidikan yang diterima Gus Dur terus menjadi sumber inspirasi sepanjang hidupnya (Abdul Mujib, 2017:50).

Gus Dur memang terlahir dari lingkungan ulama besar. Dari jalur ayahnya, ia merupakan cucu dari KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sedangkan dari jalur ibunya, ia juga berasal dari keluarga ulama berpengaruh. Lingkungan keluarganya yang kaya akan pemikiran keIslaman dan tradisi keilmuan memberikan fondasi kuat bagi perkembangan intelektualnya. Sejak kecil, ia telah terbiasa berdiskusi tentang agama, politik, dan budaya, yang membuat wawasannya semakin luas. Namun, meskipun terlahir dari garis keturunan ulama besar, itu saja tidak cukup untuk menjadikannya sosok yang begitu dihormati dan dikenal sebagai "Guru Bangsa." Keistimewaan Gus Dur bukan hanya karena darah ulama yang mengalir dalam dirinya, tetapi lebih karena semangat dan tekadnya yang luar biasa dalam belajar dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Pendidikan di Sekolah dan Pesantren

Gus Dur memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) Kris, kemudian melanjutkan ke SD Matraman Perwari. Selama masa sekolah dasar, Gus Dur sudah diperkenalkan pada buku-buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya. Ini adalah bagian dari pendidikan non-formal yang diberikan K.H. Wahid Hasyim kepada Gus Dur, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Gus Dur sejak dini. Pendidikan ini bertujuan agar Gus Dur dapat memahami berbagai perspektif dan memperkaya dirinya dengan pengetahuan dari luar dunia Islam, sebuah langkah penting dalam membentuk pandangannya yang pluralis dan toleran.

Setelah menyelesaikan SD, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Tanah Abang, Jakarta. Selain mempelajari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, Gus Dur juga sangat rajin membaca buku-buku di luar kurikulum sekolah, termasuk karya-karya sastra dan pemikiran dari berbagai tradisi pemikiran. Buku-buku berbahasa Inggris yang pernah dipelajari oleh Gus Dur di antaranya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, dan William Faulkner. Selain itu, ia juga menyelesaikan bacaan dari pemikir besar seperti Johan Huizinga, André Malraux, serta Ortega y Gasset. Tak berhenti di situ, Gus Dur juga mendalami karya-karya sastra Rusia, termasuk tulisan Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky, dan Mikhail Sholokhov.

Akhir tahun 1954, Gus Dur dikirim ibunya ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di SMEP yang lebih tinggi di sana. Di Yogyakarta, Gus Dur tidak hanya mendalami ilmu pengetahuan umum, tetapi juga memperdalam ilmu agama dengan mondok di Pesantren Krapyak. Di sinilah Gus Dur mulai belajar bahasa Inggris secara serius di bawah bimbingan Ibu Rufiah, seorang guru bahasa Inggris yang sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Gus Dur, Nyai Rofi'ah, turut memperkenalkannya Gus Dur pada sastra Eropa dengan buku-buku seperti novel "Strait Is The Gate" karya André Gide. Selain itu, Gus Dur juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan komunisme, termasuk "Das Kapital" karya Karl Marx, serta gagasan filsafat dari Plato, Thales, William Bochner, hingga pemikiran romantisme revolusioner dari Vladimir Lenin. Semua bacaan ini membentuk pola pikirnya yang luas, kritis, dan inklusif, menjadikannya sosok ulama yang mampu melihat Islam dalam konteks yang lebih universal (Abdul Mujib, 2017:54-55).

Sejak kecil, Gus Dur telah dibiasakan berpikir terbuka dan inklusif, salah satunya karena peran ayahnya, KH. Wahid Hasyim, yang mengenalkan berbagai literatur non-Muslim kepadanya sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Buku-buku karya pemikir Barat dan filsuf non-Muslim seperti Bertrand Russell, Karl Marx, dan Arnold Toynbee menjadi bagian dari bacaan yang membentuk cara pandangnya. Dengan membaca pemikiran dari berbagai latar belakang, Gus Dur tidak hanya memahami Islam dalam batasan doktrinal semata, tetapi juga dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini menjadikannya sosok ulama yang inklusif, menghargai keberagaman, dan selalu menekankan pentingnya dialog antaragama serta kebebasan berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pendidikan di Pesantren

Selain pendidikan formal, Gus Dur sangat serius dalam menempuh pendidikan agama. Di Yogyakarta, beliau melanjutkan pendidikan agama di Pesantren Krapyak yang terkenal dengan pengajaran agama yang mendalam dan moderat. Di pesantren ini, Gus Dur juga mengenal lebih dekat dunia tasawuf, ilmu spiritual Islam yang sangat mendalam. Pendidikan agama yang diterima Gus Dur semakin diperdalam ketika ia melanjutkan studi di Pesantren Tambak Beras di Jombang pada tahun 1959. Di sini, Gus Dur mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif dari berbagai aspek, baik dalam fiqh (hukum Islam), tafsir (penafsiran Al-Qur'an), serta tasawuf (ilmu batin). Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Tegalrejo, Magelang, yang diasuh oleh K.H. Chudhari, seorang kiai yang sangat dihormati karena pendekatan spiritual dan humanisnya. K.H. Chudhari mengajarkan Gus Dur untuk mendalami ilmu tasawuf dan membawa Gus Dur untuk berziarah ke makam-makam kramat para wali di Jawa, yang memperkaya spiritualitas Gus Dur.

Pada masa ini, Gus Dur bukan hanya belajar teori agama, tetapi juga menghayati ajaran-ajaran sufistik yang mengajarkan pentingnya kedalaman spiritual, kedamaian batin, dan harmoni dalam kehidupan sosial. Pengalaman spiritual yang didapatkan di Pesantren Tegalrejo ini sangat berpengaruh pada pandangan hidup Gus Dur yang selalu menekankan pentingnya moderasi, toleransi, dan cinta kasih antar sesama umat manusia. Setelah dua tahun belajar di Tegalrejo, Gus Dur kembali ke Pesantren Tambak Beras di Jombang untuk melanjutkan pendidikan agamanya (Ahmad Rifki Fuada, 2022:32-33).

Gus Dur mengasah kemampuan spiritualnya selama menempuh pendidikan di pondok pesantren, terutama ketika ia semakin mendalami ilmu agama dan tasawuf di usia 22 tahun. Di saat banyak remaja seusianya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, Gus Dur justru memilih untuk serius dalam belajar dan memperluas wawasan keagamaannya. Kecerdasannya tidak hanya terasah dalam bidang ilmu umum, tetapi juga dalam disiplin ilmu agama yang mendalam. Kombinasi pemahaman yang luas terhadap ajaran Islam serta wawasan intelektual yang kaya menjadikannya sosok pemikir cemerlang, dengan pandangan inklusif yang kelak mewarnai kiprah dan perjuangannya bagi bangsa.

4. Pendidikan di Tanah Suci dan Mesir

Pada usia 22 tahun, setelah menuntaskan pendidikan pesantrennya, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pengalaman spiritual ini menjadi landasan bagi perjalanan intelektual dan spiritual Gus Dur ke depan. Setelah menunaikan ibadah haji, Gus Dur melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang terkenal sebagai pusat pendidikan Islam dunia. Di Al-Azhar, Gus Dur tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang budaya dan pemikiran Islam yang lebih luas. Selain itu, Gus Dur juga memperluas wawasan dengan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari budaya Barat yang berpengaruh pada pemikiran dunia.

Di Al-Azhar, Gus Dur memperdalam bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam yang lebih mendalam. Namun, perjalanan intelektual Gus Dur tidak berhenti di sana. Setelah beberapa tahun di Mesir, Gus Dur melanjutkan studinya ke Bagdad, Irak, pada tahun 1970. Di Universitas Bagdad, Gus Dur memilih jurusan sastra dan menghabiskan banyak waktu di perpustakaan untuk mempelajari karya-karya besar sastra dunia, sejarah Indonesia, serta pemikiran-pemikiran sosial dan filsafat yang mendalam. Di sini, Gus Dur banyak membaca karya-karya dari tokoh-tokoh ternama seperti Émile Durkheim, seorang sosiolog terkenal, dan banyak karya sastra dunia yang membentuk pandangannya tentang masyarakat dan budaya (Ahmad Rifki Fuada, 2022:32-33).

Gus Dur tidak berhenti belajar hanya di pondok pesantren, tetapi juga terus mengasah intelektualnya dengan berhijrah ke Timur Tengah untuk melanjutkan studi. Di sana, ia mendalami keIslaman dan menggali lebih dalam kebudayaan Timur Tengah, yang semakin memperkaya cara pandangnya terhadap dunia Islam. Semangatnya dalam mencari ilmu tak pernah surut, ia selalu haus akan pengetahuan dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Dengan latar belakang pendidikan yang luas, baik dari pesantren maupun perguruan tinggi di luar negeri, Gus Dur tumbuh menjadi sosok pemikir yang kuat tekstual dan kontekstual dalam kehidupan sosial dan budaya yang lebih luas.

5. Pendidikan di Eropa

Setelah menyelesaikan studi di Universitas Bagdad, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke Eropa. Di Eropa, untuk dapat melanjutkan pendidikan, Gus Dur harus menguasai berbagai bahasa

asing, termasuk bahasa Ibrani (*Hebrew*), yang pada saat itu menjadi salah satu persyaratan penting untuk masuk ke universitas-universitas Eropa. Gus Dur berhasil menguasai bahasa tersebut dengan baik, meskipun tantangan yang dihadapinya cukup besar. Selama di Eropa, Gus Dur menghabiskan waktunya dengan menjadi pelajar keliling, mengunjungi berbagai universitas dan mendalami berbagai aspek kebudayaan serta pemikiran-pemikiran besar dari berbagai belahan dunia.

Selama tinggal di Belanda, Gus Dur mendirikan Organisasi Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang berpusat di Eropa. Organisasi ini menjadi wadah bagi pelajar Indonesia dan Malaysia untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah global dan politik dunia. Gus Dur selalu berusaha memperluas cakrawala pikirannya dengan berdiskusi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan intelektual maupun aktivis. Namun, setelah beberapa waktu tinggal di Eropa, Gus Dur memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1971 untuk melanjutkan perjuangannya di tanah air (Abdul Mujib, 2017:59-60).

Gus Dur tidak hanya mendalami keilmuan di Timur Tengah, tetapi juga meluaskan cakrawala intelektualnya ke Eropa. Meskipun ia tidak secara resmi menempuh pendidikan di universitas-universitas Eropa, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya berkeliling di berbagai kampus ternama, berdiskusi dengan para akademisi, dan mendalami beragam pemikiran filsafat, sosial, serta politik. Pengembaraannya di dunia intelektual ini menjadikannya seorang pemikir yang unik, karena mampu memadukan tiga tradisi keilmuan sekaligus: lokal (pesantren), Timur Tengah (studi Islam klasik), dan Barat (pemikiran modern). Dengan pendekatan ini, Gus Dur membingkai gagasan-gagasannya yang inklusif dan humanis.

6. Kembali ke Indonesia dan Karir Akademis

Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur memulai hidup baru dan menjadi bagian dari perjalanan panjang karirnya. Meskipun ia sempat ditawari melanjutkan studi ke Australia pada tahun 1979 dan memperoleh gelar doktor, ia memutuskan tidak mengejar kesempatan tersebut karena masalah pembiayaan dan lebih memilih terjun ke dunia sosial dan politik di Indonesia. Gus Dur merasa peranannya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat dan pluralis lebih penting bagi masa depan bangsa. Pendidikan yang diterimanya, baik di tanah air maupun luar negeri, telah membentuk

Gus Dur menjadi seorang intelektual berani mengkritisi berbagai masalah sosial dan politik di Indonesia.

7. Perjalanan Karir Dan Pemikiran Gus Dur

Sepulangnya dari pendidikan luar negeri, Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, kembali ke Indonesia dengan tekad untuk melanjutkan perjuangan kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari, dalam memperjuangkan pendidikan dan dakwah Islam. Gus Dur mengawali karirnya dengan mengajar ilmu agama di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, pesantren yang didirikan oleh kakeknya. Di sini, Gus Dur tidak hanya menambah wawasan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan generasi penerus pesantren tentang ajaran Islam yang moderat dan toleran. Ia menghabiskan waktu selama satu tahun di pesantren tersebut, sebelum akhirnya dipanggil untuk mengisi posisi penting di dunia akademik. Pada tahun 1972, Gus Dur dipercaya untuk mengajar dan menjadi dosen di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, sekaligus mengemban jabatan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1974. Di posisi ini, Gus Dur mengasah kemampuannya dalam dunia akademik dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran Islam yang progresif di kalangan mahasiswa.

Karir Gus Dur semakin melesat ketika pada tahun 1974, ia diberikan amanah oleh pamannya, K.H. Yusuf Hasyim, untuk menjabat sebagai sekretaris umum Pesantren Tebu Ireng. Tidak hanya itu, pada tahun 1979, Gus Dur juga dipercaya menjadi Katib Awal Syuriah dalam Kepengurusan Besar Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh kakeknya. Jabatan tersebut menandai kiprah Gus Dur yang semakin kuat di dunia keagamaan dan sosial. Sebagai seorang tokoh muda yang memiliki visi jauh ke depan, Gus Dur tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memperhatikan pentingnya pengembangan sosial dan pemberdayaan umat. Dalam rentang waktu ini, Gus Dur juga terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Pesantren Tebu Ireng, serta mendirikan Pesantren Ciganjur di Jakarta sebagai bentuk kontribusinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Gus Dur dikenal sebagai sosok yang tidak terbatas hanya pada pemikiran agama, tetapi juga melibatkan dirinya dalam banyak diskursus yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Sebagai seorang intelektual Muslim, Gus Dur sering

mengajak berbagai kalangan, dari lintas agama, suku, dan ras, untuk berdiskusi bersama mengenai isu-isu penting yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga aktif dalam dunia kebudayaan. Pada tahun 1983, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), sebuah lembaga yang bertugas untuk memajukan kesenian di ibu kota. Dalam kapasitas ini, Gus Dur terlibat dalam berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan seniman dan tokoh budaya, sehingga memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia. Tidak hanya itu, pada tahun 1986 dan 1987, Gus Dur juga dipercaya menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI), sebuah acara yang mengangkat karya-karya terbaik dalam dunia perfilman Indonesia. Keikutsertaannya dalam dunia seni dan budaya menunjukkan sisi lain dari Gus Dur yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan budaya di Indonesia (Abdul Mujib, 2017:61).

Pada tahun 1984, pengabdian Gus Dur dalam Nahdlatul Ulama mendapatkan pengakuan lebih luas. Setelah melalui proses panjang dalam kepengurusan NU, beliau akhirnya dipilih secara aklamasi oleh tim Ahl Hall wa Al-Aqdi yang dipimpin oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-27 yang berlangsung di Situbondo. Gus Dur diangkat bukan hanya karena latar belakang keluarga besar yang terhormat, tetapi juga karena kemampuannya dalam mengelola organisasi besar dan memajukan visi NU yang moderat dan inklusif. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur memperkenalkan berbagai program reformasi yang mengutamakan moderasi dalam beragama, serta memperkuat peran NU dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan sosial bagi umat Islam di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU terus berkembang pesat, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun politik. Pada Muktamar ke-28 NU di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, pada tahun 1989, Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kepemimpinannya di NU semakin solid dan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan organisasi ini. Gus Dur tidak hanya memimpin NU sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga memperkenalkan visi sosial-politik yang lebih progresif, seperti memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pluralisme. Gus Dur sering terlibat dalam berbagai pertemuan

internasional untuk memperkenalkan pandangannya mengenai pentingnya dialog antaragama dan keberagaman dalam masyarakat.

Pada tahun 1999, ketika usia Gus Dur memasuki angka 60, beliau mengambil keputusan penting yang mengejutkan banyak pihak. Gus Dur memilih untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PBNU dan beralih ke dunia politik. Pada saat itu, Indonesia sedang berada dalam masa transisi pasca-reformasi, dan banyak kalangan menganggap bahwa Gus Dur adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Dalam Pemilu 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Kepresidenannya dimulai pada tahun 1999, yang menandai berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan dimulainya era baru demokrasi di Indonesia. Sebagai Presiden, Gus Dur berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, pluralis, dan memperjuangkan hak asasi manusia, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan politik.

Masa kepresidenan Gus Dur, meskipun relatif singkat (1999-2001), meninggalkan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai Presiden yang tidak takut untuk menghadapi tekanan politik, serta mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur berhasil memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan kebebasan pers, serta memulai berbagai reformasi politik yang memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, karena berbagai faktor politik dan tekanan dari berbagai pihak, Gus Dur terpaksa mengundurkan diri pada tahun 2001, dan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia pun berakhir. Meskipun demikian, warisan Gus Dur sebagai tokoh pemikir, pemimpin, dan pembela kebebasan tetap dikenang hingga hari ini (Abdul Mujib, 2017:62).

Gus Dur bukan sekadar aktivis yang haus akan ilmu, tetapi juga seorang tokoh besar yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Kiprahnya merambah berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, hingga keagamaan, budaya, dan pendidikan. Sebagai seorang pemimpin organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) dan aktif dalam berbagai forum dialog lintas agama, menegaskan pentingnya toleransi serta perdamaian di tengah keberagaman Indonesia. Gus Dur juga seorang negarawan yang pernah memimpin Indonesia sebagai Presiden keempat, membawa

perubahan dalam kebebasan beragama, demokratisasi, serta hak asasi manusia. Sikapnya yang tegas, tetapi penuh humor, menjadikannya pemimpin yang dicintai oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Hingga kini, warisan pemikirannya tetap hidup dan dikenang oleh banyak orang. Di berbagai platform media sosial, video singkat berisi nasihat dan pidatonya masih sering diunggah dan dibagikan oleh para pengagumnya. Setiap kata-katanya seolah menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam memahami nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keIslaman inklusif. Makamnya di Jombang selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai latar belakang, mencerminkan betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Gus Dur bukan sekadar pemimpin, melainkan simbol dari keberagaman, keterbukaan, dan perjuangan untuk keadilan.

8. Karya Gus Dur

Karya-karya Gus Dur yang tercatat dalam daftar tersebut mencerminkan pemikiran mendalamnya tentang berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, terutama umat Islam, di tengah perubahan zaman. Buku-buku tersebut menyajikan pandangan-pandangannya mengenai agama, politik, budaya, dan kemanusiaan dengan tujuan untuk membuka wawasan dan mengajak masyarakat untuk lebih toleran, inklusif, dan berpikir kritis. Berikut adalah ringkasan singkat mengenai isi beberapa buku Gus Dur:

No	Karya Gus Dur	Deskripsi
1	Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian (2010)	Buku ini berisi pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya untuk menciptakan perdamaian dan toleransi di dunia. Gus Dur menekankan bahwa konflik dan kekerasan seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketertutupan terhadap perbedaan, dan untuk itu, dialog peradaban menjadi kunci untuk mendorong pemahaman dan penghormatan antarumat beragama.

No	Karya Gus Dur	Deskripsi
2	Gus Dur Bertutur (2005)	Buku ini adalah kumpulan wawancara dan percakapan Gus Dur dengan berbagai pihak, yang dikumpulkan oleh Alvian Muhammad dan Helmi Jacob. Dalam buku ini, Gus Dur berbicara tentang pandangannya terhadap berbagai isu sosial, politik, dan keagamaan, serta membagikan kebijaksanaannya yang bersifat humanis dan pluralis. Buku ini menggambarkan karakter Gus Dur sebagai pribadi yang terbuka dan siap mendengarkan berbagai perspektif.
3	Gus Dur Hanya Kalah dengan Orang Madura (2001)	Buku ini mengumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur yang menunjukkan keberaniannya dalam mengkritik berbagai isu penting di Indonesia, seperti ketidakadilan, korupsi, dan marginalisasi kelompok tertentu. Salah satu ciri khas Gus Dur adalah humornya yang tajam, yang digunakan untuk menyinggung masalah serius dengan cara yang ringan dan mudah diterima masyarakat.
4	Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (2010)	Buku ini berisi refleksi Gus Dur terhadap perubahan zaman, baik dalam konteks sosial, politik, maupun agama. Gus Dur mengajak umat Islam untuk menyikapi perubahan dengan bijaksana, tanpa terjebak dalam pandangan yang radikal atau dogmatis. Ia mendukung penerimaan terhadap modernitas, tetapi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang universal.
5	Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat (2007)	Buku ini mengumpulkan berbagai pemikiran Gus Dur yang ditujukan untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai kondisi politik dan sosial di

No	Karya Gus Dur	Deskripsi
		Indonesia. Gus Dur menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang adil, humanis, dan mengutamakan dialog daripada konfrontasi.
6	Islam Kosmopolitan (2007)	Dalam buku ini, Gus Dur memaparkan pandangannya mengenai Islam yang terbuka dan inklusif, yang mampu menghargai perbedaan dan mengakomodasi pluralisme. Gus Dur mengusung ide Islam yang kosmopolitan, di mana umat Islam bisa berinteraksi secara harmonis dengan budaya dan agama lain tanpa kehilangan identitas agama mereka sendiri.
7	Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006)	Buku ini menekankan pentingnya keberagaman dalam Islam. Gus Dur mengajak umat Islam untuk menghindari sikap fanatik dan rigid, serta untuk menerima perbedaan dalam cara beragama. Buku ini mengajarkan bahwa Islam itu luas dan fleksibel, dan harus dipahami dalam konteks yang lebih inklusif.
8	Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (1999)	Buku ini berisi pemikiran Gus Dur tentang hubungan antara Islam, negara, dan demokrasi. Gus Dur menekankan bahwa Islam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, dan bahwa negara harus berfungsi untuk melindungi kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga menanggapi isu-isu seputar negara Islam dan negara sekuler dengan pendekatan yang moderat.
9	Kiai Nyentrik Membela	Buku ini mengungkap pandangan Gus Dur tentang sikap kiai dan ulama terhadap pemerintahan, terutama

No	Karya Gus Dur	Deskripsi
	Pemerintah (1997, 2000, 2010)	dalam konteks politik Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai kiai yang "nyentrik" karena sering kali mengambil posisi yang tidak biasa, misalnya mendukung kebijakan pemerintah yang dilihatnya benar meskipun tidak populer di kalangan sebagian umat.
10	Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (2002)	Buku ini mengumpulkan berbagai kolom dan artikel yang ditulis Gus Dur selama masa-masa lengsernya Presiden Soeharto. Artikel-artikel ini memberikan gambaran tentang pemikiran Gus Dur dalam menganalisis situasi politik dan sosial Indonesia pasca-Orde Baru.
11	Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo (2000)	Dalam buku ini, Gus Dur menggunakan humor sebagai alat untuk mengkritik kekuasaan dan menyampaikan pesan moral. Gus Dur dikenal dengan kemampuannya untuk menggunakan humor yang tajam untuk membongkar ketidakadilan dan masalah sosial, yang menjadikannya sebagai salah satu cara efektif untuk mendidik masyarakat.
12	Membaca Sejarah Nusantara: Membaca 25 Sejarah Kolom Gus Dur (2010)	Buku ini merupakan kumpulan tulisan Gus Dur yang mengulas sejarah Indonesia, khususnya tentang perjuangan umat Islam di Nusantara. Gus Dur menggunakan sejarah untuk menggali pelajaran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengajak umat Islam untuk lebih memahami akar budaya dan sejarah mereka.

Secara keseluruhan, karya-karya Gus Dur menggambarkan seorang pemikir besar yang tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga politik, kebudayaan, dan sosial. Buku-buku ini mencerminkan pandangan Gus Dur yang moderat, toleran, dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Karya-karya tersebut masih sangat relevan bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks.

C. Pengaruh Gus Dur Dalam Dunia Pendidikan Islam

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur, merupakan sosok pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam dunia Islam, baik di Indonesia maupun dunia. Gus Dur dikenal sebagai tokoh agama, juga intelektual, reformis, dan penggerak perubahan. Memiliki pandangan luas mengenai Islam mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan politik. Pengaruhnya dalam Islam sangat terasa, terutama melalui pendekatannya yang inklusif dan moderat dalam memandang agama, serta melalui upayanya membuka akses bagi semua kalangan.

Sekian banyak karya yang di tulis oleh Gus Dur secara eksplisit ia tidak menulis tentang pendidikan Islam, beliau sosok pemikir Islam bukan pemikir pendidikan Islam, namun dalam kajian-kajian nya terutama yang ditulisanya dalam buku kosmopolitan sedikit menyinggung peranan pesantren dalam menerapkan pola hidup kosmopolit. Artinya Gus Dur bukan hanya tokoh pemikir Islam tetapi juga mempunyai kontribusi dalam pendidikan Islam. Sebagai contoh Gus Dur mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmu agama semata, tetapi juga harus mampu mengembangkan potensi individu dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan umum, kebudayaan, dan seni. Ia sering menekankan umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam di bawah pandangan Gus Dur bertujuan melahirkan generasi spiritual, cerdas dan mampu bersaing di dunia modern (Mulyadi, 2019:42).

Selama kepemimpinannya, Gus Dur memperkenalkan berbagai reformasi dalam pendidikan Islam, baik sistem pendidikan pesantren maupun sekolah-sekolah Islam formal. Ia berusaha mengintegrasikan kurikulum agama dengan pengetahuan umum.

Gus Dur memandang kedua hal tersebut saling melengkapi, bukan bertentangan. Salah satu langkah konkret Gus Dur dalam hal ini adalah pendirian Pesantren Ciganjur, yang menjadi salah satu contoh penerapan pendidikan Islam yang memadukan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Pesantren Ciganjur, yang terletak di Jakarta Selatan, merupakan salah satu contoh nyata dari kontribusi Gus Dur dalam dunia pendidikan Islam. Pesantren ini didirikan dengan tujuan untuk menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, sebuah konsep sebagai upaya menciptakan generasi Muslim berwawasan luas dan siap menghadapi tantangan zaman. Gus Dur menginginkan pesantren ini sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan keterampilan praktis dan ilmu pengetahuan modern yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Pesantren Ciganjur didirikan pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu pilar dalam reformasi pendidikan pesantren di Indonesia. Gus Dur memandang pendidikan di pesantren harus beradaptasi dengan perubahan zaman, dan juga memberikan ruang mengembangkan pemikiran kritis serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pesantren ini, santri dapat menguasai ilmu agama yang mendalam dan ilmu pengetahuan luas sehingga mereka menjadi pribadi unggul dan bermanfaat bagi umat.

Salah satu ciri khas dari Pesantren Ciganjur adalah pengajaran yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Pesantren ini mengajarkan para santri selain menguasai kitab kuning atau ilmu agama klasik, juga memberikan mereka kesempatan mempelajari ilmu-ilmu sosial, teknologi, dan bahasa. Pendidikan pesantren dapat lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan zaman, sekaligus mampu menjaga keutuhan ajaran Islam yang moderat (Badiatul Roziqin, dkk, 2009:59-60). Gus Dur juga peduli dengan pendidikan bagi kalangan yang kurang mampu. Dalam pandangannya, pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Oleh karena itu, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dapat meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk dengan mendirikan sekolah-sekolah berbasis Islam yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Salah satu kontribusi Gus Dur yang sangat besar dalam pendidikan Islam adalah reformasi sistem pendidikan pesantren. Mendorong pesantren lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Pesantren sebagai lembaga pelestarian tradisi, dan tempat mengembangkan pemikiran kritis dan

intelektual yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, banyak pesantren mulai mengadopsi kurikulum yang lebih beragam, mencakup pendidikan umum serta keterampilan hidup yang relevan. (Abdullah, 2016:227). Selain itu, Gus Dur juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi yang saleh, juga menciptakan masyarakat adil, damai, dan menghargai perbedaan. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal, bisa diterima oleh semua pihak (Rian Rohimat & Abdul Hakim, 2019:105). Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur juga berperan besar dalam memperkenalkan pendidikan berbasis nilai-nilai moderat dan inklusif. Ia berusaha menjauhkan pendidikan Islam dari paham-paham dogmatis atau ekstrim, dan lebih menekankan pada pendidikan yang mengedepankan pemikiran rasional dan moderat. Salah satu kontribusi Gus Dur dalam hal ini melalui penguatan kurikulum pesantren yang mencakup ajaran-ajaran Islam yang bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap agama lain (Ulil Absor, dkk, 2023:199).

Gus Dur juga mendukung pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya bagi generasi muda Muslim yang melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi. Untuk memajukan umat Islam, perlu generasi yang memiliki kemampuan intelektual tinggi dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, Gus Dur mendorong banyak santri dan mahasiswa Muslim melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mendukung pendirian berbagai pesantren yang memberikan pendidikan agama berkualitas, keterampilan hidup yang dapat membantu para santri mandiri. Gus Dur memandang pesantren memiliki peran sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial positif. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama ada di Indonesia, pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pentingnya inovasi dalam pendidikan pesantren, menambahkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia (M. Husni, 2018:103-105).

Sebagai seorang pemikir, Gus Dur menekankan pentingnya pendekatan humanistik dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Gus Dur harus mampu menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama, penghargaan terhadap martabat manusia, dan

kemampuan untuk berbuat adil dan bijaksana (Wahyudi Fatah, 2020:95). Pengaruh Gus Dur dalam dunia pendidikan Islam juga dapat dilihat melalui pandangan mendalam-nya tentang pluralisme. Gus Dur berpendapat bahwa pendidikan Islam harus bisa mengajarkan generasi muda hidup berdampingan dengan umat beragama lain, serta menghormati perbedaan. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai pluralisme ini menjadi sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat tinggi (Sisi Ulfianingsih, 2023:37).

Gus Dur meninggalkan warisan besar dalam dunia pendidikan Islam. Pengaruhnya sangat terasa dalam upaya menciptakan pendidikan Islam yang moderat, inklusif, humanis, dan pluralis. Mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasar agama. Gus Dur memperkenalkan konsep pendidikan yang mengutamakan kebebasan berfikir, menghargai perbedaan, dan mendukung dialog antaragama. Semua ini menjadikan Gus Dur sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, baik di Indonesia maupun dunia.

Pertanyaan mendasar, apakah gagasan besar tersebut telah mampu diaplikasikan secara kontinu atau pincang?, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memandang dari sudut realitas pendidikan Islam saat ini. Dalam era Society 5.0, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang menuntut transformasi tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Jika dianalisis dari perspektif pemikiran Gus Dur, terdapat beberapa kritik terhadap kondisi pendidikan Islam saat ini:

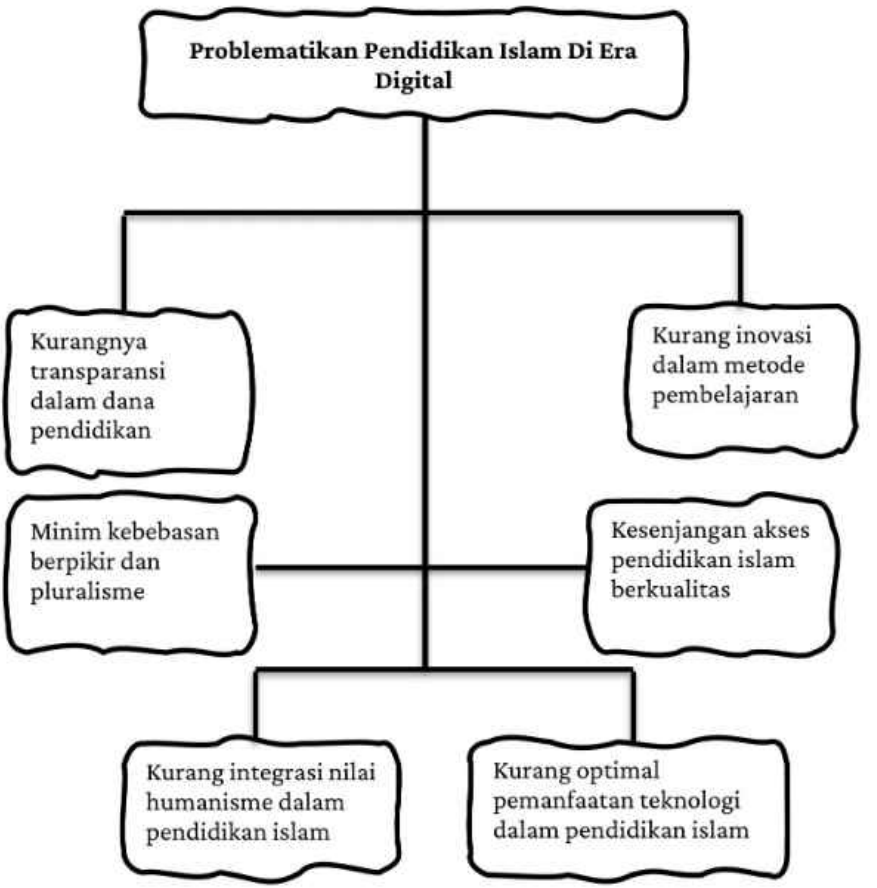

- Gus Dur menekankan pentingnya pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, banyak lembaga pendidikan Islam saat ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Kurikulum yang kaku dan minim pemanfaatan teknologi dapat menghambat perkembangan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik.
- Salah satu warisan penting dari Gus Dur adalah pluralisme dan kebebasan berpikir. Namun, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang membatasi ruang diskusi dan keberagaman pemikiran. Dogmatisme dalam pengajaran sering kali menutup ruang bagi peserta didik mengeksplorasi perspektif yang berbeda, termasuk dalam bidang sains, filsafat, dan sosial-humaniora.

- Pendidikan Islam yang berkualitas masih sulit diakses oleh masyarakat luas, terutama di daerah terpencil dan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusivitas yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Lembaga pendidikan Islam sering kali menghadapi kendala dalam hal fasilitas, sumber daya manusia, dan pendanaan yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran. Pendidikan Islam saat ini terkadang lebih menekankan aspek normatif dan hukum Islam dibandingkan nilai-nilai humanisme, seperti empati, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Gus Dur selalu mengedepankan pendidikan yang mengajarkan Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini masih kurang ditekankan dalam sistem pendidikan Islam saat ini.
- Era Society 5.0 menuntut pendidikan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Namun, banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mengadopsi teknologi ini secara optimal. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pendidikan Islam bisa lebih inklusif, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang tanpa terbatas ruang dan waktu.
- Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan Islam menjadi salah satu persoalan yang sering mencuat di berbagai lembaga pendidikan, baik di tingkat madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam. Masalah ini berakar pada minimnya keterbukaan dalam pelaporan penggunaan anggaran, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, serta lemahnya partisipasi stakeholder, termasuk orang tua santri dan masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai pertanyaan mengenai alokasi dana, kejelasan sumber pendanaan, serta anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Dampak dari kurangnya transparansi ini bisa beragam, mulai dari berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam hingga potensi penyalahgunaan dana yang merugikan perkembangan pendidikan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan pengelolaan keuangan juga menyebabkan fasilitas pendidikan menjadi kurang memadai, kesejahteraan tenaga pendidik terabaikan, serta terbatasnya akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntabilitas yang

lebih baik, seperti audit berkala, pelaporan terbuka kepada publik, serta keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan, agar pendidikan Islam dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan.

D. Kosmopolitanisme dalam Pemikiran Gus Dur: Persektif Filosofis dan Teologis

Kosmopolitanisme, sebagai sebuah ideologi mengedepankan keterbukaan, keterhubungan antarbangsa, serta penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama, telah berkembang di dunia Barat dan juga dalam pemikiran dunia Islam. Gus Dur, sebagai pemikir Muslim terkemuka, memiliki pandangan mendalam tentang kosmopolitanisme, baik dalam perspektif filosofis maupun teologis. Konsep kosmopolitanisme dalam pemikiran Gus Dur sangat dipengaruhi oleh pandangan inklusif dan moderat yang menekankan pada penghargaan terhadap kemanusiaan secara universal. Dalam analisis ini, kita akan membahas asal-usul kosmopolitanisme dalam pemikiran Gus Dur, serta membandingkannya dengan pemikir Barat dan cendekiawan Muslim lainnya yang memiliki pandangan serupa.

Kosmopolitanisme dalam pemikiran Gus Dur berasal dari pengalaman hidupnya yang sangat luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Gus Dur tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, baik dalam keluarga besar pesantren maupun interaksi dengan masyarakat berbagai latar belakang. Gus Dur menyadari dunia ini semakin terhubung dan kompleks, dan oleh karena itu, umat Islam harus memiliki pandangan lebih luas, tidak sempit, serta mampu berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama dengan sikap saling menghargai. Secara filosofis, kosmopolitanisme dalam pemikiran Gus Dur berakar pada keyakinannya tentang pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Ia berpendapat bahwa Islam, sebagai agama yang universal, harus mendorong umatnya tidak cukup pada komunitas Muslim saja, tetapi juga membuka diri terhadap umat manusia secara keseluruhan. Gus Dur menekankan pentingnya dialog antarbudaya dan antaragama, yang dia yakini sebagai cara untuk mencapai perdamaian dunia (M. Siswanto & M. Anas Fakhruddin, 2022:4-8).

Diogenes dari Sinope, seorang filsuf dari mazhab Sinisisme yang hidup pada abad ke-4 dan ke-5 SM atau (412–323 SM), mengembangkan gagasan kosmopolitanisme yang revolusioner di

zamannya. Dalam berbagai anekdot yang tercatat oleh Diogenes Laertius, Diogenes menolak identitas kebangsaan dan menegaskan bahwa manusia tidak harus dibatasi oleh negara atau budaya tertentu. Dalam kehidupannya yang asketis, ia menantang norma sosial dengan hidup sederhana dan mengandalkan kebijaksanaan alamiah, tanpa terikat pada hukum dan adat istiadat yang dianggapnya artifisial. Salah satu ungkapannya yang paling terkenal, "Saya adalah warga dunia" (kosmopolitês), mencerminkan keyakinannya bahwa manusia seharusnya tidak membatasi dirinya dalam batasan politik atau geografis, melainkan hidup sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas.

Diogenes mengkritik hierarki sosial dan menolak konsep kepemilikan pribadi serta kekuasaan politik yang membatasi kebebasan individu. Ia berpendapat bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selaras dengan alam dan tidak dikendalikan oleh konvensi sosial yang tidak rasional. Melalui gaya hidupnya menolak kemewahan dan struktur sosial yang kaku, Diogenes berusaha menunjukkan bahwa manusia dapat mencapai kebebasan sejati dengan mengandalkan kebijaksanaan dan kemandirian, bukan dengan tunduk pada aturan yang diciptakan oleh masyarakat. Pemikirannya ini kemudian menjadi fondasi bagi gagasan kosmopolitanisme dalam filsafat dan etika global di masa mendatang (Leonard Chrysostomos Epafras, 2021:23). Pemirannya menunjukan ia seorang intelektula dengan cakrawala yang luas dalam memahami persoalan hidup yang esesial, pandangannya mengejai kebijaksaan, telah menggambarkan jati diri manusia yang yang mengerti kehidupan.

Pada abad ke-18 dan 19, tepatnya dari tahun 1749 hingga 1832, Johann Wolfgang von Goethe mengembangkan konsep *Weltliteratur* atau "kesusastraan dunia" sebagai bentuk kosmopolitanisme budaya yang menekankan pentingnya pertukaran sastra dan gagasan antarbangsa. Baginya, sastra tidak boleh terbatas oleh batas-batas nasional, melainkan harus menjadi sarana bagi manusia memahami dan menghargai keragaman budaya di dunia. Dalam percakapannya dengan Eckermann, Goethe bahwa perkembangan sastra global memungkinkan manusia saling belajar, memperkaya perspektif, dan memperluas wawasan melampaui sekat-sekat kebangsaan. Ia melihat bahwa karya sastra dari berbagai belahan dunia dapat berdialog satu sama lain, membentuk kesadaran kolektif yang lebih luas tentang kemanusiaan (https://www.ipl.org/essay/Johann-

Wolfgang-Von-Goethes-Theory-Of-World-P38FTW74SCP6). Dengan demikian, pemikirannya menegaskan bahwa kosmopolitanisme bukan hanya persoalan politik atau kewarganegaraan, tetapi juga soal keterbukaan budaya dan apresiasi terhadap warisan intelektual dunia

Kemudian pada abad ke-19, John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* (1859), membahas kebebasan individu adalah fondasi utama bagi masyarakat yang maju dan beradab, terutama dalam dunia yang semakin saling terhubung. Ia berpendapat bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dijaga dari intervensi negara maupun tekanan sosial. Menurut Mill, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memungkinkan perbedaan pendapat berkembang tanpa takut akan represi, karena dari keberagaman gagasan inilah kebenaran dapat ditemukan dan kemajuan dapat dicapai (Diah Imaningrum Susanti, 2022:24-26).

Ketiga para pemikir barat ini, sangat merespon terhadap Masyarakat global, mereka tidak membatasi pada komunitas tertentu, tapi gagasan besar ini perlu dikaji agar tidak salah dikonsumsi. Diawali dengan gagasan Diogenes tentang kosmopolitanisme dan penolakan terhadap batas-batas kebangsaan bersifat progresif, pendekatannya yang ekstrem dan asketis sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Penolakannya terhadap norma sosial, kepemilikan pribadi, dan hierarki politik bisa dianggap utopis dan tidak realistis dalam masyarakat yang kompleks. Selain itu, pendekatan hidupnya yang provokatif dan sering kali konfrontatif membuat pesan filosofisnya sulit diterima oleh banyak orang.

Konsep *Weltliteratur* yang dikembangkan oleh Goethe memang menekankan pentingnya pertukaran budaya, tetapi tidak sepenuhnya mempertimbangkan ketimpangan global dalam produksi dan distribusi sastra. Dominasi budaya Eropa dalam wacana sastra dunia saat itu, dan bahkan hingga sekarang, menunjukkan bahwa pertukaran budaya tidak selalu terjadi secara setara. Kritik lain adalah bahwa *Weltliteratur* lebih bersifat idealis dan kurang memperhitungkan bagaimana struktur ekonomi dan politik mempengaruhi akses terhadap literatur global. Pemikiran Mill tentang kebebasan individu sering dikritik karena terlalu menekankan pada aspek rasionalitas individu dan mengabaikan faktor sosial yang mempengaruhi pilihan seseorang. Dalam praktiknya, tidak semua individu memiliki kebebasan yang sama untuk berpikir dan berekspresi, karena ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dapat

membatasi akses mereka terhadap ruang publik. Selain itu, konsep "*harm principle*" yang ia kemukakan juga bersifat subjektif, karena batas antara kebebasan individu dan tindakan yang merugikan orang lain bisa berbeda tergantung pada konteks budaya dan sosial masing-masing masyarakat.

Gus Dur memahami bahwa kosmopolitanisme tidak hanya terkait dengan aspek sosial-politik, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang kuat. Dalam pandangan Gus Dur, Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama, terlepas dari suku, agama, dan ras. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda sebagai bagian dari rahmat Tuhan (QS. Al-Hujurat: 13). Dengan dasar ini, Gus Dur menilai bahwa ajaran Islam secara teologis mendukung pandangan kosmopolitan yang menghargai pluralitas dan kebersamaan antar umat manusia. Gus Dur menghubungkan kosmopolitanisme dengan ajaran Islam tentang tawhid (keesaan Tuhan), yang menurutnya memberi pesan bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dalam satu kesatuan yang lebih besar. Ini berarti meskipun manusia berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu jalinan kemanusiaan yang saling terkait. Oleh karena itu, Gus Dur berpendapat bahwa Islam tidak boleh dipahami sempit sebagai ajaran yang hanya komunitas Muslim saja, melainkan sebagai agama yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.

Secara historis, kosmopolitanisme sebagai ideologi pertama kali berkembang di dunia Barat. Salah satu tokoh yang dikenal sebagai pelopor ide kosmopolitanisme adalah Immanuel Kant, filsuf Jerman yang mengembangkan konsep "perdamaian abadi" melalui gagasan tentang negara-negara yang saling terhubung dan hidup dalam kedamaian berorientasi pada sikap saling menghormati hak asasi manusia. Dalam karya terkenalnya, *Perpetual Peace*, Kant berargumen bahwa perdamaian hanya dapat tercapai jika negara-negara menerapkan prinsip-prinsip kosmopolitanisme yang menekankan pada penghargaan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia (Josep Arianto, 2024:49).

Selain Kant, pemikir seperti Martha Nussbaum juga memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan kosmopolitanisme modern. Nussbaum mengajukan konsep *cosmopolitanism as justice*, bahwa keadilan harus diberikan kepada semua manusia, terlepas dari kewarganegaraan, suku, dan agama. Nussbaum berpendapat bahwa

sebuah sistem moral yang adil harus memperlakukan setiap individu sebagai anggota dari komunitas global yang lebih luas, tanpa membedakan identitas lokal atau nasional (Cicilia Damayanti, 2021:45). Pemikiran Kant dan Nussbaum memberikan kontribusi penting dalam pemikiran kosmopolitanisme yang diadopsi oleh pemikir Muslim, termasuk Gus Dur. Gus Dur sendiri tidak hanya mengadopsi pemikiran Barat ini, tetapi ia juga mengintegrasikannya dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman.

Penting juga diketahui dalam dunia Islam, terdapat beberapa cendekiawan yang memiliki pandangan kosmopolitan sejalan dengan pemikiran Gus Dur. Seperti, Muhammad Abduh, seorang pemikir modernis dari Mesir, adalah salah satu tokoh yang menekankan penyesuaian antara ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Abduh mengatakan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta memperkenalkan pemikiran rasional dalam mendekati teks-teks agama (Bobbi Aidi Rahman, 2017:43-44). Kemudian Fazlur Rahman, seorang pemikir Pakistan, juga berkontribusi besar dalam pemikiran Islam modern yang mendorong interpretasi ulang terhadap ajaran Islam. Rahman berpendapat bahwa Islam harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas, bukan terbatas pada teks-teks klasik yang bisa mengarah pada pemahaman sempit dan dogmatis (Muhamad Hakim, 2017:127). Bagi Rahman, ajaran Islam adalah agama yang mendorong dialog dan interaksi antara umat beragama, sejalan dengan gagasan kosmopolitanisme.

Selain itu, Abdulaziz Sachedina, seorang cendekiawan Islam kontemporer, dalam karya-karyanya juga mengemukakan pentingnya menghargai pluralitas agama dan budaya. Ia berpendapat Islam mengajarkan keharmonisan dan dialog antar umat beragama sebagai bagian dari ajaran kesetaraan dan keadilan (Muhamad Arfan, 2022:109-110). Pemikiran Sachedina ini juga sangat mendukung prinsip-prinsip kosmopolitanisme yang diusung Gus Dur, yakni penghargaan terhadap kemanusiaan dan perbedaan. Gus Dur berusaha untuk memadukan kosmopolitanisme dengan nilai-nilai teologis Islam yang menekankan pada kesetaraan dan solidaritas. Dalam pandangannya, kosmopolitanisme selain ideologi sosial-politik, juga suatu kewajiban moral yang harus diterapkan oleh setiap Muslim. Sebab Islam adalah agama yang universal, tidak untuk umat Muslim saja, dia mencakup seluruh umat manusia. Oleh karena itu,

prinsip-prinsip kosmopolitanisme yang mengedepankan saling menghormati dan menjaga perdamaian global sangat relevan dengan ajaran Islam yang mengajarkan hidup berdampingan secara damai.

Gus Dur mengkritik pandangan sempit yang sering muncul dalam interpretasi Islam yang cenderung eksklusif dan menganggap bahwa Islam hanya untuk umat Muslim. Dalam pandangannya, ini adalah bentuk kesalahan besar yang bertentangan dengan nilai-nilai teologis Islam yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan umat manusia dalam berbagai bentuk perbedaan untuk saling mengenal dan hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Gus Dur melihat dalam ajaran Islam bahwa hubungan antarumat beragama seharusnya dibangun dengan dasar saling pengertian, bukan permusuhan.

Pemikiran Gus Dur mengenai kosmopolitan ini, banyak tokoh-tokoh pemikir yang searah dengan cara pandang Gus dur terhadap dunia. Namun, di sisi lain banyak juga yang kontroversi dengannya, misalnya gagasan Gus Dur tentang pluralisme dan demokrasi, di bantal oleh Jafar Umar Thalib (1961–2019) seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Laskar Jihad, sebuah organisasi militan Islam yang berperan dalam konflik Maluku pada awal 2000-an. Hidup di abad ke-20 hingga awal abad ke-21, ia memiliki pandangan Islam yang puritan dan skripturalis, berlandaskan ajaran Salafi Wahabi. Salah satu pemikirannya yang paling menonjol adalah penolakannya terhadap pluralisme agama. Menurutnya, hanya Islam yang merupakan jalan kebenaran, sementara konsep pluralisme yang menyamakan semua agama dianggap bertentangan dengan akidah Islam.

Pandangan ini berseberangan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menekankan kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama. Selain itu, Jafar juga menolak demokrasi ala Barat, yang ia anggap bertentangan dengan syariat Islam. Baginya, hukum Islam (syariat) harus menjadi dasar negara, bukan hukum buatan manusia yang dapat berubah-ubah sesuai kehendak rakyat. Sikapnya ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Gus Dur, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keberagaman. Pemikiran Jafar Umar Thalib juga berkaitan erat dengan konsep jihad dan militanisme, di mana ia meyakini bahwa jihad bersenjata diperlukan dalam kondisi tertentu untuk membela Islam. Hal ini tercermin dalam Laskar Jihad yang ia pimpin, yang mengirim ribuan militer ke Maluku

saat terjadi konflik agama. Namun, setelah intervensi pemerintah, ia akhirnya membubarkan Laskar Jihad pada tahun 2002. Pemikirannya yang keras dan radikal menjadikannya salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia (Ridwan, 2021:52-55).

Memang dalam sebuah pemikiran tidak ada yang sifatnya menerima dengan terbuka, pastinya akan selalu melahirkan dua aspek pro dan kotra, dan hal itu biasa dalam dunia akademik, kalau kata Rocky Gerung "pikiran disebut pikiran kalau dipertengkarkan". Artinya pergolakan pemikiran yang tumbuh dalam peradaban manusia itu sesuatu yang biasa, yang jadi masalah adalah ketika terjadi sikut menyikut. Adapun Gerakan yang dilakukan oleh Jafar tersebut adalah Upaya untuk memurnikan ajaran Islam dari budaya-budaya barat, cuman penyelesaiannya yang bertentangan dengan moral dan hak asasi manusia. Gus Dur sendiri berusaha mendudukkan manusia pada prinsip hidup bersama dan saling bertanggung jawab tanpa membedakan satu sama lain. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada manusia, seandinya Tuhan mau maka, hanya ada satu umat yaitu Islam saja, tapi Tuhan punya kehendak atas semua itu, karena manusia adalah makhluk Tuhan apapun jenisnya, harus dipadang sama dalam nilai-nilai kemanusiaan.

Makanya kosmopolitanisme, dalam pandangan Gus Dur, berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Gus Dur sering mengutip ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dengan martabat yang sama, dan bahwa kemanusiaan adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar identitas agama, suku, atau ras. Dalam konteks ini, Gus Dur melihat kosmopolitanisme sebagai sebuah panggilan moral yang harus direspons oleh umat Islam, bukan sebagai sebuah ideologi asing yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kosmopolitanisme dalam pemikiran Gus Dur adalah hasil dari penggabungan antara pandangan filosofis dan teologis yang mendalam, mendukung penghargaan terhadap kemanusiaan secara universal. Gus Dur berhasil membawa pemikiran kosmopolitanisme ke dalam konteks Islam yang moderat, inklusif, dan damai. Pandangannya tentang kosmopolitanisme sejalan dengan pemikiran para cendekiawan Muslim modern, seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Abdulaziz Sachedina, juga mendukung pentingnya menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat global. Gus Dur menunjukkan bahwa Islam bukan menjadi agama untuk umat Muslim, tetapi juga

seluruh umat manusia. Dengan pandangan kosmopolitan yang inklusif, Gus Dur berhasil memberikan wawasan baru dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung, dengan menghargai keberagaman dan memperjuangkan perdamaian serta keadilan. Sebagai seorang pemikir, Gus Dur memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Islam dan juga terhadap pemikiran global yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal.

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

BAB III

KONSEP KOSMOPOLITANISME ABDURRAHMAN WAHID

A. Definisi Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme, meskipun bukanlah konsep baru, telah berkembang jauh sejak zaman Yunani Kuno, yang mengartikan kata "kosmopolitan" dari dua suku kata: *kosmo* yang berarti dunia, dan *polites* yang berarti warga negara. Konsep ini pada dasarnya merujuk pada ideologi dunia yang lebih besar, di mana moralitas bangsa dipandang secara universal, dengan sikap keterbukaan terhadap perbedaan tanpa dibatasi oleh latar belakang bangsa, suku, ras, budaya, atau agama. Kosmopolitanisme mengajarkan pentingnya mengharmoniskan agama dan budaya, serta membangun hubungan yang saling menghargai antara berbagai bangsa dan umat manusia. Tujuannya menciptakan dunia yang lebih inklusif, setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan yang ada (Miftahus Sa'diyah & M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, 2021:288).

Pandangan ini sangat sejalan dengan pemikiran Gus Dur, yang melihat Islam sebagai agama mengutamakan kemanusiaan, menciptakan kesadaran universal terhadap nilai-nilai moral yang melampaui batas-batas agama dan kebangsaan. Gus Dur mengajarkan bahwa umat Islam harus memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman. Ia berpendapat untuk mencapai peradaban yang optimal, harus ada kesepadanan antara nilai-nilai normatif yang seringkali cenderung kaku dengan keterbukaan dalam berpikir, agar umat manusia dapat memahami dan hidup bersama. Konsep kosmopolitanisme juga digemakan oleh Nurcholish Madjid, perlunya kesadaran manusia atas perbedaan

sebagai takdir Tuhan yang mesti diterima dengan lapang dada. Madjid menjelaskan bahwa kesadaran akan perbedaan dapat membawa umat manusia pada kehidupan yang harmonis, semua elemen masyarakat dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan memahami perbedaan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, manusia sedang menciptakan dunia yang kosmopolitan (Nurchalish Madjid, 2019:984-985).

Prinsip kosmopolitanisme sebagai sebuah ideologi politik atau sosial, juga cara hidup yang diterapkan dalam keseharian. Atas dasar ini, umat Islam harus menanggalkan sifat eksklusifitas dan membuka ruang berkolaborasi dengan umat agama lain, membangun dunia lebih damai dan adil. Konsep ini melibatkan penghargaan terhadap perbedaan dan pencarian titik temu yang saling menguntungkan antarbangsa dan antaragama. Ajaran kosmopolitanisme ini, menurut Gus Dur dan Nurcholish Madjid, menjadi pedoman menciptakan dunia lebih inklusif. Mengajak umat manusia untuk hidup berdampingan secara damai dengan mengedepankan moralitas universal.

Pandangan mengenai kosmopolitan di atas tertuju pada tiga aspek yang sangat urgensial dan kebanyakan sulit diimplementasikan, entah mengapa ini bisa terjadi, perhatikan gambar berikut:

1. Moralitas bangsa yang rusak

Wajah kekuasaan Indonesia yang digambarkan sebagai parodi kelam oligarki korup bertolak belakang dengan prinsip kosmopolitanisme Abdurrahman Wahid. Gus Dur, dengan filosofi pluralismenya, menekankan penghormatan pada keragaman budaya dan agama sebagai fondasi bangsa. Namun, realitasnya, elite penguasa justru memelintir identitas religius menjadi topeng untuk mengesahkan praktik judi ilegal dan kepemilikan kasino gelap sebuah ironi yang mengubur prinsip "Bhinneka Tunggal Ika". Di sisi lain, kosmopolitanisme Gus Dur yang berporos pada keadilan sosial secara telak dihancurkan oleh mekanisme ekonomi transaksional, proyek fiktif menggerogoti anggaran negara sementara rakyat kecil terjepit inflasi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip egalitarianisme Gus Dur yang menolak sistem ekonomi predator segelintir elite.

Lebih dalam lagi, humanisme universal Gus Dur yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan HAM berhadapan dengan mafia hukum yang memberi imunitas pada koruptor. Praktik narkoba sebagai alat kontrol politik dan rekrutmen politik kotor dari level RT hingga istana bukan hanya bukti dehumanisasi, tetapi juga pembunuhan karakter meritokrasi yang menjadi pilar tata kelola kosmopolitan. Sementara Gus Dur membayangkan masyarakat yang memanusiakan manusia, oligarki saat ini justru menjadikan uang sebagai "tuhan baru" dan narkoba sebagai simbol kekuasaan.

Ketika elit penguasa telah menjadi role model kehancuran moral, negara ini sedang menapaki jalan menuju *failed state*. Perlu revolusi kultural dan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih untuk memutus lingkaran setan ini. Solusi yang ditawarkan Gus Dur melalui revolusi kultural kini menjadi jalan wajib untuk mencegah Indonesia menjadi *failed state*. Pendidikan kewarganegaraan berbasis etika global, penguatan *civil society*, dan diplomasi kebudayaan adalah triad yang diperlukan untuk memutus mentalitas transaksional dan melawan ancaman *narcostate*. Gagasan Gus Dur yang sering dianggap visioner justru terbukti lebih relevan di era *post-truth* ini, di mana

krisis moral kekuasaan menunjukkan bahwa kosmopolitanisme bukan sekadar utopia[1], melainkan antitesis sistematis menyelamatkan kedaulatan bangsa.

2. Dilema pribumi terjajah

Gambar ini merefleksikan paradoks kosmopolitanisme ala Abdurrahman Wahid yang berhadapan dengan realitas "kolonialisme gaya baru". Di satu sisi, Gus Dur membayangkan masyarakat Indonesia sebagai ruang dialog antarbudaya yang setara, di mana identitas pribumi dan asing saling memperkaya tanpa dominasi. Namun, praktiknya, pemerintah justru mengadopsi kosmopolitanisme semu membuka keran investasi asing secara masif tanpa mekanisme proteksi sosial, sehingga buruh pribumi terjerembap dalam sistem upah murah (di bawah US$300/bulanUS$300/bulan) yang kontras dengan standar kesejahteraan pekerja di negara asal investor. Sementara perempuan hamil dan anak-anak pribumi bergulat dengan akses kesehatan terbatas, tenaga kerja asing menikmati paket asuransi premium sebuah ironi yang mengerdilkan prinsip keadilan distributif Gus Dur.

---

[1] Utopia merupakan suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna. Cita-cita utopis sering kali memberikan penekanan pada prinsip-prinsip egaliter kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keadilan kendati tidak berarti secara eksklusif dengan metode dan struktur dari usulan implementasi yang bervariasi berdasarkan ideologi. Menurut Lyman Tower Sargent, "ada sosialis, kapitalis, monarkis, demokratis, anarkis, ekologis, feminis, patriarkal, egalitarian, hierarkis, rasis, sayap kiri, sayap kanan, reformis, cinta bebas, keluarga inti, keluarga besar, dan lebih banyak lagi kaum utopia".

Kata ini diciptakan dari bahasa Yunani oleh Sir Thomas More untuk buku *Utopia* karyanya dalam bahasa Latin yang diterbitkan pada tahun 1516; buku tersebut menggambarkan suatu masyarakat di pulau fiktif di Samudra Atlantik. Istilah ini kemudian digunakan untuk mendeskripsikan baik komunitas intensional yang berupaya untuk menciptakan masyarakat ideal, maupun masyarakat khayalan yang digambarkan dalam karya fiksi. Berbagai pandangan alternatif mengenai atribut-atribut struktural dan kualitatif dari masyarakat telah melahirkan konsep lainnya, yang paling terkemuka yaitu distopia. https://id.wikipedia.org/wiki/Utopia.

Kosmopolitanisme Gus Dur sejatinya menuntut kesetaraan partisipatif, di mana kebijakan pemerintah harus menjadi jembatan emansipasi bagi pribumi untuk bersaing secara bermartabat. Alih-alih memfasilitasi kompetisi berbasis kapabilitas, negara malah menjadi aktor pembentuk hierarki ekonomi melalui UU Cipta Kerja yang memangkas hak buruh dan memuluskan ekspansi korporasi transnasional. Di titik inilah visi Gus Dur tentang "kemanusiaan universal" berbenturan dengan logika "pasar bebas predator", di mana identitas pribumi direduksi menjadi komoditas tenaga kerja murah dalam rantai pasok global.

Solusi Gus Dur menuntut rekonstruksi sistemik: (1) Revolusi kebijakan upah berbasis produktivitas dan kebutuhan hidup layak, (2) Pemutusan mata rantai ketergantungan pada investasi asing eksploitatif melalui penguatan UMKM berbasis kearifan lokal, serta (3) Pendidikan multikultural yang tidak sekadar toleransi pasif, namun membekali pribumi dengan literasi ekonomi global untuk bernegosiasi setara. Hanya dengan demikian kosmopolitanisme tidak menjadi topeng baru bagi penjajahan ekonomi berbasis identitas.

3. Fragmentasi Sosial

Dinamika fragmentasi sosial di Indonesia kontemporer mulai dari ketegangan antara FPI dan NU, polemik otoritas keagamaan habaib Yaman versus Kiyai Imaduddin Usman, hingga kontroversi Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang teh atau berbicara di gereja menjadi cermin retak dari kosmopolitanisme ala Gus Dur. Gus Dur, dengan konsep Pribumisasi Islam-nya, justru membangun kosmopolitanisme yang berakar pada lokalitas, sebuah sintesis unik di mana perbedaan tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai *rahmatun li al-nas* (karunia bagi semesta). Kebijakannya mencabut larangan perayaan Imlek pada 2001, misalnya, bukan sekadar langkah politik, melainkan pengakuan bahwa identitas Indonesia adalah mozaik yang terdiri dari unsur Tionghoa, Arab, Jawa, dan ratusan etnis lain.

Namun, di era digital ini, masyarakat terjebak dalam "kosmopolitanisme semu"terhubung secara global melalui media sosial, tetapi terkotak-kotak dalam *echo chamber*[2] algoritmik yang memproduksi kebenaran tunggal. Konflik seperti kasus Gus Miftah yang dianggap melanggar batas kelas sosial atau agama justru mengungkap paradoks, di satu sisi generasi muda mengklaim diri inklusif, tetapi di sisi lain, mereka mudah terprovokasi oleh narasi *identity politics* yang menyederhanakan kompleksitas menjadi dikotomi "kita vs mereka". Gus Dur, yang dengan leluasa shalat Jumat di gereja atau berdialog dengan pendeta Kristen, mengajarkan bahwa kosmopolitanisme sejati bukanlah toleransi pasif, melainkan *engagement* aktif sebuah keberanian untuk memasuki ruang "liyan" tanpa kehilangan jati diri. Sayangnya, warisan ini terdistorsi menjadi pertunjukan *virtue signaling* di dunia maya, di mana toleransi diukur dari jumlah *like* daripada kedalaman dialog. Fragmen-fragmen konflik terkini menjadi pengingat kosmopolitanisme Gus Dur bukan warisan mati, melainkan proyek kebudayaan yang terus diperbarui, terutama di tengah gelombang *hyper-religiosity* dan komodifikasi identitas yang mengancam pancasila sebagai *common platform* kebinekaan.

B. Kosmopolitanisme Dalam Perspektif Islam

Kosmopolitanisme dalam Islam bukanlah sekadar fenomena sosial atau politik, melainkan juga mencakup dimensi pemikiran agama yang terbuka dan inklusif. Pemikiran ini mengakar pada ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk hidup dalam kedamaian, menghargai perbedaan, dan memahami bahwa segala bentuk keberagaman adalah bagian dari takdir ilahi. Dalam konteks ini, Gus Dur memiliki pandangan yang sangat relevan dengan perkembangan kosmopolitanisme, baik dalam aspek filosofis maupun teologis.

Secara filosofis, kosmopolitanisme berasal dari kata-kata Yunani "kosmos" yang berarti dunia dan "polites" yang berarti warga negara. Makna dasarnya adalah bahwa seseorang seharusnya merasa

[2] Echo Chamber adalah situasi di mana seseorang atau kelompok hanya terpapar pada informasi, opini, atau pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga memperkuat bias dan menutup diri dari sudut pandang yang berbeda. https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-apa-itu-echo-chamber-fenomena-dalam-penggunaan-media-sosial-20nAIDWALs0.

bagian dari dunia ini, bukan hanya sebagai warga negara atau individu dalam suatu bangsa tertentu. Gus Dur, dalam pandangannya, menjadikan ajaran Islam sebagai landasan pemikiran kosmopolitan yang berakar pada keterbukaan terhadap perbedaan. Islam dalam pandangan Gus Dur bukanlah agama yang memisahkan umat manusia berdasarkan garis pemisah seperti suku, agama, atau bangsa, lebih dari itu sebagai ajaran yang mengutamakan kesetaraan dan keharmonisan antarumat manusia (Zainal Abidin, 2021:375).

Pemikiran Gus Dur tentang kosmopolitanisme dalam Islam bukanlah tanpa dasar. Salah satu contoh, dalam literatur sejarah Islam, sejak masa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sikap terbuka terhadap budaya dan tradisi lain. Dalam peristiwa pembuatan mimbar khutbah Jumat, Nabi Muhammad menerima masukan dari seorang tukang kayu Romawi untuk membuat mimbar yang lebih baik. Hal ini menunjukkan keterbukaan terhadap teknologi dan budaya lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Islam mengakomodasi kemajuan zaman dan tidak kaku terhadap perubahan. Begitu pula dalam peristiwa Perang Ahzab, ketika Rasulullah SAW menerima saran dari Salman al-Farisi, seorang sahabat dari Persia, untuk menggali parit sebagai pertahanan kota. Meskipun metode ini berasal dari budaya Persia, Rasulullah tidak menolaknya dengan alasan bahwa itu adalah kebiasaan orang Majusi, melainkan justru menerima dan mengimplementasikannya. Sikap Rasulullah ini mencerminkan pandangan kosmopolitanisme yang terbuka terhadap pemikiran dari luar, selama itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam.

Selain itu, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam tidak hanya berkembang dalam konteks agama, juga mengadopsi berbagai elemen dari kebudayaan Yunani, Persia, dan Romawi. Hal ini terlihat dalam adopsi sistem administrasi dan birokrasi dari Bizantium dan Persia. Pemikiran kosmopolitan dalam Islam pun berkembang dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dari luar, seperti filsafat Yunani, yang menjadi salah satu elemen penting dalam peradaban Islam di masa itu (Bahrul Ulum & Siti Raudhatul Jannah, 2017:4-5). Pemahaman kosmopolitan dalam Islam sebagaimana uraian tersebut memberikan landasan dasar bagi kita dalam membangun masyarakat yang secara esensial tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritualitas, juga secara potensial sebagai sarana untuk melengkapi satu sama lain dalam peradaban. Namun,

bagi kita hari ini, telah membenturkan hal yang esensial dengan pontensial jadinya paradoks, kita akan coba mengkaji berdasar pada realitas.

Konflik antara budaya lokal dan klaim otentisitas agama di Indonesia mengkristal dalam paradoks akulturasi yang kerap diabaikan. Ambil contoh rebana yang dianggap "warisan Hindu" oleh kelompok puritan, alat musik ini justru menjadi simbol sinkretisme kreatif antara tradisi Nusantara dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana terbukti dalam manuskrip Serat Centhini[3] abad ke-17 yang menyebut rebana sebagai media dakwah Wali Songo. Demikian pula tahlilan ritual berkumpulnya masyarakat pasca-kematian sebenarnya merupakan transformasi cerdas dari tradisi sraddha[4]

---

[3] Serat Centhini (dalam aksara Jawa: ꦯꦼꦫꦠ꧀ ꦕꦼꦤ꧀ꦛꦶꦤꦶ), atau juga disebut Suluk Tambanglaras atau Suluk Tambangraras-Amongraga, merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Serat Centhini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa, supaya tidak punah dan tetap terlestarikan sepanjang waktu. Serat Centhini dapat menjadi refleksi dalam melihat kebudayaan masyarakat Jawa disebabkan isi tekstualitasnya. Serat Centhini disampaikan dalam bentuk tembang atau suluk, dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis lagunya. Karya ini boleh dikatakan sebagai ensiklopedia mengenai "dunia dalam" masyarakat Jawa. Sebagaimana tecermin dalam bait-bait awal, serat ini ditulis memang dengan ambisi sebagai perangkum *baboning pangawikan Jawi*, induk pengetahuan Jawa. Serat ini meliputi beragam macam hal dalam alam pikiran masyarakat Jawa, seperti persoalan agama, kebatinan, kekebalan, dunia keris, karawitan dan tari, tata cara membangun rumah, pertanian, primbon (horoskop), makanan dan minuman, adat-istiadat, cerita-cerita kuno mengenai Tanah Jawa, dan lain-lainnya. Serat Centhini disusun berdasarkan kisah perjalanan putra-putri Sunan Giri setelah dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, ipar Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Kisah dimulai setelah tiga putra Sunan Giri berpencar meninggalkan tanah mereka untuk melakukan perkelanaan, karena kekuasaan Giri telah dihancurkan oleh Mataram. Mereka adalah Jayengresmi, Jayengraga/ Jayengsari, dan seorang putri bernama Ken Rancangkapti. Dalam perjalanan itu mereka berdua mendapatkan pengetahuan mengenai *adat-istiadat tanah Jawa, syariat para nabi, kisah Sri Sadana, pengetahuan wudhu, salat, pengetahuan dzat Allah, sifat dan asma-Nya (sifat dua puluh), Hadist Markum, perhitungan slametan orang meninggal, serta perwatakan Pandawa dan Kurawa*. https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_Centhini.

[4] Tradisi Sraddha merupakan salah satu ritual penting dalam ajaran Hindu dan Budha, terutama dalam konteks penghormatan kepada leluhur. Dalam ajaran Hindu, Sraddha adalah upacara suci yang dilakukan oleh keluarga untuk mendoakan arwah orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia, dengan harapan mereka memperoleh tempat yang baik di alam baka. Upacara ini melibatkan persembahan makanan, doa, dan mantra-mantra suci yang dipimpin oleh seorang pendeta, sebagai simbol kasih dan bakti anak kepada orang tua yang telah tiada. Dalam

dalam Hindu-Buddha yang diIslamisasi melalui konsep tawassul (perantaraan doa), tetapi kini dianggap "bid'ah" oleh kelompok literalis yang memaknai agama secara tekstual.

Fenomena ini memperlihatkan krisis epistemologi keberagamaan di mana agama dipahami sebagai entitas yang steril dari dinamika budaya. Di satu sisi, ada penolakan terhadap akar kultural Islam Nusantara seperti gamelan dalam sekaten atau wayang sebagai media dakwah, tetapi di sisi lain, terjadi adopsi masif terhadap budaya Barat seperti penggunaan jas dan dasi dalam acara resmi keagamaan, atau tren hijab *streetwear* yang mengadopsi estetika mode Paris. Ironisnya, kelompok yang menolak rebana karena dianggap "Hindu" justru diam terhadap penggunaan arsitektur Gothic dalam pembangunan masjid-megah, yang notabene warisan Kristen Eropa abad pertengahan.

Umat Islam persis seperti mata rantai yang terputus, praktik pengkafiran sesama Muslim (takfir) atas dasar perbedaan budaya seperti menuduh "tidak syar'i" mereka yang tidak berjubah mengabaikan fakta sejarah bahwa pakaian Arab sendiri (seperti thawb atau keffiyeh) merupakan produk adaptasi budaya Badui dengan iklim gurun, bukan "pakaian surgawi" yang turun dari langit. Gus Dur dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (1984) mengingatkan bahwa "Arabisasi bukanlah Islamisasi" sebuah kritik terhadap kecenderungan mengidentikkan budaya Timur Tengah dengan kesalehan. Namun, gerakan puritan kontemporer justru melakukan

konteks Buddhisme, terutama di wilayah yang terpengaruh ajaran Mahayana, Sraddha juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur agar mereka mendapatkan kelahiran kembali yang lebih baik dalam siklus reinkarnasi. Ritual ini mencerminkan keyakinan mendalam akan adanya hubungan spiritual antara dunia orang hidup dan dunia roh, serta pentingnya nilai karma dan dharma sebagai penentu nasib jiwa setelah kematian. Tradisi Sraddha bukan hanya bentuk penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga simbol dari ketulusan hati dan kesadaran spiritual masyarakat terhadap keberlangsungan hidup yang tidak hanya terbatas di dunia ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. https://id.wikipedia.org/wiki/Keyakinan_dalam_Buddhisme.

fetisisme simbol dengan menganggap jubah Arab sebagai indikator iman, mengabaikan substansi seperti keadilan sosial atau perlindungan terhadap minoritas.

Problematika ini menunjukkan kegagalan dalam menerjemahkan kosmopolitanisme Gus Dur secara utuh. Di satu sisi, masyarakat mengadopsi elemen global (seperti teknologi atau mode), tetapi di sisi lain, menolak dialog dengan akar kultural sendiri. Padahal, kosmopolitanisme sejati seperti ditunjukkan Wali Songo yang mengIslamisasi wayang atau Gus Dur yang menghadiri misa Natal harusnya bersifat dwipolar, mampu mengapresiasi universalitas nilai Islam tanpa kehilangan lokalitas. Sayangnya, kecenderungan untuk mempolitisasi budaya sebagai alat klaim kebenaran (*cultural truth-claim*) telah mengubah agama menjadi medan pertarungan identitas, bukan ruang dialog peradaban.

Solusinya terletak pada redefinisi "kesalehan kultural" ala Gus Dur di mana tradisi lokal bukan musuh yang harus dimusnahkan, melainkan medium untuk mengekspresikan spiritualitas. Jika rebana bisa menjadi alat dzikir kolektif, atau tahlilan menjadi sarana silaturahmi sosial, mengapa harus dikafirkan? Kosmopolitanisme Islam Indonesia perlu dibangun bukan dengan meniru Arab atau mengekor Barat, melainkan dengan merajut "identitas mozaik" yang memadukan universalisme ajaran Islam dengan kearifan lokal, sebagaimana tercermin dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang justru semakin relevan di tengah gelombang puritanisme global.

Islam sebagai agama tidaklah eksklusif, melainkan inklusif, membuka ruang bagi berbagai budaya dan pemikiran untuk berkembang dan berinteraksi. Sikap ini menjadi dasar bagi konsep Islam kosmopolitan yang dikembangkan oleh Gus Dur, mengajarkan bahwa Islam harus dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bukan berarti Islam harus mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya, tetapi lebih kepada penyesuaian diri dengan realitas dunia modern yang terus berkembang (Hamadi B. Husain,2014:81). Perspektif Gus Dur, Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Sikap inklusif terhadap perbedaan adalah kunci menciptakan kehidupan lebih adil, damai, dan harmonis di tengah-tengah masyarakat majemuk. Gus Dur berpendapat bahwa Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman harus berpegang pada prinsip-prinsip kosmopolitanisme untuk

menjaga kerukunan antarwarga negara, terutama di tengah perkembangan global yang semakin kompleks.

Pada konteks Indonesia, Gus Dur memandang bahwa ideologi Negara Islam tidak relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang sangat plural. Indonesia, menurut Gus Dur, harus mengadopsi ideologi Pancasila sebagai dasar negara, yang mencakup semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau budaya. Pancasila, menurut Gus Dur, adalah falsafah hidup yang mampu menampung semua keberagaman di Indonesia dan memberikan ruang bagi semua agama menjalankan ajaran agama mereka dalam kerangka pluralisme (Bahrul Ulum & Siti Raudhatul Jannah, 2017:17). Pandangan Gus Dur ini sejalan dengan prinsip kosmopolitanisme yang mendukung pluralisme dan saling menghargai. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak dapat dipaksakan menjadi negara Islam yang eksklusif, melainkan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gus Dur, harus mengutamakan kepentingan bersama, kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, Indonesia menjadi contoh nyata dari penerapan Islam kosmopolitan yang menghargai pluralitas dan keberagaman.

Selain Gus Dur, ada beberapa pemikir Islam kontemporer juga mendukung konsep kosmopolitanisme dalam Islam. Salah satunya adalah Nurcholish Madjid, yang mengemukakan pentingnya menghargai perbedaan dan menjadikan pluralisme sebagai bagian dari ajaran Islam. Madjid berpendapat bahwa kesadaran akan perbedaan adalah langkah pertama dalam menciptakan masyarakat lebih adil dan damai. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, umat Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan membuka diri terhadap perbedaan (Aris Munandar Almi, 2019:42). Gus Dur, melalui berbagai pemikirannya, mengajak umat Islam selalu membuka diri terhadap dunia luar, tanpa takut kehilangan identitas agama. Islam yang kosmopolitan adalah Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Konsep ini, adalah solusi mengatasi tantangan zaman, baik dalam bidang politik, sosial, maupun agama, dan dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis di tengah-tengah perbedaan yang ada.

Keterbukaan umat Islam terhadap keberagaman tercermin nyata dalam kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralitas. Umat Islam tidak menutup diri dari keberagaman, justru memberikan ruang dialog inklusif bagi mereka yang berbeda keyakinan. Contoh konkret dari sikap ini dapat dilihat dalam podcast Login, Habib Ja'far bersama perwakilan agama lain duduk berdampingan dalam sebuah dialog santai yang dibalut dengan humor, tanpa sedikit pun menyisakan ruang kebencian atau caci maki. Acara ini menjadi sebuah medium efektif menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah tembok pemisah, tapi jembatan untuk saling memahami, mempererat persaudaraan antarumat beragama, serta menampilkan wajah Islam yang sejuk, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal (https://youtu.be/5ACmPpEPWks?si=CKRdrghf_ZwT3qvn).

Keterbukaan umat Islam terhadap dunia luar, sebagaimana diajarkan oleh Gus Dur, adalah langkah progresif menuju terciptanya harmoni antarumat manusia. Namun, jika keterbukaan tersebut dijalankan secara berlebihan tanpa diimbangi dengan penguatan identitas dan pemahaman keIslaman yang mendalam, menimbulkan efek negatif yang signifikan. Salah satu risikonya adalah hilangnya batas nilai, di mana umat menjadi terlalu permisif terhadap nilai-nilai asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, keterbukaan yang tidak kritis menyebabkan masuknya paham-paham sekularisme ekstrem, relativisme moral, hingga liberalisme keagamaan dapat mengikis keyakinan umat terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Selain itu, keterbukaan yang tidak dibarengi dengan literasi agama yang kuat juga berpotensi menciptakan kebingungan identitas di kalangan generasi muda Muslim. Mereka akan kehilangan orientasi spiritual dan kultural, merasa terjebak antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luar yang tampak lebih "modern" atau "universal", tanpa mampu memilah mana yang bisa dikompromikan dan mana yang tidak. Hal ini dapat membuka ruang bagi radikalisme atau sebaliknya, apatisme terhadap agama.

Keterbukaan bukan berarti menghilangkan filter. Islam kosmopolitan harus disertai dengan mekanisme seleksi nilai, yakni sikap terbuka namun tetap selektif dan berlandaskan pada akidah serta prinsip syariah yang kuat. Keterbukaan seharusnya menjadi jalan memperluas wawasan dan memperkuat ukhuwah, bukan

membuat umat kehilangan arah. Maka, yang dibutuhkan bukan hanya keterbukaan, tetapi juga keteguhan identitas.

C. Nilai-Nilai Pluralisme Dan Toleransi Dalam Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme sebagai sebuah pandangan filosofis, mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, yang sangat penting di era globalisasi dan keragaman. Dalam kosmopolitanisme, setiap individu dihargai dan dihormati sebagai komunitas global. Dengan kata lain, kosmopolitanisme menciptakan ruang saling menghargai perbedaan, serta mencari titik temu antara perbedaan tersebut menciptakan kedamaian dan harmoni. Adapun nilai-nilai yang dimaksud sebagai berikut:

1. Nilai Pluralisme

Pluralisme dalam kosmopolitanisme merujuk pada pandangan dan sikap terbuka terhadap keberagaman masyarakat menghargai dan menerima perbedaan dalam kehidupan bersama. Pluralisme bukan hanya soal toleransi, juga mengenai individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diterima dalam masyarakat global. Kosmopolitanisme memandang dunia sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, nilai pluralisme dalam kosmopolitanisme bukan soal toleransi, menyangkut keberagaman sebagai kekayaan yang perlu dijaga dan dihargai. Pluralisme dalam kosmopolitanisme mengajarkan kita untuk memahami perbedaan bagian dari kehidupan yang harus diterima, bukan dihindari. Nilai-nilai pluralisme dapat diklasifikasikan dalam lima aspek berikut:

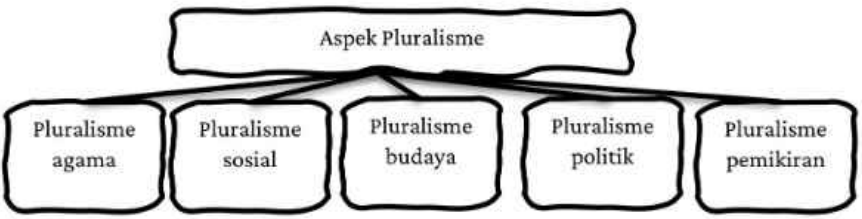

❖ **Pluralisme agama**

Salah satu aspek penting dalam pluralisme adalah penerimaan terhadap perbedaan agama. Agama bukan lagi menjadi alasan untuk memisahkan diri, tetapi bagian dari keragaman yang dihargai. Pemikiran Gus Dur, misalnya, sangat menekankan bahwa setiap agama memiliki kebenarannya sendiri, dan tidak ada satu agama pun yang bisa mengklaim sebagai yang paling benar di hadapan yang lain. Artinya semua agama harus dihormati, dan penganutnya harus diberi kebebasan menjalankan keyakinannya. Pluralisme agama mengajarkan pentingnya hidup berdampingan meski dengan perbedaan iman. Hal ini berarti menciptakan ruang bagi dialog antaragama yang produktif dan saling menguntungkan. Dialog antaragama sebagai upaya membangun pemahaman yang lebih baik antara umat beragama, menemukan titik temu dalam nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh umat manusia, seperti kasih sayang, kedamaian, dan keadilan.

Selain itu, pluralisme agama menyoroti bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar setiap individu yang tidak dapat diganggu gugat. Negara atau masyarakat yang menganut prinsip pluralisme harus menjamin kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi setiap kelompok agama berkembang sesuai dengan ajaran mereka. Hal ini sejalan dengan pendirian Gus Dur yang selalu mendukung kebebasan beragama dan melawan segala bentuk diskriminasi agama, baik secara individu maupun kolektif. Dalam UUD yang mengatur tentang kebebasan beragama seperti: Pasal 28E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945: (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Penegasan dalam UU lain: Misalnya, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa: Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara telah mendukung pluralisme ini, dan menjadi pijakan dasar bagi warga negara dalam bertindak. Setiap agama harus hidup dengan ruh-ruh spiritual masing-masing, jangan sampai keberadaan agama menjadi problem ini yang mesti disadari bersama. Perlu juga waspada jika pluralisme agama dibiarkan tanpa pemahaman, penguatan, dan pengelolaan yang tepat, maka dampaknya menjadi kontraproduktif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tanpa kerangka nilai yang kuat, pluralisme agama dapat disalahartikan sebagai relativisme yang mengaburkan identitas, atau bahkan sebagai ancaman terhadap kebenaran suatu agama tertentu, sehingga memicu sikap eksklusif dan intoleran. Ketiadaan ruang dialog antaragama yang sehat juga bisa menimbulkan prasangka, diskriminasi, dan konflik antarumat beragama. Dalam konteks negara, jika pluralisme agama tidak dijamin melalui kebijakan dan penegakan hukum yang adil, maka kelompok-kelompok minoritas bisa mengalami marginalisasi dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Akibatnya, semangat persatuan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi bangsa akan melemah. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk mengakui pluralisme agama, dan mengembangkannya dalam semangat penghargaan, keterbukaan, dan keadilan, sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pluralis seperti Gus Dur.

Pluralisme Sosial

Selain pluralisme agama, pluralisme sosial juga menjadi salah satu pilar penting. Pluralisme sosial mengacu pada penerimaan terhadap perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat, baik dalam hal kelas sosial, status ekonomi, jenis kelamin, maupun orientasi seksual. Dalam masyarakat kosmopolitan, perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dipandang negatif atau sebagai penghalang untuk bekerja sama, tetapi sebagai unsur yang memperkaya kehidupan sosial (Alwi Shihab, 1999:41).

Gambaran pluralisme sosial identik dengan simbol jantung melambangkan "pusat kehidupan dan kepedulain", sedangkan pohon melambangkan "struktur sosial yang kompleks". Maknanya "keberagaman sosial adalah seperti pohon yang kuat dan rindang, tetapi ia hanya akan hidup dan memberi naungan jika dihidupi oleh detak kasih sayang dan kepedulian sosial seperti jantung yang memberi kehidupan pada seluruh tubuh. Kalau nilai jantung berhenti,

pohon layu. Artinya, masyarakat tanpa kasih sayang dan empati akan kehilangan kehidupannya, begitu kira-kira logi simpelnya. Gus Dur sangat menekankan nilai pluralisme sosial ini dalam perjuangannya untuk kesetaraan dan keadilan. Bahwa setiap individu, berbagai latar belakang sosial, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial (Sajid Iqbal Firdaus, 2021:4). Oleh karena itu, setiap komunitas sosial tidak hanya peduli terhadap urusan masing-masing, namun juga mengusung nilai-nilai sosial yang adil dan merata bagi seluruh umat manusia.

Meskipun secara normatif pluralisme dijunjung tinggi, dalam praktiknya ia sering kali tidak diaplikasikan secara konsisten dan adil. Di berbagai wilayah, termasuk dalam konteks lokal seperti di Nusa Tenggara Barat, masih terjadi diskriminasi, stereotip, dan penghinaan terhadap kelompok masyarakat adat tertentu. Contoh konkret seperti yang terjadi tahun 2023, oknum masyarakat Dompu yang menghina suku Donggo dengan menyematkan label negative misalnya mengatakan bahwa "Donggo berarti orang gunung yang kasar dan keras" merupakan bentuk pelanggaran terhadap semangat pluralisme sosial itu sendiri. Pernyataan tersebut tidak hanya menggeneralisasi karakter suatu kelompok secara sepihak, tetapi juga menyentuh aspek identitas kultural dan harga diri kolektif dari masyarakat Donggo. Ketika identitas suatu kelompok dihina atau direduksi menjadi stigma, maka yang lahir bukan lagi dialog sosial, melainkan luka sosial dan bahkan potensi konflik horizontal.

Kejadian seperti ini menunjukkan pluralisme sosial bukan soal keberagaman semata yang diakui secara formal, tetapi bagaimana masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif menghargai dan merawat perbedaan. Tanpa kesadaran ini, pluralisme hanya akan menjadi jargon kosong makna. Dalam konteks masyarakat adat, penghinaan semacam itu tidak hanya menyakiti personal, juga mengancam warisan budaya, struktur sosial, dan prinsip hidup komunitas tersebut, yang justru selama ini

mengajarkan nilai-nilai kedamaian, harmoni dengan alam, serta penghargaan terhadap leluhur.

Lebih jauh, hal ini mencerminkan masih rendahnya literasi budaya dan empati sosial dalam masyarakat luas. Masyarakat cenderung menggunakan stereotip tanpa memahami sejarah, nilai, dan cara hidup suatu komunitas. Padahal, masyarakat adat seperti suku Donggo memiliki sistem nilai yang khas dan kaya, yang seharusnya dihormati sebagai bagian dari mozaik[5] kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, kritik ini perlu diarahkan pada kurangnya pendidikan multikultural dan ruang dialog lintas komunitas. Negara dan lembaga pendidikan harus lebih serius mengutamakan pendidikan toleransi, empati sosial, dan penghormatan terhadap komunitas adat. Selain itu, peran tokoh masyarakat, media, dan pemuda sangat penting mengoreksi narasi-narasi diskriminatif dan membangun jembatan pemahaman antarkelompok. Tanpa itu semua, maka semangat pluralisme sosial hanya akan menjadi idealisme kosong yang gagal menjawab realitas sosial penuh luka dan ketimpangan.

Pluralisme Budaya

Kosmopolitanisme juga menekankan pentingnya pluralisme budaya, yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada di dunia. Budaya tidak hanya mencakup bahasa, adat, seni, dan tradisi, mencakup juga cara pandang, norma, dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap kelompok. Pluralisme budaya mengajarkan kita untuk melihat perbedaan budaya sebagai kekayaan, bukan sebagai hal yang mengancam kesatuan atau identitas kita (Khomarudin Gilang Ramadhan dkk, 2022:43).

Gus Dur, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan. Keberagaman budaya ini harus dihargai, dan tidak boleh ada dominasi budaya satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dengan memahami dan menerima keberagaman budaya, kita dapat

[5] Secara harfiah Mozaik adalah karya seni yang dibuat dari potongan-potongan kecil seperti keramik, kaca, batu, atau bahan lain yang disusun membentuk gambar atau pola tertentu. Dalam istilah maknawi atau kiasan Mozaik digunakan untuk menggambarkan keragaman yang membentuk satu kesatuan indah. Dalam konteks sosial atau budaya, "mozaik" berarti berbagai unsur yang berbeda suku, agama, budaya, identitas yang bersatu membentuk masyarakat yang harmonis. https://id.wikipedia.org/wiki/Mosaik_budaya.

menciptakan masyarakat lebih inklusif dan harmonis. Gus Dur sering mengutip bahwa Islam di Indonesia bukanlah Islam yang kaku atau terpisah dari budaya lokal, tetapi Islam yang dapat beradaptasi dengan kebudayaan setempat. Pluralisme budaya juga berarti pengakuan terhadap hak setiap individu untuk mengungkapkan identitas budayanya tanpa takut dihina atau diabaikan. Hal ini bisa tercermin dalam penerimaan terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya, mulai dari seni, musik, pakaian, hingga makanan. Masyarakat yang kosmopolitan seharusnya dapat menghargai keberagaman ini dan menjadikannya sebagai bagian dari kekayaan yang dilestarikan.

Namun, dalam praktiknya, pluralisme budaya sering kali dihadapkan pada tantangan akulturasi dan inkulturasi. Budaya akan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, dan jika tidak disikapi dengan bijak, akar budaya yang khas dari suatu masyarakat bisa hilang begitu saja. Gambar tersebut membuka kesadaran kita, bahwa era digital ini, Masyarakat akan kehilangan kekhasan dari budayanya sendiri. Sebagai contoh, tradisi masyarakat Donggo seperti *ziki* pertunjukan musik rebana dan tarian laki-laki menjelang pernikahan mulai tergeser oleh hiburan modern seperti *orhen* yang meski praktis, sering memicu konflik antar pemuda. Padahal, *ziki* menciptakan suasana damai dan menyenangkan bagi masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Bima, di mana tradisi memakai sarung (*rimpu tembe*)[6] sebagai penutup aurat bagi perempuan

[6] Kata *rimpu* berasal dari bahasa Bima yang memiliki arti penutup kepala dengan sarung, sehingga *rimpu* memiliki arti sebagagai busana muslimah perempuan Bima yang menutupi kepala dan seluruh tubuh dengan menggunakan sarung khas Bima. *Rimpu* pertama kali dikenalkan sebagai pakaian perempuan muslimah di tanah Bima yaitu sejak abad XVII setelah masuknya islam yang ditandai dengan perubahan kerajaan menjadi kesultanan islam (M. Fachrir Rahman, 2009). Lebih lanjut Rahman mengatakan bahwa Ajaran Islam masuk di Bima pada 15 Rabiul awal 1050 H bertepatan dengan 5 Juli 1640 M. Pembawanya adalah dua ulama asal Sumatera (Dato ri Bandang dan Dato ri Tiro) yang diutus oleh pihak kesultanan Gowa untuk syiar Islam di daerah Bima (*Dou Mbojo*). Pada saat itu, hampir semua perempuan yang ada di wilayah Kesultanan Bima masih mengenakan pakaian warisan

semakin memudar akibat pengaruh *tren fesyen* modern, dan kini hanya dikenakan saat peringatan Hari Jadi Bima. Jika fenomena ini terus dibiarkan, maka dalam satu atau dua dekade ke depan, budaya-budaya lokal yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat dikhawatirkan budaya terancam punah, eksistensi budaya local terancam, budaya lama terseret oleh arus waktu dan kesenian akan jarang dimainkan

Menjaga budaya lokal tidak sekadar mempertahankan bentuk luarnya, tetapi juga merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upaya pelestarian harus melibatkan kesadaran kolektif dari masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, terutama dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan mempraktikkan budaya mereka sendiri. Pendidikan budaya sejak dini, festival kesenian lokal, serta revitalisasi tradisi-tradisi lama dapat menjadi langkah konkret menghidupkan kembali kearifan lokal yang mulai terpinggirkan. Jika generasi muda tidak lagi merasa memiliki budayanya sendiri, maka proses globalisasi mudah menggantikan identitas lokal dengan budaya instan yang belum tentu selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat. Pluralisme budaya yang sejati bukan ngerti keberagaman saja, lebih dari itu menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan bermakna dalam kehidupan modern.

Pluralisme Politik

Kosmopolitanisme juga mendorong pentingnya pluralisme politik, yaitu penerimaan terhadap berbagai ideologi dan sistem politik yang ada di dunia. Dalam dunia kosmopolitan, setiap negara harus memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik untuk berkembang. Ini berarti keberagaman politik harus dihargai, dan sistem politik yang ada harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat. Gus Dur sendiri adalah contoh nyata dari penerapan pluralisme politik, terutama dalam konteks Indonesia. Beliau selalu menghargai perbedaan pandangan politik dan mengutamakan dialog sebagai cara menyelesaikan perbedaan tersebut. Bahkan, Gus Dur sering terlibat dalam diskusi dengan berbagai kalangan yang berbeda pandangan

---

leluhurnya dengan kain penutup anggota tubuh seadanya, maka kedua ulama tersebut memperkanalkan kepada mereka cara berpakaian yang sesuai dengan tuntutan Islam. Sejak Islam diperkenalkan, sarung-sarung tradisional khas Bima mulai digunakan untuk menutup anggota tubuhnya dan dikenal dengan nama *rimpu* (Irfan Hidayat & Gozin Najah Rusyada, 2024:225).

politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pandangan Gus Dur, perbedaan politik adalah hal yang wajar dan harus dihormati, selama perbedaan itu dilakukan dalam kerangka yang konstruktif dan tidak merugikan orang lain (Zainal Fikri, 2013:11-16).

Pada era digital berbagai media menyoroti persoalan politik yang terjadi di negeri ini, contoh rivalitas antara PDIP dan Gerindra sebenarnya bukan hanya sekadar persaingan elektoral biasa, sudah menjadi semacam perebutan hegemonic siapa yang berhak menentukan arah bangsa, siapa yang berkuasa atas narasi nasional. Ketegangan ini kemudian diperparah dengan masuknya isu-isu identitas, populisme, serta manuver politik yang sering kali mengabaikan etika demokrasi. PDIP misalnya, dengan posisinya sebagai partai penguasa, mengalami konflik internal yang dipicu oleh perbedaan arah dukungan politik, seperti kasus pemecatan kader yang mendukung Prabowo. Di sisi lain, Gerindra justru memainkan narasi populis yang kuat dan mampu mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai arah, termasuk yang sebelumnya berseberangan secara ideologis.

Masyarakat pada akhirnya menjadi korban dari ketegangan elit ini. Mereka tidak mendapatkan pendidikan politik yang sehat, melainkan disuguhkan tontonan konflik, manuver, dan retorika menyesatkan. Banyak terombang-ambing karena orientasi politik tidak lagi berbasis pada ide atau gagasan, lebih mementingkan pada loyalitas sempit, fanatisme, bahkan politik transaksional. Kedaulatan rakyat idealnya menjadi fondasi demokrasi, hanya menjadi jargon saat kampanye, tetapi terpinggirkan dalam praktik. Yang paling miris dari semua ini adalah tergerusnya nilai pluralisme. Politik seharusnya menjadi ruang perjumpaan ide-ide, bukan ajang saling meniadakan. Namun ketika perbedaan politik direspons dengan pemecatan, pelabelan, dan pembungkaman, maka politik tidak lagi menjadi ekspresi demokrasi, tapi menjadi alat dominasi. Dalam konteks ini, pluralisme bukan lagi terkikis, namun perlahan dihapus oleh logika kekuasaan.

Jika terus dibiarkan, konflik antar elite seperti PDIP dan Gerindra bisa menciptakan ketidakstabilan sosial-politik yang lebih dalam. Kita butuh politik yang lebih dewasa mampu merangkul, bukan merebut. Dan yang paling penting, kita butuh masyarakat sipil yang kuat, bisa mengawal demokrasi agar tidak diseret ke arah otoritarianisme berkedok demokrasi. Pluralisme bukan berarti menghormati keragaman budaya, agama, atau etnis, mengakui dan

merespons keragaman kebutuhan serta realitas hidup Masyarakat terutama kelompok rentan seperti guru honorer, CPNS baru yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan negara. Ketika pemerintah menunda pengangkatan selama satu tahun, padahal mereka sudah dinyatakan lulus dan siap mengabdi, ini adalah bentuk pelecehan terhadap hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan ekonomi. Negara seperti kehilangan sensitivitas sosial terhadap realitas hidup rakyat. Guru, yang notabene menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, justru dibiarkan gantung secara ekonomi oleh keputusan politik yang kering empati (https://www.kompas.com/). Lebih parah lagi, di tengah keresahan itu, justru terjadi pemotongan anggaran di berbagai sektor publik, yang membuat pelayanan dasar semakin lemah. Ini menciptakan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Bagaimana bisa negara mendorong rakyat untuk mencintai bangsa, jika bangsa sendiri tidak hadir ketika mereka membutuhkan?

Dari perspektif pluralisme, kebijakan seperti ini sangat bertentangan. Pluralisme sejati menuntut negara untuk tidak hanya mendengar suara mayoritas, atau melayani elite dan sektor yang menguntungkan secara ekonomi, yang lebih substansial menjamin hak dan kesejahteraan kelompok-kelompok yang posisinya lemah secara politik dan sosial. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang mengakomodasi keragaman kebutuhan, bukan menyeragamkan penderitaan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa pluralisme kita sedang dikikis oleh logika kekuasaan yang pragmatis yang lebih sibuk mengatur strategi politik dan proyek-proyek besar, ketimbang memastikan keadilan ekonomi rakyat kecil. Dan ketika pluralisme mati di level kebijakan, maka tersisa hanyalah demokrasi prosedural yang hampa makna.

Pluralisme politik yang sehat hanya bisa hidup jika para aktor politik memiliki etika demokrasi, yaitu kesadaran bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, tapi alat mengakomodasi keberagaman dan menjembatani perbedaan. Tapi faktanya, banyak elit politik justru menjadikan pluralisme sebagai alat kosmetik, digunakan saat kampanye atau debat publik, lalu dilupakan saat mereka mulai membangun koalisi, menjalankan kekuasaan, atau menyerang oposisi. Mereka bicara soal kebersamaan, tapi memecah masyarakat demi kepentingan elektoral.

Ketika para aktor politik lebih sibuk bertarung untuk kekuasaan daripada memperjuangkan nilai, maka yang terjadi bukan pluralisme politik, tapi kompetisi destruktif yang menyuburkan kecurigaan, perpecahan, dan ketimpangan. Publik disuguhi drama politik, bukan solusi nyata. Bahkan lembaga-lembaga yang seharusnya netral seperti birokrasi, media, dan institusi hukum ikut terseret dalam logika pertarungan itu. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi sempit dan pluralisme tidak bisa tumbuh secara substansial. Jadi benar, kita tidak bisa bicara pluralisme kalau para elit justru menjadi sumber konflik. Implementasi pluralisme butuh syarat, keteladanan moral, konsistensi sikap, dan keberanian mendengar yang berbeda. Sayangnya, itu masih jadi barang langka di panggung politik kita.

Pluralisme Pemikiran

Pluralisme pemikiran ala Gus Dur adalah salah satu warisan intelektual dan spiritual sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Gus Dur, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, Presiden RI ke-4, dan budayawan, tidak hanya bicara pluralisme dalam konteks keberagaman agama dan budaya, terseret pula dalam ruang berpikir dan perbedaan cara pandang. Bagi Gus Dur, kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok, agama, atau aliran pemikiran tertentu. Ia sering menegaskan bahwa tidak ada satu tafsir yang absolut, dan perbedaan pendapat justru merupakan rahmat, sebagaimana dalam tradisi Islam dikenal istilah *ikhtilaf* (https://uingusdur.ac.id). Pluralisme pemikiran Gus Dur juga terlihat dalam kemampuannya menjembatani antara tradisi pesantren dengan pemikiran modern dan sekuler. Ia bisa berdiskusi tentang fiqih klasik sambil mengutip Karl Marx atau Michel Foucault. Baginya, keterbukaan terhadap berbagai sumber pengetahuan adalah wujud kecintaan terhadap ilmu. Gus Dur tidak melihat adanya pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara iman dan akal. Justru semua jalan pemikiran bisa saling menguatkan jika tujuannya adalah kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, Gus Dur sangat terbuka terhadap perbedaan pemikiran, bahkan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ia tidak pernah membalas caci maki dengan kemarahan, tapi dengan senyuman dan argumentasi yang bijak. Baginya, perbedaan adalah ruang belajar, bukan ruang saling

menghakimi. Setiap orang punya pengalaman hidup, latar belakang, dan pengetahuan yang membentuk cara berpikir mereka dan itu sah.

Gus Dur sangat mendukung pluralisme pemikiran, karena manusia tidak bisa tumbuh tanpa keberagaman cara berpikir. Namun, Gus Dur juga menekankan kebebasan berpikir harus dibarengi dengan kedewasaan intelektual dan tanggung jawab etis. Tanpa itu, pluralisme bisa berubah menjadi relativisme liar di mana semua orang merasa bebas mengklaim kebenaran tanpa dasar yang kuat. Di era digital, kita hidup dalam banjir informasi. Generasi muda bisa membaca pemikiran siapa saja dari Gus Dur sampai Mustafa Kemal Atatürk, tokoh modernis-sekuler dari Turki yang sangat kontroversial. Singkatnya, Atatürk ingin memisahkan agama sepenuhnya dari negara, menghapus kekhalifahan Utsmaniyah, mengganti hukum Islam dengan hukum sipil ala Barat, bahkan melarang simbol-simbol agama di ruang public (Ahmad Dhiyaul Haq dkk, 2023:23).

Bagi sebagian, Atatürk adalah simbol modernisasi dan pembebasan dari keterbelakangan. Tapi bagi yang lain, ia adalah figur yang mengikis spiritualitas dan memutus akar tradisi. Nah, ketika pemikiran seperti ini dikonsumsi tanpa kerangka berpikir kritis, maka yang muncul adalah klaim-klaim kebenaran setengah matang yang kemudian bisa menimbulkan disorientasi bahkan konflik ideologis. Contoh lain dalam Sejarah, ketika sejarah ditulis dengan motif ideologis bukan berdasarkan data dan kejujuran intelektual hasilnya adalah sejarah versi kekuasaan, bukan kebenaran ilmiah. Jika generasi muda hanya mengenal versi sejarah yang dipelintir, maka kontradiksi keilmuan akan muncul, dan lebih buruk lagi, bisa melahirkan generasi yang terputus dari akar sejarahnya sendiri. Ini bukan sekadar soal akademis, tapi bisa berdampak pada identitas dan kesadaran kolektif bangsa.

Uraian di atas memang mengangkat semangat pluralisme pemikiran, namun jika tidak dibarengi dengan kerangka nilai dan etika berpikir yang kuat, pluralisme bisa melenceng dari makna dasarnya sebagai ruang saling menghargai dan pencarian kebenaran bersama. Dalam konteks Islam, pluralisme pemikiran memang diakui sebagai rahmat, selama perbedaan itu berakar pada metodologi yang sahih dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama. Misalnya, dalam penafsiran Al-Qur'an, tidak semua orang boleh menafsirkan secara bebas tanpa ilmu yang memadai seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqh, dan konteks sosial-

historis. Di sinilah letaknya batasan pluralisme dalam Islam, kebebasan berpikir tetap berada dalam koridor keilmuan dan adab ilmiah. Gus Dur, meskipun sering disebut sebagai pemikir liberal, sejatinya tetap berpijak pada tradisi pesantren dan ilmu keIslaman klasik, hanya saja pendekatannya lebih terbuka terhadap realitas sosial dan nilai-nilai universal. Kritik terhadap Gus Dur sering muncul bukan karena ia melanggar prinsip Islam, tapi karena ia menabrak tembok konservatisme yang menutup ruang dialog. Maka, pluralisme pemikiran dalam Islam bukan ruang bebas tanpa batas, tapi medan dinamis di mana kebenaran dicari lewat disiplin ilmu, adab, dan penghargaan terhadap otoritas yang sah.

2. Nilai-Nilai Toleransi

Toleransi dalam kosmopolitanisme mengacu pada sikap menerima, menghormati, dan memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok dengan latar belakang, pandangan, atau keyakinan yang berbeda. Dalam perspektif kosmopolitan, toleransi bukan bersifat pasif, tapi penerimaan aktif terhadap keberagaman yang ada di dunia ini. Toleransi mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari keberagaman yang perlu dimengerti dan dipertahankan.

Kosmopolitanisme melihat toleransi sebagai landasan menciptakan dunia yang damai dan adil. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, tantangan terbesar bukan lagi perbedaan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan harmonis meskipun memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, toleransi bukan hanya soal tidak mengganggu atau menyakiti orang lain yang berbeda, lebih dari itu menciptakan ruang di mana perbedaan tersebut dihargai dan dihormati. Nilai toleransi yang perlu diperhatikan dan mesti diimplementasikan dengan baik sebagai berikut:

Toleransi Antar agama

Toleransi antaragama adalah salah satu bentuk penerapan nilai toleransi dalam kosmopolitanisme. Dalam konteks kosmopolitan, setiap agama diakui memiliki nilai dan ajaran yang substansial, dan penganut agama yang berbeda berhak hidup sesuai dengan ajaran mereka. Kosmopolitanisme mengajarkan bahwa meskipun umat manusia memiliki perbedaan dalam keyakinan agama, setiap agama tetap memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui keberadaannya.

Kosmopolitanisme menekankan pentingnya dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman, membangun jembatan komunikasi, dan memperkuat rasa saling menghormati. Dialog antaragama ini tidak bertujuan untuk mencari titik temu dalam pemahaman dan memperkaya pemahaman tentang agama lain. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, umat beragama dapat belajar melihat perbedaan sebagai peluang untuk saling menghargai, bukan sebagai sumber konflik (Ridho Siregar dkk, 2022:1344). Penting untuk dicatat bahwa toleransi antaragama dalam kosmopolitanisme tidak berarti mengharuskan semua orang untuk setuju dengan keyakinan agama yang berbeda, tetapi lebih pada sikap saling menghormati dan menghargai. Dalam dunia kosmopolitan, tidak ada tempat untuk ekstremisme agama atau fanatisme yang mengarah pada kekerasan. Sebaliknya, nilai-nilai toleransi mengajak umat manusia untuk menciptakan dunia di mana perbedaan agama dapat hidup berdampingan dalam kedamaian.

Kita perlu toleransi antaragama karena tanpa itu, keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia justru berubah menjadi sumber konflik yang merusak. Toleransi bukan berarti mencampuradukkan ajaran, tetapi menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa gangguan, intimidasi, atau diskriminasi. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dengan enam agama resmi dan berbagai kepercayaan local, toleransi menjadi fondasi utama dalam perdamaian, adil, dan harmonis. Toleransi juga penting karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebencian, dan semua agama pada dasarnya menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Ketika kita mampu memahami perbedaan sebagai bagian dari kehendak Tuhan seperti yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat:13 "*Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal*" maka perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan ancaman.

Toleransi tidak cukup diletakkan pada level simbolik atau wacana damai permukaan, harus ditopang oleh kesadaran struktural dan politik yang lebih dalam. Memang benar bahwa di banyak ruang publik kita sering melihat masyarakat tampak "rukun" namun di balik itu, ada dinamika bawah tanah atau "gerakan goib", yang menyusup lewat berbagai bentuk provokasi, infiltrasi ideologi, bahkan manipulasi emosi identitas agama demi kepentingan politik atau kekuasaan. Fenomena ini bisa dilihat dalam konflik internal umat Islam seperti ketegangan antara kelompok konservatif dan moderat yang sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperkeruh suasana. Ironisnya, solidaritas atas nama agama terkadang dijadikan alat mengintervensi konflik internal agama lain, alih-alih menjaga batas-batas etika pluralisme. Di sinilah toleransi diuji bukan soal bisa hidup berdampingan saja, mampu menahan diri untuk tidak mencampuri konflik internal agama lain demi agenda tertentu itu juga toleran.

Kalau kita Tarik ke masa lalu, Sejarah mencatan Christiaan Snouck Hurgronje adalah seorang orientalis dan penasihat pemerintah kolonial Belanda. Ia lahir di Belanda pada tahun 1857 dan dikenal sebagai tokoh penting dalam studi Islam di Hindia Belanda (Indonesia). Ia sangat fasih dalam bahasa Arab dan sangat mendalami kebudayaan serta agama Islam. Snouck Hurgronje menyamar sebagai seorang Muslim dengan nama Syekh Abdul Gafur saat berada di Mekkah tahun 1884-1885 untuk mempelajari Islam dari dalam. Ia menyembunyikan identitasnya sebagai seorang non-Muslim dan

mengaku sebagai muallaf agar bisa tinggal dan melakukan observasi di pusat dunia Islam, yang saat itu tertutup bagi non-Muslim (Dita Hendriani, 2020).

Setelah kembali dari Mekkah, Snouck dipekerjakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan diangkat sebagai penasehat urusan pribumi dan Islam. Ia kemudian tinggal di Indonesia (terutama di Jawa dan Aceh), dan misi utamanya adalah mempelajari Islam secara mendalam untuk mengetahui bagaimana Belanda bisa mengontrol umat Islam tanpa menciptakan perlawanan besar-besaran. Secara khusus, misinya antara lain: (1) Memecah kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman politik terhadap kolonialisme. (2) Membedakan antara aspek keagamaan dan aspek politik dalam Islam, lalu menyarankan kepada Belanda agar menindak keras gerakan politik Islam, tapi tetap membiarkan kegiatan keagamaan biasa. (3) Menanamkan strategi kolonial untuk "mendamaikan" ulama lokal agar tak melawan pemerintah colonial (Humar Sidik, 2020).

Snouck Hurgronje adalah contoh klasik infiltrasi intelektual dan budaya dalam konteks kolonialisme. Ia tidak datang untuk menyebarkan Islam, melainkan mengendalikan umat Islam dari dalam, melalui pendekatan antropologis dan sosial-politik. Ia adalah wujud dari kolonialisme pengetahuan (*colonial knowledge*), di mana pemahaman terhadap budaya lokal digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan asing. Ini yang dinamakan "intel agama" meskipun tidak formal, sangat kuat secara makna dan menggambarkan kekhawatiran terhadap infiltrasi terselubung dalam praktik-praktik keagamaan dan sosial. Istilah ini cocok untuk menyebut aktor-aktor (baik individu maupun institusi) yang menggunakan topeng agama, toleransi, atau kerukunan sebagai cara menyusup, mengontrol, bahkan memecah belah masyarakat dari dalam.

Secara kontekstual "Intel Agama" dalam Toleransi, jika kita merujuk pada pengalaman kolonial seperti kasus Snouck Hurgronje, maka kita bisa melihat bahwa upaya mempelajari agama bukanlah untuk menyuburkan nilai-nilainya, tetapi untuk mengendalikan dan menetralisir potensi perlawanan. Dalam konteks sekarang, bentuknya bisa bermacam-macam, Lembaga yang tampak netral atau damai, namun diam-diam menyebarkan narasi yang menyingkirkan satu golongan. Narasi toleransi yang dipolitisasi, digunakan membungkam kritik atau memihak kelompok dominan secara halus. Penyusupan ideologi lewat pendidikan atau media, dengan

menyajikan pandangan yang tampaknya inklusif tapi menggerus nilai-nilai lokal dan spiritualitas yang otentik.

Bahaya dari "Intel Agama" dalam ruang toleransi, akan menjadi alat kuasa, bukan ruang dialog sejati. Identitas agama disusupi agenda tertentu, yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat terbelah secara halus, karena konflik tidak selalu kasatmata ia bergerak di level pemikiran, media, dan opini publik. Pluralisme jadi semu, karena yang tampak seperti perbedaan yang diterima, sejatinya adalah normalisasi terhadap satu narasi dominan. Kekhawatiran soal toleransi yang ditunggangi oleh infiltrasi adalah sangat sah dan penting untuk dibahas secara terbuka dan kritis. Justru dalam masyarakat demokratis dan pluralistik, kita harus waspada terhadap toleransi yang bersifat manipulatif, hanya melanggengkan dominasi kelompok tertentu dan mereduksi agama menjadi alat politik.

Toleransi dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

Toleransi juga mencakup penghargaan terhadap perbedaan budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita dihadapkan pada masyarakat yang sangat beragam. Toleransi dalam budaya adalah kekayaan yang perlu dirawat dan dihormati. Setiap budaya memiliki cara pandang dan nilai-nilai yang berbeda, dan kita perlu belajar menerima serta menghargai keberagaman ini. Toleransi melibatkan pemahaman aktif tentang mengapa suatu budaya memiliki tradisi dan nilai-nilai tertentu. Hal ini mengajarkan pentingnya menghormati keunikan setiap kelompok budaya, serta kontribusinya dalam memperkaya kehidupan sosial bersama. Demikian, kehidupan sosial yang toleran menciptakan ruang bagi setiap kelompok budaya berkembang dan berbagi tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penindasan (Dewita Anugrah Nurhayati, 2023:96-97).

Toleransi budaya dalam kosmopolitanisme juga berarti membuka diri terhadap pengaruh budaya lain yang datang dari luar. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang multikultural, kita bisa melihat bagaimana berbagai budaya saling mempengaruhi dan beradaptasi. Toleransi ini membuka peluang bagi integrasi budaya, yang bukan hanya memperkaya kehidupan sosial, juga meningkatkan solidaritas antar masyarakat berbeda. Oleh karena itu, dalam perspektif kosmopolitan, penghargaan terhadap perbedaan budaya adalah kunci membangun masyarakat inklusif dan harmonis

(Muhammad Zusanri Batubara, 2023:174). Toleransi itu penting, tapi bukan berarti tanpa batas. Toleransi yang terlalu longgar tanpa kerangka nilai dan moral yang jelas justru bisa menjadi bumerang merusak tatanan sosial dan identitas suatu masyarakat. Maka, batas toleransi sosial dan budaya seharusnya berada pada titik-titik berikut:

- Toleransi tidak boleh membiarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan atau konstitusi dilanggar. Misalnya, tidak bisa mentolerir praktik budaya yang melanggar hak asasi manusia (seperti kekerasan atas nama adat). Tidak bisa mentolerir budaya yang mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti perempuan, suku minoritas, atau difabel. Tidak bisa membiarkan kebebasan budaya digunakan untuk menyebarkan kebencian atau kekerasan.
- Toleransi bukan berarti mengorbankan identitas lokal demi akomodasi budaya asing atau dominan. Contohnya, mengganti semua bentuk kesenian lokal dengan budaya pop global demi dianggap modern. Menghapus simbol-simbol adat karena dianggap tidak "universal".
- Toleransi juga tidak boleh dijadikan celah untuk menyusupkan ideologi yang ingin merusak keharmonisan masyarakat. Misalnya, kelompok yang memanfaatkan narasi toleransi untuk mengaburkan batas antara kebebasan dan provokasi. Narasi lintas budaya yang diam-diam menghapus akar nilai tradisional atau agama masyarakat.

Jadi, toleransi dibatasi oleh nilai moral, konstitusi, kemanusiaan, dan keseimbangan antara menerima perbedaan dan menjaga identitas. Ketika toleransi mengancam prinsip-prinsip ini, maka ia tidak lagi menjadi kebajikan, justru menjadi bentuk penindasan halus (*soft oppression*). Papua sering dikatakan sebagai wilayah yang "berbeda tapi tetap dalam bingkai NKRI." Namun dalam praktiknya, budaya lokal Papua sering terpinggirkan. Contohnya, modernisasi paksa atas nama pembangunan, seperti tambang *Freeport* atau pemindahan warga ke kota, membuat masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Masuknya pendatang dari luar Papua membawa budaya dominan yang kemudian menggeser nilai, bahasa, bahkan mata pencaharian lokal. Sistem pendidikan nasional kurang memberi ruang terhadap bahasa dan nilai lokal Papua. Anak-anak Papua dipaksa belajar dengan struktur budaya luar yang tidak akrab bagi mereka. Di sini, toleransi budaya seharusnya berarti pengakuan

dan pemberdayaan nilai-nilai lokal, bukan sekadar membiarkan mereka "hidup seadanya."

Kemudian di masyarakat Dayak dan komunitas adat Kalimantan punya kearifan yang sangat kaya, hidup selaras dengan alam, punya hukum adat kuat, dan spiritualitas yang dalam. Tapi, Perusahaan tambang dan sawit sering masuk tanpa mengindahkan hukum adat atau persetujuan masyarakat lokal. Budaya lokal digantikan dengan logika industri dan konsumerisme, yang tidak ramah terhadap nilai-nilai gotong royong dan spiritual. Toleransi hanya dalam bentuk "festivalisasi" budaya Dayak, seperti pameran seni atau tari, tapi tidak menyentuh substansi perlindungan hak dan tanah adat. Toleransi harus naik level dari "simbolik" ke "struktural" memberi ruang bagi masyarakat adat menentukan nasibnya sendiri. Toleransi budaya modern di Indonesia menghadapi tantangan nyata. Bukan hanya soal menghargai "perbedaan", tapi soal keadilan budaya dan kedaulatan komunitas lokal. Jangan sampai toleransi hanya menjadi "pemanis bibir" tanpa menyentuh akar persoalan struktural seperti tanah, ekonomi, pendidikan, dan politik representasi.

Adaptasi terhadap perubahan zaman adalah keniscayaan, dan bahkan menjadi tanda bahwa suatu budaya itu *hidup*, bukan mati. Kita bisa menganalogikan ini seperti pohon besar, ranting dan daunnya bisa terus tumbuh dan berubah, tapi akarnya tidak boleh dicabut. Adaptasi Bukan Berarti Melepaskan Identitas, dalam banyak kasus, yang jadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tapi bagaimana perubahan itu dilakukan; (1) Kalau perubahan dilakukan dengan melupakan atau menghapus nilai lokal, maka akan lahir alienasi budaya generasi muda tidak lagi merasa terhubung dengan tanah, leluhur, atau komunitasnya. (2) Tapi kalau perubahan dilakukan secara reflektif dan selektif, maka kita bisa menciptakan keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal. Contoh, musik tradisional bisa dikombinasikan dengan instrumen modern tapi makna simboliknya tetap dijaga. Contoh lain, Upacara adat bisa ditampilkan di media sosial tapi tetap dengan penghayatan spiritual dan penghormatan terhadap leluhur.

Toleransi dalam kehidupan sosial dan budaya bukan sesuatu yang baru ada, masyarakat indonesia sejak lama telah mendirikan bangunan toleransi. Prinsip ini dapat disebut "prinsip klasik" yang

terus mekar sampai hari ini. Contoh konkret, tardisi "*raju*"[7] di masyarakat mbawa adalah potret emas dari toleransi otentik berbasis kearifan lokal. Ini bukan sekadar "toleransi formal" seperti yang sering dikampanyekan oleh negara, tapi toleransi yang hidup di nadi masyarakat, ditanamkan secara turun-temurun, dan dijaga oleh rasa hormat, kekeluargaan, serta identitas komunal yang kuat. Masyarakat Mbawa yang beragama katolik, mereka biasanya di bulan agustus mengadakan upacara adat dikenal tradisi "*raju*". Dalam acara ini minimal tiga hal yang menjadi teropong kita Bersama dalam bingkai toleransi sosial dan budaya:

- Partisipasi bukan konversi. Umat Islam hadir dalam acara "*Raju*" bukan sebagai dukungan religius, tapi partisipasi sosial dan penghormatan budaya. Ini bentuk toleransi yang dewasa, tidak merasa terancam oleh perbedaan. Tidak memaksakan identitas sendiri pada ruang orang lain. Tapi tetap hadir sebagai bagian dari komunitas.

[7] Hari raju merupakan salah satu tradisi masyarakat Mbawa yang diadakan sekali dalam setahun dalam sistim pertanian yang masih di pertahankan samapai sekarang oleh masyarakat Mbawa sebagai warisan budaya dari generasi kegenerasi yang mampu menghadapai tantang dunia pertanian. Pada hari raju dilakukan berbagai rangkaian acara perayaan. Yang di mulai dari musyawarah besar para ketua klan atau yang disebut *Ndo"i* untuk menentukan hari Raju. Perayaan Hari Raju biasanya dilakukan pada bulan Oktober atau sebelum masa tanam selama 7 hari. Ada 12 Klan atau *Ndo"i* dalam masyarakat Donggo. Di antaranya adalah *Ndo"I Tuta Rasa, Lanco ini, Ntifa Siwe dan Mone, Paha Woha, Soro Jara, Puta Nawa, Paninta, Roho, Karia Dewa, Lua Lembo* dan *Keto Rasa*. Biasanya para anggota Klan ini akan datang pada hari Raju untuk menghormati nenek moyang dan melakukan persembahan meskipun mereka telah hidup beranak pinak diluar daerah Bima. Setiap Klan dipimpin oleh seseorang yang dipercaya memiliki *Rafu* atau Shakti tertentu. *Rafu winte*, misalnya dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Sedangkan *rafu Ngguli* kebal terhadap berbagai senjata tajam. Waktu dan tempat pelaksanaan Pada hari pertama perayaan biasanya dilakukan upacara persembahan ke tempat tempat yang disucikan oleh masing-masing klan menurut Tottem-nya. Setiap *Ndo"i* memiliki tempat yang dianggap suci atau keramat. Jumlahnya ada 12 sesuai dengan jumlah *Ndo"I* dan berada di sekitar desa Mbawa. Klan *Ndo"I Soro Jara* misalnya, harus melakukan persembahan dengan memotong seekor kuda. Sebagaian dari persembahan tersebut diletakkan di tempat keramat tersebut dan sebagian lagi dibagikan kepada warga. Jika hal tersebut dilanggar atau tidak dilakukan, maka salah satu anggota keluarga akan terkena "*tulah*" atau kutukan seperti penyakit dan kesialan lainnya. Pada saat hari raju juga di lakukan berburu Binatang seperti, rusa, ayam hutan, babi, dalam perburuan umat islam maupu umat katolik dan protestan, ikut serta (Nurhasanah, 2017:87).

- Toleransi berbasis kekerabatan. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa perbedaan agama tidak meniadakan hubungan darah dan sejarah bersama. Justru, nilai kekeluargaan melampaui batas-batas doktrin agama, tanpa harus mencampuradukkan keyakinan. Ini sangat penting, karena dalam banyak konflik horizontal di Indonesia, yang rusak pertama kali adalah jaringan sosial antarwarga. Di Mbawa, jaringan itu justru jadi pengikat dan penenang.
- Warisan kultural dan spiritual tetap terjaga. Meskipun sebagian masyarakat telah berpindah keyakinan, nilai adat dan ritual tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Di sini terlihat bahwa Islam dan adat tidak bertabrakan, karena tidak saling mendominasi. Justru saling berdialog dan beradaptasi tanpa memaksakan superioritas.

Mbawa adalah praktik tolernasi sosial dan budaya yang sehat dan matang, karena Agama tidak menjadi alat pemisah, tapi justru hidup berdampingan dalam realitas sosial. Budaya lokal menjadi jembatan persatuan, bukan sumber konflik. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, karena nilai penghargaan terhadap sesama menjadi fondasi utama. Kalau semua wilayah di Indonesia bisa mengembangkan model seperti ini yaitu berakar pada kearifan lokal, menjunjung nilai kekeluargaan, dan memiliki etos saling menghormati tanpa mengorbankan identitas maka kita tidak hanya bicara tentang "toleransi", tapi sedang membangun peradaban yang tahan terhadap provokasi, polarisasi, dan kekacauan sosial.

Pada satu kondisi toleransi sosial dan budaya yang terkadang salah diterjemahkan oleh kalangan anak-anak muda terutama seperti, fenomena meningkatnya keberadaan dan penerimaan terhadap LGBT di kalangan remaja, khususnya di wilayah seperti Bima yang memiliki falsafah luhur "*maja labo dahu*[8]" (malu dan

[8] *Maja Labo Dahu* secara bahasa adalah ucapan bima (Nggahi Mbojo) yakni asal kata *Maja*, yang artinya *malu*; *Labo*, yang artinya *dan*, serta *Dahu*, yang berarti takut. Sementara secara harfiah dapat diartikan sebagai Rasa Malu dan Takut kepada Allah SWT. Sehingga dapat diartikan sikap diri yang dijadikan pegangan dan fondasi dalam bersikap, berpikir serta bertindak, dimana harus memiliki rasa malu dan takun yang selalu ditanamkan dalam hati yang didasarkan pada nilai-nilai ke-Islaman. *Maja labo dahu* merupakan filosofi masyarakat bima pada masa kesultanan bima. Filosofi ini tersusun rapi dan terjaga sampai saat ini. Sehingga diwarisi dari turun temurun walaupun di era globalisasi mempengaruhi filosofi tersebut. Filosofi

takut), memang menjadi tantangan besar dalam konteks toleransi sosial budaya. Falsafah ini tidak sekadar slogan, tetapi merupakan pedoman hidup masyarakat yang menjunjung tinggi etika, kehormatan, dan moralitas sosial. Ketika nilai ini mulai terkikis oleh tren global yang masuk tanpa filter seperti normalisasi LGBT melalui media sosial dan gaya hidup modern terjadi benturan antara identitas budaya lokal dengan arus globalisasi yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai adat.

Satu sisi, prinsip toleransi menuntut untuk tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk komunitas LGBT. Namun, di sisi lain, toleransi tidak berarti membenarkan setiap perilaku, apalagi jika hal itu bertentangan secara esensial dengan jati diri budaya dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk membedakan antara menghargai keberadaan seseorang dan menyetujui pilihan hidupnya. Ketika masyarakat mulai menganggap semua hal "boleh atas nama kebebasan", di situlah batasan nilai-nilai luhur seperti "*maja labo dahu*" mulai digerus dan remaja kehilangan pegangan etis dalam berperilaku. Tugas kita bukan sekadar menolak atau menerima, tetapi mendidik generasi muda dengan pendekatan kebudayaan, keagamaan, dan akhlak, agar mereka memahami jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur. Dialog terbuka, bukan kebencian, edukasi berbasis kearifan lokal, bukan caci maki, dan kebijakan publik yang berpihak pada ketahanan budaya, bukan tunduk pada arus liberalisasi nilai itulah jalan tengah yang perlu ditempuh agar toleransi tidak menjadi senjata meruntuhkan akar moral dan budaya bangsa.

Pemahaman terhadap makna toleransi di kalangan remaja saat ini. Ketika seseorang memaksakan kehendak atau menganggap bahwa orang lain harus ikut dalam sebuah kebiasaan yang sebenarnya tidak baik seperti minum minuman keras atas nama "penghargaan" atau "solidaritas", maka itu bukan lagi toleransi, tetapi bentuk pemaksaan terselubung yang merusak nilai-nilai sosial

---

maja labo dahu tidak hanya ide (gagasan) akan tetapi sebagai *way of life* sekaligus menjadi semangat hidup masyarakat bima yang bersumber dari nilai dasar keIslaman yang dianggap sebagai seperangkat adab yang berlandaskan Pendidikan Islam yang dapat mengontrol sikap dan perilaku disetiap aktivitas kehidupan masyarakat bima. Bagi masyarakat bima, *maja labo dahu* bernilai petuah yang berlaku harafiah serta selalu ditanamkan dan dilontarkan setiap orang tua ketika mendidik dan menasehati (*ngoa ra tei*) seorang anak (abd. Salam, 2022:99-100).

dan moral. Kebiasaan seperti ini menciptakan tekanan sosial (*social pressure*) yang sangat kuat, terutama bagi remaja yang masih dalam fase pencarian jati diri dan sangat mudah terpengaruh lingkungan. Ironisnya, mereka justru ingin menjaga prinsip hidup, moralitas (Renaldi Faturachman, 2022:4), atau bahkan ajaran agama dianggap sebagai pihak yang "tidak menghargai pertemanan". Ini adalah bentuk distorsi nilai toleransi, di mana perbedaan pandangan tidak dihargai, justru yang salah dianggap benar dan dipaksakan menjadi norma sosial.

Penting sekali membangun kesadaran kritis di kalangan remaja, bahwa menghargai orang lain bukan berarti harus ikut dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Toleransi sejati justru kemampuan menerima perbedaan tanpa harus menyerahkan prinsip atau keyakinan. Kita harus mulai membalik cara pandang, orang yang bisa berkata "tidak" pada hal buruk seharusnya dihormati, bukan dijauhi. Maka, pendidikan karakter berbasis nilai lokal, agama, dan etika sosial menjadi sangat mendesak mengembalikan arah toleransi ke jalan yang sehat dan membangun.

Toleransi antar Politik

Toleransi politik adalah nilai penting lain dalam kosmopolitanisme. Dalam konteks ini, toleransi politik mengajarkan bahwa berbagai pandangan politik, ideologi, dan sistem pemerintahan yang ada di dunia ini harus dihargai dan dihormati. Kosmopolitanisme tidak menganggap bahwa ada satu pandangan politik yang lebih unggul dari yang lain, melainkan menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan hak untuk memilih dalam sistem politik (Sukron Romadhon, 2022:1). Toleransi politik juga berkaitan dengan penghargaan terhadap hak setiap individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses politik. Dalam masyarakat kosmopolitan, setiap orang memiliki hak mengemukakan pendapat politiknya, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan membentuk aliansi politik tanpa takut akan penganiayaan atau penindasan. Hal ini memberikan ruang bagi kebebasan politik, yang memungkinkan terciptanya demokrasi yang sehat dan dinamis.

Kosmopolitanisme juga mengajarkan bahwa toleransi politik tidak berarti kita harus sepakat dengan pandangan politik orang lain, tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa perbedaan politik adalah bagian dari dinamika sosial (Syahrir Ibnu, 2024:656). Dengan demikian, toleransi politik mendorong kita mendekati perbedaan

dengan sikap terbuka dan saling menghargai, tanpa menghalangi orang lain mengekspresikan pandangannya secara bebas. Kalau kita lihat secara menyeluruh, politik Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang rapuh secara moral dan etika, karena toleransi antar kekuatan politik tidak dibarengi dengan kesadaran berbangsa. Banyak aktor politik yang lebih fokus pada kuasa, bukan pada rakyat. politik Indonesia hari ini makin jauh dari etika dan kebijaksanaan, terutama jika kita melihat praktiknya di akar rumput. Dalam filsafat politik yang ideal, politik seharusnya menjadi ruang dialog, musyawarah, dan pencarian kebaikan bersama, bukan arena pertempuran siapa yang paling kuat atau paling kejam. Falsafah dalam perang "siapa yang kuat dia berkuasa" falsafah semacam ini lahir dari politik kekuasaan, bukan politik kebangsaan. Jika dibiarkan, ini akan menghasilkan polarisasi tajam antar warga. Hilangnya orientasi pada kesejahteraan rakyat. Tumbuhnya budaya kultus individu atau tokoh, bukan ide.

Padahal, seharusnya politik berbasis nilai dan program, bukan berbasis dendam dan loyalitas buta. Konflik elit seringkali tidak terlihat langsung, tapi getarannya terasa keras di tingkat bawah. Saat tokoh politik saling sindir dan fitnah, pendukung di bawah bisa saling caci, bahkan bunuh-bunuhan. Contoh Pilkada Bima 2024 sangat nyata, kata-kata kasar, fitnah di media sosial, hingga potensi konflik fisik, semua itu mencederai nilai pluralisme politik. Dulu, tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Buya Hamka, Hatta, membangun narasi politik dengan kebajikan dan adab. Tapi sekarang, yang muncul justru politik transaksional, populisme kosong, dan perebutan kuasa.

Toleransi politik hilang, karena rasa malu dan takut (seperti filosofi "*maja labo dahu*") tidak lagi ditanamkan dalam dunia politik. Tidak ada pembelajaran politik yang sehat sejak dini. Media sosial memperparah kebencian melalui disinformasi dan ujaran kebencian. Politik seharusnya memuliakan perbedaan, bukan menyingkirkan yang berbeda. Kalau perbedaan pandangan jadi alasan membenci, maka yang gagal bukan hanya politisinya, tapi juga sistem pendidikannya, budaya sosialnya, dan media yang tak bertanggung jawab. Akar dari semua kegaduhan politik di masyarakat bawah sesungguhnya adalah nihilnya kesadaran akan toleransi. Toleransi bukan hanya urusan antaragama atau antaretnis tapi juga menyangkut perbedaan pilihan politik, cara berpikir, bahkan cara hidup. Ketika masyarakat tidak dibekali dengan pemahaman bahwa perbedaan adalah hal yang normal dalam demokrasi, maka yang

muncul adalah fanatisme yang membabi buta. Toleransi politik belum menjadi budaya, banyak masyarakat masih menganggap lawan politik sebagai musuh pribadi, bukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Padahal dalam sistem yang sehat, persaingan ide itu justru memperkaya gagasan untuk kemajuan.

Minim Literasi Demokrasi, masyarakat kita lebih cepat menyerap propaganda daripada memahami visi-misi. Mereka mudah tersulut oleh hoaks, fitnah, dan provokasi apalagi jika dibumbui sentimen agama atau kesukuan. Ketiadaan Teladan dari Elite Politik, para tokoh politik sering memberi contoh buruk, saling serang, adu narasi kebencian, bahkan menjadikan rakyat sebagai alat mobilisasi massa, bukan subjek pembangunan. Maka wajar jika di bawah, warganya saling hujat dan bermusuhan. Budaya Lokal yang Mulai Luntur, filosofi-filosofi luhur seperti "*maja labo dahu*" di Bima, "basudara" di Maluku, atau "gotong royong" di Jawa, semua itu semakin tersingkir oleh politik transaksional dan identitas. Akhirnya, masyarakat lebih mudah terprovokasi karena nilai luhur itu tidak lagi menjadi penahan emosi. Toleransi seharusnya menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dari pendidikan, budaya, dan teladan. Tanpa itu, masyarakat akan terus menjadi korban dalam pertarungan politik elite. Maka perlu ada revitalisasi nilai-nilai lokal, penguatan literasi politik di sekolah dan komunitas, serta peran aktif ormas dan tokoh agama dalam membangun narasi damai.

Nabi Muhammad SAW menjadi contoh agung bagaimana gerakan politik dapat dibangun di atas fondasi toleransi dan kesepahaman lintas identitas. Saat hijrah dari Mekkah ke Yatsrib (yang kemudian dikenal sebagai Madinah), Nabi mendapati kota tersebut dihuni oleh beragam suku dan komunitas, seperti Kaum Anshar, Muhajirin, Bani Quraizhah, Bani Nadhir, serta komunitas Yahudi lainnya. Jika kita analogikan secara modern, masing-masing kelompok ini bisa disamakan dengan entitas politik atau "partai-partai" yang memiliki kepentingan, ideologi, dan latar belakang berbeda. Namun, alih-alih membangun kekuasaan secara otoriter, Nabi justru menginisiasi dialog dan musyawarah antar kelompok tersebut. Hasil dari proses ini lahirnya Piagam Madinah, sebuah dokumen visioner yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam, mengatur tentang hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, tanpa memandang suku atau agama (Muhammad Kaulan Karima dkk, 2023:38-40).

Piagam ini menjadi bukti bahwa politik bisa dijalankan dengan menghargai pluralisme, menjaga keadilan antar kelompok, serta mendorong perdamaian dalam masyarakat majemuk. Semangat ini adalah cermin bagaimana demokrasi berbasis nilai-nilai profetik[9] seharusnya dibangun berpolitik tanpa harus meniadakan yang berbeda. Ironi besar dalam kehidupan politik kita hari ini. Ajaran-ajaran luhur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam membangun Madinah yang menjunjung tinggi musyawarah, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan justru jarang diangkat, apalagi diimplementasikan oleh partai politik maupun para pendukungnya. Partai-partai politik di Indonesia lebih banyak menampilkan wajah kekuasaan daripada wajah pendidikan. Mereka sibuk menguatkan elektabilitas, membangun citra, bahkan terkadang menyulut polarisasi demi kepentingan politik sesaat. Padahal, jika mereka mau menggali sejarah Islam atau sejarah bangsa sendiri, banyak sekali warisan kebijaksanaan politik yang bersifat inklusif, damai, dan bermartabat (Nidya Ulfa Riyani, 2022:779).

Sementara itu, sebagian masyarakat yang menjadi pendukung fanatik partai politik seringkali justru menjauh dari nilai-nilai toleransi. Mereka tak segan menghina lawan, menyebar hoaks, atau menekan yang berbeda pilihan sebuah praktik yang jauh dari semangat Piagam Madinah. Ironisnya lagi, mereka melakukannya atas nama agama atau kebenaran moral, padahal sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip itu sendiri. Jadi wajar bila kita menyaksikan politik penuh konflik, bukan karena politik itu buruk, tapi nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi roh politik seperti toleransi, kesetaraan, dan keadilan telah ditinggalkan. Maka, tugas kita adalah terus menyuarakan dan menghidupkan kembali etika politik yang berakar dari sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Selanjutnya kita akan coba menggali toleransi di kalangan para ormas keagamaan. Gerakan politik ormas keagamaan di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, FPI, Wahabi, Salafi, hingga Ikhwanul Muslimin pada dasarnya memiliki kontribusi penting

[9] Profetik berasal dari kata dasar "nabi" atau "kenabian" (dalam bahasa Inggris: *prophet*), sehingga profetik berarti hal-hal yang berkaitan dengan sifat, tugas, atau ajaran nabi. Dalam konteks yang lebih luas, profetik mengandung makna sebagai sesuatu yang bersifat visioner, penuh kebijaksanaan, membawa pesan moral dan spiritual yang mendalam, serta mengarahkan manusia pada kebaikan dan kebenaran (Heddy Shri Ahimsa Putra, 2016:2).

dalam membentuk kesadaran keagamaan dan sosial-politik umat, terutama dalam mendidik generasi muda tentang nilai-nilai keIslaman dan peran mereka di tengah masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika masing-masing ormas ini membawa narasi politik yang berbeda dan cenderung eksklusif, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam.

Bagi mereka yang memiliki pendidikan atau akses informasi yang baik, mungkin perbedaan itu bisa dipahami secara bijak sebagai dinamika dalam keberagaman umat. Akan tetapi, di kalangan masyarakat bawah, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, perbedaan ideologi dan narasi ini justru menciptakan kegamangan dan kebingungan tentang mana ajaran yang benar atau yang harus diikuti. Lebih dari itu, fanatisme terhadap kelompok masing-masing sering kali menjadi pemicu gesekan sosial yang nyata di tengah masyarakat. Di sinilah letak tantangan besar gerakan politik ormas keagamaan, bagaimana mereka dapat tetap bergerak dalam ranah politik dan sosial tanpa melahirkan polarisasi yang tajam, dan bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan keIslaman yang inklusif, damai, dan membangun, bukan sebaliknya, justru memperuncing sekat-sekat antarumat Islam sendiri.

Kita juga menyoroti fenomena kegaduhan di kalangan ulama, khususnya terkait kiprah KH. Ma'ruf Amin yang dulu menjabat sebagai Wakil Presiden, mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Banyak kalangan, terutama dari kelompok konservatif atau yang mengidealkan posisi ulama sebagai sosok yang seharusnya netral dari kekuasaan duniawi, merasa kecewa. Mereka menilai bahwa di usia yang sepuh, seharusnya KH. Ma'ruf fokus mengabdikan diri pada pendidikan umat dan persiapan akhirat, bukan malah terlibat dalam politik negara. Bahkan tidak jarang terdengar cibiran tajam seperti "ulama penjilat kekuasaan," yang menyebar luas di media sosial dan menjadi konsumsi publik. Termasuk yang memberikan kritik adalah kalangan santri NU sendiri (https://www.tempo.co), namun di sisi lain, kelompok yang pro justru melihat keterlibatan ulama dalam politik sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam pandangan mereka, justru negara akan lebih baik jika dipandu oleh nilai-nilai agama, dan ulama sebagai penjaga moral masyarakat harus ikut ambil bagian dalam merumuskan arah kebijakan negara.

Pertengkaran wacana antara para sarjana Muslim ini pun menjadi tontonan publik yang terkadang mencederai marwah keulamaan itu sendiri. Sayangnya, debat yang seharusnya bersifat intelektual seringkali berubah menjadi ajang saling serang dan menjatuhkan, tanpa memberi ruang dialog yang sehat. Inilah yang pernah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kerusakan masyarakat bersumber dari kerusakan pemimpinnya, dan kerusakan pemimpin bersumber dari para ulama yang telah kehilangan integritas dan arah spiritualnya (Nabil Abdurrahman, 2021:5). Di era digital saat ini, perkataan Al-Ghazali terasa begitu relevan ketika para ulama malah terjebak dalam arus kekuasaan, popularitas, dan pengaruh, sementara umat menjadi bingung dan terpecah. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukanlah ulama yang sekadar tampil di panggung politik atau media, tapi ulama yang mampu menjaga etika, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, dan tetap menjadi mercusuar moral yang menyinari arah umat dan bangsa.

Toleransi dalam Menghargai Hak Asasi Manusia

Toleransi dalam kosmopolitanisme sangat erat kaitannya dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam dunia kosmopolitan, setiap individu berhak hidup dengan martabat, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau ketidakadilan. Toleransi dalam hal ini berarti menghormati hak setiap individu untuk bebas memilih keyakinan, orientasi seksual, atau budaya yang mereka anut. Toleransi terhadap hak asasi manusia semestinya berlandaskan pada asas saling menghargai, bukan saling merasa paling benar, asas kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang seenaknya lalu berlindung di balik tameng 'ini hak saya' serta asas kesetaraan, bukan keserakahan untuk menang sendiri dalam ruang publik.

Kosmopolitanisme mengajarkan bahwa hak asasi manusia adalah hak universal, berlaku semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, toleransi dalam kosmopolitanisme bukan hanya soal menerima keberagaman, juga memastikan setiap individu dapat menjalani kehidupan mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut akan penindasan atau pengucilan. Ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beribadah, serta hak untuk hidup di lingkungan yang aman dan adil (Hidayat Edi Santoso, 2024:52). Undang-Uundang 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2)

UUD 1945: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3: Setiap orang dilahirkan bebas dengan martabat dan hak yang sama sebagai manusia. Karena itu setiap orang berhak atas perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan penuh toleransi."

Negara mengakui hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak memperoleh keadilan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Jaminan ini menegaskan bahwa secara konstitusional, Indonesia berdiri di atas prinsip penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia. Namun demikian, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan semangat konstitusi tersebut. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum negara telah menyediakan jaminan kuat, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi dan keberanian institusi untuk benar-benar menegakkan konstitusi demi keadilan dan kemanusiaan.

Amartya Sen Peraih Nobel Ekonomi, pemikir HAM dan pembangunan manusia tahun 1998 mengakatan bahwa toleransi bukan soal menerima perbedaan semata, tapi kemampuan melihat nilai dalam keberagaman dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak selalu sepaham dengan kita (Irmayanti Meliono, 2017:418)". Toleransi adalah bagian penting dari kebebasan dan keadilan sosial, dan HAM harus dijamin oleh negara dan diperjuangkan oleh masyarakat sipil. Toleransi terhadap HAM bukan sekadar formalitas hukum, tetapi praktik sosial dan kultural yang dibangun dengan kesadaran dan pendidikan. Dalam negara demokratis, perlindungan minoritas, kebebasan berpendapat, dan keberagaman keyakinan bukanlah ancaman, tapi kekayaan yang mesti dijaga. Meskipun

digadang-gadang sebagai nilai universal, HAM sejatinya lahir dari tradisi Barat pasca-Pencerahan yang sangat menekankan individualisme dan kebebasan pribadi. Dalam kerangka ini, segala bentuk larangan terhadap ekspresi personal dianggap sebagai pelanggaran HAM meskipun dalam konteks budaya atau agama tertentu, ekspresi itu justru dianggap tidak bermoral atau mengganggu tatanan sosial.

Contohnya: (1) Hak atas orientasi seksual seringkali berbenturan dengan norma agama. (2) Hak berekspresi bisa menjustifikasi ujaran kebencian atas nama kebebasan berpendapat. (3) Hak berpakaian kadang ditabrakkan dengan nilai kesopanan lokal. Dalam banyak masyarakat seperti di Indonesia, kearifan lokal atau *local wisdom* tidak hanya soal tradisi, juga pedoman moral dan sosial. Jika HAM menuntut kebebasan penuh, tetapi masyarakat adat masih memegang teguh nilai kolektif (gotong royong, sopan santun, penghormatan pada tua), maka justru HAM bisa dilihat sebagai ancaman terhadap moralitas sosial. Franz Magnis-Suseno, filsuf Indonesia, pernah berkata, kebebasan tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan budaya. Menusia memiliki dua dimensi kebebasan yakni bersifat eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya terdapat dalam kemampuan manusia menentukan dirinya sendiri, bersifat positif. Sedangkan kebebasan sosial terdiri atas tiga dimensi yaitu, kebebasan jasmaniah, apabila kita tidak berada di bawah paksaan. Kebebasan rohaniah, apabila kita bebas dari tekanan psikis. Kebebasan normatif, apabila kita tidak berada di bawah tekanan atau ancaman untuk melakukan kewajiban dan larangan (Muhammad In'amuzzahidin, 2015:260).

Masalah besar yang sering muncul dalam konteks hak asasi manusia justru terdapat pada dimensi kebebasan sosial. Banyak orang yang tidak mendapatkan ruang atau pengakuan sosial untuk mengekspresikan keyakinan, budaya, atau pilihan hidupnya karena tekanan mayoritas, diskriminasi, atau fanatisme sosial. Ironisnya, hak sosial yang semestinya menjadi jembatan antarindividu dan komunitas, justru sering kali menjadi sumber konflik karena tidak adanya toleransi yang cukup. Dalam realitas sosial kita, masih banyak kelompok yang mudah menstigma, memusuhi, bahkan mengintimidasi hak sosial orang lain, hanya karena berbeda cara pandang atau keyakinan. Oleh karena itu, membangun toleransi dalam kebebasan sosial menjadi sangat penting agar hak asasi manusia benar-benar terwujud secara adil dan menyeluruh.

Di Negara yang tercinta ini, persoalan penegakan hak asasi manusia di Indonesia kerap kali mengalami ironi, di mana hak-hak dasar warga negara justru dirampas oleh aparat yang seharusnya menjaganya. Salah satu contoh nyata adalah kasus pembunuhan Fina di Cirebon yang menyorot perhatian publik, terutama setelah penangkapan terhadap Pegy Setiawan yang belakangan diduga kuat bukan pelaku sebenarnya. Dalam kasus ini, muncul dugaan kuat bahwa terjadi pemalsuan bukti dan rekayasa penegakan hukum demi membenarkan penangkapan yang keliru. Hak Pegy sebagai warga negara untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil seakan diabaikan, bahkan aparat kepolisian terkesan berusaha menutupi kekeliruan dengan tidak memberikan ruang yang layak bagi tersangka menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya (https://icjr.or.id/kasus-pembunuhan-vina). Kejadian ini menjadi cerminan bahwa praktik HAM di Indonesia masih sering diputarbalikkan, hak diakui secara hukum, namun kerap disangkal dalam tindakan nyata. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya mencederai keadilan, juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Toleransi dalam perbedaan pendapat

Toleransi dalam kosmopolitanisme juga mencakup kebebasan berpikir dan berekspresi. Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya, mengemukakan ide-idenya, dan berbicara tentang keyakinan mereka tanpa takut akan reaksi negatif atau kekerasan. Dalam dunia kosmopolitan, kebebasan berpikir dan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dilindungi. Kosmopolitanisme mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sehat dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat berisiko menciptakan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, penting menciptakan ruang yang aman bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Toleransi dalam pemikiran dan ekspresi juga berarti mengakui bahwa setiap orang berhak mempraktikkan kebebasan berpendapat mereka dalam berbagai bentuk, apakah itu melalui seni, tulisan, diskusi, atau media sosial. Dengan demikian, kosmopolitanisme memandang kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis (Muhammad Mukhlisin dkk, 2022).

Secara filosofis, kebebasan berpendapat adalah hak mendasar manusia untuk menyatakan pikiran, gagasan, dan keyakinannya tanpa rasa takut akan pembalasan, penindasan, atau tekanan dari pihak lain termasuk negara. Namun, para pemikir memberikan pendekatan yang berbeda-beda terhadap konsep ini, tergantung pada konteks zaman dan pemikiran moral mereka. Jika perbedaan pendapat terus diperlakukan seperti *explosive materials* yang mengancam, maka lokal wisdom akan sulit tumbuh sebagai benih toleransi dan perdamaian dalam kehidupan bersama. John Stuart Mill adalah seorang filsuf, ekonom, dan politisi asal Inggris hidup di abad ke-19) Mill adalah tokoh paling dikenal dalam membela kebebasan berpendapat. Dalam bukunya *On Liberty*, ia menyatakan *the liberty of man consists in doing what he desires*. "Kebebasan manusia adalah hak untuk melakukan apa yang ia kehendaki", Mill menegaskan bahwa kebebasan seseorang hanya boleh dibatasi jika tindakannya membahayakan orang lain (*harm principle*) (Diah Imaningrum Susanti, 2022:17).

Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin secara tegas dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (1). Di tingkat internasional, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948:9), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk tidak diganggu karena pendapatnya serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa batasan. Bahkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 pada poin lima dalam lembaran UU tersebut. Kebebasan berpendapat ditegaskan sebagai bagian dari hak sipil dasar manusia. Namun demikian, baik di dalam maupun di luar negeri, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Hukum internasional dan nasional tetap mengatur batasan-batasan tertentu, terutama apabila pendapat yang disampaikan mengandung unsur kebencian, kekerasan, atau mengancam ketertiban umum dan keamanan negara. Dengan demikian, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak yang fundamental, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tetap dalam koridor hukum.

Praktik kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan paradoks. Secara hukum, kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan

perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut kerap kali dibatasi oleh interpretasi hukum yang sempit, tekanan sosial, bahkan intimidasi dari aparat atau kelompok tertentu. Banyak kasus di mana warga negara dipidanakan karena menyampaikan kritik melalui media sosial, seperti kasus UU ITE yang sering dianggap sebagai "pasal karet" karena bisa digunakan membungkam suara-suara kritis. Di sisi lain, praktik kebebasan berpendapat juga seringkali diwarnai oleh ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang merusak nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia belum sepenuhnya "bebas" dalam makna yang ideal. Masyarakat masih harus berjalan di antara dua kutub, menjaga hak menyampaikan pendapat dan menghindari jeratan hukum yang seringkali tidak berpihak pada kebebasan itu sendiri. Maka, tantangan terbesar bukan menjamin hak tersebut secara hukum, tetapi menciptakan ruang publik yang aman, adil, dan dewasa dalam menerima perbedaan pendapat.

Toleransi dalam perbedaan pendapat di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan secara utuh. Meskipun secara hukum kebebasan berpendapat dijamin, dalam praktik sosial dan politik, perbedaan pendapat masih sering disikapi dengan emosional, fanatisme, bahkan permusuhan. Ruang public baik di dunia nyata maupun media social seringkali menjadi arena konflik ideologis, bukan ruang dialog yang sehat. Orang yang menyampaikan kritik dianggap musuh, yang berbeda pandangan dianggap sesat, dan yang netral justru disalahpahami. Hal ini mencerminkan kebebasan berpendapat tidak otomatis disertai kedewasaan dalam bersikap dan kemampuan menerima perbedaan. Budaya toleransi masih lemah, terutama ketika perbedaan pendapat menyentuh isu sensitif seperti agama, politik, atau identitas kelompok. Maka dari itu, membangun toleransi terhadap perbedaan pendapat bukan soal memberi ruang bicara, juga soal membentuk karakter masyarakat yang mampu mendengarkan, menghargai, dan berdialog secara beradab.

D. Pemikiran Gus Dur Tentang Multikulturalisme

Gus Dur, dikenal sebagai seorang pemikir dan tokoh yang memperjuangkan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. Sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur tidak hanya berfokus pada kebijakan politik, juga memperkenalkan ideologi yang

mengedepankan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan pengakuan terhadap keberagaman. Pemikirannya mengenai multikulturalisme lebih dari sekedar sebuah teori sosial, tetapi merupakan dasar penting membangun Indonesia sebagai bangsa inklusif (Miskan, 2017:69).

Indonesia sebagai negara dengan ratusan suku bangsa, agama, dan bahasa merupakan salah satu contoh masyarakat multikultural terbesar di dunia. Gus Dur memahami keberagaman ini bukan hanya kenyataan yang diterima, juga sebuah aset yang dihargai dan dipelihara. Baginya, Indonesia bukanlah negara homogen memaksakan satu identitas budaya atau agama, tetapi negara yang merayakan pluralitas sebagai sumber kekuatan. Gus Dur menekankan bahwa multikulturalisme tidak mengharuskan homogenitas atau penghapusan perbedaan. Sebaliknya, multikulturalisme menurutnya adalah tentang merayakan perbedaan dan menemukan titik temu di antara perbedaan tersebut. Dalam konteks Indonesia, meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita tetap dapat hidup berdampingan dalam keharmonisan.

Pemikiran Gus Dur juga berfokus pada hubungan antara agama dan multikulturalisme. Sebagai seorang Muslim, Gus Dur melihat agama Islam sebagai ajaran mendorong toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari takdir Tuhan. Sebagai Presiden, Gus Dur memiliki peluang mewujudkan pemikirannya tentang multikulturalisme dalam kebijakan publik. Salah satu kebijakan penting yang ia terapkan adalah menciptakan ruang bagi kebebasan beragama di Indonesia, di mana semua agama dan kepercayaan diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Gus Dur juga memperkenalkan konsep "Islam yang Ramah", yang menekankan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam beragama (Moch Husnan & Nur Halimatus, 2023:85).

Pendidikan adalah kunci membangun kesadaran multikulturalisme dalam masyarakat. Mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman dan mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Pendidikan yang menghasilkan generasi yang lebih terbuka dan siap menghadapi tantangan masyarakat multikultural. Gus Dur juga melihat hubungan erat antara multikulturalisme dan demokrasi. Ia berpendapat bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus menghargai dan mengakomodasi keberagaman yang ada di dalamnya. (Moch Shohib, 2020:82).

Selain Gus Dur, beberapa tokoh pemikir multikulturalisme lainnya turut berkontribusi dalam membentuk pemikiran ini. Di antaranya adalah Charles Taylor, dalam karyanya *Multiculturalism and The Politics of Recognition* mengemukakan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya yang berbeda. Taylor berpendapat bahwa penghormatan terhadap perbedaan budaya adalah syarat untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat yang majemuk. John Rawls, seorang filsuf politik Amerika, dalam karya terkenalnya *A Theory of Justice* juga membahas tentang multikulturalisme dalam konteks keadilan. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu mengakomodasi keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa diskriminasi (Zainal Arifin, 2019:137-139). Pemikiran ini sangat relevan dengan konsep multikulturalisme yang diajukan oleh Gus Dur.

Meskipun multikulturalisme secara normatif dimaknai sebagai upaya untuk menghargai dan mengakui keberagaman budaya, dalam praktiknya sering kali menciptakan segregasi sosial terselubung. Ketika individu atau kelompok semakin memahami identitas budayanya dalam kerangka multikultural, pada saat yang sama bisa muncul kecenderungan membandingkan budaya lain yang berujung pada sikap merendahkan atau menyepelekan. Dalam bahasa sehari-hari, perbandingan semacam ini sering muncul secara halus, "budaya kami lebih sopan, kalau di adat kami, hal begitu tidak pantas, mereka terlalu bebas, tidak seperti kita yang masih menjaga nilai-nilai".

Sikap membandingkan budaya dalam konteks multikulturalisme dapat dipahami dari sudut pandang psikososial sebagai bentuk manifestasi dari identitas sosial dan kebutuhan akan pengakuan kelompok. Ketika individu menjadi semakin sadar akan identitas budayanya, secara tidak langsung muncul dorongan untuk menegaskan keunikan dan keunggulan kelompoknya dibanding kelompok lain (Valentino Reykliv Mokalu & Charis Vita Juniarty Boangmanalu, 2020:181). Hal ini sejalan dengan teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henri Tajfel, yang menyatakan bahwa individu cenderung mengkategorikan diri dalam kelompok sosial tertentu (*in-group*) dan membandingkannya dengan kelompok lain (*out-group*) demi membangun harga diri kolektif. Dalam proses ini, perbedaan yang seharusnya dihargai dalam semangat multikultural malah dijadikan dasar untuk membuat penilaian hierarkis terhadap

budaya lain (Ismail Alviano & Gazi Saloom, 2022:762). Selain itu, faktor psikologis seperti rasa tidak aman terhadap dominasi budaya luar atau kekhawatiran akan hilangnya identitas juga mendorong individu mempertahankan kelompoknya dengan cara merendahkan budaya lain. Dengan demikian, alih-alih mendorong toleransi, pemahaman multikultural yang tidak disertai dengan kesadaran kritis justru berpotensi menciptakan sekat-sekat sosial baru yang memperkuat segregasi kultural di masyarakat.

Pemikiran Gus Dur tentang multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan atas keberagaman budaya sebagai fondasi hidup bersama dalam damai. Ia mendorong masyarakat untuk memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang memperkaya bangsa. Namun, dalam praktiknya, pendekatan multikultural ini sering terjebak pada permukaan yakni pengenalan terhadap identitas budaya tanpa pembacaan kritis terhadap relasi kuasa yang menyertainya. Tujuannya menghasilkan sikap saling menghargai, pemahaman multikultural yang dangkal justru berpotensi melahirkan sikap saling mengklaim dan membandingkan, di mana budaya diposisikan bukan sebagai nilai (*value*) yang harus dihargai, tetapi sebagai alat legitimasi superioritas kelompok. Dengan demikian, paradoks jadinya dalam implementasi multikulturalisme, semangatnya menyatukan justru menciptakan sekat-sekat baru yang tak kasat mata dalam relasi sosial.

Paradoks multikulturalisme dalam praktik sosial muncul ketika keberagaman yang secara normatif dirayakan justru menghasilkan pembatasan-pembatasan baru dalam kehidupan bersama. Di satu sisi, masyarakat tampak menerima perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya sebagai kekayaan bersama namun di sisi lain, relasi antar kelompok sering dibangun dalam kerangka toleransi yang bersifat permukaan seremonial, simbolik, dan seringkali dangkal. Multikulturalisme yang semestinya menjadi jembatan antar identitas justru kerap menjadi pagar halus memisahkan. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat menunjukkan sikap terbuka terhadap kelompok lain, sambil tetap mempertahankan klaim bahwa budayanya lebih unggul, lebih sopan, atau lebih bermartabat. Akibatnya, ruang sosial tampak inklusif sebenarnya menyimpan segregasi sosial yang tak kasat mata orang hidup berdampingan, tapi tidak benar-benar Bersama (Nur Rif'ah Hasaniy dkk, 2024:14). Paradoks ini memperlihatkan bahwa multikulturalisme tanpa refleksi kritis dan distribusi keadilan hanya akan mereproduksi ketimpangan

dalam bingkai yang lebih halus dan dapat diterima secara sosial. Kajian multikulturalisme yang dianggap sebagai fondasi hidup bersama di tengah keberagaman, justru menimbulkan segregasi dalam praktik sosial. Sehingga multikulturalisme diposisikan sebagai persaingan bukan sebagai *value*.

E. Hubungan Kosmopolitanisme Dengan Pembangunan Masyarakat Madani

Kosmopolitanisme dan pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan dua konsep pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dalam membangun sebuah masyarakat harmonis, adil, dan berkeadilan. Kosmopolitanisme mengajarkan keterbukaan, penghargaan terhadap keberagaman, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai warga dunia. Sementara itu, masyarakat madani mengacu pada sebuah tatanan sosial mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, kedua konsep tersebut saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam upaya mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kosmopolitanisme menawarkan landasan filosofis yang sangat relevan bagi pembangunan masyarakat madani, terutama dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Kosmopolitanisme mengajak masyarakat melihat dunia sebagai satu kesatuan yang terhubung, dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks masyarakat madani, prinsip kosmopolitanisme mendorong masyarakat bersikap inklusif, mengutamakan kebersamaan, dan membangun solidaritas lintas batas etnis, agama, dan budaya. Oleh karena itu, kosmopolitanisme berperan sebagai penghubung penting dalam membangun tatanan sosial yang inklusif dan penuh toleransi (Suroto, 2015:664). Masyarakat madani merupakan sebuah konsep merujuk pada masyarakat yang memiliki kualitas tinggi dalam hal kebebasan, hak asasi manusia, pluralisme, serta partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam masyarakat madani, ada penghargaan terhadap pluralitas, keberagaman, dan hak-hak individu. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat madani adalah menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, demokratis, dan tidak diskriminatif. Masyarakat madani menghargai hak setiap

individu untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan identitasnya, serta mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Salah satu cara mengimplementasikan kosmopolitanisme dalam pembangunan masyarakat madani adalah melalui pendidikan multikultural. Pendidikan yang berbasis pada pemahaman tentang keberagaman dan saling menghargai perbedaan akan menciptakan generasi yang lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Gus Dur memandang pendidikan sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan madani. Pendidikan multikultural mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai budaya dan agama lain, serta mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, pendidikan menjadi alat efektif dalam mewujudkan masyarakat madani penuh toleransi (Zakiyyudin Baidhawy, 2010:4133-4132). Kosmopolitanisme juga memberikan dasar bagi pembangunan demokrasi dalam masyarakat madani. Demokrasi dalam masyarakat madani bukan hanya tentang pemilihan umum, lebih dari itu, demokrasi mencakup penghargaan terhadap pluralitas, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Gus Dur sering menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, kosmopolitanisme menjadi dasar relevan memperkuat demokrasi dalam masyarakat madani.

Negara memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat madani dan mengimplementasikan nilai-nilai kosmopolitanisme. Negara harus memastikan bahwa setiap warganya diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Negara harus menjadi pelindung hak-hak minoritas dan menjamin keberagaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, negara harus menjaga dan melindungi kebhinekaan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat hidup sesuai dengan keyakinan dan identitasnya (Syamsul Mujahidin, 2021:9-10). Cita-cita masyarakat madani di Indonesia masih jauh dari kenyataan, apalagi dilihat melalui lensa kritik sosial Hegelian. Karl max memang memberikan peringatan penting, bahwa masyarakat sipil hanya akan berfungsi secara etis jika ia mampu menciptakan ruang bagi keadilan substantif, bukan sekadar kebebasan formal. Ketika kehidupan sosial hanya berjalan melayani mereka yang berkuasa dan berkecukupan kaum borjuis maka yang terbentuk

bukan masyarakat madani, melainkan arena persaingan tak setara yang menyisihkan kaum proletar, menjadi penonton dari kemajuan yang dikooptasi elit (Muhammad Kambali, 2020:73).

Pancasila secara normatif seharusnya menjadi fondasi kuat bagi masyarakat madani karena ia menjunjung keadilan sosial, musyawarah, dan penghargaan atas nilai kemanusiaan. Namun, praktiknya justru memperlihatkan sebaliknya. Keadilan hukum lebih akrab pada mereka yang memiliki akses dan modal, sementara demokrasi dijalankan dalam bentuk ritual prosedural berlapis kepentingan transaksional. Rakyat sering kali tidak hadir sebagai subjek, hanya sebagai angka dalam statistik pemilu. Masyarakat madani seharusnya menjadi ruang di mana warga negara bisa berpartisipasi aktif secara setara, bebas dari tekanan negara maupun dominasi pasar. Tapi kenyataan hari ini lebih mencerminkan dominasi oligarki dan birokrasi yang tak tersentuh kritik publik. Ini menunjukkan persoalan kita bukan semata kelemahan hukum atau etika, tapi kerapuhan struktur sosial dan politik yang menghambat terwujudnya masyarakat madani sejati.

Habermas mengusulkan bahwa masyarakat madani tumbuh dari sebuah ruang yang disebutnya *public sphere* ruang diskursif tempat warga negara berdialog secara rasional dan setara, bebas dari dominasi negara maupun pasar. Dalam ruang ini, warga menggunakan rasio komunikatif menyepakati nilai-nilai bersama secara deliberatif, bukan melalui paksaan atau transaksi (Arienda Addis Prasetyo, 2022: 215). Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah ruang publik kita belum sungguh bebas media dimonopoli oleh pemilik modal, kritik kerap ditanggapi dengan represi, dan diskusi publik sering dibungkam oleh polarisasi politik serta buzzer-buzzer partisan. Maka, masyarakat madani yang digagas Habermas belum memiliki tanah subur untuk tumbuh di sini. Bahkan, demokrasi kita lebih banyak terjebak dalam apa yang disebut Habermas sebagai "demokrasi prosedural tanpa rasionalitas publik."

Meskipun dalam konteks negara masyarakat madani masih jauh dari terwujud terhambat oleh birokrasi yang transaksional, dominasi kekuasaan, dan ketimpangan akses keadilan justru dalam ruang-ruang kehidupan lokal, embrio masyarakat madani seringkali hadir secara lebih nyata dan otentik. Salah satu contoh yang mencolok adalah kehidupan sosial di desa Mbawa, di mana masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang suku seperti Donggo, Sumba, Flores, Sumbawa, dan Jawa serta berbagai agama, termasuk Islam,

Katolik, dan Protestan, mampu hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai. Meskipun umat Islam menjadi mayoritas, mereka tidak menggunakan posisi itu untuk mendominasi, melainkan justru mengedepankan nilai-nilai hidup bersama dan tanggung jawab sosial. Pembangunan masjid dan gereja secara berdampingan, serta praktik gotong royong lintas iman dan etnis, mencerminkan bentuk masyarakat madani yang tumbuh dari bawah berbasis pada kepercayaan, solidaritas, dan pengalaman hidup yang dibagi bersama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat madani tidak harus dimulai dari institusi negara, tetapi dapat tumbuh subur dari akar rumput, dari ruang-ruang kecil di mana perbedaan tidak sekadar ditoleransi, melainkan dijalani dengan kesadaran bersama menjaga harmoni. Desa Mbawa menjadi cermin bahwa peradaban bisa tumbuh dari pinggiran, bahkan ketika negara belum mampu mewujudkannya di pusat.

Bangunan masyarakat madani justru lahir dari kehidupan masyarakat lokal. Jika ingin memahami bentuk dan struktur sejati masyarakat madani, maka jangan melihat dari atas dari kekuasaan atau institusi negara melainkan telusurilah dari bawah, dari ruang-ruang hidup warga yang sederhana. Sebab, tumbuhnya masyarakat madani selalu dimulai dari akar, dari komunitas lokal yang menjunjung nilai kebersamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Masyarakat madani juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Masyarakat sipil yang kuat akan mampu mendorong pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan menjamin kesejahteraan bersama. Kosmopolitanisme, dengan pendekatannya yang inklusif, memberi ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan. Gus Dur memperjuangkan agar masyarakat sipil diberikan ruang berkembang dan berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial (Suaib, 2023:14). Pembangunan masyarakat madani tidak berarti meniadakan kebudayaan lokal. Sebaliknya, masyarakat madani harus dapat menghargai dan melestarikan kebudayaan lokal, membuka diri terhadap pengaruh budaya global. Kosmopolitanisme mengajarkan bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan bersama. Bahwa kebudayaan lokal, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan (Firki Mardianto, 2019:42).

Pada era globalisasi, kosmopolitanisme menjadi semakin relevan, karena dunia semakin terhubung satu sama lain. Globalisasi membawa tantangan baru dalam membangun masyarakat madani, seperti munculnya ketidaksetaraan ekonomi, migrasi massal, dan perubahan sosial yang cepat. Globalisasi harus dilihat sebagai peluang untuk membangun solidaritas internasional, memperkuat hubungan antarbangsa, serta memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, kosmopolitanisme dalam konteks globalisasi sangat penting untuk memastikan pembangunan masyarakat madani yang inklusif. Kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek utama dalam pembangunan masyarakat madani. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar semua warganya. Dalam masyarakat madani, tidak ada tempat untuk kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Kosmopolitanisme mengajarkan semua individu, berhak hidup sejahtera dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai kebahagiaan (Dede Rosyada dkk, 2003:239). Pembangunan masyarakat madani juga melibatkan keadilan gender, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, membangun masyarakat madani juga berarti menciptakan masyarakat yang bebas dari diskriminasi gender.

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN KOSMOPOLITAN GUS DUR DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan Islam Inklusif

Kosmopolitanisme dalam konteks pendidikan Islam inklusif berarti pendidikan yang berfokus pada ruang pemahaman terhadap keberagaman dan perbedaan. Gus Dur berpendapat bahwa Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan keterbukaan terhadap budaya, agama, dan pandangan hidup lain, tanpa harus menanggalkan identitas keIslaman. Hal ini menjadi tugas fungsional pendidikan Islam mempersiapkan generasi yang dapat hidup berdampingan dengan penuh toleransi, kerukunan, dan rasa saling menghargai. Salah satu pilar utama dari pendidikan Islam yang inklusif adalah penghargaan terhadap pluralitas. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya, memerlukan pendidikan yang dapat menyatukan keberagaman tersebut dalam sebuah wadah yang harmonis. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme tak ada tawar menawar, sehingga para siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Upaya ini guna membangun masyarakat yang lebih inklusif dan damai (Rofiqotul Aini & Dhifa Safinatunaja, 2023:19).

Implementasi pendidikan Islam inklusif sejatinya berorientasi pada tumbuhnya kesadaran kolektif sebagai fondasi bersama. Bukan semata-mata soal membuka pintu ruang kelas, menghadirkan keadilan dalam pemerataan akses, menganyam dialog yang hidup

antara agama dan budaya, serta memberikan ruang yang lapang bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan minatnya yang unik. Pendidikan ini adalah taman keberagaman, tempat di mana perbedaan bukan untuk dihapuskan, melainkan dirayakan dalam semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Ketika kita bicara tentang pendidikan inklusif, John Dewey menjadi tokoh pertama yang bersuara. Bahwa pendidikan harus menjadi pengalaman sosial yang menyeluruh, bukan soal penguasaan materi akademik. Dalam pandangan Dewey, sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat demokratis terbuka di mana setiap anak, memiliki ruang berkembang dan berpartisipasi tanpa sekat (Ila Khayati Muflikhah & Abdul Khobir, 2023:13). Di sisi lain, Paulo Freire, meski lebih dikenal dalam konteks Amerika Latin, memberikan kontribusi penting dalam diskursus pendidikan inklusif melalui pendidikan pembebasan ia menolak sistem pendidikan yang menindas, dan mengusung perlunya dialog antara guru dan murid (Paulo Freire, 2001:59). Freire ingin pendidikan menjadi alat penyadaran dan pembebasan, bukan menyeragamkan. Lalu muncul tokoh seperti Martha Nussbaum, yang mengangkat pendekatan *capability*, bahwa pendidikan inklusif bukan hanya soal akses fisik ke ruang kelas, tetapi soal memastikan setiap individu benar-benar punya kemampuan dan kesempatan berkembang sesuai potensinya baik secara kognitif, emosional, maupun sosial (Cicilia Damayanti, 2021:46).

Pendidikan Islam inklusif juga harus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti rasa empati, kasih sayang, dan peduli terhadap sesama. Gus Dur sering mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai martabat manusia dan mengajarkan untuk saling menyayangi. Oleh karena itu, nilai-nilai ini harus diterapkan dalam setiap aspek pembelajaran di sekolah. Guru dapat memasukkan tema-tema tentang kemanusiaan dalam pembelajaran, baik dalam mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum lainnya. Untuk mewujudkan pendidikan Islam inklusif, sekolah dapat mengembangkan program pertukaran pelajar atau kegiatan internasional yang memungkinkan siswa bertemu dan berinteraksi dengan siswa dari negara atau budaya yang berbeda. Membuka wawasan global adalah salah satu cara memperkenalkan konsep kosmopolitanisme. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar langsung mengenai perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai kehidupan yang

ada di negara lain, sehingga memperluas pemahaman mereka terhadap dunia (I Made Darsana, 2024:1-2).

Implementasi pendidikan Islam inklusif diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama sebagai fondasi etis dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter peserta didik, juga menciptakan lingkungan pendidikan humanis dan ramah terhadap keberagaman. Selain itu, pendidikan Islam inklusif juga menyoroti integrasi antara ilmu keagamaan dan perkembangan dunia digital, guna membentuk pola pikir peserta didik yang terbuka, adaptif, dan tidak sempit dalam memahami realitas sosial maupun spiritual di era modern.

Pendidikan Islam juga harus mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, seperti sains dan teknologi. Kosmopolitanisme mengajarkan bahwa dunia merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam inklusif harus mengajarkan siswa memadukan nilai-nilai agama dengan pengetahuan ilmiah, sehingga mereka berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia tanpa kehilangan akar spiritual mereka. Untuk mengikuti perkembangan zaman, kurikulum pendidikan Islam harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan sebagai alat memajukan peradaban, dan untuk itu kurikulum pendidikan Islam harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam hal ini, sekolah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kurikulum yang ada, untuk memastikan materi yang diajarkan tetap relevan dengan tantangan global dan kebutuhan masa depan (Agus Moh. Sholahuddin, 2022:236).

Pemikiran Gus Dur tentang pendidikan Islam inklusif memberikan arah yang jelas bagi pembangunan pendidikan yang lebih baik. Melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan kurikulum, metode pengajaran, serta pembentukan karakter, pendidikan Islam dapat menjadi sarana menciptakan masyarakat yang lebih toleran, adil, dan penuh kasih sayang. Pendidikan sebagai proses mentransfer pengetahuan dan penanaman nilai-nilai luhur yang membentuk generasi siap menghadapi dunia yang penuh dengan perbedaan.

Adapun dimensi implementasi pendidikan Islam inklusif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Pluralitas

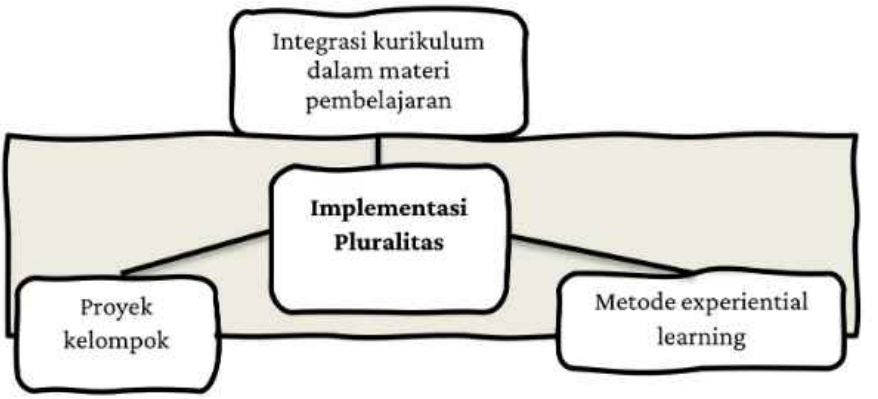

➢ Integrasi kurikulum dalam materi pelajaran

Implementasi pluralitas dilakukan dengan pengintegrasian nilai pluralisme dalam materi pelajaran dapat dilakukan dengan menyertakan topik-topik yang berkaitan dengan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari tentang sejarah berbagai suku bangsa di Indonesia dan kontribusinya terhadap pembentukan identitas bangsa. Dalam pelajaran seni, siswa dapat diperkenalkan pada berbagai bentuk seni tradisional dari berbagai daerah dan budaya yang ada di Indonesia.

Implementasi nilai-nilai pluralitas melalui integrasi kurikulum merupakan upaya strategis membangun kesadaran keberagaman sejak dini dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini menempatkan pluralitas bukan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan sebagai nilai yang dihidupkan dalam berbagai disiplin ilmu dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, hingga Bahasa dan Ilmu Sosial. Dengan cara ini, peserta didik memahami pluralitas sebagai konsep teoritis, juga melihatnya sebagai realitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini memungkinkan pendidikan nilai berlangsung secara holistik, membangun empati, menumbuhkan sikap saling menghargai, serta menjadi benteng kognitif terhadap pemikiran eksklusif dan intoleran. Namun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas guru, sensitivitas budaya lokal, serta ketersediaan panduan implementasi yang konkret. Tanpa itu, integrasi nilai pluralitas

berisiko menjadi simbolik dan normatif semata, tanpa daya ubah yang nyata dalam pola pikir dan sikap peserta didik (Basiah & Sakti Ritonga, 2024:1207).

Nilai, seperti halnya kejujuran, kasih sayang, atau pluralitas, tidak selalu bisa dijinakkan oleh sistem pengukuran kuantitatif yang kaku. Ia hidup melalui praktik, melalui relasi antar manusia di ruang belajar, bukan melalui angka-angka atau rubrik evaluasi yang teknis. Pernyataan bahwa nilai pluralitas itu tidak membutuhkan panduan yang kaku justru menegaskan bahwa pendidikan adalah seni, bukan sekadar prosedur. Dalam pendekatan ini, guru sebagai penyampai materi, dan teladan hidup yang menghidupkan nilai melalui empati, sikap inklusif, dan kepekaan sosialnya. Maka benar, dalam implementasi pluralitas, paling dasar adalah atmosfer kelas, relasi sosial, dan contoh nyata dari guru itu sendiri. Pedoman yang teknis tak cukup, dibutuhkan adalah kesadaran mendalam dari para pendidik akan pentingnya hidup bersama dalam keberagaman. Bahkan kalau dipikir-pikir, semakin teknis pedoman yang dibuat, semakin jauh kita dari makna sejati nilai itu sendiri karena nilai, pada akhirnya, adalah soal laku, bukan sekadar teori.

Pendidikan pluralitas sejatinya lebih tepat jika diimplementasikan melalui pendekatan berbasis relasi dan keteladanan, bukan semata-mata lewat rumusan teknis kurikulum. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat hidup bersama tidak tumbuh dari hafalan atau penilaian kognitif, termasuk melalui interaksi sosial yang nyata dan pembiasaan sikap keseharian. Guru memiliki peran sentral sebagai figur bukan sekadar menyampaikan materi, menghadirkan contoh konkret bagaimana menghargai keragaman melalui cara berpikir, berbicara, dan bersikap. Relasi yang hangat, inklusif, dan terbuka di dalam ruang kelas menjadi medium subur bagi internalisasi nilai-nilai pluralitas tanpa perlu paksaan. Keteladanan menjadi kunci utama ketika peserta didik melihat dan mengalami langsung sikap hormat terhadap perbedaan dari figur pendidik, maka nilai tersebut akan lebih mudah diresapi secara emosional dan sosial. Dengan demikian, pendidikan pluralitas merupakan laku hidup yang ditumbuhkan dalam jejaring relasi antar manusia (Naufal Samudra, 2024:49).

➢ Metode *experiential learning*

Metode yang efektif untuk mengimplementasikan nilai pluralisme dalam pendidikan adalah melalui metode *experiential learning*. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran David Kolb, yang merumuskan siklus pembelajaran pengalaman (*experiential learning cycle*) terdiri dari empat tahap (Zulfikar Rafi Nurcahyandi & Jayanti Putri Purwaningrum, 2022:3-5):

✓ *Concrete Experience* (mengalami langsung suatu kejadian atau aktivitas)

Tahap *Concrete Experience* dalam model *experiential learning* merupakan titik awal peserta didik terlibat langsung dalam suatu kejadian, aktivitas, atau situasi nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Implementasinya dapat dilakukan melalui simulasi, permainan peran, studi lapangan, praktik laboratorium, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Misalnya, dalam pembelajaran pluralitas, siswa bisa diajak mengunjungi tempat ibadah lintas agama, berdialog dengan tokoh masyarakat dari latar belakang berbeda, terlibat dalam forum diskusi multikultural. Melalui pengalaman langsung ini, peserta didik menerima informasi secara pasif, membentuk makna melalui keterlibatan emosional dan sosial. Aktivitas semacam ini memungkinkan mereka merasakan realitas kompleks, sehingga mendorong lahirnya kesadaran reflektif yang lebih dalam pada tahap-tahap selanjutnya dalam siklus pembelajaran.

✓ *Reflective Observation* (merefleksikan pengalaman tersebut)

Pada tahap *Reflective Observation*, peserta didik diajak merenungkan pengalaman yang telah mereka alami secara langsung. Refleksi ini bertujuan mengidentifikasi apa yang mereka rasakan, pelajari, dan maknai dari aktivitas sebelumnya. Proses ini dapat difasilitasi melalui diskusi kelompok, jurnal reflektif, tanya jawab terbuka, atau presentasi pengalaman pribadi. Misalnya, setelah kunjungan ke tempat ibadah lintas agama, siswa dapat diminta merefleksikan apa yang mengejutkan mereka, nilai-nilai yang mereka temukan, dan bagaimana hal itu memengaruhi cara pandang mereka terhadap keberagaman. Melalui proses refleksi ini, peserta didik mulai menghubungkan pengalaman konkret dengan pemahaman diri dan sosial yang lebih luas. Tahap ini sangat penting karena menjadi jembatan antara tindakan dan pemahaman, serta membentuk dasar bagi pembentukan konsep-konsep baru pada fase berikutnya.

- ✓ *Abstract Conceptualization* (menyusun pemahaman atau teori berdasarkan refleksi)
  Tahap *Abstract Conceptualization* merupakan proses di mana peserta didik mulai menyusun pemahaman teoretis berdasarkan hasil refleksi dari pengalaman mereka lalui. Pada fase ini, mereka tidak hanya memahami apa yang terjadi, juga mulai menghubungkannya dengan konsep-konsep, prinsip, atau teori yang lebih luas. Misalnya, setelah merefleksikan kunjungan ke komunitas lintas agama, peserta didik mungkin mulai memahami makna toleransi dalam konteks sosial, pentingnya dialog antar iman, atau bahkan mengaitkannya dengan teori identitas sosial dan pluralisme. Guru berperan penting dalam membantu peserta didik mengaitkan pengalaman dan refleksi mereka dengan wacana ilmiah yang relevan, sehingga pembelajaran tidak bersifat empirik, tetapi juga konseptual. Proses ini memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta membuka ruang bagi pemaknaan mendalam terhadap realitas sosial yang mereka hadapi.
- ✓ *Active Experimentation* (mencoba menerapkan pemahaman itu dalam situasi baru)
  Pada tahap *Active Experimentation*, peserta didik diberi kesempatan menerapkan pemahaman dan konsep yang telah mereka susun ke dalam situasi baru atau tantangan nyata. Ini merupakan fase pembelajaran yang paling aplikatif, karena peserta didik tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga menguji efektivitas pemahaman tersebut dalam praktik. Misalnya, setelah memahami makna toleransi dan keberagaman secara reflektif dan konseptual, siswa dapat merancang kegiatan kampanye damai di sekolah, menjadi fasilitator dialog antarkelas, atau menciptakan proyek kolaboratif lintas budaya. Melalui tindakan ini, mereka mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Fase ini juga memberi ruang bagi peserta didik menguji, mengevaluasi, dan bahkan merevisi pemahamannya, sehingga proses belajar menjadi siklikal, terus berlanjut dan berkembang. Dengan begitu, pendidikan tidak lagi berhenti pada ranah kognitif, tetapi menyentuh aspek afektif dan praksis secara utuh.

Meskipun keempat tahapan *experiential learning* yang dikemukakan oleh David Kolb menawarkan pendekatan pembelajaran yang mendalam, namun penerapannya di tingkat SD

dan SMP tidaklah sederhana. Peserta didik pada jenjang ini umumnya masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan afektif yang membutuhkan pendampingan intensif, khususnya dalam merefleksi dan mengkonseptualisasi pengalaman. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat krusial sebagai fasilitator membimbing proses belajar dari tahap pengalaman konkret hingga aplikasi di dunia nyata. Di sisi lain, perkembangan digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam implementasi pendidikan pluralitas. Kini, informasi budaya dan nilai-nilai keberagaman dapat diakses dengan mudah melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan platform digital lainnya, tanpa harus melakukan kunjungan fisik ke situs budaya atau komunitas tertentu. Dalam konteks ini, sekolah perlu mengadopsi pendekatan *digital learning* sebagai media baru dalam memperkenalkan nilai pluralitas, misalnya dengan mendorong siswa membuat konten digital yang menggambarkan keberagaman budaya lokal, sejarah daerah, atau praktik hidup rukun antar umat beragama. Dengan cara ini, pembelajaran berbasis pengalaman tetap relevan, tetapi dikontekstualisasikan dalam lanskap digital yang lebih dekat dengan dunia peserta didik hari ini.

Pendekatan *digital learning*, meskipun peserta didik diberi ruang berekspresi dan mengeksplorasi berbagai sumber belajar melalui teknologi, peran guru tetap tidak tergantikan sebagai pendidik dan pengarah. Ketika siswa diminta membuat konten digital, seperti memperkenalkan seni tari tradisional, guru perlu mempersiapkan skema pembelajaran yang terstruktur, termasuk memberikan naskah atau arahan yang memuat informasi dasar tentang jenis tari, asal-usulnya, makna filosofis, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting agar produk digital yang dihasilkan peserta didik tidak hanya menarik secara visual, juga sarat akan muatan edukatif yang akurat dan kontekstual. Tanpa panduan tersebut, ada risiko informasi yang disampaikan menjadi dangkal atau bahkan keliru. Dengan demikian, integrasi antara kebebasan eksploratif siswa dan kerangka pedagogis yang disusun guru akan menciptakan pengalaman belajar yang seimbang: kreatif sekaligus bermakna.

- Proyek kelompok

Siswa dapat bekerja sama mengeksplorasi dan mempresentasikan berbagai aspek budaya yang ada di Indonesia, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, makanan khas, dan bahasa

daerah. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengetahuan tentang keragaman, juga belajar bekerja dalam kelompok yang mencerminkan keberagaman tersebut, mengembangkan sikap saling menghargai, dan memperkaya pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan berbagai latar belakang.

Salah satu cara efektif menanamkan nilai pluralitas di lingkungan sekolah adalah melalui proyek kelompok dirancang inklusif. Dalam kegiatan ini, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik memperkenalkan keberagaman budaya, agama, bahasa, atau tradisi yang ada di sekitar mereka. Yang penting, pembagian kelompok dilakukan tanpa membedakan latar belakang sehingga setiap siswa berkesempatan bekerja sama lintas identitas. Melalui interaksi ini, peserta didik mengalami langsung bagaimana bekerja dalam semangat kebersamaan, saling menghargai, dan mengatasi perbedaan secara konstruktif. Proyek seperti pembuatan video dokumenter budaya lokal, pentas seni lintas budaya, atau wawancara dengan tokoh dari berbagai komunitas, bisa menjadi wahana pembelajaran yang bermakna. Dengan pendekatan ini, sekolah tak hanya menjadi tempat transfer ilmu, juga ruang membangun kesadaran pluralitas melalui praktik sosial yang nyata.

Kegiatan ini seakar dengan konsep yang ditawarkan oleh David Johnson dan Roger Johnson yakni, pendekatan *Cooperative Learning*[10] bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui kerja sama, bukan kompetisi. Dalam konteks pendidikan pluralitas, metode ini menjadi sangat relevan karena mendorong interaksi antar peserta didik dari latar belakang yang beragam secara inklusif. Johnson

[10] Menurut Johnson dalam B. Santoso *Cooperative Learning* adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar danbekerjasama untuk sampai pada pengalaman belajaryang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Sedangkan Nurhadi mengartikan *Cooperative Learning* sebagai pembelajaran yangsecara sadar dan sengaja mengembangkan interkasi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Selanjutnya Davidson dan Kroll, sebagaimana yang dikutip oleh Hamdun, *Cooperative Learning* diartikan dengan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar sehingga siswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik. Walhasil, *Cooperative Learning* adalah metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Selain itu juga untuk memecahkan soal dalam memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab dan berpandangan bahwa semua siswa memiliki tujuan sama (Ismun Ali, 2021:250).

menggarisbawahi lima elemen penting, interdependensi positif, akuntabilitas individual, interaksi tatap muka yang mendorong, keterampilan sosial, dan refleksi kelompok. Melalui proyek kelompok yang dirancang dengan prinsip-prinsip ini, peserta didik belajar saling mendukung, bertanggung jawab atas tugas masing-masing, dan mengembangkan empati dalam interaksi sosial. Proses ini memperkuat pemahaman akademik, juga menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerja sama lintas identitas. Dengan demikian, *cooperative learning* menjadi wahana efektif dalam membentuk generasi cerdas juga matang secara sosial dalam menghadapi realitas masyarakat yang majemuk.

2. Implementasi Kurikulum Inklusif

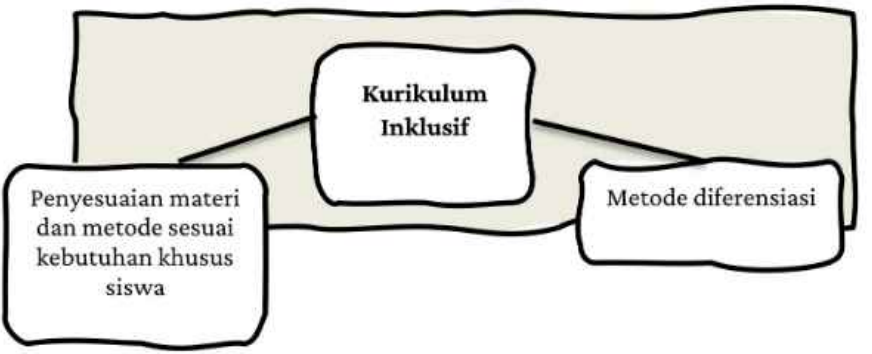

➢ Penyesuaian materi dan metode sesuai kebutuhan khusus siswa

Penyesuaian materi dan metode pembelajaran menjadi aspek yang sangat penting. Setiap siswa memiliki cara belajar berbeda-beda, dan kurikulum inklusif menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Sebagai contoh, bagi siswa dengan gangguan penglihatan, materi dapat disajikan dalam bentuk *braille*[11] atau audio. Sementara itu, bagi siswa dengan

[11] Braille adalah sistem tulisan sentuh yang dirancang untuk digunakan oleh tunanetra (orang yang tidak dapat melihat) agar mereka dapat membaca dan menulis melalui perabaan jari. Sistem ini ditemukan oleh Louis Braille, seorang tunanetra asal Prancis, pada awal abad ke-19. Huruf *braille* merupakan solusi bagi para tunanetra untuk dapat berkomunikasi melalui buku atau tulisan. Seiring berkembangnya teknologi masa kini huruf *braille* dapat juga digunakan untuk memberikan pembelajaran bagi para penyandang tunanetra. lebih dari 40 juta orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis, serta dapat

kesulitan belajar, materi dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana atau dengan menggunakan alat bantu yang lebih visual. Dengan demikian, penyesuaian ini memastikan bahwa tidak ada siswa tertinggal dan semua siswa memiliki kesempatan yang sama memahami materi yang diajarkan.

Penyesuaian materi dan metode pembelajaran merupakan elemen kunci dalam implementasi kurikulum inklusif, namun sering kali justru menjadi bagian yang terabaikan dalam praktik di lapangan. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyediakan lembaga pendidikan yang memisahkan antara sekolah umum dan sekolah berkebutuhan khusus, realitas di ruang kelas menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Di banyak sekolah umum maupun lembaga pesantren, muncul diskursus tersendiri terkait keberagaman tingkat kemampuan peserta didik. Diskursus ini berakar pada kenyataan bahwa tidak semua siswa memiliki kecepatan belajar, gaya memahami, dan latar belakang kognitif yang seragam (Khomsiatul Fitri Harahap, 2023:142). Namun dalam proses pembelajaran, banyak guru yang cenderung mengabaikan perbedaan tersebut dan menerapkan pendekatan yang seragam bagi semua siswa. Akibatnya, peserta didik yang memiliki kebutuhan atau keunikan tertentu justru tertinggal dan tidak mendapatkan ruang berkembang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa semangat inklusivitas belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran pedagogis para pendidik, dan karenanya, perlu ada penguatan pemahaman serta pelatihan berkelanjutan agar prinsip inklusi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran.

Tugas guru menjadi unsur vital dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Guru tidak cukup penyampai materi, harus pula jadi fasilitator memastikan setiap peserta didik dengan segala keunikan, kemampuan, dan latar belakangnya mendapatkan akses yang adil terhadap proses pembelajaran. Tanpa keterlibatan aktif guru dalam menyesuaikan metode, pendekatan, dan interaksi pembelajaran, maka implementasi pendidikan inklusif akan berjalan pincang. Ketimpangan perlakuan terhadap peserta didik, baik yang membutuhkan perhatian khusus maupun yang berada di luar standar umum, dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, peran guru tidak dapat digantikan oleh kebijakan atau kurikulum

---

mengenyam pendidikan sebagaimana rekan-rekannya yang awas. Karena itulah, tanggal 4 januari diperingati oleh dunia internasional sebagai "Hari Braille" (https://budaya.jogjaprov.go.id/koleksi-museum-sejarah-huruf-braille-bagi-tunanetra).

semata, ia adalah aktor utama menjembatani nilai-nilai inklusif menjadi kenyataan di dalam kelas. Tanpa kesadaran dan kompetensi guru yang memadai, inklusivitas pendidikan hanya menjadi konsep ideal yang jauh dari realitas.

➢ Implementasi metode diferensiasi

Pelopor utama metode diferensiasi dalam pendidikan adalah Carol Ann Tomlinson, seorang profesor pendidikan dari University of Virginia, Amerika Serikat. Metode diferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya penyesuaian strategi mengajar sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan masing-masing peserta didik. Dalam implementasinya, guru tidak lagi menyampaikan materi secara seragam kepada seluruh siswa, melainkan memberikan variasi dalam konten, proses, maupun produk pembelajaran. Misalnya, materi dapat disampaikan melalui teks, video, atau praktik langsung, proses belajar bisa dilakukan secara individual maupun kelompok dan hasil tugas dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, presentasi, atau proyek kreatif. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses belajar. Dalam konteks pendidikan inklusif, metode diferensiasi sangat relevan karena membuka ruang bagi setiap anak berkembang secara optimal, tanpa harus tunduk pada standar Tunggal (KEMDIKBUDRISTEK, 2021:26).

Adapun inti dari metode diferensiasi, berikut (Ahmad Zain Sarnoto, 2024: 15929):

✓ Diferensiasi konten

Menyesuaikan apa yang diajarkan kepada peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, atau profil belajar mereka contoh, siswa dengan kemampuan membaca tinggi diberi teks yang lebih kompleks, sementara yang lain membaca teks yang lebih sederhana namun tetap mengandung makna yang sama. Guru menyediakan materi melalui berbagai media, teks, video, infografik, atau manipulatif nyata. Tujuannya adalah semua siswa bisa mengakses materi pelajaran sesuai kemampuan awal mereka, tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

✓ Diferensiasi proses

Menyesuaikan bagaimana siswa belajar atau memproses informasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, contoh,

siswa kinestetik belajar melalui eksperimen atau simulasi. Siswa reflektif diberi waktu berpikir dan menulis sebelum diskusi. Guru memberikan beragam aktivitas dalam satu kelas, diskusi, proyek kreatif, atau latihan mandiri. Tujuannya adalah memastikan setiap siswa dapat memahami dan mengolah informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka.

- ✓ Diferensiasi produk
  Menyesuaikan bentuk hasil belajar atau *output* pembelajaran yang diminta dari siswa, disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kecakapan mereka, contoh, satu siswa membuat presentasi PowerPoint, siswa lain menulis esai, sementara lainnya membuat poster atau video. Proyek akhir yang bisa disesuaikan, membuat drama, menulis puisi, membuat karya ilmiah, dll. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling relevan dan bermakna bagi mereka.

Pendekatan Tomlinson dapat menjadi jembatan memastikan tidak ada peserta didik terpinggirkan. Lebih dari sekadar metode teknis, prinsip diferensiasi mengandung semangat keadilan dan kesetaraan, yang selaras dengan cita-cita pendidikan inklusif nasional. Integrasi prinsip-prinsip Tomlinson dalam pelatihan guru dan praktik pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia menjadi langkah strategis menjawab tantangan implementasi kurikulum responsif dan adaptif terhadap keberagaman peserta didik.

Pemerintah juga telah mengatur system kebijakan seperti; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan bermutu. Pasal 5 ayat (2): Warga negara yang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Diatur juga dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif "pelayanan pendidikan memberikan kesempatan belajar setara bagi semua peserta didik, termasuk memiliki kebutuhan khusus. Dalam praktiknya, metode diferensiasi sangat dibutuhkan mendukung prinsip inklusivitas ini". Demikian juga dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah "Menyebutkan bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan berpusat pada peserta didik. Guru dituntut

menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, termasuk dalam gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan".

Meskipun istilah "metode diferensiasi" tidak disebut secara literal dalam undang-undang, prinsip, pendekatan, dan kewajiban melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sangat kuat tertanam dalam kerangka sistem pendidikan Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan metode diferensiasi seringkali belum terlaksana secara utuh. Banyak guru masih mengajar secara menyeluruh dengan pendekatan seragam kepada seluruh peserta didik, tanpa mempertimbangkan keragaman gaya belajar, kesiapan, atau minat mereka. Padahal, dalam prinsip diferensiasi, khususnya pada aspek konten, guru seharusnya dapat menyajikan materi dengan beragam pendekatan seperti teks, audio visual, diskusi, atau simulasi agar siswa mengakses informasi sesuai gaya belajarnya. Namun, kenyataan di lapangan justru pembelajaran berpusat pada aktivitas seragam, misalnya hanya sekadar menulis atau mencatat. Hal ini tentu tidak mencerminkan semangat pembelajaran berdiferensiasi yang inklusif dan adaptif.

Ketika guru tidak menggunakan siklus diferensiasi secara komprehensif (konten, proses, dan produk), maka peserta didik dengan kebutuhan atau kekuatan belajar yang berbeda akan kesulitan berkembang secara optimal. Dalam praktik diferensiasi konten, sebetulnya terdapat ruang inovatif sangat menarik diolah oleh guru. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah membalik peran tradisional guru sebagai penyedia utama media pembelajaran, menjadi fasilitator memberi ruang bagi peserta didik menjadi kreator. Misalnya, dalam mata pelajaran Seni Budaya, guru dapat memberikan tugas kepada siswa membuat media sendiri yang memuat gambar, cerita, atau artefak terkait kebudayaan lokal. Lebih jauh lagi, siswa dapat mempresentasikan hasil karya tersebut melalui platform media sosial sebagai bentuk apresiasi dan publikasi digital. Tentu tugas tersebut diberikan berdasarkan minat masing-masing siswa, bukan paksaan, agar mereka merasa nyaman dan terlibat aktif dalam proses belajar. Dengan pola semacam ini, pembelajaran menjadi lebih hidup, juga terasa nyata dan membumi. Inilah esensi dari kurikulum inklusif ketika setiap peserta didik merasa diperhatikan, diakui keberadaannya, dan diberi ruang untuk tumbuh sesuai potensinya masing-masing.

3. Implementasi toleransi dan kerukunan

➢ Program dialog antaragama dan budaya

Penting bagi sekolah mengimplementasikan program-program yang mendorong dialog antaragama dan budaya. Program ini dapat berbentuk kegiatan yang memungkinkan siswa dari latar belakang berbeda saling berbagi pandangan, pengalaman, dan nilai-nilai yang mereka anut. Misalnya, program dialog antaragama yang mengundang perwakilan agama yang berbeda untuk berbicara tentang ajaran-ajaran agama mereka serta pentingnya hidup berdampingan dengan damai. Melalui program seperti ini, siswa lebih memahami dan menghargai keberagaman agama yang ada di sekitar mereka, serta belajar menghormati keyakinan orang lain tanpa menilai atau menghakimi (Frejhon Cleimen Lasatira, 2017:75).

Salah satu kelemahan dalam penanaman nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama di sekolah adalah ketergantungan terlalu besar pada penyampaian lisan oleh guru, tanpa menghadirkan pengalaman nyata yang membangkitkan kesadaran siswa. Padahal, membangun pemahaman lintas agama dan budaya membutuhkan ruang interaksi konkret dan dialogis. Sayangnya, program dialog antaragama yang melibatkan tokoh lintas agama dan budayawan masih sangat jarang dilakukan di sekolah-sekolah. Padahal, jika para tokoh ini dihadirkan secara langsung memperkenalkan identitas, ajaran, dan nilai-nilai luhur dari agama dan budayanya masing-masing, kesadaran siswa akan keberagaman bisa tumbuh secara alami dan mendalam. Karena itu, sekolah perlu menciptakan momentum pembelajaran kontekstual seperti "hari budaya" atau "karnaval adat sekolah" yang memungkinkan siswa berpartisipasi

aktif, mengenakan pakaian adat, menyajikan pertunjukan budaya, dan berdialog langsung dalam suasana meriah dan edukatif. Melalui kegiatan semacam ini, siswa tidak lagi mengenal keberagaman budaya hanya dari gambar atau narasi guru, melainkan dari pengalaman hidup yang menyentuh dan menyenangkan. Tentu, keberhasilan ini sangat bergantung pada kesadaran para penyelenggara pendidikan dan kepala sekolah menjadikan pendidikan toleransi bukan sebagai wacana semata, tetapi sebagai praktik pembelajaran terstruktur dan bermakna.

➢ Metode kolaboratif

Metode pembelajaran kolaboratif merupakan cara efektif dalam menumbuhkan nilai toleransi dan kerukunan. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman yang memiliki pandangan dan latar belakang berbeda. Dalam suasana ini, siswa belajar berdiskusi, berkomunikasi, dan mencari solusi bersama dalam menghadapi perbedaan (Arum Putri Rahayu dkk, 2024:369).

Pada konteks metode kolaboratif, pembelajaran seperti ini bukan sekadar kerja kelompok biasa, tapi bagaimana setiap individu dalam kelompok berkontribusi dari kekuatannya sendiri, dan belajar dari kekuatan orang lain. Saat siswa pandai menggambar diberi ruang berbagi keahliannya kepada temannya yang unggul di *public speaking*, dan sebaliknya, maka di situ terjadi pembelajaran dua arah bukan guru yang menggurui, tapi sesama siswa saling menguatkan. Pemetaan minat dan potensi adalah langkah penting sayangnya belum menjadi perhatian utama di banyak sekolah. Sistem pendidikan masih terlalu fokus pada keseragaman, padahal justru dalam keberagaman potensi itulah kolaborasi menemukan ruangnya. Yang lebih indah lagi, pola seperti ini dapat menumbuhkan toleransi, empati, dan saling menghargai antar peserta didik, karena mereka tidak hanya belajar bersama, juga saling membutuhkan. Jika pola ini diterapkan secara konsisten, sekolah menjadi laboratorium kecil dari masyarakat plural yang inklusif.

Metode kolaboratif tidak hanya relevan diterapkan di dalam kelas, juga diperluas dalam bentuk kerja sama antarsekolah, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka Belajar mendorong pembelajaran bermakna, lintas batas, dan berorientasi pada pengalaman nyata. Di era digital, kolaborasi tidak lagi harus dilakukan melalui studi tur yang mahal

dan memakan waktu, cukup dengan membentuk grup virtual lintas sekolah, dan mengadakan agenda diskusi atau proyek bersama secara berkala, misalnya seminggu sekali. Tentu, bagi sebagian sekolah, terutama yang sumber dayanya terbatas, hal ini mungkin terdengar kompleks karena banyaknya tanggung jawab administratif. Namun, kuncinya adalah membangun fondasi internal terlebih dahulu. Jika sistem kolaborasi di dalam sekolah sudah berjalan baik, maka memperluas jejaring ke luar menjadi langkah alami yang lebih mudah dijalankan.

- Festival lintas budaya

Salah satu contoh kegiatan mendukung toleransi dan kerukunan adalah festival budaya atau kegiatan bersama lintas agama dan budaya. Festival budaya ini dapat menjadi kesempatan bagi siswa memperkenalkan dan merayakan tradisi, makanan, pakaian, serta seni dari berbagai budaya yang ada di Indonesia atau di dunia. Kegiatan semacam ini memberikan wawasan tentang keberagaman budaya, juga mempererat hubungan antar siswa dengan menciptakan suasana saling menghargai dan memahami. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, siswa belajar meskipun ada perbedaan, kita semua memiliki kesamaan dalam hal kemanusiaan dan hidup bersama dalam kerukunan yang saling mendukung.

Pelaksanaan festival budaya di lingkungan sekolah, meskipun ideal kegiatan ini dapat menjadi wahana efektif menanamkan nilai-nilai pluralitas, toleransi, dan kebanggaan terhadap keragaman budaya bangsa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Salah satu persoalan utama keterbatasan anggaran dan fasilitas. Banyak sekolah, terutama berada di wilayah dengan sumber daya terbatas, kesulitan mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan budaya secara maksimal. Selain itu, partisipasi siswa yang rendah sering menjadi kendala, terutama jika mereka tidak merasa dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan. Ketimpangan representasi budaya pun kadang terjadi, ketika budaya mayoritas mendapatkan panggung lebih besar dibandingkan minoritas, sehingga alih-alih membangun inklusivitas, festival justru memperkuat sekat-sekat simbolik.

Di sisi lain, tidak semua guru memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola kegiatan budaya edukatif dan sensitif secara sosial. Akibatnya, festival hanya berjalan sebagai ajang

seremonial tanpa nilai pembelajaran mendalam. Tantangan lainnya terletak pada jadwal akademik yang padat, menyebabkan festival budaya sering dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan bagian dari proses pembelajaran inti. Tak kalah penting adalah tantangan dalam menghadapi sensitivitas antaragama dan antarbudaya. Apabila kegiatan tidak dikemas dengan pendekatan dialogis dan inklusif, ada potensi munculnya kesalahpahaman bahkan konflik kecil. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan strategi pedagogis yang matang agar festival budaya benar-benar menjadi ruang pembelajaran yang hidup, bukan sekadar simbolik.

4. **Implementasi Ruang yang Inklusif**

Ruang yang inklusif merujuk pada lingkungan yang mendukung keberagaman dan inklusivitas, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa terkecuali. Dalam konteks pendidikan, menciptakan ruang kelas yang inklusif sangat penting memastikan bahwa semua siswa, baik berkebutuhan khusus maupun berasal dari latar belakang berbeda, dapat belajar dengan nyaman dan optimal. Ruang inklusif tidak hanya mencakup fisik ruang kelas, juga menciptakan suasana mendukung interaksi sosial yang positif dan meningkatkan rasa aman bagi setiap siswa. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri siswa dan memastikan mereka merasa dihargai (Rosma Sari, 2019:II).

Salah satu langkah menciptakan ruang kelas inklusif adalah mendesain ruang kelas yang ramah untuk semua siswa, termasuk berkebutuhan khusus. Mendesain ruang kelas yang ramah berarti memperhatikan berbagai faktor, seperti aksesibilitas bagi siswa dengan mobilitas terbatas, pencahayaan yang memadai, serta ruang yang cukup untuk bergerak dengan bebas. Selain itu, desain ruang kelas harus memperhitungkan penggunaan alat bantu teknologi atau material pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau disabilitas lainnya. Ruang yang inklusif juga didesain dengan memasukan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya.

Memajang hasil karya siswa yang merepresentasikan kekayaan budaya masing-masing bukan hanya memperindah ruang kelas, juga menciptakan atmosfer pembelajaran yang menghargai keberagaman. Ketika siswa dari berbagai latar belakang diberi ruang menampilkan identitas budayanya seperti makanan khas, pakaian adat, atau simbol-simbol tradisional mereka merasa diterima, juga

dihargai secara personal dan kolektif. Pendekatan ini memperkuat pesan bahwa ruang kelas bukan sekadar tempat belajar akademik, juga menjadi wadah tumbuhnya nilai-nilai pluralitas dan saling menghormati. Keterlibatan aktif siswa dari berbagai kalangan juga membentuk relasi sosial yang setara, karena semua diberi ruang ekspresi yang sama. Dalam konteks pedagogi inklusif, ini disebut sebagai bagian dari pembelajaran responsif terhadap budaya (*culturally responsive teaching*), di mana kurikulum dan lingkungan belajar dibangun berdasarkan identitas siswa yang beragam.

Ruang inklusif, bisa dikatakan sebagai kelas museum, istilah "kelas museum" dapat dijadikan sebagai konsep inovatif khususnya dalam kerangka pengembangan ruang belajar inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Konsep ini menggambarkan ruang kelas bukan hanya tempat belajar akademik semata, melainkan juga sebagai ruang representasi budaya, identitas, dan ekspresi individual para peserta didik. Seperti halnya museum yang menyimpan dan memamerkan warisan budaya, ruang kelas diibaratkan sebagai wadah yang menampung kekayaan latar belakang siswa mulai dari gambar makanan tradisional, pakaian adat, hingga simbol-simbol kebudayaan lokal. Dalam praktiknya, guru berperan sebagai kurator mengarahkan dan membimbing siswa menampilkan kekhasan budaya masing-masing melalui proyek seni, pameran mini, atau dekorasi dinding kelas. Dengan demikian, ruang kelas menjadi tempat menyenangkan dan akomodatif, juga menjadi medan interaksi nilai yang membangun rasa saling menghormati, toleransi, dan kesadaran kolektif akan pluralitas. Konsep "kelas museum" ini menawarkan pendekatan baru dalam pendidikan inklusif menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam proses pembelajaran (GDI Hub, 2022:5-8).

Ketika ruang inklusif diterjemahkan ke dalam bentuk "kelas museum", maka ruang kelas mempunyai dua dimensi yakni mentransfer ilmu dan ruang dialektika budaya dan identitas. Implementasi ini memungkinkan siswa mengalami dan memahami keberagaman langsung, bukan hanya melalui teks atau ceramah. Dengan memajang artefak atau representasi visual kearifan local seperti baju adat, makanan khas, alat musik, atau simbol tradisional dan menyertakan narasi singkat mengenai asal-usul dan maknanya, siswa memiliki konteks yang lebih dalam tentang kebudayaan tersebut. Narasi ini penting bukan sebagai informasi, penghubung emosional dan intelektual antara peserta didik dan kekayaan budaya

bangsanya. Ini juga menjadi strategi pembelajaran berbasis lingkungan memungkinkan guru menyampaikan materi kebudayaan dengan cara kontekstual dan konkret, menjadikan setiap sudut kelas sebagai sumber belajar.

Lebih dari itu, setiap hari siswa akan terpapar oleh keragaman budaya di sekitar mereka, secara perlahan menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Maka benar, pembelajaran tidak lagi kaku dan abstrak, tetapi hidup, dinamis, dan relevan dengan realitas multikultural yang mereka jalani. Jika dikelola secara konsisten, "kelas museum" bukan hanya simbol inklusivitas, melainkan alat transformasi sosial kecil yang tumbuh dari ruang kelas ke masyarakat lebih luas. Namun, persoalan utama pendidikan kita saat ini bukan semata soal kekurangan dana, melainkan terletak pada minimnya inisiatif dan visi pendidikan progresif di tingkat satuan pendidikan. Banyak sekolah memiliki sumber daya cukup, namun gagal mengoptimalkannya karena budaya birokrasi yang kaku, kurangnya dorongan inovasi, dan mentalitas puas diri terhadap rutinitas lama.

Konsep seperti "kelas museum" yang sederhana, murah, namun sarat makna sering kali dianggap remeh atau tidak prioritas. Padahal, inilah bentuk pembelajaran kontekstual dan humanis sangat dibutuhkan di era globalisasi dan konektivitas antarbudaya. Di saat dunia saling terhubung dan perbedaan menjadi keniscayaan sehari-hari, ruang kelas seharusnya menjadi miniatur peradaban yang menyiapkan siswa menjadi warga dunia yang toleran, cerdas budaya, dan peka terhadap keragaman. Sayangnya, inisiatif semacam ini tergantung pada segelintir guru yang kreatif dan visioner, sementara sebagian besar lainnya masih terjebak pada pola ajar linear dan tekstual. Sistem pun jarang memberi ruang apresiasi atau dukungan bagi inovasi dari bawah. Maka tidak mengherankan jika sekolah-sekolah yang benar-benar menerapkan pendekatan inklusif dan multikultural secara nyata bisa dihitung dengan jari. Yang dibutuhkan sekarang bukan soal reformasi kurikulum, tetapi reformasi budaya kerja di sekolah. Inovasi harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral pendidik, bukan beban administratif. Sekolah perlu membangun ekosistem yang menghargai kreativitas, mendorong kolaborasi, dan membuka ruang bagi ide-ide segar dari para guru, siswa, maupun komunitas sekitar.

B. Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi

Pendidikan Islam berbasis demokrasi merupakan pendekatan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendidikan mampu membentuk karakter, sikap, dan keterampilan siswa agar menjadi individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Implementasi pendidikan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik empirik maupun teoritis. Pendidikan Islam memiliki akar kuat dalam nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan musyawarah. Dalam Al-Qur'an, Surah Ash-Shura (42:38) menekankan perlunya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis demokrasi dapat dilihat sebagai upaya mengajarkan siswa pentingnya keterlibatan dalam proses sosial dan politik.

Nurcholish Madjid, seorang tokoh intelektual Muslim, mengatakan pendidikan yang demokratis dalam menciptakan masyarakat yang beradab. Pendidikan harus mampu membentuk individu kritis dan mampu berpikir mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, Madjid mengajak umat Muslim mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Implementasi pendidikan Islam berbasis demokrasi juga melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Melalui forum komunikasi antara sekolah dan orang tua, diharapkan dapat terbangun kesepahaman mengenai nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anak. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter siswa (Akmal Hawi, 2019:108).

John L. Esposito seorang cendekiawan Barat terkemuka dalam studi Islam kontemporer, pemikiran-pemikirannya berkembang dan dikenal luas pada paruh kedua abad ke-20 hingga awal abad ke-21. John Esposito berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidaklah saling bertentangan secara esensial. Menurutnya, nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah (*shura*), dan tanggung jawab sosial dalam Islam sangat mungkin dikembangkan dalam kerangka demokrasi modern. Ia juga mengkritik stereotip Barat yang menyamakan Islam dengan otoritarianisme. John sangat mendukung adanya Pendidikan Islam demokrasi, mendukung prinsip keterbukaan, keadilan dan kesempatan yang sama berperan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi (Kiki Muhamad Hakiki, 2016:4).

Pendidikan Islam berbasis demokrasi seharusnya menjadi ruang subur bagi tumbuhnya nilai-nilai kebebasan berpikir, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut masih jauh dari harapan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, kebebasan berpendapat atau pemikiran kritis terhadap kebijakan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas, bukan sebagai ekspresi intelektual yang sehat. Hal ini mencerminkan kultur otoriter yang masih bercokol dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Contoh nyata dari realitas ini dapat dilihat dalam kasus tokoh intelektual seperti Rocky Gerung, yang kerap mengalami perlawanan baik secara rasis, verbal, bahkan fisik karena pandangan kritisnya terhadap pemerintah. Alih-alih dijadikan bagian dari dinamika demokrasi, kritik justru ditanggapi dengan tindakan represif, termasuk berhadapan dengan aparat hukum. Ironisnya, Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi, namun rakyat yang menyuarakan kritik justru diintimidasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih bersifat prosedural, belum menyentuh pada nilai substansialnya, yakni penghargaan terhadap kebebasan berpikir dan menyuarakan kebenaran secara adil dan bermartabat.

Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang tidak berhenti pada proses formal seperti pemilu, pembentukan lembaga negara, atau partisipasi administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai substansial seperti kebebasan berpendapat, keadilan sosial, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap keberagaman. Dalam demokrasi yang ideal, suara setiap warga negara dihargai tanpa diskriminasi, dan kekuasaan negara dikontrol oleh prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Demokrasi idealnya memberi ruang bagi kritik dan oposisi sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan publik. Kebebasan pers, kemerdekaan akademik, serta ruang publik terbuka menjadi penopang penting dalam sistem ini. Dalam konteks pendidikan, demokrasi ideal tercermin dari pembelajaran membebaskan, membentuk peserta didik menjadi subjek berpikir, bukan objek doktrinasi. Nilai-nilai seperti dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi elemen penting. Demokrasi ideal bukan berarti tanpa konflik, melainkan bagaimana konflik dikelola secara damai, adil, dan berdasarkan hukum yang berpihak pada rakyat, bukan pada elite kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi ideal

adalah sistem hidup dari bawah dari Masyarakat bukan hanya ditentukan oleh elite di atas (LestiHeriyanti & SitiBaroroh, 2022:104).

Berdasarkan pada uraian tersebut maka implementasi pendidikan Islam berbasis demokrasi berlandaskan pada prinsip "Demokrasi Berkeadaban" adalah gagasan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip etika, moral, dan budaya luhur. Ini bukan sekadar sistem politik yang memberi ruang kebebasan berpendapat atau pemilihan umum, tetapi juga kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Gabriana Akhira Malik dkk, 2021:701), berikut gambarannya:

1. Keterlibatan

Prinsip keterlibatan dalam konteks pendidikan adalah melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu siswa, guru, dan orang tua dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Salah satu bentuk penerapan prinsip keterlibatan ini adalah melalui musyawarah kelas, di mana semua pihak diberikan kesempatan berdiskusi dan membuat keputusan bersama.

Pendidikan Islam demokratis menolak model *top-down* yang otoriter. Sebaliknya, mendorong pengembangan pemikiran kritis, penghargaan terhadap suara setiap individu, dan pembiasaan dialog. Ini bukan hanya nilai-nilai demokrasi modern, tetapi juga memiliki akar kuat dalam sejarah peradaban Islam, di mana ulama, pemimpin, dan rakyat duduk bersama membahas persoalan umat. Lalu, apakah prinsip keterlibatan ini wajib? Jawabannya, sangat perlu. Sebab pendidikan yang meminggirkan keterlibatan akan cenderung melahirkan siswa pasif, tidak percaya diri, dan mudah ditundukkan oleh kekuasaan. Sebaliknya, keterlibatan yang sehat justru membangun peserta didik yang sadar peran sosialnya, mampu menyampaikan pendapat, dan terlatih menyelesaikan persoalan bersama secara bijak.

Di era digital, prinsip keterlibatan dalam pendidikan memang menghadapi tantangan baru berupa jarak fisik antara siswa dan guru. Namun, jarak bukan berarti keterlibatan mustahil. Justru dengan dukungan teknologi, keterlibatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan luas. Guru dapat membangun forum diskusi daring, grup belajar di media sosial, atau menggunakan platform pembelajaran digital interaktif memungkinkan siswa menyampaikan

pendapat, bertanya, dan berdialog secara *real time* maupun asinkron. Orang tua juga bisa dilibatkan melalui pertemuan daring secara berkala untuk membahas perkembangan anak dan memberikan masukan terhadap kebijakan sekolah. Di sisi lain, guru perlu menciptakan suasana digital yang aman dan nyaman, agar setiap siswa merasa dihargai dan tidak takut berpartisipasi. Dengan pendekatan ini, prinsip keterlibatan akan tetap hidup, juga mengalami perluasan bentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, meskipun jarak ada, relasi edukatif tetap bisa hangat dan inklusif bila dikelola dengan kesadaran dan kreativitas.

2. Keadilan

Pendidikan berbasis demokrasi berfokus pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Keadilan dalam pendidikan merujuk pada prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, sedangkan kesetaraan merujuk pada memberikan kesempatan yang setara kepada setiap siswa berkembang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau fisik mereka. Pendidikan yang berorientasi pada demokrasi menekankan perlunya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan berbasis demokrasi, keadilan tidak hanya dilihat dari segi pemberian akses yang setara kepada setiap individu mendapatkan Pendidikan juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Sebagai contoh, siswa dari keluarga kurang mampu harus diberikan dukungan lebih agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan meraih prestasi mereka (Marwah Salim & Syamsul Aripin, 2025:545-546).

Prinsip keadilan dalam pendidikan berbasis demokrasi merupakan elemen penting yang banyak disorot oleh para ahli pendidikan dan filsuf. Keadilan di sini dimaknai sebagai perlakuan yang sama dan pemberian hak yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. John Rawls, seorang filsuf politik Barat, dalam teorinya tentang *justice as fairness*, bahwa keadilan sebagai asas utama dalam pengaturan lembaga sosial, termasuk pendidikan. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan harus memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang kurang beruntung, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Muhammad Taufik, 2013:51). Sedangkan Paulo Freire, tokoh

pendidikan dari Brasil, memandang keadilan dalam pendidikan terwujud melalui proses pembebasan. Pendidikan harus membongkar ketimpangan sosial dan memberi ruang bagi peserta didik dari semua lapisan untuk berpikir kritis, menyuarakan gagasan, dan berpartisipasi aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil (Siti Aminah Saing dkk, 2023:409).

Di Indonesia sendiri, konsep keadilan pendidikan tercermin dalam kebijakan pemerataan akses pendidikan, pendidikan inklusif, dan upaya afirmatif bagi wilayah tertinggal atau peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam kerangka demokrasi, prinsip keadilan menjadi dasar menciptakan sistem pendidikan yang tidak diskriminatif, berorientasi pada kesetaraan, dan menjamin setiap warga negara dapat mengakses pendidikan bermutu. Ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam beberapa pasal berikut: Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah memiliki kewajiban memastikan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar, tersedia dan tidak menjadi beban finansial bagi masyarakat.

Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini adalah dasar hukum yang kuat untuk pemerataan pendidikan, karena anggaran yang memadai memungkinkan pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian beasiswa, dan pelatihan guru semua itu berkontribusi pada akses pendidikan yang lebih adil. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini memperkuat bahwa pendidikan adalah bagian dari pengembangan diri manusia, dan akses terhadapnya tidak diskriminatif.

Meski secara normatif konstitusi dan berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan yang cukup mencolok. Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah dalam proses seleksi CPNS atau PPPK, di mana muncul dugaan bahwa banyak yang lolos bukan semata karena kapasitas dan kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu atau "ordal" (orang dalam). Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya terbuka dan adil. Begitu pula dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama di sekolah-sekolah unggulan. Idealnya, sekolah unggulan menjadi tempat bernaungnya siswa yang memiliki kapasitas akademik tinggi atau bakat istimewa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa beberapa siswa yang tidak memenuhi kriteria prestasi bisa diterima karena faktor hubungan keluarga, status sosial, atau bahkan pengaruh kekuasaan. Fenomena ini menggerus rasa keadilan dan menyingkirkan potensi-potensi lain yang seharusnya mendapat ruang berkembang. Dalam konteks ini, keadilan belum sepenuhnya menjadi roh utama dalam sistem pendidikan kita ia lebih sering menjadi jargon daripada kenyataan. Maka, perlu ada evaluasi menyeluruh dan reformasi sistemik agar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan benar-benar hidup dalam denyut pendidikan nasional.

3. Aspirasi/pendapat

Aspirasi atau pendapat merupakan salah satu pilar penting yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah, partisipasi, dan penghargaan terhadap kebebasan berpikir. Islam sendiri menempatkan musyawarah sebagai bagian dari prinsip kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38: *"Dan urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka."* Ini menegaskan bahwa memberi ruang terhadap pendapat setiap individu adalah bagian dari etika sosial Islam. Dalam konteks pendidikan, aspirasi berarti membuka ruang bagi siswa, guru, bahkan orang tua mengemukakan gagasan, kritik, dan solusi atas kebijakan atau proses pembelajaran. Hal ini sangat penting karena melalui partisipasi aktif, pendidikan tidak lagi bersifat *top-down* atau satu arah dari guru ke siswa, tetapi menjadi ruang interaksi dua arah yang membangun pemikiran kritis dan tanggung jawab kolektif. Demokrasi dalam pendidikan Islam tidak meniadakan otoritas guru, tetapi mengajak setiap elemen dalam pendidikan berdialog dan

bersama-sama menentukan arah pembelajaran (Herman Lawelai dkk, 2022:42). Namun, dalam praktiknya, aspirasi sering kali belum mendapatkan tempat yang layak, terutama karena sistem pendidikan kita masih kental dengan budaya hierarkis. Oleh karena itu, pendidikan Islam demokratis mendorong transformasi budaya sekolah, dari yang otoriter menuju yang lebih dialogis dan kolaboratif, sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* bahwa pendidikan harus membawa kebaikan, keterbukaan, dan keadilan bagi semua pihak.

Idealnya, pendidikan harus menjadi ruang membentuk manusia berakhlak sekaligus berpikir kritis dan memiliki keberanian moral. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, nilai-nilai luhur seperti *tawadhu'* seringkali diajarkan secara parsial tanpa disertai penanaman kesadaran akan hak berbicara, hak bertanya, bahkan hak menegur secara santun. Dalam banyak konteks, terutama di pesantren atau lembaga keagamaan, ketawadhu'an kadang berubah menjadi alat dominasi, menciptakan relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid. Dalam demokrasi berkeadaban, keterlibatan aktif dan hak menyampaikan pendapat adalah bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika murid tidak diberikan ruang berbicara, apalagi mengkritik, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi besar. Kasus-kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pesantren, misalnya, bukan hanya tentang kejahatan individual, tapi juga tentang sistem pendidikan yang gagal menciptakan ruang aman bagi para murid, karena mereka sejak awal dibentuk patuh tanpa syarat (Ida Nurlaeli, 2022:37-38).

Maka dari itu, penting sekali untuk menanamkan prinsip bahwa adab dan akhlak sejatinya bukanlah penghalang menyuarakan kebenaran, melainkan landasan kokoh bagi keberanian bermartabat. Membungkam suara hati justru darinya lahir keberanian menyuarakan kebenaran dengan cara yang luhur. Pendidikan Islam seharusnya mengajarkan murid untuk tawadhu' tanpa kehilangan daya kritis, dan menghormati guru tanpa meniadakan hak mereka mempertanyakan sesuatu yang keliru. Inilah wajah dari demokrasi yang beradab bukan hanya tertib secara lahiriah, tetapi juga sehat secara moral dan intelektual.

C. Pendidikan Islam Egaliter

Pendidikan Islam, sebagai salah satu sistem pendidikan yang berkembang di dunia, memiliki prinsip egalitarian sangat kuat, yaitu prinsip kesetaraan. Dalam pandangan Islam, setiap individu, tanpa memandang status sosial, etnis, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi, memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan. Prinsip ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan bagi setiap umat manusia, baik pria maupun wanita, kaya atau miskin. Implementasi pendidikan Islam egaliter dapat dilihat dalam berbagai aspek. Pertama, Islam menekankan bahwa ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim" (Al-Imam Al-Ghazali, Ibnu Ibrahim Ba'adillah (penerjemah), 2018:21). Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi dalam hak belajar, dan setiap individu, tanpa terkecuali, harus berusaha memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Pendidikan egaliter merupakan konsep berakar dari perkembangan filsafat modern, khususnya setelah Revolusi Prancis dan semakin menguat pasca-Perang Dunia II. Semangat melandasi pendidikan egaliter adalah prinsip *liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan) yang menjadi fondasi gerakan revolusioner Prancis. Setelah Perang Dunia II, ketika dunia mengalami krisis kemanusiaan yang mendalam akibat kolonialisme, perang, dan ketidakadilan sosial, muncul dorongan kuat menciptakan sistem sosial dan pendidikan yang menjunjung tinggi martabat manusia secara universal. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai alat dominasi kelas atau golongan tertentu, melainkan sebagai instrumen pembebasan dan pemerdekaan manusia dari belenggu ketimpangan (Adita Taufik Widianto & Mahfud, 2023:858).

Prinsip kesetaraan dalam pendidikan egaliter tidak berarti menyeragamkan peran atau identitas semua orang, melainkan mengakui bahwa setiap manusia, apapun latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk belajar, berpikir, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, meskipun manusia memiliki peran yang berbeda baik secara gender, sosial, maupun kultural mereka tetap memiliki nilai yang setara sebagai subjek pendidikan. Yang lebih penting dari sekadar distribusi akses adalah terbentuknya nilai kesetaraan dalam sistem pendidikan itu sendiri, bahwa tidak ada

yang lebih tinggi karena status, dan tidak ada yang direndahkan karena perbedaan. Inilah yang menjadi esensi pendidikan egaliter yaitu mendidik manusia untuk saling menghargai, memahami perbedaan, dan berjuang bersama dalam iklim keadilan sosial.

Di Indonesia, prinsip egaliter yaitu kesetaraan dan persamaan hak setiap warga negara diatur secara jelas dalam beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Meskipun istilah "egaliter" tidak disebut secara eksplisit, nilai-nilai yang mendasarinya termuat dalam berbagai ketentuan konstitusional berikut: Pasal-Pasal UUD 1945 Mengatur Tentang Kesetaraan (Egaliter), Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini adalah dasar konstitusional utama prinsip egaliter, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi.

Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Menguatkan prinsip non-diskriminasi dan menjamin perlakuan setara bagi semua orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau identitas lainnya. Pasal 28I Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ini menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi baik dalam pendidikan, pekerjaan, hukum, maupun aspek kehidupan lainnya. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini menjadi landasan penting untuk akses pendidikan yang merata, sebagai wujud penerapan prinsip egaliter dalam pendidikan.

UUD 1945 secara jelas memuat prinsip-prinsip egaliter sebagai bagian dari dasar negara. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mengharuskan sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, serta menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ekonomi, gender, suku, atau agama. Maka dari itu, pendidikan Islam berpijak pada konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai kesetaraan ini secara nyata baik dalam akses, isi kurikulum, maupun relasi antara pendidik dan peserta didik.

Gerakan feminisme, di dunia Barat, memang dari pergulatan panjang terhadap diskriminasi struktural terhadap Perempuan baik dalam ruang domestik, pendidikan, hingga politik. Tokoh-tokoh feminisme seperti Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill, salah satu pejuang hak perempuan yang sudah menikah yang paling menonjol adalah Caroline Norton memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya setelah Caroline bercerai. Telah berkontribusi besar dalam mendobrak struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam konteks Barat, ini merupakan perjuangan mendapatkan kesetaraan hak secara sipil dan politik, yang memang sebelumnya sangat timpang (Ni Komang Arie Suwastini, 2013:200).

Pada konteks Islam, munculnya tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud menawarkan dimensi baru dalam diskursus keagamaan. Amina Wadud adalah seorang akademisi dan cendekiawan Muslim asal Amerika, yang dikenal karena pendekatan tafsir Al-Qur'an berbasis gender. Ia mencoba membaca ulang teks-teks wahyu dengan menolak asumsi patriarkal yang sering melekat dalam penafsiran klasik. Puncak kontroversinya terjadi ketika ia menjadi imam dan khatib salat Jumat pada tahun 2005 di New York, yang dipandang sebagai tindakan radikal bahkan oleh banyak kalangan Muslim, karena bertentangan dengan tradisi dan konsensus ulama tentang peran kepemimpinan salat Jumat. Dari sudut pandang sebagian besar fuqaha, tindakan seperti ini dianggap melampaui batas syar'i karena imam salat Jumat dipandang sebagai posisi yang memiliki dimensi kepemimpinan publik (*imamah kubra*), yang secara tradisional diperuntukkan bagi laki-laki. Namun dari sudut pandang Amina Wadud dan para pendukungnya, hal ini adalah bentuk perjuangan menantang sistem tafsir dan tradisi yang tidak sepenuhnya bersumber dari wahyu, tetapi lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki Arab abad pertengahan (Ujang Imamul Muttaqin, 2020:36).

Ketika gerakan seperti ini berdiri atas dasar prinsip egaliter, maka yang patut kita cermati bukan hanya "apa yang dilakukan", tetapi juga mengapa hal itu dilakukan, dan apa basis nilai serta epistemologinya. Jika prinsip egaliter dimaknai secara mutlak tanpa memperhatikan *maqashid syariah*, prinsip kemaslahatan, serta nash yang *qath'i*, maka ia bisa membawa pada benturan dengan nilai-nilai dasar agama. Tapi jika prinsip egaliter ditempatkan sebagai instrumen menghapus diskriminasi dan membangun kesetaraan

martabat manusia tanpa melanggar batas *syar'i*, maka ruang ijtihad bisa dibuka dengan pendekatan kontekstual dan etis. Diskusi tentang egaliterisme dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari dua hal penting: *pertama*, kritik terhadap tradisi tafsir yang patriarkal; dan *kedua*, kehati-hatian dalam melakukan perubahan agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip ushul dalam Islam. Gerakan seperti yang dilakukan Amina Wadud adalah refleksi dari kegelisahan terhadap ketimpangan, namun perlu dikritisi secara ilmiah, bukan hanya dikutuk secara emosional. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan semangat kesetaraan dengan otoritas wahyu yang memang memiliki batasan tertentu dalam peran sosial dan spiritual.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah mengadopsi prinsip-prinsip egaliter dalam sistem pendidikannya, sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam praktiknya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama mengenyam pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu lembaga yang merepresentasikan semangat pendidikan inklusif dan egaliter dalam Islam di Indonesia adalah *The Wahid Foundation*, yang dipimpin oleh Yeni Wahid, putri dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Lembaga ini memiliki misi utama memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, keadilan gender, dan pemberdayaan Perempuan terutama dalam melawan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang masih marak di berbagai lapisan masyarakat. Kiprah Wahid Foundation memperlihatkan bahwa egalitarianisme tidak harus bertentangan dengan Islam, tetapi justru dapat menjadi instrumen menegakkan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip egaliter secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an dikatakan bahwa perbedaan merupakan ketentuan Allah yang harus diterima, maka dari itu manusia perlu menyikapinya dengan sikap keterbukaan, menjaga persatuan dan kesatuan, rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Berbangsa-bangsa bersuku-suku adalah sebuah keberagaman yang dinamis (Tafsir, Qurash shihab, 2005:160). Ayat ini menegaskan bahwa kesetaraan dalam martabat manusia adalah prinsip ilahiyah, dan bahwa perbedaan gender, suku, maupun status sosial bukan alasan mendiskriminasi. Maka umat Islam sebenarnya memiliki landasan teologis yang kuat membangun sistem pendidikan yang setara, adil, dan inklusif.

Namun, di sisi lain, perlu ada kewaspadaan intelektual terhadap interpretasi kesetaraan yang terlalu ekstrem atau disalahartikan. Ketika prinsip egaliter diterjemahkan secara bebas tanpa memperhatikan nilai epistemologis Islam (yakni cara kita mengetahui dan memahami kebenaran dari wahyu) dan aksiologinya (yakni bagaimana nilai-nilai itu dijalankan dalam kehidupan), maka bisa muncul fragmentasi dalam umat. Misalnya, ketika kesetaraan disamakan dengan individualisme mutlak, maka struktur sosial seperti keluarga, tanggung jawab kolektif, dan peran moral dalam masyarakat bisa terancam. Laki-laki dan perempuan bisa menjadi "bebas" terlepas dari tanggung jawab, sehingga muncul sekularisasi peran dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Lebih jauh lagi, dalam kekosongan otoritas moral yang berbasis wahyu, bisa muncul kecenderungan baru pengklaiman kebenaran secara subjektif dan individualis, pada akhirnya bisa melahirkan kelompok-kelompok memonopoli kebenaran secara otoriter, dan menjauh dari nilai universalitas Islam yang sejatinya inklusif dan menyejukkan. Prinsip kesetaraan adalah nilai Islam yang luhur, tapi ia harus dipandu oleh kerangka etik dan teologis yang sehat, agar tidak berubah menjadi alat fragmentasi atau sekularisasi nilai. Kesetaraan bukan berarti kehilangan peran, tetapi pengakuan akan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang setara dalam hak, berbeda dalam tanggung jawab, dan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang beradab. Pendidikan egaliter bukan sekadar soal membuka pintu kelas, tetapi tentang membongkar tembok ketimpangan dan membentuk manusia yang sadar akan martabat dirinya serta tanggung jawab sosialnya.

D. Pendidikan Islam Pembebasan

Gus Dur menginginkan agar pendidikan Islam tidak selalu dibelenggu oleh tradisi, melainkan harus dipahami secara komprehensif, bukan secara parsial. Pendidikan yang demikian merupakan cerminan kemerdekaan manusia. Manusia memiliki kebebasan memilih dan mengembangkan potensinya yang beragam. Dalam pandangan Gus Dur, pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi dan berinovasi (Muhammad Aras, 2017:65).

Menurut Nasri Kurnialoh dan Sri Suharti, pendidikan yang bersifat pembebasan mencerminkan kebebasan manusia memilih dan menentukan cara hidupnya tanpa dibatasi oleh cara berpikir eksklusif. Pendidikan harus mampu bersaing dan membuka peluang berdialektik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Nasri Kurnialoh & Sri Suharti, 2016:213). Pandangan Paulo Freire menambahkan bahwa pendidikan pembebasan berarti tidak adanya paksaan. Dalam artian, manusia harus merdeka tanpa adanya belenggu yang menghalangi ruang geraknya. Pendidikan harus memungkinkan individu mengembangkan potensi mereka tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat pembebasan yang memberikan kekuatan kepada individu menentukan nasibnya sendiri (Aridlah Sendy Robikhah, 2018:6).

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan Islam berbasis pembebasan:

- *Pertama* adalah kontekstualisasi, Gus Dur menghendaki agar pendidikan Islam tidak hanya dipahami secara tekstual. Pemahaman yang hanya bersifat tekstual sering kali menyulitkan dalam menjawab realitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kontekstualitas sebagai jawaban atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Pendidikan harus mampu mengaitkan ajaran Islam dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada.
- *Kedua* komprehensif, merujuk pada pemahaman yang luas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam sesungguhnya bertujuan mencetak manusia yang mampu menjawab realitas dan menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan, seperti kemiskinan, penindasan, dan kebodohan. Pendidikan harus memberikan peluang kepada setiap individu dan kelompok berpikir kritis serta menentukan arah hidup yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan mampu mengembangkan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
- *Ketiga* adalah multidimensi. Dengan kemajuan zaman, cara hidup setiap orang pun akan terpengaruh. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus bersifat multidimensi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sebagai solusi terhadap kenyataan hidup. Setiap individu harus dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan yang multidimensi akan membuka

peluang bagi setiap orang mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang, baik akademis, sosial, maupun budaya. Pendidikan yang bersifat multidimensi juga memperhatikan konteks lokal dan global. Dalam era globalisasi, pendidikan Islam harus mampu bersaing dengan sistem pendidikan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia modern.

Pendidikan Islam yang membebaskan bukan berarti melepaskan diri dari akar tradisi Islam, tetapi memahami tradisi sebagai fondasi, bukan belenggu. Selama ini, model pendidikan Islam dominan seringkali bersifat normatif-tekstual, menekankan hafalan dan kepatuhan terhadap *nash* tanpa membuka ruang kritis untuk dialog, refleksi, dan aktualisasi nilai. Akibatnya, generasi Islam cenderung stagnan dalam mengolah pengetahuan, karena tidak terbiasa dilatih berdialektika dengan realitas zaman, termasuk dengan pengetahuan modern yang berkembang pesat. Padahal, semangat pembebasan dalam pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk keluar dari pengetahuan pasif menuju pengetahuan aktif dan produktif, yakni pengetahuan yang tumbuh dari pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang solutif (Muhammad Abdul Halim Sani & Ilham, 2021:18).

Namun, perlu diwaspadai bahwa semangat pembebasan ini tidak boleh terlepas dari disiplin ilmu dan kaidah tafsir yang kokoh. Ketika pembebasan disalahartikan sebagai kebebasan mutlak dalam menafsirkan teks sesuai kehendak pribadi, tanpa perangkat metodologis yang memadai, maka akan lahir fragmentasi pemahaman agama yang membingungkan bahkan merusak tatanan epistemologis Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang membebaskan harus dibangun atas dasar epistemologi kritis yang menghormati tradisi, tetapi juga membuka ruang kreativitas keilmuan. Setiap peserta didik harus diberi ruang untuk tumbuh sebagai subjek ilmu yang mandiri bukan sekadar objek yang dijejali informasi namun tetap dalam bingkai nilai, tanggung jawab intelektual, dan adab. Dengan demikian, pendidikan Islam bisa menjadi jalan tengah antara pemeliharaan tradisi dan pembaharuan

pemikiran, demi lahirnya generasi Muslim yang visioner, berakar, dan relevan dengan tantangan zaman.

Gagasan pendidikan pembebasan sejatinya telah lama menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam, seperti yang dicontohkan oleh KH. Ahmad Dahlan, seorang ulama progresif yang tidak hanya menekankan pentingnya penguasaan ilmu agama, tetapi juga ilmu modern sebagai sarana membebaskan umat dari keterbelakangan dan kebodohan. Dalam hal ini, beliau memahami pendidikan bukan sekadar transmisi doktrin, tetapi sebagai proses emansipatoris, memungkinkan peserta didik berpikir kritis, bertindak kreatif, dan berkontribusi nyata dalam Masyarakat (Abdul Mu'thi, 2015:71).

Namun, dalam realitas pendidikan Islam hari ini, terutama di era digital yang penuh gejolak informasi dan ideologi, semangat pembebasan itu tampak belum sepenuhnya terimplementasi. Kita justru menyaksikan fragmentasi umat dalam berbagai kelompok keagamaan yang mengembangkan struktur epistemologinya sendiri, terkadang begitu eksklusif hingga menutup diri dari dialog dan perkembangan keilmuan yang lebih luas. Dalam pengertian teknis, memang bisa dikatakan bahwa mereka telah 'bebas' memilih jalan dan komunitas keilmuannya sendiri, namun secara substantif, ini belum bisa disebut pendidikan yang membebaskan (Imam Barnadib, 2001:2). Mengapa? Karena pembebasan sejati dalam pendidikan meniscayakan keterbukaan, refleksi kritis, dan keberanian merumuskan ulang makna-makna lama dalam terang zaman baru, bukan sekadar mempertahankan doktrin dengan loyalitas buta.

Jika seseorang hanya diajarkan berpikir dalam kerangka internal mazhab atau kelompoknya tanpa membuka diri terhadap dialektika lintas pandangan, maka ia tidak sedang dibebaskan, tetapi dikondisikan walau dengan cara yang tampak intelektual. Maka di sinilah letak tantangan besar pendidikan Islam saat ini, bagaimana menghidupkan semangat pembebasan yang tidak memutus akar tradisi, tetapi juga tidak memenjarakan nalar dalam sekat-sekat eksklusifitas epistemik. Pendidikan yang membebaskan harus mampu melahirkan manusia Muslim yang berpengetahuan luas, berpikir terbuka, dan memiliki komitmen etis membangun peradaban yang inklusif dan berkeadilan.

E. Pendidikan Islam Berbasis Kerjasama

Kerjasama menjadi sarana mengoptimalkan pembangunan kualitas pendidikan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pendidikan Islam, nilai kerjasama harus diutamakan dan bersifat proaktif. Suryo Subroto menekankan bahwa kerjasama mengandung kewajiban dan tanggung jawab baik secara individu maupun komunitas, yang bertujuan mencapai keberhasilan seimbang. Dengan adanya kerjasama, lembaga pendidikan dapat mengembangkan strategi yang efektif meningkatkan kualitas pendidikan Islam (Kholilullah, 2023:14). Dalam konteks pendidikan, kerjasama menjadi peluang besar mencapai cita-cita yang lebih tinggi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan sarana prasarana yang memadai. Tanpa kerjasama yang aktif, pendidikan Islam akan mengalami stagnasi, terutama dalam menghadapi persaingan global. UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Skala internasional, kerjasama antar negara, seperti dalam ASEAN, memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam berkembang. Melalui pertukaran pelajar dan tenaga pendidik, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia. Kerjasama ini penting membangun kreativitas, inovasi, serta penguasaan teknologi dan komunikasi yang luas. Dengan begitu, pendidikan Islam dapat bersaing di kancah internasional dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Abd. Rachman Assegaf, 2003:208). Kerjasama antar lembaga pendidikan Islam juga memungkinkan mereka bersama-sama menghadapi tantangan global, seperti ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi. Kerjasama ini bukan hanya tentang meningkatkan kualitas pendidikan, lebih dari itu meminimalisir tindakan yang melanggar moralitas manusia. Kesadaran akan pentingnya kerjasama harus menjadi bagian integral dalam pendidikan Islam, sehingga dapat menciptakan lingkungan mendukung perbaikan mutu pendidikan dan membangun masyarakat lebih baik.

Strategi pendidikan Islam berbasis kerjasama dapat dilakukan dalam beberapa langkah yakni:

1. Kerjasama Nasional

Kerjasama nasional dalam pendidikan Islam melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat di dalam negeri. Melalui sinergi ini, program-program pendidikan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif, mengingat adanya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal. Misalnya, institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah mengidentifikasi isu-isu pendidikan yang mendesak dan merumuskan solusi yang tepat, seperti pengembangan kurikulum yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, kerjasama antar lembaga pendidikan juga dapat memperkuat jaringan dan sumber daya yang tersedia. Dengan berbagi fasilitas, pengalaman, dan keahlian, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Misalnya, kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan bersama dapat diadakan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan staf, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa berinteraksi dan belajar dari berbagai perspektif (Wijiharta Wijiharta dkk, 2022:2).

Kerjasama nasional juga dapat menciptakan program pertukaran pelajar antar institusi di dalam negeri. Program ini dapat memperluas wawasan mahasiswa, juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara generasi muda. Dengan mengenal berbagai budaya dan tradisi Islam yang ada di Indonesia, mahasiswa diharapkan dapat menjadi individu yang lebih toleran dan menghargai perbedaan, serta siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang harmonis.

Kerja sama antar lembaga pendidikan, khususnya dalam konteks nasional, sangat relevan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan, kerja sama antarlembaga pendidikan menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari. Secara yuridis, prinsip kerja sama dalam pendidikan terutama di Tingkat perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Inilah UU utama yang secara spesifik mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Pasal 5 Ayat (2): Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis, keadilan, non-diskriminatif, serta menjamin keberagaman budaya, kepercayaan, dan agama. Pasal 7 Ayat (2): Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat). Pasal 50 Ayat (1): Perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, atau lembaga internasional untuk mengembangkan tridharma.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ini adalah regulasi teknis terbaru yang mendorong kerja sama antarlembaga untuk penjaminan mutu. Menyebut bahwa kolaborasi akademik, pertukaran mahasiswa/dosen, dan kolaborasi riset adalah bagian dari indikator pengembangan mutu institusi. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK), UU ini menjadi dasar kerja sama riset antara perguruan tinggi dan lembaga riset, baik dalam maupun luar negeri. Pasal 17: Mendorong kolaborasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama institusional, termasuk dengan dunia industri.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan regulasi turunannya, kerja sama antarperguruan tinggi maupun dengan lembaga lain memiliki dasar hukum yang kuat dan diarahkan memperkuat kualitas tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak bisa berjalan secara eksklusif, melainkan harus membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi instrumen penting meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, dan membuka akses sumber daya pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, UU ini menjadi fondasi penting dalam mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan penguatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Sistem pendidikan tinggi, baik umum maupun keagamaan, semakin didorong untuk membangun kolaborasi lintas institusi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kampus yang menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kemitraan akademik, riset, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah STIT Bima, yang secara aktif membangun kemitraan nasional dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya: UIN Raden Mas Said Surakarta, STAI DDI Sidrap, STAI DDI Maros, STIA Abdul Haris, IAI Al-Amanah, STIT DDI Pasangkayu, dan IAI DDI Polman. Selain itu, pada skala lokal, STIT Bima juga menjalin kerja sama dengan Universitas Nggusuwaru dan STIQ Bima

(Data Resmi Kampus STIT 2025). Kerja sama ini tidak hanya penting dalam konteks administratif, seperti mempermudah akses data, program akademik lanjut (S2 dan S3), maupun sistem rekognisi kredit, tetapi lebih dari itu, kerja sama menjadi alat penguat ekosistem keilmuan. Ketika kampus menjalin hubungan lintas lembaga, maka terjadi pertukaran gagasan, saling melengkapi dalam bidang penelitian, dan terbentuk ruang-ruang akademik seperti seminar, lokakarya, maupun pengabdian masyarakat yang lebih luas dan berdampak.

Di tengah tantangan zaman, kerja sama pendidikan bukan hanya soal manajemen institusi, tetapi bagian dari transformasi kultural dalam dunia akademik, agar kampus tidak menjadi menara gading yang terisolasi, melainkan ruang terbuka yang adaptif dan kolaboratif. Konektivitas antara perguruan tinggi seperti STIT Bima dengan kampus lokal lain seperti Universitas Nggusuwaru atau STIQ Bima juga menunjukkan bahwa kerja sama tidak harus berskala nasional atau internasional untuk berdampak, bahkan di tingkat lokal pun, kolaborasi dapat menghasilkan sinergi yang kuat, asal disusun dengan visi yang jelas. Dengan demikian, kerja sama dalam dunia pendidikan tinggi adalah sebuah keniscayaan dalam era kompetisi dan kolaborasi global saat ini. Ia menjadi sarana strategis untuk peningkatan mutu, penguatan jejaring, dan perluasan daya jangkau lembaga pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, terbuka, dan responsif terhadap dinamika zaman (Candra Nugraha Wati dkk, 2022:203).

Namun demikian, tantangan utama dalam kerja sama antarlembaga pendidikan tinggi terletak pada aspek keberlanjutan dan implementasi riil dari kerja sama tersebut. Tidak sedikit kerja sama yang dibangun hanya bersifat administratif dan formalitas semata, yakni sebatas memenuhi kelengkapan dokumen dalam rangka akreditasi institusi. Praktik semacam ini menjadikan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama sebagai simbol legalitas tanpa aktualisasi yang memadai dalam bentuk kegiatan akademik yang berkelanjutan. Akibatnya, substansi dari kemitraan antarlembaga tidak tercapai, dan kepercayaan antar institusi pun dapat tergerus. Ketika kerja sama hanya berhenti pada level dokumentatif, tanpa adanya sinergi nyata seperti pertukaran akademik, kolaborasi riset, atau kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur, maka potensi besar dari kemitraan tersebut akan terbuang sia-sia. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengelola

perguruan tinggi, bahwa kemitraan yang sehat bukan hanya tanda tangan perjanjian, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan program-program yang disepakati secara nyata dan pengembangan mutu pendidikan.

2. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dalam pendidikan Islam membuka peluang bagi institusi pendidikan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Melalui program-program pertukaran mahasiswa dan dosen, institusi pendidikan dapat memperluas jaringan dan akses terhadap pengetahuan serta praktik terbaik dalam pendidikan. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa belajar dari pengalaman pendidikan di negara lain, sehingga mereka dapat memperoleh perspektif yang lebih luas tentang ajaran Islam dan aplikasinya dalam konteks global. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat meningkatkan kualitas penelitian di bidang pendidikan Islam. Dengan melakukan penelitian kolaboratif dengan institusi luar negeri, dosen dan mahasiswa dapat saling bertukar ide dan hasil penelitian, serta berkontribusi pada publikasi akademik yang lebih beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi institusi pendidikan, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu pendidikan Islam di tingkat global (Atik Yuliyani dkk, 2023:1137).

Program-program internasional juga sering kali mencakup seminar, konferensi, dan lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kegiatan ini memberikan platform bagi para akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai tantangan dan peluang dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, kerjasama internasional tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan, juga membangun solidaritas dan kolaborasi di antara komunitas pendidikan Islam di seluruh dunia.

Era globalisasi dan integrasi informasi seperti saat ini, kerja sama internasional dalam bidang pendidikan bukan lagi sebuah opsi, melainkan keharusan strategis mengejar ketertinggalan dan membangun kualitas pendidikan nasional yang kompetitif. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, telah menunjukkan bagaimana kolaborasi global, pertukaran ilmuwan, dan riset bersama menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mencetak para ilmuwan, inovator, dan pemimpin di berbagai bidang. Oleh

karena itu, perguruan tinggi di Indonesia harus lebih agresif dan masif dalam menjalin kemitraan internasional, baik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan dosen, program gelar bersama (*joint degree*), riset kolaboratif, maupun pengembangan kurikulum. Bahkan, di tingkat pesantren, sudah mulai tumbuh kesadaran untuk mengirimkan para santri ke luar negeri seperti ke Universitas Al-Azhar di Mesir, kampus-kampus Islam di Australia, dan negara lainnya, sebagai bentuk afirmasi terhadap penguatan keilmuan Islam dan penguasaan bahasa asing sebagai modal global (Matheus Gratiano Mali, 2020:77).

Contoh konkret dapat dilihat di STIT Bima, yang telah membangun kerja sama internasional dengan berbagai institusi, seperti Fatoni University (Thailand), Ibnu Auf Islamic Cooperative Ltd (Thailand), Andaman Anatoha Technological College (Thailand), University College of Yayasan Pahang (Malaysia), dan University Sultan Zainal Abidin (UniSZA, Malaysia). Kemitraan ini merupakan langkah progresif untuk membuka akses jejaring global, berbagi pengalaman pengelolaan perguruan tinggi, serta mempelajari praktik-praktik terbaik dari institusi luar yang telah lebih dulu maju. Dengan demikian, kerja sama internasional memperkuat identitas keilmuan nasional di mata dunia, juga menjadi pintu percepatan informasi, inovasi, dan reformasi sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Hal ini juga membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa dan dosen berkembang secara intelektual dan profesional dalam lanskap keilmuan global.

Kerja sama internasional dalam bentuk *mobility*, *international publication*, dan *joint research* memang memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi mengikuti arus globalisasi dan mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Namun di balik potensi tersebut, terdapat problem struktural yang mesti menjadi perhatian serius, khususnya terkait *student mobility*. Program pertukaran pelajar atau kunjungan akademik ke luar negeri sering kali menjadi sarana eksklusif yang tidak inklusif, karena hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial lebih. Banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki kapasitas akademik, namun terhambat karena persoalan biaya, bahkan tak jarang ada yang terpaksa berutang demi mengikuti program tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan akses dan menambah beban psikologis dan ekonomi, baik bagi mahasiswa maupun keluarganya (Rini Muharini dkk, 2023:596).

Lebih dari itu, pada level pendidikan dasar, praktik serupa juga terjadi dalam bentuk *study tour* ke luar daerah atau luar negeri, yang kerap menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan siswa. Tanpa sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang ketat, kegiatan ini justru dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan siswa, alih-alih menjadi pengalaman pendidikan yang berharga. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi kritis dan kebijakan afirmatif dalam setiap bentuk kerja sama internasional, agar tidak menjadi beban sosial, tetapi benar-benar menjadi sarana pembebasan dan pemerataan akses terhadap kualitas pendidikan global (Priskilla Elisabet Saing & Junita Yosephine Sinurat, 2024:209).

Secara reflektif terhadap realitas yang dihadapi oleh banyak perguruan tinggi saat ini. Kerja sama internasional memang membuka peluang yang luas termasuk beasiswa kuliah ke luar negeri, program pertukaran pelajar, pelatihan tenaga pendidik, hingga kolaborasi riset lintas negara. Namun, prasyarat utama agar dapat mengakses peluang ini adalah kecakapan dalam berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Di tengah kompleksitas dunia global, kemampuan berbahasa asing menjadi jembatan utama untuk menjalin relasi keilmuan, bertukar gagasan, dan memperluas wawasan dalam konteks internasional (Sudur dkk, 2024:7).

Namun, di balik peluang besar tersebut juga tersimpan tantangan yang tak kalah besar. Secara internal, kerja sama internasional menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan yang matang. Setiap level tanggung jawab akan semakin kompleks seiring meningkatnya standar internasional yang harus dipenuhi. Selain itu, upaya menjaga mutu pendidikan dan akreditasi menjadi beban tersendiri. Di era audit mutu yang semakin ketat, satu dokumen atau laporan yang tidak lengkap bisa berdampak pada penurunan nilai akreditasi institusi. Hal ini memperlihatkan bahwa kerja sama internasional bukan sekadar menjalin kemitraan, tetapi juga menuntut konsistensi manajemen mutu yang berkelanjutan. Yang tak kalah penting adalah aspek keberlanjutan. Tidak semua kerja sama internasional mampu berlangsung lama sebagian besar hanya berumur pendek, karena bergantung pada pemangku kebijakan atau tidak adanya tindak lanjut yang konkret. Maka, perguruan tinggi harus memiliki perencanaan strategis, kesiapan SDM, dan sistem dokumentasi yang rapi, agar kerja sama yang dibangun bukan simbol administratif, melainkan benar-benar membawa transformasi pendidikan yang signifikan.

F. Pendidikan Islam Moralitas

Moralitas dalam pendidikan Islam merujuk pada nilai-nilai etika dan akhlak yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ini mencakup sikap dan perilaku yang baik, seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang. Pendidikan Islam pembentukan karakter dan akhlak siswa agar mereka menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Moralitas sangat penting dalam pendidikan Islam karena membentuk dasar perilaku individu dalam masyarakat. Tanpa moralitas yang kuat, pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan Islam berupaya menanamkan nilai-nilai moralitas yang kokoh agar siswa memiliki akhlak yang baik (Romirio Torang Purba, 2021:63).

Kohlberg terkenal dengan teori perkembangan moral yang membagi moralitas manusia dalam beberapa tahap, mulai dari tahap pra-konvensional, konvensional, hingga pasca-konvensional. Menurutnya, pendidikan moral yang baik adalah yang mampu mendorong siswa berpikir kritis, mempertanyakan nilai, dan mengambil keputusan etis berdasarkan prinsip universal, bukan sekadar mengikuti aturan (Romirio Torang Purba, 2022:12). Sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Dalam sistem Taman Siswa, beliau mengintegrasikan antara pengetahuan, moral, dan seni untuk membentuk manusia yang utuh: "*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*" adalah filosofi pendidikan yang juga memuat pesan moral yang sangat dalam (Nurhasanah & Abdi Syahrial Harahap, 2023:28). Dalam tradisi Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperbaiki akhlak. Baginya, ilmu pengetahuan harus membawa manusia kepada Tuhan dan kebaikan, bukan hanya pada penguasaan materi duniawi. Ia menekankan pentingnya mujahadah (perjuangan jiwa) untuk mendidik hati, karena moralitas bukan hanya dilatih, tapi juga dimurnikan (Ahmad Sahar, 2012:206).

Di era digitalisasi yang serba cepat dan kompleks, pendidikan Islam dituntut tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, juga menaruh perhatian besar terhadap dimensi moralitas peserta didik. Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemudahan akses informasi dan komunikasi tidak selamanya membawa dampak positif. Justru dalam realitas digital ini, nilai-nilai akhlak dan etika kerap tergerus oleh budaya instan, konsumtif, dan

individualistik. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki tugas utama mengembalikan peran sentral moralitas dalam pembentukan karakter siswa.

Pendidikan yang menitikberatkan pada moralitas bukan sekadar bentuk perilaku, melainkan suatu pola asuh yang membentuk kesadaran mendalam tentang nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan pengendalian diri. Dalam konteks keIslaman, moralitas bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan yang memiliki dasar normatif dan filosofis yang kuat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu misi utama kenabiannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa amal yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik (Abd Wahid, 2013:210). Ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dalam Islam bersifat integral dengan pencapaian spiritual dan sosial.

Jika menilik sejarah filsafat Barat, perhatian terhadap moralitas juga menjadi pusat pemikiran para tokoh besar. Di abad ke-18, Immanuel Kant memberikan dimensi baru pada etika melalui etika deontologisnya memperkenalkan imperatif kategoris sebagai pedoman moral yang universal dan rasional (Moh Dahlan, 2009:43). Abad ke-19 menyaksikan kelahiran teori utilitarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham dan disempurnakan oleh John Stuart Mill. Bentham dengan prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" dan Mill dengan pembagian kesenangan intelektual dan fisik, memberikan kerangka moral yang berbasis konsekuensi. Mereka semua menegaskan bahwa moralitas adalah kunci dalam membangun peradaban manusia(Muharir & Slamet Haryono, 2023:110). Artinya, meskipun lahir dari basis epistemologis yang berbeda dengan Islam, para pemikir Barat pun menyadari bahwa kebesaran suatu bangsa dan peradaban bukan diukur dari kemegahan arsitektur atau kekuatan ekonomi, melainkan pada kualitas moral masyarakatnya.

Kegelisahan yang mendalam terhadap tantangan moral di era digital saat ini. Dalam arus globalisasi yang didorong oleh teknologi, hampir seluruh lapisan Masyarakat dari anak-anak hingga orang tua mengandalkan platform digital berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan berbagi pengalaman. Meskipun media digital membuka peluang luas menyebarkan nilai-nilai edukatif, religius, hingga kreativitas sosial, namun aspek aksiologis dari digitalisasi yaitu

dimensi nilai dan makna kehidupan sering kali terpinggirkan. Era generasi beta saat ini menyaksikan pergeseran eksistensial yang serius, di mana identitas moral masyarakat tidak lagi terbentuk secara internal melalui nilai-nilai luhur, tetapi terepresentasi secara instan lewat konten yang viral di media sosial. Ketika konten tidak senonoh atau amoral dari individu-individu di daerah tertentu tersebar luas tanpa konteks atau filter budaya, maka muncullah generalisasi yang merusak citra kolektif sebuah komunitas. Inilah krisis moral besar yang kita hadapi, generasi masa depan berisiko mewarisi konstruksi moral yang rusak, jika pendidikan tidak hadir sebagai filter, pemurni, dan penuntun nilai. Oleh karena itu, pendidikan moral di sekolah perlu dikuatkan, tidak hanya sebagai transfer etika normatif, tetapi juga sebagai proyek filosofis-transformatif dalam membentuk karakter, kesadaran nilai, dan tanggung jawab sosial generasi mendatang.

G. Nilai Pluralisme Dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Pluralisme merujuk pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, etnis, maupun pandangan hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, pluralisme menjadi penting membangun sikap toleransi dan saling menghormati di antara individu yang berbeda. Pendidikan Islam yang mengedepankan nilai pluralisme berfungsi membentuk individu yang cerdas juga mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Dengan mengajarkan nilai pluralisme, siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan.

Kurikulum pendidikan Islam perlu dirancang secara inklusif, mencakup berbagai perspektif dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Dengan memasukkan materi yang mencerminkan keberagaman, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai universal yang mengikat semua manusia, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Pengajaran sejarah dan budaya dalam kurikulum pendidikan Islam harus mencakup berbagai peristiwa dan kontribusi dari berbagai kelompok etnis dan agama. Dengan memahami sejarah yang beragam, siswa memiliki wawasan lebih luas tentang dinamika sosial dan budaya Masyarakat (Mutakallim, 2018:314).

Diskusi mengenai nilai-nilai pluralisme dalam kurikulum pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Dalam konteks pendidikan Islam di

Indonesia, nilai-nilai pluralisme secara implisit dan eksplisit telah tercantum dalam beberapa mata pelajaran, terutama pada Pendidikan Agama Islam (PAI): Materi Akhlak: menekankan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyyah). Materi Fiqih Sosial: membahas hubungan antar umat beragama dan hak-hak non-Muslim dalam masyarakat Islam. Materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI): menunjukkan bagaimana peradaban Islam tumbuh dalam keberagaman etnis dan budaya. Materi Al-Qur'an dan Hadis: menyajikan ayat-ayat yang menekankan pentingnya perdamaian, kasih sayang, dan sikap saling mengenal antarsuku dan bangsa (seperti Q.S. Al-Hujurat: 13). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): Meski bukan pelajaran agama, PKn memperkuat nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan demokrasi yang merupakan inti dari pluralisme (Tsalis Nurul 'Azizah, 2019:X).

Nilai-nilai pluralisme telah terakomodasi dalam kurikulum mata pelajaran, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sangat merespons semangat kebangsaan dan kehidupan masyarakat majemuk. Dalam berbagai materi ajar, khususnya pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, telah dimuat nilai-nilai toleransi antarumat beragama, penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, serta penguatan sikap saling menghormati dalam bingkai persatuan. Kurikulum ini membentuk keimanan yang kokoh, juga membangun kesadaran sosial yang tinggi, memperkuat *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), dan menumbuhkan identitas sebagai warga negara demokratis dan berkeadaban. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia tidak terkungkung pada aspek ritual semata, juga mendorong siswa menjadi pribadi yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural dan heterogen.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Frasa "demokratis dan bertanggung jawab" merupakan landasan nilai pluralisme dalam

pendidikan nasional. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Islam, mendorong pendidikan Islam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K-13), dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI & KD) banyak memuat indikator yang mengarah pada penguatan toleransi, empati sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Nilai-nilai pluralisme dalam kurikulum pendidikan Islam juga semakin terealisasi dengan hadirnya kebijakan terbaru pemerintah, yakni Peraturan terbaru yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dalam merancang pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Di dalam Kurikulum Merdeka, peserta didik dibekali dengan pengetahuan keagamaan, juga diarahkan untuk memahami dan menghargai perbedaan melalui pendekatan kontekstual dan reflektif. Pendidikan Agama Islam, misalnya, pembahasan bukan saja ritual dan dogma, mencakup aspek sosial keagamaan, seperti sikap saling menghormati antarumat beragama dan penguatan identitas kebangsaan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka menjadi wadah penting dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* (Guruh Sukma Hanggara & Khususiyah, 2024:532).

Nilai-nilai pluralisme telah diakomodasi dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Peraturan perundang-undangan seperti UU Sisdiknas dan PMA tentang pengelolaan pendidikan Islam mendukung integrasi nilai-nilai ini. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan, apakah nilai-nilai tersebut benar-benar ditanamkan melalui pendekatan yang dialogis, inklusif, dan kontekstual.

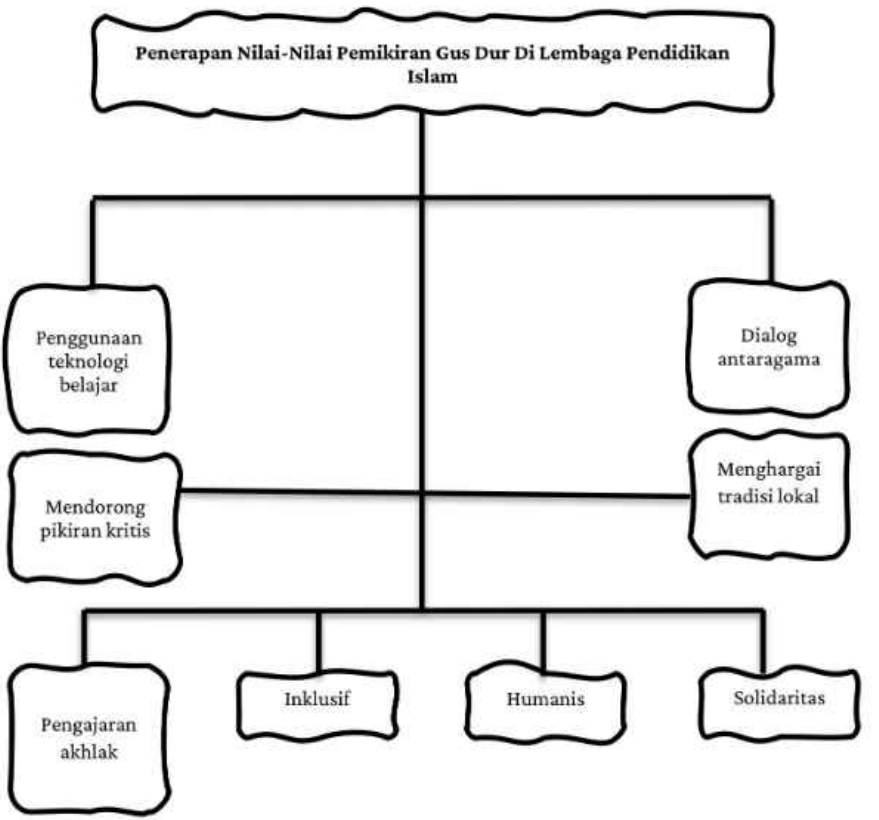

H. Penerapan Nilai-Nilai Pemikiran Gus Dur Di Lembaga Pendidikan Islam

Adapun beberapa penerapan nilai-nilai pemikiran Gus Dur yang dapat diwujudkan dalam dunia Pendidikan Islam untuk meningkatkan kesadaran Pendidikan terhadap pandangan dunia global dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Inklusif

Pendidikan inklusif adalah salah satu cara menerapkan pemikiran Gus Dur dalam lembaga pendidikan Islam. Kurikulum yang inklusif mencakup materi yang berfokus pada agama atau budaya, juga mengakui dan menghargai berbagai tradisi yang ada. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar tentang keberagaman dan memahami setiap budaya memiliki nilai dan kontribusi berharga.

Pendidikan inklusif juga mendorong siswa berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Melalui kegiatan kelompok dan proyek kolaboratif, siswa dapat belajar menghargai perspektif orang lain dan mengembangkan sikap empati. Ini penting membangun hubungan yang harmonis di antara siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Penerapan nilai inklusif juga berarti mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Gus Dur sangat menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum, lembaga pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang cerdas, juga peka terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.

Penerapan nilai inklusif dalam pendidikan era digital adalah suatu keharusan yang mendesak, mengingat dunia saat ini hidup dalam keterhubungan yang luas dan kompleks. Pendidikan sebagai media pembentukan karakter dan peradaban manusia yang berkeadaban. Nilai inklusif, yang mencakup penerimaan terhadap perbedaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan sikap saling menghormati, harus diajarkan secara konsisten baik dalam bentuk teori maupun praktik sosial. Tokoh seperti Jürgen Habermas, melalui gagasan diskursus etis dan rasionalitas komunikatif, menekankan pentingnya ruang publik yang inklusif sebagai fondasi masyarakat demokratis yang beradab (Anwar Nuris, 2016:44). Maka dari itu, guru yang tidak membangun nilai-nilai inklusif sesungguhnya belum menjadi bagian dari masyarakat kosmopolitan sejati, karena kosmopolitanisme menuntut keterbukaan terhadap perbedaan dan keadilan dalam perlakuan.

Pendidikan inklusif juga dapat dikembangkan melalui pendekatan budaya. Membangun ruang-ruang kebudayaan di sekolah yang menampilkan keragaman etnis, bahasa, seni, dan bahkan peninggalan sejarah kolonial dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai inklusif. Siswa yang diajar melalui pendekatan ini akan matang dalam empati sosial dan wawasan budaya, menjadikannya sebagai generasi budayawan yang inklusif. Sayangnya, praktik semacam ini belum menjadi arus utama dalam pendidikan kita. Banyak sekolah yang masih terjebak dalam pola eksklusif mengunggah konten hanya dari lingkungan sendiri tanpa membuka diri terhadap narasi keberagaman yang lebih luas. Inilah yang perlu diubah, yakni dengan membangun kesadaran digital dan

kultural akan pentingnya inklusivitas sebagai pilar penting dalam pendidikan masa depan.

2. Dialog Antaragama

Dialog antaragama merupakan salah satu pilar penting dalam pemikiran Gus Dur. Perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang membangun hubungan yang baik antarindividu. Dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan Islam dapat mengadakan forum-forum diskusi yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama. Kegiatan ini akan memperkaya wawasan siswa dan membangun rasa saling menghormati. Melalui dialog, siswa diajak mendengarkan dan memahami pandangan serta keyakinan orang lain. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai baik, dan melalui interaksi ini, siswa dapat menemukan kesamaan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, dialog antaragama dapat menjadi sarana mengurangi prasangka dan stereotip yang sering muncul di masyarakat. Pendidikan yang mendorong dialog antaragama juga mengajarkan siswa untuk toleransi dan kerukunan. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki hak berkeyakinan sesuai dengan pilihannya, siswa akan lebih siap hidup dalam masyarakat. Ini sangat penting menciptakan lingkungan aman dan damai bagi semua orang (Nurasikin Pratiwi dkk, 2024:440).

Era globalisasi dan digitalisasi yang semakin mempercepat interaksi lintas budaya dan agama, dialog antaragama bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi keharusan etis dan eksistensial. Dunia yang semakin terhubung ini memperlihatkan bahwa umat manusia, hidup berdampingan dalam satu "kosmos" yang sama planet kita huni bersama. Maka, kemampuan berdialog lintas iman adalah bagian dari keterampilan hidup abad ke-21 yang tak terelakkan. Dialog antaragama bukanlah tentang mencari kesamaan dogmatis atau menyeragamkan keyakinan, tetapi merupakan ruang kontemplatif memperdalam iman masing-masing sekaligus menjembatani kemanusiaan universal. Dalam proses ini, setiap agama tidak diminta mengorbankan ajarannya, melainkan justru menemukan titik temu dalam nilai-nilai luhur yang dijunjung dalam relasi global.

Seperti kisah Nabi Ibrahim yang ditegur Tuhan karena menolak memberi makan kepada orang tua yang berusia 70 tahu beragama lain menunjukkan bahwa ajaran agama yang autentik selalu berangkat dari welas asih, bukan permusuhan

(https://Islam.nu.or.id). Tuhan, dalam pandangan teologis yang universal, tidak membeda-bedakan manusia dalam ciptaan dan rezeki-Nya. Maka, siapa pun yang mengatasnamakan Tuhan untuk membenci sesama manusia, sebenarnya telah kehilangan makna terdalam dari keimanan. Dalam kerangka pendidikan, nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini. Sekolah dan lembaga keagamaan mesti berani membuka ruang dialog, baik dalam bentuk formal (diskusi, seminar) maupun informal (cerita lintas budaya, kerja sama sosial). Dialog antarpelajar dari berbagai agama, misalnya, akan membentuk kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana ilahi yang harus dirayakan, bukan ditakuti.

Lebih jauh lagi, menyentuh hal penting bahwa era digital telah membuka semua sisi kehidupan manusia, termasuk menampakkan perilaku-perilaku destruktif yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam konteks ini, dialog antaragama adalah benteng moral melawan krisis etika digital, di mana prasangka, kebencian, dan informasi yang menyesatkan menyebar dengan cepat. Dialog bukan lagi hanya milik elite rohaniawan, tetapi harus menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi pengguna utama media digital. Pendidikan berbasis dialog antaragama guna menjaga keharmonisan sosial dan Upaya membangun manusia kosmopolitan, yang mampu hidup dengan damai di tengah keberagaman dan tetap teguh dalam keyakinan. Guru dan institusi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai inklusif ini adalah pejuang kemanusiaan sejati yang membentuk generasi masa depan yang cerdas, intelektual, bijak, spiritual dan kesadaran sosial.

3. Pengajaran Akhlak

Gus Dur sangat menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan. Nilai-nilai moral harus menjadi dasar dari setiap proses belajar mengajar. Dalam lembaga pendidikan Islam, pengajaran akhlak harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pembentukan karakter yang baik. Pengajaran akhlak yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu siswa memahami tanggung jawab mereka sebagai individu masyarakat. Mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, siswa akan diajak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan ajaran Gus Dur yang

menekankan bahwa akhlak baik adalah cerminan dari iman yang kuat.

Penguatan akhlak peserta didik dalam sistem pendidikan nasional merupakan mandat utama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 3 UU ini secara tegas menyebutkan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa akhlak mulia bukan sekadar pelengkap, melainkan inti (core) dari tujuan pendidikan nasional, terutama dalam pendidikan Islam. Dalam tradisi Islam, pengajaran akhlak adalah warisan langsung dari risalah kenabian. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan dalam sabdanya: *"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Ahmad). Maka jelas bahwa pendidikan akhlak adalah pangkal dan tujuan utama dari seluruh aktivitas pendidikan Islam.

Namun, tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana menanamkan akhlak kepada siswa di tengah gempuran media sosial yang masif. Generasi hari ini lebih banyak bercermin pada tren viral ketimbang pada keteladanan guru. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menjadi panggung utama perilaku dan ekspresi diri anak-anak, bahkan dalam bentuk yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adab. Ketika siswa sudah tidak lagi menganggap ucapan gurunya sebagai rujukan moral, maka ikatan edukatif antara guru dan siswa mulai rapuh. Ini menandakan hilangnya otoritas etika guru di mata siswa, dan akan berujung pada degradasi moral yang sistematis. Jika hal ini dibiarkan, kita sedang menyiapkan masa depan yang rapuh, generasi yang mahir secara teknologi tapi miskin dalam etika (Suhartono & Nur Rahma Yulieta, 2019:37). Akhlak sebagai tolok ukur utama kedudukan dan martabat manusia. Penegasan dari Ibnu Qayyim tersebut benar-benar mengakar dalam filsafat Islam bahwa akhlak bukan hanya hiasan hidup, melainkan inti dari kualitas manusia di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, seorang ulama besar dari abad pertengahan, memang menjelaskan bahwa akar dari kebahagiaan seseorang terletak pada perangainya (*khuluq*) yakni karakter batinnya. Dalam karyanya seperti *Madarij As-Salikin*, ia menekankan bahwa seseorang

tidak akan memperoleh keselamatan di dunia maupun akhirat kecuali melalui akhlak yang baik (Ibnu Qayyim, 1999:294).

Oleh karena itu, pengajaran akhlak tidak bisa hanya bersifat teoritis, melainkan harus kontekstual dan transformatif. Artinya, pengajaran akhlak harus mampu menjangkau realitas kehidupan digital siswa. Guru dan orang tua perlu memahami cara kerja media sosial, bahasa tren, dan logika algoritma agar dapat masuk ke dunia anak-anak dengan bahasa yang relevan. Mereka bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga *influencer moral* di tengah kebisingan digital. Selain itu, perlunya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam membatasi dan mengarahkan konsumsi digital siswa menjadi sangat vital. Anak yang terlalu bebas berselancar di dunia maya tanpa pendampingan akan mudah terjebak dalam gaya hidup instan dan superficial. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini bahkan sebelum anak mengenal dunia akademik. Akhlak menjadi fondasi utama sebelum ilmu dan kecerdasan dikembangkan. Bangsa yang baik adalah bangsa yang generasinya menjunjung tinggi nilai moralitas. Jika generasi penerus kehilangan pegangan akhlak, maka yang terjadi adalah krisis peradaban. Keberlanjutan bangsa ini sangat bergantung pada keberhasilan pendidikan dalam menanamkan akhlak mulia, bukan membangun "infrastruktur atau menyempurnakan kurikulum".

4. Nilai Kemanusiaan

Pemikiran Gus Dur sangat menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga pendidikan Islam perlu mengajarkan siswa untuk menghargai hak asasi manusia dan memahami pentingnya keadilan sosial. Dengan menekankan nilai kemanusiaan, siswa diajak melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Gus Dur mengajarkan bahwa tindakan diskriminasi dan intoleransi tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, juga merugikan kemanusiaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan harus membekali siswa dengan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan. Pendidikan yang menekankan pada kemanusiaan juga membantu siswa mengembangkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing, siswa akan lebih mampu berkontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini adalah bagian dari upaya membangun masyarakat harmonis (Ririk Novembri, 2022:17).

Nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam relasi manusia kosmik sangat penting dan layak menjadi perenungan mendalam, terutama dalam dunia yang kompleks dan terkoneksi ini. Pendidikan sejati bukan semata-mata instrumen mencetak individu pintar, lebih dari itu, pendidikan menuntun manusia pada kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Ketika seseorang dirampas haknya, dilukai kehormatannya, atau dianiaya atas dasar kekuasaan, sesungguhnya itulah titik runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran emosional dan sosial peserta didik, yakni kepekaan terhadap penderitaan orang lain, dan semangat saling membantu dalam semangat empati dan solidaritas (Tasya Shalsabilla Firdhaus & Ida Sulistyawati, 2024:125).

Kesadaran akan nilai kemanusiaan bisa muncul dari dua sumber utama: *pertama*, secara natural (fitrah), karena manusia diciptakan dengan nurani yang mendorongnya melakukan kebaikan. *Kedua*, melalui proses pengajaran dan pembiasaan, yang dilakukan secara berulang melalui contoh, bimbingan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi tugas mendasar dari pendidikan menumbuhkan karakter yang kuat, rasional, dan berjiwa welas asih. Tokoh-tokoh pemikir besar juga banyak menegaskan pentingnya kemanusiaan sebagai inti dari keberadaban. Dalam tradisi Barat, Immanuel Kant menyatakan dalam formulasi *Imperatif Kategoris*-nya bahwa Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat (Otto Gusti Madung, 2022:166). Tidak ada manusia yang boleh dimanfaatkan hanya demi kepentingan orang lain atau sistem. Sementara itu, dalam pemikiran Islam, Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyampaikan, *"Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi."* (HR. Bukhari-Muslim). Ini adalah pesan universal bahwa belas kasih dan rasa kemanusiaan adalah ciri orang beriman.

Contoh-contoh sosial seperti korupsi, pelecehan, perkelahian, bahkan kemiskinan struktural seperti anak-anak yang mengemis semua berakar pada hilangnya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Seorang koruptor tidak akan tega merampas hak rakyat jika ia benar-benar menyadari penderitaan orang miskin. Seorang pemimpin tidak akan mengabaikan pendidikan anak jalanan jika hatinya dipenuhi oleh empati. Maka benar sekali bahwa hilangnya nilai kemanusiaan juga berarti hilangnya nilai ketuhanan. Oleh

karena itu, pendidikan yang tidak mengajarkan nilai kemanusiaan adalah pendidikan yang cacat secara moral. Kita tidak bisa berharap mencetak manusia yang utuh hanya dengan matematika dan sains. Kita butuh pendidikan yang menyentuh batin dan nurani. Kita butuh ruang-ruang diskusi tentang penderitaan, tentang pengorbanan, tentang menolong orang yang tidak kita kenal. Pendidikan harus menjadi rantai kebaikan, bukan semata produksi gelar dan ijazah. Jika nilai-nilai kemanusiaan benar-benar ditegakkan, tidak akan ada penjajahan dalam bentuk apapun baik penjajahan secara fisik, ekonomi, budaya, maupun spiritual. Maka, membangun peradaban berarti membangun manusia yang manusiawi dan tugas itu harus dimulai dari pendidikan.

5. Mendorong Pemikiran Kritis

Gus Dur sangat mendorong pengembangan pemikiran kritis dalam pendidikan. Siswa harus diajarkan untuk mempertanyakan dan menganalisis berbagai pandangan. Dalam lembaga pendidikan Islam, penting menciptakan suasana yang mendukung siswa berpikir kritis dan tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Dengan mendorong pemikiran kritis, siswa diajak mengeksplorasi berbagai perspektif dan memahami kompleksitas isu-isu sosial. Ini sangat penting dalam konteks keberagaman, di mana siswa perlu belajar menghargai pandangan orang lain sambil tetap mempertahankan keyakinan mereka sendiri. Pendidikan yang mendorong pemikiran kritis melahirkan individu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan yang mendorong pemikiran kritis juga membantu siswa menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Dunia terus berkembang, dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, siswa lebih mampu menghadapi tantangan dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang beragam (Endra Sattrahing Jaya Kusuma dkk, 2024:370).

Pendidikan harus menjadi ruang subur bagi tumbuhnya pemikiran kritis, karena hanya dengan kemampuan berpikir kritislah manusia bisa menilai realitas secara jernih, merespon ketimpangan secara bijak, dan membela kebenaran secara berani. Pemikiran kritis tidak sekadar kemampuan mengkritik, melainkan keberanian menggali kebenaran di balik yang tampak. Sokrates, filsuf besar Yunani Kuno, adalah salah satu contoh agung dari pemikiran kritis. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak menerima begitu saja apa yang disebut "kebenaran umum", melainkan harus diuji

lewat pertanyaan, dialog, dan refleksi. Metode *elenchus* atau dialektika-nya terkenal sebagai cara menggugah kesadaran moral dan intelektual lawan bicaranya. Sokrates tidak takut bertanya hal yang dianggap tabu oleh masyarakat atau elit politik saat itu. Akibatnya, ia dipenjarakan dan dihukum mati karena dianggap merusak pikiran pemuda. Tapi dari sinilah kita belajar berpikir kritis kadang berbiaya mahal, namun ia adalah pondasi kebebasan berpikir dan martabat manusia (Siti Zahra Anisa dkk, 2024:1).

Aristoteles, murid dari Plato, juga membangun tradisi berpikir kritis lewat pendekatan rasional dan empiris. Ia membedakan berbagai jenis pengetahuan, menekankan logika sebagai dasar berpikir, dan mendorong penyelidikan sistematis terhadap alam, etika, dan politik. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia adalah *zoon politikon* makhluk sosial yang harus aktif dalam kehidupan publik, dan berpikir kritis adalah sarana menjalankan tanggung jawab sosial dengan bijak (Susanti Vera dkk, 2021:67). Dalam sejarah Indonesia, Tan Malaka menjadi contoh nyata dari pemikiran kritis yang radikal dan berani. Ia tidak hanya menggugat kebijakan kolonial yang menindas rakyat, tetapi juga mengkritik para elite pribumi yang kompromistis. Dalam bukunya *Madilog* (Materialisme, Dialektika, dan Logika), ia memperkenalkan cara berpikir ilmiah kepada rakyat Indonesia agar tidak mudah ditipu oleh feodalisme dan dogma yang membutakan. Kebebasan berpikir adalah pondasi kemerdekaan sejati, bukan hanya sekadar mengganti penjajah dari bangsa asing ke bangsa sendiri (Muhammad Fajrul Islam, 2016:159).

Era digital saat ini, mendorong siswa untuk berpikir kritis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia maya dipenuhi oleh informasi yang bercampur antara fakta dan hoaks, antara kebenaran dan propaganda. Tanpa kemampuan berpikir kritis, siswa mudah terbawa arus, bahkan bisa menjadi korban manipulasi ideologis, radikalisme, dan disinformasi. Kelompok-kelompok seperti orientalis, separatis, bahkan kelompok ekstrem, bisa dengan mudah masuk ke dalam benak yang kosong dan tidak kritis. Pemikiran kritis juga sangat relevan dalam persaingan global. Di tengah arus teknologi, ekonomi, dan kebudayaan yang mengglobal, hanya generasi yang memiliki kemampuan analisis, argumentasi, dan kreativitaslah yang bisa bersaing. Siswa yang tidak dilatih berpikir kritis hanya menjadi konsumen dari produk dan ide bangsa lain (Imas Kurniawaty dkk, 2022:2).

Lebih dalam lagi, berpikir kritis sejatinya adalah bagian dari fitrah manusia. Dalam Islam, Al-Qur'an berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir dan merenung. Ayat-ayat yang menggunakan kata seperti *yatafakkarun* (mereka berpikir), *ya'qilun* (mereka berakal), atau *afala tatafakkarun* (tidakkah kamu berpikir), menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan umat-Nya menjadi pasif dan taklid buta, melainkan aktif menggunakan akalnya menimbang kebenaran, menolak kebatilan, dan membangun peradaban. Maka benar sekali, membangun pemikiran kritis dalam pendidikan adalah bentuk penghormatan terhadap fitrah manusia, sekaligus tanggung jawab besar kita agar generasi masa depan mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan, antara kebajikan dan kezaliman. Pendidikan yang mendorong pemikiran kritis mampu melahirkan siswa cerdas, berani, bijak, dan merdeka. Tanpa itu, kita hanya akan mencetak generasi "pandai tapi pasrah", cerdas tapi kehilangan arah.

6. Menghargai Tradisi Lokal

Meskipun mendorong kosmopolitanisme, Gus Dur juga sangat menghargai tradisi lokal. Setiap budaya memiliki nilai dan keunikan yang perlu dihargai. Dalam lembaga pendidikan Islam, penting untuk mengajarkan siswa menghargai warisan budaya mereka sendiri dan tetap terbuka terhadap pengaruh dari luar. Menghargai tradisi lokal membantu siswa memahami identitas mereka dan akar budaya mereka. Dengan mengenal dan mencintai budaya sendiri, siswa akan lebih mampu berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Gus Dur mengajarkan bahwa keberagaman harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Pendidikan yang menghargai tradisi lokal juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal dalam kurikulum, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat mereka. Ini akan membantu menciptakan rasa kebanggaan dan cinta terhadap budaya sendiri, sekaligus mendorong sikap terbuka terhadap perbedaan (Ni Made Suarningsih, 2019:24).

Menghargai tradisi local adalah hal esensial dalam relasi antara pendidikan, manusia, dan tradisi. Dalam perspektif antropologi budaya dan sosial, bahwa tradisi mendahului agama dalam sejarah umat manusia. Sebelum sistem kepercayaan dan wahyu turun kepada manusia, mereka telah lebih dahulu hidup

dalam lingkaran adat, ritus, simbol, serta nilai-nilai yang mengatur relasi sosial dan alam. Tradisi adalah akar kehidupan manusia, tempat bernaungnya makna, kebersamaan, dan jati diri. Sebagai warga dunia manusia kosmopolitan, menghargai dan menjaga tradisi lokal adalah bagian dari aksiologi kemanusiaan, yakni bagaimana manusia menilai, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai dalam kehidupan. Tradisi bukan sekadar kebiasaan, tapi merupakan ekspresi dari kearifan kolektif yang teruji oleh zaman. Seperti yang dikatakan Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka, tradisi adalah simbol-simbol budaya yang memuat makna mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami dunia, Tuhan, dan sesamanya. Maka, penghormatan terhadap tradisi berarti penghormatan terhadap identitas dan martabat manusia itu sendiri (Ahmad Sugeng Riady, 202117):

Sayangnya, arus globalisasi dan modernisasi seringkali melibas tradisi lokal dengan dalih kemajuan. Di sinilah pendidikan Islam memiliki peran penting bukan menjadi alat perusak tradisi, melainkan menjadi penjaga dan pengembangnya. Sebagaimana gagasan Seyyed Hossein Nasr, seorang filsuf Islam kontemporer, bahwa tradisi dan spiritualitas tidak boleh dipisahkan, karena tradisi adalah wahana yang mengantarkan manusia kepada tatanan hidup yang suci dan beradab. Pendidikan Islam semestinya mewarisi semangat ini, dengan mengakar kuat pada budaya lokal sekaligus terbuka terhadap dinamika global (M. Mahdi Alatas, 2020:154). Maka, pendidikan Islam tidak boleh semata mengejar capaian teknologi atau sains, tetapi harus juga menjadi ruang konservasi nilai-nilai luhur, yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Di dalam tradisi, masyarakat belajar bekerjasama, membangun solidaritas, dan hidup selaras dengan alam serta sesama. Gotong royong, musyawarah, adat istiadat, dan penghormatan terhadap leluhur adalah nilai-nilai yang menyatukan komunitas dan menciptakan ketahanan sosial. Pendidikan Islam harus mendorong regenerasi tradisi ini dengan pendekatan yang kontekstual dan kreatif, seperti menyisipkan praktik budaya lokal dalam pembelajaran, menyelenggarakan kegiatan sekolah berbasis tradisi (misalnya prosesi panen, seni daerah, dan sastra lokal), serta membangun kesadaran sejarah murid akan akar budayanya. Jangan sampai pendidikan berubah menjadi mesin pemutus warisan. Jika peserta didik tidak lagi mengenal atau merasa bangga dengan tradisinya sendiri, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kosong

identitas dan mudah diseret oleh arus budaya luar yang belum tentu sesuai. Sebaliknya, peserta didik yang mengenal dan mencintai tradisi, akan tumbuh sebagai pribadi yang kokoh, terbuka, namun tetap mengakar. Sebagaimana kata Kuntowijoyo, pendidikan harus mengangkat budaya menjadi kesadaran, bukan menenggelamkannya dalam modernitas yang membutakan.

Maka, pendidikan Islam hari ini perlu bersikap masif dalam mempertahankan dan menumbuhkan tradisi-tradisi luhur. Era digital boleh diadaptasi, tetapi bukan dengan mengorbankan warisan budaya. Pendidikan harus menjadi jembatan antara warisan masa lalu yang penuh hikmah dengan masa depan yang terbuka pada perubahan. Sebab dalam tradisi yang dijaga dan dimuliakan, di situlah fondasi peradaban diletakkan dan dari sanalah akan lahir manusia yang utuh, yang berakal, berbudaya, dan berakhlak.

7. Menumbuhkan Rasa Solidaritas

Rasa solidaritas adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan oleh Gus Dur. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial membantu sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dalam lembaga pendidikan Islam, menumbuhkan rasa solidaritas di antara siswa melalui berbagai kegiatan sosial. Melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mereka dapat belajar peduli dan berbagi dengan orang lain. Kegiatan seperti bakti sosial atau penggalangan dana untuk korban bencana dapat menjadi sarana mengajarkan nilai solidaritas. Tindakan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan orang lain. Menumbuhkan rasa solidaritas juga membantu siswa memahami pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Dalam masyarakat yang beragam, sikap saling membantu dan mendukung sangat penting menciptakan lingkungan harmonis. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, lembaga pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli.

Penerapan nilai-nilai pemikiran Gus Dur dalam lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam konteks kosmopolitan, urgen membentuk individu toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Pendidikan yang mengedepankan keberagaman, dialog antaragama, etika, dan keterlibatan masyarakat, siswa dapat belajar hidup berdampingan dengan orang lain. Pendidikan harus mampu membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia yang kompleks.

Mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan pemikiran kritis, lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan generasi yang siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

Solidaritas bukan sesuatu yang otomatis hadir dalam masyarakat. Ia bukan keniscayaan seperti perbedaan, melainkan sesuatu yang harus dibentuk, ditanamkan, dan dirawat melalui proses pendidikan. Pendidikan yang baik selain mengajarkan logika dan keterampilan, juga pengejaran nilai empati, kepedulian, dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat plural. Seperti dikatakan Émile Durkheim, seorang sosiolog pendidikan terkemuka, fungsi utama pendidikan adalah mentransmisikan nilai-nilai sosial. Dalam *The Division of Labor in Society*, Durkheim membedakan antara "solidaritas mekanik" yang terjadi pada masyarakat homogen dan "solidaritas organic" yang tumbuh dalam masyarakat kompleks dan beragam (Witri Safitri, 2023:5). Pendidikan dalam masyarakat modern harus mampu menanamkan solidaritas organik, yaitu kesadaran bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi kebutuhan untuk saling melengkapi.

Tokoh lain seperti Paulo Freire, dalam *Pedagogy of the Oppressed*, bahwa pendidikan sebagai sarana membangkitkan kesadaran kemanusiaan. Pendidikan, kata Freire, harus membuat manusia tidak hanya tahu, tapi peduli dan bertindak untuk membebaskan sesama dari ketertindasan. Kemudian dalam narasinya mengatakan ketika guru berperan sebagai satu-satunya narator dalam proses pembelajaran, siswa cenderung didorong untuk menghafal materi secara mekanis tanpa ruang bagi pemahaman yang kritis dan reflektif. Dalam pola ini, siswa diposisikan seperti wadah kosong yang hanya berfungsi menerima isi dari guru. Keberhasilan guru diukur dari seberapa banyak ia mampu "mengisi" siswa, sementara siswa yang dianggap baik adalah mereka yang pasif dan patuh menerima informasi. Pola ini tidak hanya mematikan kreativitas, juga menghambat tumbuhnya sikap solidaritas di antara siswa. Sebab, dalam sistem yang menekankan kepatuhan individual dan penerimaan sepihak, ruang untuk interaksi, kolaborasi, dan saling belajar antar siswa menjadi sempit. Padahal, solidaritas sebagai sikap saling peduli, berbagi, dan bekerja sama tumbuh melalui dialog, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap pengalaman belajar masing-masing. Maka, pendekatan pendidikan yang partisipatif dan dialogis jauh lebih potensial dalam membangun solidaritas social (Mark Garavan, 2010:4).

Inilah akar dari solidaritas, kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri. Dalam konteks kebangsaan, solidaritas menjadi lem perekat sosial yang menjaga keutuhan masyarakat di tengah perbedaan. Tanpa solidaritas, setiap perbedaan akan mudah menjelma menjadi konflik. Sejarah Indonesia mencatat, berbagai kerusuhan sosial hingga polarisasi politik terjadi karena hilangnya kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Pendidikan adalah alat terkuat mengembalikan kesadaran itu. Negara yang damai lahir dari pendidikan yang berhasil menanamkan rasa tanggung jawab sosial kepada setiap warganya. Generasi yang dibentuk hanya untuk mengejar prestasi individual, tanpa nilai solidaritas, akan mudah menjadi apatis, bahkan destruktif. Siswa yang tak diajarkan arti berbagi, empati, dan gotong royong, bisa tumbuh menjadi individu egois yang merasa dunia hanya tentang dirinya. Berbagai polemik sosial seperti konflik antarsuku, kekerasan pelajar, intoleransi, bahkan perundungan di sekolah, adalah gejala minimnya pendidikan yang menanamkan solidaritas. Pendidikan harus menghidupkan nilai-nilai humanisme dan kepekaan sosial. Jika di sekolah, siswa dilatih untuk menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, belajar empati lewat kegiatan sosial, atau memahami penderitaan orang lain melalui diskusi dan proyek kemanusiaan. Maka ketika mereka dewasa, mereka akan terbiasa mendudukkan persoalan dengan kepala dingin dan hati yang jernih bukan menambah persoalan dengan kemarahan dan ego sektoral.

Solidaritas bukan hadiah dari alam, tapi buah dari kesadaran nurani yang dipupuk melalui pendidikan. Ia tumbuh saat manusia sadar bahwa hanya dengan hidup bersama secara damai dan saling menopanglah kita bisa membangun dunia yang lebih layak ditinggali. Pendidikan adalah jalan panjang menuju kesadaran ini. Maka, sekolah menjadi arena pembentukan komunitas di mana setiap individu belajar menjadi manusia bagi manusia lain. Pendidikan yang tak menanamkan solidaritas, sama dengan membiarkan generasi tumbuh tanpa akar. Maka, jika kita ingin masa depan bangsa ini damai, adil, dan sejahtera, mulailah dari pendidikan yang membentuk solidaritas sejak dini.

I. Tantangan dan Peluang Implementasi Pemikiran Kosmopolitanisme Gus Dur dalam Pendidikan Islam

1. Peluang

Peluang Implementasi Pemikiran Kosmopolitanisme Gus Dur dalam Pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa item berikut:

Pemikiran kosmopolitan menawarkan cara pandang yang mengangkat manusia sebagai warga dunia yang setara, melewati batas-batas etnis, agama, dan nasionalisme sempit. Dalam konteks global yang semakin terhubung, implementasi pemikiran ini membuka banyak peluang strategis, baik di ranah pendidikan, sosial, hingga politik dan budaya.

2. Penguatan toleransi dan dialog antarbudaya

Penguatan toleransi dan dialog antarbudaya menjadi pintu masuk paling penting. Kosmopolitanisme mendorong lahirnya kesadaran perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. Ini memberi ruang terbuka bagi terciptanya dialog antaragama dan antarbudaya yang bertujuan menemukan titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam dunia yang penuh gejolak konflik identitas, peluang ini sangat relevan menciptakan masyarakat damai dan inklusif. Pemikiran kosmopolitan bukan sebuah gagasan abstrak tentang kesetaraan umat manusia, melainkan sebuah tawaran praktis dan strategis menciptakan dunia damai melalui penguatan toleransi dan dialog antarbudaya. Dunia ini menjadi ruang kosmik bersama, tempat segala bangsa, budaya, dan keyakinan bertemu, saling memandang, dan terkadang bersinggungan. Kosmopolitanisme hadir sebagai jembatan menghubungkan perbedaan menjadi kekuatan (Choirul Muna & Puji Lestari, 2023:243).

Peluang utama pemikiran ini mendorong kesadaran kolektif manusia untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Ibarat lebah yang bekerja tanpa mengganggu bunga yang ia hinggapi, manusia kosmopolitan idealnya mereka menghadirkan manfaat tanpa mencederai yang lain. Semua penghuni bumi kita ibaratkan sebagai satu galaksi kehidupan sejatinya menginginkan kedamaian, bukan konflik. Namun damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit, perlu dibangun melalui penerimaan, pengertian, dan dialog yang jujur antar budaya. Dalam dunia yang semakin terbuka, manusia bergerak lintas batas negara, budaya, dan bahasa. Ketika seseorang berjalan di jalanan Eropa dan melihat budaya berpakaian yang terbuka, atau menyaksikan ekspresi kasih sayang di ruang publik, maka respons kosmopolitan bukanlah penolakan atau penghakiman, tetapi pemahaman bahwa budaya memiliki logikanya sendiri. Di belahan dunia lain, seperti China yang menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama, atau Arab dengan pakaian jubah, sorban, dan salamnya yang khas semua itu adalah ekspresi nilai yang lahir dari sejarah, ruang, dan makna khas (Fiandy Mauliansyah, 2016:2).

Kosmopolitanisme tidak meminta kita untuk mencair dalam budaya lain, melainkan mendorong kesediaan memahami tanpa meninggalkan akar budaya sendiri. Ia bukan pembubaran identitas, melainkan kesadaran pluralitas yang memerdekakan. Seperti dikatakan tokoh poskolonial Homi K. Bhabha, interkulturalitas sejati terjadi bukan saat satu budaya menaklukkan yang lain, tapi ketika

mereka berdialog dalam posisi sejajar. Dalam konteks ini, toleransi bukan lagi sekadar sikap pasif "membiarkan", melainkan kesediaan aktif membangun ruang komunikasi (Syihabul Furqon & Busro, 2020:74). Dialog antar budaya menjadi mekanisme penting membongkar stereotip, menyingkap prasangka, dan menciptakan titik temu dalam perbedaan. Inilah yang membedakan kosmopolitanisme dari sekadar multikulturalisme. Ia bukan hanya mengakui keberagaman, tetapi mendorong pertukaran makna dalam keberagaman itu sendiri.

Pendidikan menjadi medan penting dalam menanamkan semangat ini. Ketika siswa diajak memahami keberagaman budaya global, mereka tidak hanya belajar geografi atau antropologi, tapi juga empati. Mereka akan lebih siap hidup di dunia majemuk tanpa kehilangan jati diri. Seperti yang dikatakan Amartya Sen, "identitas tidak harus tunggal, dan keberagaman tidak mesti berujung pada konflik, jika manusia dididik hidup dalam pluralitas (B. Herry-Priyono, 2015:57). Maka dari itu, dalam membangun bangsa yang seimbang, sejuk, dan damai seperti kehidupan para lebah, kesadaran akan perbedaan harus menjadi norma, bukan gangguan. Budaya luar yang baik dan bernilai kemanusiaan bisa diterima sebagai pelengkap, bukan pengganti. Dan budaya lokal harus tetap dijaga sebagai akar identitas agar dialog tidak berubah menjadi asimilasi sepihak. Dengan pendekatan ini, kosmopolitanisme menjadi peluang nyata dalam menciptakan dunia baru, dunia yang tidak dibatasi oleh tembok kebencian, tetapi diikat oleh jembatan penghormatan.

Pengembangan kurikulum inklusif

Gagasan tentang kurikulum inklusif sebagai peluang strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, terbuka, dan responsif terhadap tantangan zaman sangat relevan. Kurikulum inklusif merupakan peluang fundamental dalam mereformasi dunia pendidikan. Bukan sekadar pembaruan isi materi, melainkan sebuah paradigma baru dalam memahami pengetahuan membentuk pola pikir peserta didik. Di tengah kompleksitas zaman ditandai dengan disrupsi, globalisasi, dan interkoneksi budaya serta ilmu pengetahuan, pendekatan kurikulum eksklusif dan monodisipliner menjadi tidak lagi memadai. Kurikulum inklusif menawarkan jalan alternatif lebih terbuka, menyeluruh, dan adaptif terhadap ragam realitas kehidupan (Erwin Eka Saputra dkk, 2024:2).

Salah satu kekuatan utama dari kurikulum inklusif adalah pendekatan interdisipliner dalam memahami isu atau konsep. Suatu topik tidak cukup dipahami dari satu perspektif ilmu, mesti didekati secara multidimensi agar maknanya lebih utuh dan transformatif. Misalnya, isu perubahan iklim tidak hanya dikaji dari sains lingkungan, tetapi melibatkan perspektif ekonomi, etika, politik, budaya, hingga keagamaan. Inilah bentuk integrasi pengetahuan menjadikan kurikulum lebih relevan dengan kenyataan hidup dan kebutuhan manusia menyeluruh. Tugas pendidikan menanamkan kemampuan menyintesis dan merefleksikan pengetahuan lintas bidang. Metode pengajaran interdisipliner menjadi sarana utama mewujudkan hal ini. Peserta didik didorong untuk melihat hubungan antar ilmu, mengembangkan dialog pengetahuan, serta memperluas cakrawala berpikir secara kritis dan kreatif (Hamida Olfah, 2024:2).

Lebih jauh, kurikulum inklusif tak hanya mengedepankan keilmuan internal (lokal), tetapi terbuka pada pemikiran global, termasuk dari peradaban Barat. Ini bukan soal meninggalkan identitas, melainkan membangun daya lenting intelektual menjangkau lebih luas. Seperti yang telah dicontohkan oleh peradaban Islam di masa keemasannya, terutama pada abad pertengahan, ketika dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Córdoba, dan Toledo menjadi pusat studi para ilmuwan dari berbagai belahan dunia, termasuk sarjana-sarjana Eropa seperti: Gerard dari Cremona, Ia datang ke Toledo untuk menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina ke dalam bahasa Latin (Fathurrahman Muhtar, 2014:7). Michael Scot, Menerjemahkan karya-karya filsuf dan ilmuwan Muslim, seperti Averroes (Ibnu Rusyd), ke dalam bahasa Latin untuk diserap oleh dunia Kristen Eropa (Qoidy Hilman Hindami & Mochamad Yusuf, 2023:8). Adelard dari Bath mengunjungi dunia Islam untuk belajar matematika, astronomi, dan filsafat (Aniroh, Fathurohim & Umi Sangadah, 2022:8).

Pengalaman ini membuktikan kosmopolitanisme intelektual sudah menjadi praktik sejak lama. Dunia Islam waktu itu tidak menutup diri terhadap pemikiran asing, justru mengintegrasikannya dengan nilai-nilai lokal melahirkan inovasi. Maka, dalam semangat yang sama, pengembangan kurikulum inklusif hari ini pun perlu belajar dari strategi dunia Barat dalam membangun kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum inklusif juga berpeluang menjadi solusi peningkatan mutu pendidikan. Membuka akses

teknologi modern tanpa menafikan metode klasik. Pembelajaran berbasis kitab dan teks tetap penting sebagai penguat tradisi keilmuan dan berjalan berdampingan dengan literasi digital, kecerdasan buatan, dan pendekatan pedagogi modern. Kurikulum tidak lagi bersandar pada kertas dan papan tulis, tetapi menjelma dalam bentuk *platform* digital, laboratorium virtual, hingga simulasi dunia nyata. Dengan pendekatan ini, kurikulum inklusif akan menghasilkan peserta didik yang pandai, kaya perspektif, tangguh berpikir, dan terbuka terhadap perbedaan. Mereka menjadi manusia pembelajar sejati, menjawab tantangan zaman dengan keyakinan dan kedalaman ilmu. Maka dari itu, kurikulum inklusif bukan saja peluang, melainkan keharusan bagi pendidikan yang ingin tetap relevan di masa depan.

Penguatan Kerjasama internasional

Implementasi pemikiran kosmopolitan dalam penguatan kerja sama internasional sangat relevan, terutama dalam konteks globalisasi dan era keterhubungan digital saat ini. Gagasan ini menyentuh dimensi praktis sekaligus filosofis dari relasi antarbangsa. Kosmopolitanisme juga membuka peluang penguatan kerjasama internasional. Dalam kerangka ini, manusia tidak lagi terkungkung dalam semangat eksklusifisme bangsa, tapi belajar membangun jaringan solidaritas antarnegara dan antarbangsa. Peluang seperti pertukaran pelajar, kolaborasi riset lintas kampus dunia, hingga partisipasi aktif dalam forum-forum global menjadi semakin terbuka dan perlu dimanfaatkan membentuk generasi kosmopolitan yang peka terhadap tantangan kemanusiaan global (Masitha Tismananda Kumala dkk, 2021:123).

Pemikiran kosmopolitan tidak berhenti pada level etis atau kultural saja, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kerja sama antarnegara bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kematangan dalam membangun solidaritas global berkelanjutan. Dalam pandangan kosmopolitan, manusia adalah warga dunia (*citizen of the world*) yang berbagi tanggung jawab atas kehidupan bersama di bumi ini. Maka, menutup diri dari relasi global sama saja dengan menyempitkan ruang gerak keberadaban. Bila negara-negara memilih jalan hidup sendiri, enggan membuka diri untuk kerja sama, maka tak hanya mereka akan tertinggal, melainkan eksistensi mereka

mudah rapuh. Ketergantungan yang sehat antarbangsa bukanlah aib, melainkan niscaya menciptakan dunia stabil dan saling mendukung (Saripudin dkk, 2023:4).

Pertanyaan yang sering muncul adalah "Mengapa kita tidak hidup mandiri saja? Apakah kita tak cukup kuat untuk berdiri sendiri?" Asumsi ini, meski lahir dari semangat nasionalisme, seringkali menyesatkan jika tidak dilandasi oleh wawasan realitas global. Tidak ada bangsa yang bisa benar-benar hidup sendiri. Seperti dalam kehidupan manusia, tidak ada satu individu pun bertahan tanpa dukungan orang lain. Dalam konteks inilah, kerja sama internasional menjadi bentuk tanggung jawab moral, strategi pembangunan, dan menjaga stabilitas bangsa itu sendiri. Kerja sama internasional memberikan peluang besar untuk peningkatan mutu pendidikan, pengembangan riset, teknologi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, melalui program beasiswa luar negeri, pertukaran pelajar, kolaborasi riset antar kampus, hingga dukungan teknis dan pendanaan dari lembaga internasional. Semua ini hanya mungkin jika hubungan diplomatik dan kerja sama internasional dibangun dengan prinsip kesalingan dan keterbukaan.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, misalnya, dalam berbagai forum internasional seperti G20 atau ASEAN, sering menekankan kerja sama yang adil, inklusif, dan saling menghormati. Kerja sama global bukan sekadar keuntungan ekonomi, tapi cara menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Dalam Forum G20 Bali 2022, Jokowi menyuarakan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan iklim isu-isu global yang tidak bisa diatasi sendirian (https://m.tribunnews.com). Lebih dari itu, kerja sama internasional juga merupakan sarana menjaga stabilitas hubungan antarwarga negara di seluruh dunia. Sebagai contoh, mengapa warga Muslim di Amerika relatif aman, atau warga Konghucu di Indonesia tidak terganggu? Karena ada prinsip timbal balik yang disadari secara global, jika kita mengganggu komunitas minoritas dari negara lain di negara kita, maka warga negara kita yang tinggal di negara mereka pun akan ikut terdampak. Kerja sama internasional bukan tentang pertukaran barang dan teknologi, tetapi juga bentuk nyata dari perlindungan martabat manusia. Pemikiran kosmopolitan yang menjiwai kerja sama internasional mampu membangun dunia yang saling menghormati, bukan saling mencurigai. Dunia ini ibarat taman penuh warna dan wangi, tidak hanya satu jenis bunga yang tumbuh.

Keberagaman adalah anugerah, dan kerja sama lintas batas adalah cara terbaik menyiraminya agar tumbuh subur.

Inklusifitas dalam politik dan kebijakan public

Pada ranah politik dan kebijakan publik, kosmopolitanisme memberikan dorongan menghadirkan kebijakan yang inklusif. Kebijakan tidak lagi berpusat pada kelompok mayoritas, tapi memperhatikan kelompok marginal dan minoritas. Dalam semangat kosmopolitanisme, hak asasi manusia dipandang sebagai fondasi bersama, bukan sebagai narasi Barat, tapi sebagai nilai yang menyatu dalam fitrah setiap manusia. Hal ini menjadi peluang besar memperkuat keadilan sosial dalam tatanan lokal maupun nasional. Pemahaman akan nilai-nilai kosmopolitan memiliki implikasi besar terhadap arah dan bentuk pemerintahan, khususnya dalam ranah politik dan kebijakan publik. Dalam kerangka kosmopolitan, politik tidak lagi dipandang sebagai arena pertarungan kekuasaan semata, melainkan sebagai ruang etis yang memediasi kepentingan bersama secara adil dan setara (Inka Nusamuda Pratama dkk, 2024:2). Kebijakan publik pun bergerak dari paradigma eksklusif menuju pendekatan yang inklusif dan berkeadaban. Ketika negara mengadopsi prinsip ini dalam politik dan kebijakan, maka diskriminasi, eksklusif, dan kekerasan sistemik akan terkikis.

Negara yang mengembangkan diri dalam kerangka kosmopolitan tidak lagi mengenal bentuk pemerintahan otoriter atau sistem kebijakan berpihak pada elite atau kelompok tertentu. Yang tumbuh adalah negara visioner, negara yang menjadikan keadilan, kesejahteraan, dan hak hidup sebagai nilai dasar setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, politik yang tertutup dan eksklusif akan terdisrupsi oleh etika keterbukaan cosmopolitan (Tiara Melati & Sulikah Asmorowati, 2023:1). Gerakan politik yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan kelompok, dinasti, atau oligarki akan digeser oleh kesadaran kolektif yang menjunjung tinggi martabat seluruh warga negara. Kebijakan publik tidak lagi dirancang berdasarkan kompromi elite, melainkan sebagai hasil dialog partisipatif lintas komunitas yang menghargai keragaman suara. Kosmopolitanisme menolak partikularisme sempit yang menjadi akar dari berbagai bentuk intoleransi, eksploitasi, dan ketidakadilan struktural. Dalam sistem kosmopolitan, politik transaksional dan praktik diskriminatif kehilangan legitimasi, karena keabsahan suatu kebijakan diukur dari sejauh mana ia menciptakan ruang hidup yang

adil bagi semua, bukan mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan (Mariyam dkk, 2020:2). Lebih jauh, inklusivitas dalam politik juga membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi kelompok marjinal seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan etnis, serta komunitas adat. Inilah wujud konkret dari cita-cita demokrasi deliberatif, di mana keputusan politik tidak ditentukan oleh mayoritas yang menindas, tetapi oleh proses dialog dan konsensus mencerminkan keberagaman pengalaman hidup warga negara.

Kebijakan publik dibentuk dalam semangat kosmopolitan akan menjunjung tinggi nilai keadilan distributif, akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ruang publik. Negara kosmopolitan bukan negara tanpa batas, tetapi negara yang batas-batasnya tidak membatasi nilai kemanusiaan. Menjaga kedaulatannya, namun tidak bersikap eksklusif terhadap dunia. Menjalin kerja sama dengan bangsa lain dalam semangat solidaritas global, bukan dominasi atau isolasi. Dengan demikian, inklusivitas dalam politik dan kebijakan publik bukan hanya strategi pembangunan, tetapi juga ekspresi dari nilai kosmopolitan yang mengedepankan keadaban, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif dalam dunia yang terus bergerak menuju keterhubungan global (Abdal dkk, 2021:17).

Inklusifitas dalam politik berlandaskan pada cosmopolitan mengacu juga pada "etika" atau etika politik cosmopolitan. Etika ini menolak batas-batas politik dan geografis sebagai halangan memperjuangkan keadilan. Dalam perspektif kosmopolitan, kewajiban moral seseorang tidak berhenti pada komunitas lokal atau negara bangsa, tetapi merentang hingga seluruh umat manusia sebagai satu komunitas global (Dwi Fa'yi Arya Sakhi dkk, 2024:96). Pemikiran ini antara lain dikembangkan oleh Immanuel Kant, dalam esainya *Perpetual Peace* (1795) mengusulkan sebuah tatanan dunia yang ditopang oleh prinsip "*hospitality*" atau keramahan antarmanusia dan negara. Republik global dan prinsip-prinsip moral universal sebagai dasar hubungan antarnegara bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat (Muhammad Khasib Amin Murtadlo & Abdul Khobir, 2023:2).

Appiah, dalam konsep "*rooted cosmopolitanism*", menegaskan bahwa seseorang bisa berakar dalam tradisi lokal, namun tetap terbuka dan terhubung dengan kemanusiaan global. Inilah bentuk etika kosmopolitan yang tidak memaksa homogenitas, justru

menghargai pluralitas dalam bingkai tanggung jawab Bersama (Leonard Chrysostomos Epafras, 2021:25-26). Etika politik kosmopolitan memprotes keras bentuk-bentuk politik eksklusif, seperti nasionalisme sempit, politik identitas yang menindas, atau sistem kebijakan mengabaikan penderitaan manusia hanya karena perbedaan tempat tinggal atau kewarganegaraan. Dalam dunia yang saling terhubung ini, penderitaan satu kelompok adalah urusan semua, dan keadilan tidak boleh dibatasi oleh paspor atau asal negara. Dalam praktiknya, etika politik kosmopolitan mendorong kebijakan publik, politik luar negeri, hingga bantuan kemanusiaan dilakukan atas dasar prinsip kesetaraan manusia. Misalnya, penanganan pengungsi bukan hanya soal beban negara penerima, melainkan tanggung jawab global atas hak hidup mereka. Begitu pula isu perubahan iklim, keadilan ekonomi, dan akses terhadap pendidikan harus dijadikan persoalan bersama, karena dampaknya melintasi batas-batas negara.

Etika kosmopolitan juga mengoreksi arah politik global agar tidak berorientasi pada kekuatan dan keuntungan sempit, melainkan berdasar pada kewajiban moral melindungi, memberdayakan, dan menghormati seluruh umat manusia. Politik yang demikian tidak membenarkan agresi, penindasan, atau eksploitasi atas nama kepentingan nasional. Sebaliknya, ia menumbuhkan politik tanggung jawab yang inklusif dan bermartabat. Dalam konteks pendidikan politik, etika ini menjadi penting untuk ditanamkan kepada generasi muda. Mereka perlu memahami menjadi warga negara yang baik berarti menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini menyangkut komitmen terhadap keadilan global, perdamaian, dan solidaritas lintas budaya. Dalam realitas politik kontemporer, demokrasi kerap direduksi menjadi sekadar prosedur electoral, pemilu rutin, rotasi kekuasaan, dan jaminan hak pilih. Itulah yang disebut demokrasi formal yang menekankan aspek mekanis demokrasi (Muhammad Diki & Nurmalasari, 2021:62). Namun, perspektif kosmopolitan menuntut kita untuk melampaui batas ini, menuju apa yang disebut sebagai demokrasi substantif, demokrasi yang tidak hanya legalistik, juga menghadirkan keadilan sosial, partisipasi bermakna, serta perlindungan hak-hak semua manusia tanpa diskriminasi.

Pandangan kosmopolitan, demokrasi tidak berhenti pada hak suara, tapi pada kualitas hidup manusia sebagai warga dunia. Demokrasi substantif adalah demokrasi yang hidup dan berdampak

di mana kebijakan publik menyentuh kebutuhan dasar warga, mendengar suara yang termarjinalkan, dan melindungi minoritas, baik di dalam suatu negara maupun lintas batas negara. Kosmopolitanisme, dengan semangat universalitasnya, menantang demokrasi formal yang sering berlaku dalam konteks negara-bangsa. Ia menawarkan visi demokrasi global, di mana warga negara tidak hanya menjadi subjek kebijakan nasional, juga aktor yang memiliki suara dalam urusan-urusan global memengaruhi hidup mereka seperti isu iklim, migrasi, dan keadilan ekonomi dunia. Pemikir seperti David Held mendorong gagasan "demokrasi kosmopolitan" sebagai bentuk evolusi demokrasi substantif. Ia berpendapat bahwa demokrasi sejati tidak boleh dibatasi oleh batas-batas negara, karena tantangan yang dihadapi manusia saat ini bersifat global. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme representasi dan akuntabilitas yang berskala global dalam lembaga-lembaga internasional, organisasi lintas negara, atau forum-forum publik dunia (Ahmad Sholikin, 2021:170).

Demokrasi substantif juga menolak adanya ketimpangan struktural dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya, ketika kebijakan ekonomi internasional ditentukan oleh segelintir negara besar tanpa mendengarkan negara-negara kecil, hal itu sejatinya bukan demokrasi, meski dilakukan melalui mekanisme formal. Inilah yang dikritik oleh pemikir-pemikir cosmopolitan, substansi demokrasi harus berpihak pada prinsip keadilan global, partisipasi sejati, dan solidaritas lintas komunitas. Pergeseran dari demokrasi formal ke substantif juga sangat penting dalam konteks Indonesia. Demokrasi kita secara prosedural telah berlangsung pada pemilu, ada kebebasan berpendapat. Namun, apakah itu telah cukup menghadirkan kesejahteraan? Apakah demokrasi kita telah mengangkat suara-suara pinggiran, atau justru hanya melayani elite yang punya modal dan kuasa?

Perspektif kosmopolitan mendorong kita mengevaluasi ulang demokrasi kita apakah ia hanya demokrasi "kulit luar", atau sudah menyentuh substansi hidup rakyat? Apakah kebijakan publik yang diambil sudah melibatkan partisipasi rakyat yang autentik, atau hanya sebatas formalitas? Dengan demikian, demokrasi substantif dalam perspektif kosmopolitan mengajak kita mengintegrasikan etika global, partisipasi inklusif, dan keadilan sosial ke dalam jantung politik. Bukan hanya siapa yang memilih, tapi apa yang diperjuangkan dan siapa yang diuntungkan dari proses demokrasi itu.

Pembangunan kesadaran ekologis global

Kosmopolitanisme memberikan kerangka etis bahwa bumi adalah rumah bersama. Pandangan ini melahirkan kesadaran ekologis bahwa setiap tindakan manusia berdampak secara global. Peluang ini sangat penting membangun kolaborasi internasional dalam merespons perubahan iklim, kerusakan alam, dan isu lingkungan lainnya. Kosmopolitanisme mendorong manusia untuk keluar dari ego sektoral menuju solidaritas ekologis. Kesadaran ekologis global merupakan bagian penting dari cara pandang kosmopolitan menempatkan manusia sebagai warga dunia, bukan warga negara tertentu (Abdurrahman Hilabi dkk, 2020:11). Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, batas-batas geografis dan fisik bukan lagi penghalang utama dalam membangun kesadaran bersama. Manusia kini mengetahui, merasakan, dan bahkan terdampak oleh kejadian di belahan bumi lain hanya dalam hitungan detik. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia kini berada dalam jaringan ekologis global yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata, wabah yang muncul secara lokal di negara China, menyebar luas dan mengguncang hampir seluruh negara. Situasi ini menjadi refleksi penting bahwa persoalan ekologis tak bisa lagi diselesaikan secara lokal, memerlukan solidaritas dan tanggung jawab global (Restifani Cahyami Rosmita, 2022:115).

Kesadaran ekologis global menuntut perubahan paradigma dari eksploitasi menuju konservasi, dari kepentingan jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, misalnya, tidak bisa hidup mandiri tanpa keterhubungan energi dan sumber daya dari negara lain. Kebutuhan akan energi, bahan pangan, dan air bersih menandakan tidak ada satu bangsa pun yang benar-benar mandiri secara ekologis (Maizer Said Nabdi, 2008:160). Oleh karena itu, membangun kesadaran ini berarti membangun rasa tanggung jawab kolektif, membangun kerjasama internasional yang adil, serta mendorong pendidikan dan kebijakan berpihak pada kelestarian bumi. Dalam konteks ini, manusia kosmopolitan adalah mereka yang menyadari bahwa tindakan lokal berdampak global, dan bahwa masa depan bumi adalah tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.

Selain itu, kesadaran ekologis global menuntut adanya transformasi kebijakan publik dan kerja sama antarnegara. Negara-negara yang sadar tanggung jawab ekologis membentuk kesepakatan

internasional yang melindungi lingkungan hidup, mendorong teknologi hijau, serta melindungi masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup bersandingan langsung dengan alam. Sebab, dalam banyak kasus, justru komunitas-komunitas lokal inilah yang telah lama hidup dalam harmoni ekologis, namun kini terancam oleh kerakusan pembangunan modern. Kosmopolitanisme ekologis tidak menolak modernitas, tetapi mengarahkan modernitas untuk tidak mengorbankan keseimbangan alam. Ekologis global bukanlah wacana elit, tetapi panggilan nurani universal menjaga bumi.

Kesadaran ekologis global menjadi semakin urgen ketika kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan di satu wilayah memiliki dampak langsung terhadap stabilitas iklim dan keberlanjutan hidup di seluruh negara. Deforestasi besar-besaran yang terjadi di Amazon atau Kalimantan, misalnya, tidak hanya merusak keanekaragaman hayati lokal, tetapi mengganggu sistem iklim global karena hutan tropis berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar (Maria Aurelia Pramitha dkk, 2023:154). Demikian pula, polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri di satu negara dapat menyebar ke wilayah lain melalui atmosfer, menunjukkan betapa batas-batas geografis tidak mampu membendung konsekuensi ekologis. Ketergantungan negara-negara maju seperti Amerika Serikat terhadap sumber daya alam dan energi dari negara-negara di *Global South* seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika semakin mempertegas bahwa tidak ada bangsa yang benar-benar mandiri secara ekologis. Dalam sistem global yang terhubung ini, krisis lingkungan bukan lagi masalah lokal, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia. Karena itu, membangun solidaritas ekologis global merupakan satu-satunya jalan menjaga keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Pelestarian dan transformasi tradisi local

Kosmopolitanisme tidak anti-tradisi. Sebaliknya, ia menghargai tradisi sebagai ekspresi kemanusiaan yang tumbuh dari kebijaksanaan lokal. Dalam pendidikan Islam misalnya, tradisi lokal seperti musyawarah, gotong royong, hingga nilai-nilai kearifan adat bisa menjadi basis penguatan kosmopolitisme. Tradisi tidak dipertentangkan dengan kemajuan, justru bisa menjadi pondasi kokoh dalam membangun identitas global yang berakar kuat pada lokalitas. Dalam kerangka pemikiran kosmopolitan, pelestarian dan

transformasi tradisi lokal bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi (Habel Nain Samongilailai & Aldrin Budi Utomo, 2024:164). Kosmopolitanisme justru membuka ruang kesadaran baru tentang pentingnya menjaga nilai-nilai lokal sebagai identitas budaya yang khas, sembari menyesuaikannya secara adaptif dengan dinamika zaman. Prinsip dasarnya adalah mempertahankan esensi dan makna tradisi, kemudian mentransformasi aspek-aspek non-substansial agar tetap relevan di tengah arus modernitas (Aisya Putri Handayani dkk, 2024:179). Misalnya, dalam tradisi pernikahan, dahulu masyarakat menggunakan pakaian sederhana dan iringan musik biola atau alat musik tradisional. Kini, pernikahan dilakukan dengan busana modern dan musik yang dikolaborasi dengan alat-alat kontemporer seperti organ atau keyboard. Namun, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam prosesi pernikahan tetap dijaga itulah pelestarian dalam semangat transformasi.

Prinsip ini juga tampak dalam dunia seni musik tradisional seperti marawis dan gendang, yang kini dikolaborasikan dengan instrumen modern tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Oleh karena itu, kosmopolitanisme bukanlah proyek penghapusan warisan budaya, melainkan strategi pembaruan yang berakar pada kearifan lokal. Dalam pandangan Emha Ainun Nadjib, manusia adalah makhluk yang memiliki dua sisi tak terpisahkan, sebagai makhluk budaya dan makhluk spiritual. Kedua sisi ini senantiasa melekat dan membentuk keberadaan manusia secara utuh. Budaya, menurut Emha, bukan sekadar produk estetika yang dinikmati atau diperjualbelikan, melainkan perwujudan dari sistem nilai diyakini manusia sebagai kebaikan. Ia lahir dari ketidakpuasan manusia terhadap realitas yang ada, lalu diolah melalui cipta, rasa, dan karsa menjadi simbol-simbol bermakna khas. Maka dari itu, budaya tidak pernah bebas dari nilai, dan dalam dirinya mengandung potensi spiritual yang dalam. Dalam konteks pelestarian dan transformasi tradisi lokal, pemikiran Emha ini sangat relevan. Kosmopolitanisme sejati tidak menghapus kekhasan lokal, justru mendorong agar tradisi lokal dilestarikan sebagai ekspresi nilai dan spiritualitas masyarakat. Tradisi bukan sekadar rutinitas simbolik atau folklor yang diwariskan begitu saja, melainkan mengandung pesan batin yang dalam, yang jika digali, bisa menjadi jalan spiritual menuju realitas terdalam kemanusiaan. Maka dalam semangat kosmopolitan, pelestarian tradisi lokal bukanlah upaya konservatif semata, tetapi tindakan

sadar untuk menjaga identitas kultural sekaligus memperkaya spiritualitas Masyarakat (Mudzakkir Ma'ruf, 2019:57).

Transformasi pun tetap diperlukan, namun harus dilakukan pada aspek-aspek yang tidak substansial, agar tradisi dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jiwanya. Seperti perubahan alat musik atau pakaian dalam upacara pernikahan, selama tidak menghilangkan nilai dan makna dari peristiwa sakral tersebut. Emha mengingatkan bahwa budaya yang tidak digali secara spiritual hanya akan menjadi simbol ekonomi semata hanya menjadi objek pasar, kehilangan makna, dan menjauh dari nilai. Maka dari itu, budaya harus diperlakukan sebagai kendaraan spiritual, sebagaimana sujud dalam agama, tangis penderitaan, atau ilmu yang tuntas. Ia adalah salah satu jalan manusia mendekat kepada Sang Khalik. Oleh karena itu, dalam era kosmopolitan digital ini, pelestarian tradisi lokal menjadi tindakan urgen. Tradisi menjadi penanda identitas, ruang spiritual, dan jejak nilai yang membentuk bangsa. Jika tradisi ini dilupakan atau hanya dimodifikasi demi estetika global, maka masyarakat akan kehilangan arah dan jati dirinya. Seperti kata Emha, manusia yang tidak menyelami aspek spiritual dalam budaya hanya akan melahirkan budaya permukaan yang miskin makna dan tidak bermutu. Maka dalam semangat kosmopolitanisme, tradisi lokal perlu dilestarikan, digali maknanya, dan ditransformasi dengan bijak bukan ditinggalkan, tapi terus hidup dan menyinari kemanusiaan kita hari ini dan masa depan (Mudzakkir Ma'ruf, 2019:58-59).

Pandangan ini sangat tepat dalam melihat urgensi pelestarian budaya di era globalisasi digital. Corak khas setiap daerah adalah jejak hidup yang membentuk identitas kolektif. Tradisi Jawa seperti *wayang kulit, upacara sekaten, atau batik* adalah cerminan kosmologi dan nilai Jawa yang mendalam. Di Sulawesi, masyarakat Bugis dan Toraja dikenal dengan ritual *Rambu Solo'*[12] dan sistem *pappaseng*[13] (petuah

[12] Upacara pemakaman adat Rambu Solo merupakan upacara adat yang berhubungan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati roh atau jiwa seseorang yang mati dan mengirimnya ke alam roh atau bisa dikatakan sebagai pemurnian arwah manusia yang telah mati. Selain itu, upacara adat Pemakaman Rambu Solo juga dilakukan sebagai bentuk pemujaan terhadap arwah nenek leluhur dan leluhur. Upacara Adat Rambu Solo dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan didasarkan pada tingkat sosial, serta singgasana aturan yang telah bertekad (Guruh Ryan Aulia & Kristina Roseven Nababan, 2022:148).

[13] *Pappaseng* berasal dari kata *paseng* yang berarti pesan. *pappaseng* berisi petujuk-petunjuk dan nasihat dari nenek moyang agar menjalani hidup dengan baik.

leluhur). Di Aceh, kita mengenal *Peusijuek*[14] sebagai simbol harmoni dan berkah dalam setiap peristiwa penting. Sedangkan Kalimantan memiliki tradisi *Tari Hudoq*[15] suku Dayak yang sarat makna spiritual

---

Pappaseng dalam bahasa Bugis mempunyai arti yang sama dengan kata wasiat dalam bahasa Indonesia. *Pappaseng* dapat juga diartikan sebagai *pangaja* yang bermakna nasihat yang berisi ajakan moral yang sudah sepatutnya diikuti dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Hasmawati SU dkk, 2023:2).

[14] *Peusijuek* adalah tradisi adat masyarakat Aceh yang berupa prosesi memohon keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Tradisi ini juga dikenal sebagai tepung tawari. Tradisi *peusijuek* tersebut diperkirakan telah berawal dari unsur budaya Hindu, dimana pada saat itu masyarakat Aceh khususnya masih menggunakan mantra-mantraatau do'a-do'a tertentu. Namun sejak Islam masuk ke Aceh, tradisi peusijuek kemudian diubah dengan dimasukkannya unsur-s-unsur keislaman di dalamnya, diantaranya mengandung do'a-do'a keselamatan dan sholawat. Semenjak Islam masuk danberkembang di Aceh, tradisi yang terdapat pada masyarakat Aceh yang sebelumnya terdapat unsur-unsur budaya Hindu, kini telah disesuaikan dengan ajaran yang dianjurkanoleh Islam (Nanda Sekti Prayetno, 2021:175).

[15] Tari Hudoq adalah Tarian Tradisional Kalimantan Timur yang menggunakan topeng sebagai perwujudan dari binatang, leluhur dan dewa. Tarian ini biasanya di tampilkan pada saat pembukaan lahan pertanian atau setelah menanam padi di lading. Menurut kepercayaan masyrakat khususnya masyarakt suku Dayak Bahau, tarian ini merupakan ritual permohonan kepada Tuhan agar hasil pertanian mereka di berikan hasil yang melimpah ruah. Nama Tari Hudoq ambil dari kata hudoq yang berarti menjelma. Maka dalam tarian ini penari menggunakan topeng sebagai perwujudan dari hewan atau hama yang dianggap perusak tanaman seperti, tikus, gagak, monyet, babi, dan lainnya. Topeng yang melambangkan burung elang dianggap sebagai pelindung serta memelihara hasil panen masyarakat Dayak Bahau dan ada juga topeng manusia yang dilambangkan sebagai para leluhur atau nenek moyang mereka. Penari juga menggunakan baju yang terbuat dari kulit pohon yang dihiasi rumbai berwarna hiajau yang terbuat dari daun pisang atau daun kelapa. Baju ini menyibolkan dedaunan yang di harpkan terus menghijau agar tanaman yang mereka tanam tumbuh subur seperti yang di harapkan. Topeng yang digunakan adalah topeng yang terbuat dari kayu *Jelatung* dengan ukuran dan bentuk yang berbeda–beda sesuai dengan perwujudan yang ingin ditampilkan. Tidak ketinggalan, penutup kepala yang dihiasi dengan bulu burung enggang yang telah menjadi ciri khas dan memiliki arti khusus bagi masyarakat Suku Dayak Bahau. Tari Hudoq Manugal hanya hanya bisa ditampikan pada upacara Manugal (tanam padi) dan tidak boleh ditampilkan pada upacara perkawinan atau upacara naik ayun. Jika ditampilkan diluar pada waktunya akan terjadi bencana kegagalan panen dan kampung akan di serang wabah penyakit atau kesialan. Gerakan yang ditampilkan dalam tarian ini adalah perpaduan gearakan tangan dan kaki. Dengan badan tegak penari menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri di setiap langkahnya. Tangan diayunkan ke atas dan kebawah sambal menepuk paha. Geraka kaki berjalan dengan diangkat dan menghentak ke tanah sehingga menimbulkan suara hentakan. Gerakan kepala hanya mengangguk, bila mulut pada topeng dapat di gerakkan maka

dan ekologis. Di tengah era digital yang begitu cepat mengglobal, corak tradisi inilah yang menjadi penanda eksistensi suatu komunitas. Tanpa kesadaran kolektif untuk melestarikannya, masyarakat akan tercerabut dari akar budayanya dan menjadi homogen dalam kultur global yang seragam.

Karena itu, pelestarian tradisi lokal bukan sekadar romantisme masa lalu, tapi merupakan fondasi identitas dan kebanggaan kultural yang tak tergantikan. Transformasi pun diperlukan agar tradisi tidak menjadi fosil budaya, melainkan tetap hidup, bernafas, dan menginspirasi. Dalam semangat kosmopolitanisme, menjaga tradisi lokal berarti menjaga keberagaman dunia, dan transformasi adalah jembatan mempertemukan kearifan lokal dengan tantangan global. Di era kosmopolitan ditandai oleh pertukaran budaya yang intens, pelestarian tradisi lokal justru menjadi titik pijak bagi masyarakat untuk tidak larut dalam arus globalisasi seragam (Feberianus S. Tanggur dkk, 2025:3). Tradisi lokal adalah ekspresi dari sejarah panjang, nilai-nilai spiritual, dan sistem pengetahuan yang telah terbukti membentuk karakter dan etos suatu bangsa. Oleh karena itu, kesadaran kosmopolitan mendorong masyarakat untuk tidak merasa rendah diri terhadap budayanya sendiri. Sebaliknya, memfasilitasi ruang dialog antara lokal dan global, sehingga masyarakat lokal dapat tetap berdiri tegak dalam kearifan budayanya dan terbuka terhadap inovasi.

---

topeng tersebutterlihat seperti berbicara. Dalam Tari Hudoq ini, penari bergerak dalam lingkaran barisan. Penari bergerak dari satu sudut ke sudut lain sampai ke empat sudut tersentuh. Kemudian penari dudk bersila dengan berbaris memanjang sambal memanggil roh. Pada saat pemanggilan roh, roh tersebut mulai merasuki mereka seperti kesurupan, kemudian para penari kembali menari seperti semula. Setelah itu, roh yang merasuki mereka tadi akan keluar dari tubuh mereka dan meninggalkannya. Dalam pertunjukan Tari Hudoq memang terlihat bernuansa mistis. Dalam pelaksanaan ritual pawang atau pemimpin upacara memulai dengan pembacaan mantra dengan sesaji yang sudah dipersiapkan. Pada saat penari duduk berbaris pawang pun menaburkan beras kuning di kepala para penari sebagai tanda di mulainya acara. setelah itu penari kembali menari dengan iringan musik tradisional Suku Dayak Bahau. Saat penari kesurupan, pawang menyampaikan pesan kepada roh tersebut dengan mengucapkan mantra. Maksud dari mantra tersebut adalah untuk meminta agar roh tersebut menjaga tanaman mereka dan melindungi penduduk desa dari segala mara bahaya. Pertujukan ini bisa berlangsung selama satu hari dan bahkan lebih. Seiring perkembangannya Tari Hudoq ini tidak hanya di tampilkan dalam berbagai perayaan budaya masyarakat Kalimantan timur, tetapi sebagai hiburan dengan bebagai modifikasi dan keativitas dalam pertunjukan (Nuryasmi, 2021:111-112).

Transformasi tradisi tidak berarti kehilangan otentisitas. Justru proses transformasi itulah tradisi bisa menjawab tantangan zaman, tanpa meninggalkan jati dirinya. Misalnya, pelestarian nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia kini dapat diwujudkan melalui platform digital mempertemukan berbagai komunitas sosial untuk kerja kolektif. Atau, festival budaya lokal yang kini dikemas secara digital untuk menjangkau publik internasional tanpa harus kehilangan nilai-nilai sakral di dalamnya. Ini adalah cara tradisi bergerak, menyesuaikan bentuk tanpa merusak isi. Kesadaran ini sangat penting, sebab di tengah derasnya gelombang budaya populer dan produk budaya global, hanya mereka yang memiliki akar kuatlah yang tidak mudah tercerabut. Dengan demikian, pemahaman kosmopolitan bukan sekadar menyambut dunia luar, juga merawat dan menguatkan fondasi dari dalam. Dalam konteks ini, kosmopolitanisme bukan hanya gagasan keterbukaan, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga warisan leluhur sebagai kontribusi unik kepada peradaban global.

3. Tantangan

Tantangan Implementasi Pemikiran Kosmopolitanisme dalam Pendidikan Islam sebagai berikut:

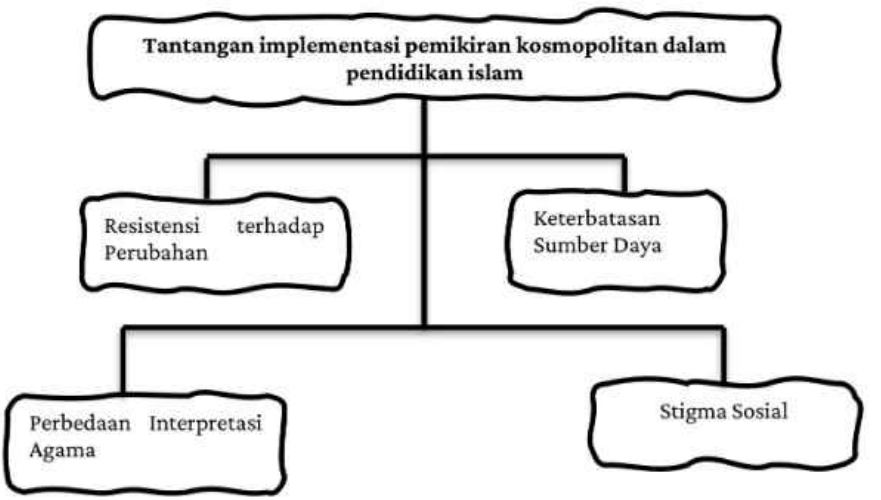

Resistensi terhadap Perubahan

Tantangan pertama dalam implementasi pemikiran kosmopolitanisme adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak lembaga pendidikan Islam mungkin merasa nyaman dengan cara tradisional dalam mengajarkan agama dan nilai-nilai. Perubahan menuju pendekatan yang lebih inklusif dan kosmopolitan bisa dianggap sebagai ancaman terhadap identitas agama mereka. Resistensi ini sering kali berasal dari kekhawatiran bahwa mengajarkan nilai-nilai kosmopolitan dapat mengikis ajaran agama yang dianggap fundamental. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa pendekatan tersebut dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa, terutama jika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi pendidik menjelaskan bahwa kosmopolitanisme tidak berarti mengabaikan nilai-nilai agama, justru memperkuat pemahaman keberagaman.

Salah satu tantangan besar dalam membangun masyarakat kosmopolitan adalah resistensi terhadap perubahan yang bersifat lintas identitas, terutama ketika menyangkut persoalan ras, etnis, dan budaya. Di Amerika Serikat, persoalan rasisme masih menjadi luka sosial yang dalam dan belum terselesaikan. Data dari FBI Hate Crime Statistics (2019) menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi lebih dari 7.000 kasus kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kebencian, dengan mayoritas kasus sekitar 57,6% berakar pada diskriminasi ras dan etnis. Sementara itu, 20,1% lainnya disebabkan oleh intoleransi terhadap agama tertentu. Fakta ini mengindikasikan nilai-nilai hak asasi manusia seperti kesetaraan dan kebebasan identitas belum sepenuhnya mengakar dalam struktur sosial Amerika. Rasisme yang terus berlangsung menjadi penghalang utama bagi pembentukan identitas kolektif dan cita-cita perdamaian dalam masyarakat multikultural tersebut. Selain itu, resistensi terhadap pengaruh budaya luar juga aspek penting dalam memahami kegagalan kosmopolitanisme di Amerika. Meski dikenal sebagai negara terbuka dan pluralistik, Amerika menunjukkan sikap ambivalen terhadap budaya Eropa. Sebagian masyarakatnya menolak dominasi nilai-nilai Eropa dalam kehidupan sehari-hari, dianggap sebagai bayang-bayang masa lalu ketika bangsa ini masih berada di bawah kolonialisme negara-negara Eropa. Akibatnya, muncul upaya membangun identitas budaya nasional eksklusif dan dianggap lebih unggul dari pengaruh luar. Alih-alih menciptakan ruang dialog antarbudaya, justru melahirkan sekat-sekat psikologis dan historis

menyulitkan terciptanya kehidupan kosmopolitan yang sehat (Naufal Fikhri Khairi, 2021:271-272).

Fenomena resistensi semacam ini juga bisa kita temukan di dalam negeri, khususnya di wilayah Papua. Ketegangan terus berlangsung di sana bukan sekadar persoalan politik dan ekonomi, menyangkut identitas kultural dan marginalisasi sosial. Sebagian masyarakat Papua merasa perubahan ditawarkan oleh negara tidak selaras dengan nilai-nilai lokal dan tidak menyentuh akar kebutuhan masyarakat setempat. Proses integrasi kurang mempertimbangkan tradisi dan aspirasi asli masyarakat Papua telah menimbulkan resistensi yang berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis, tidak cukup dengan pendekatan struktural atau kebijakan formal, harus pula dibarengi dengan pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal dan ruang dialog yang adil (Marthinus Ngabalin dkk, 2024:74). Dengan demikian, baik dalam konteks Amerika Serikat maupun Papua, resistensi terhadap perubahan tidak berarti penolakan terhadap modernitas. Sering kali, resistensi adalah bentuk ekspresi dari kebutuhan mempertahankan identitas, martabat, dan ruang hidup bermakna bagi kelompok tertentu. Dalam kerangka kosmopolitanisme sejati, tantangan ini harus dijawab bukan dengan pemaksaan asimilasi, melainkan dengan membangun jembatan dialog yang menghormati keberagaman dan mendorong keadilan kultural.

Keterbatasan Sumber Daya

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi pemikiran kosmopolitanisme. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama berada di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki anggaran atau fasilitas yang memadai untuk mengembangkan kurikulum inklusif. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya memperkenalkan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam pendidikan. Keterbatasan sumber daya juga dapat mencakup kurangnya pelatihan bagi pendidik. Guru yang tidak terlatih dalam pendekatan kosmopolitan mungkin merasa kesulitan mengajarkan materi lebih kompleks dan beragam. Tanpa dukungan memadai, implementasi pemikiran Gus Dur dalam pendidikan Islam menjadi tidak efektif. Selain itu, lembaga pendidikan juga menghadapi tantangan dalam mengakses materi ajar relevan. Buku dan sumber daya mencerminkan nilai-nilai

kosmopolitanisme mungkin sulit ditemukan, terutama di daerah kurang berkembang. Hal ini dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan menawarkan pengalaman belajar yang kaya dan beragam. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program pelatihan pendidik dan penyediaan sumber daya memadai sangat penting mendukung implementasi pemikiran kosmopolitanisme dalam pendidikan Islam (Fildzah Nur Shabrina dkk, 2024:64).

Salah satu hambatan mendasar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kosmopolitanisme di berbagai konteks kehidupan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam aspek kapasitas intelektual dan pemahaman multidisipliner. Kosmopolitanisme bukanlah sekadar gagasan normatif tentang keterbukaan terhadap keragaman, tetapi paradigma yang kompleks, mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga spiritual. Oleh karena itu, pemahaman yang dangkal terhadap konsep ini akan melahirkan praktik-praktik setengah hati dan cenderung menyimpang dari esensinya. Ketika individu atau kelompok tidak dibekali dengan pengetahuan cukup, maka upaya menerapkan nilai-nilai kosmopolitan seperti pekerjaan berat tak sebanding dengan kemampuannya ibarat mengangkat dua karung beras sekaligus seorang diri. Ini bukan hanya perkara beban kerja, menyangkut keterbatasan daya jelajah intelektual dan wawasan global. Kosmopolitanisme menuntut pelaku sosial menjelajah berbagai cabang ilmu, memahami konteks global yang terus berubah, serta memiliki kepekaan budaya yang tinggi. Tanpa bekal itu semua, pemahaman cenderung sempit dan bersifat parsial, justru menghambat semangat kosmopolit itu sendiri.

Penguatan kapasitas SDM menjadi tugas besar tidak bisa diabaikan. Pendidikan multikultural dan global, pelatihan lintas disiplin, serta pembudayaan nilai-nilai inklusif menjadi langkah strategis agar setiap individu mampu menyerap dan menerjemahkan nilai-nilai kosmopolitan dalam kehidupan nyata. Kosmopolitanisme bukan hanya milik elite intelektual, melainkan menjadi kesadaran kolektif yang ditanamkan sejak dini. Sebab hanya dengan SDM yang unggul dan terbuka, nilai-nilai seperti keadilan global, solidaritas antarbangsa, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi jargon yang berhenti di tataran teori.

Perbedaan Interpretasi Agama

Tantangan ketiga adalah perbedaan interpretasi agama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, ada berbagai pandangan tentang bagaimana nilai-nilai agama seharusnya diajarkan dan diterapkan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dan kebingungan di kalangan siswa, terutama ketika mereka dihadapkan pada nilai-nilai kosmopolitanisme yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Beberapa kelompok melihat pendekatan kosmopolitan sebagai upaya mengurangi nilai-nilai agama yang dianggap fundamental. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara mereka yang mendukung pendekatan kosmopolitan dan mereka yang lebih konservatif. Dalam situasi seperti ini, penting bagi lembaga pendidikan menjelaskan bahwa kosmopolitanisme tidak bertentangan dengan ajaran agama, justru memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai universal (Amin Maghfuri, 2015:14).

Selain itu, perbedaan interpretasi agama juga dapat mempengaruhi bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain. Siswa berasal dari latar belakang berbeda memiliki pandangan berbeda tentang keberagaman dan toleransi. Pendidikan yang mengedepankan dialog dan pemahaman sangat penting mengatasi tantangan ini. Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan inklusif dan dialogis. Lembaga pendidikan perlu menciptakan ruang bagi siswa berdiskusi dan berbagi pandangan mereka, sehingga mereka dapat belajar saling menghargai dan memahami perbedaan.

Stigma Sosial

Stigma sosial yang mungkin dihadapi oleh siswa yang terlibat dalam pendidikan kosmopolitan. Di beberapa masyarakat, ada pandangan negatif terhadap individu atau kelompok dianggap terlalu terbuka atau liberal dalam pandangan mereka. Siswa belajar tentang nilai-nilai kosmopolitanisme menghadapi kritik atau penolakan dari teman sebaya atau masyarakat. Stigma sosial ini dapat menyebabkan siswa merasa terasing atau tidak diterima. Hal ini dapat menghambat mereka dalam mengembangkan pemikiran kritis dan sikap terbuka. Jika siswa merasa bahwa mereka tidak dapat berbagi pandangan mereka tanpa takut akan penilaian negatif, mereka enggan terlibat dalam diskusi keberagaman.

Selain itu, stigma sosial juga dapat memengaruhi keputusan orang tua mengirim anak-anak mereka ke lembaga pendidikan yang menerapkan nilai-nilai kosmopolitan. Mereka khawatir anak-anaknya akan dipandang negatif oleh masyarakat jika mereka terlibat dalam pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma lokal. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi. Lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan mendukung dan menghargai perbedaan, sehingga siswa merasa aman mengekspresikan diri mereka. Implementasi pemikiran kosmopolitanisme dalam pendidikan Islam menawarkan banyak peluang menciptakan generasi yang lebih toleran, inklusif, dan peka terhadap keberagaman. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi agama, dan stigma sosial juga perlu diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, lembaga pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan menciptakan lingkungan belajar lebih baik.

GERAKAN PEMUDA ANSOR
NAHDLATUL ULAMA

BAB V

PERAN GURU DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI KOSMOPOLITAN

Guru merupakan tonggak utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Di tangan merekalah lahir para pemimpin, pemikir, dan perintis peradaban. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi penjaga nilai, penyalur ilmu, sekaligus pengarah arah moral masyarakat. Guru layaknya ruh peradaban menghidupkan sesuatu yang mati, memberi makna pada yang hampa. Jika ilmu adalah benih, maka guru adalah hujan menyuburkannya. Menumbuhkan pohon-pohon pemikiran dan semak-semak kesadaran. Baik buruknya pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dari lisan, sikap, dan pemahamannya terpancar arah pendidikan suatu generasi. Dalam penerapan nilai-nilai cosmopolitan sebuah pandangan hidup menjunjung tinggi keterbukaan, penghargaan terhadap keragaman, dan kesadaran akan kemanusiaan universal peran guru sangat substansial. Guru adalah mesin penggerak awal. Melalui pengetahuannya, nilai-nilai kosmopolitan diperkenalkan kepada peserta didik, bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai laku hidup. Dari guru, peserta didik belajar membedakan benar dan salah, memahami lokal sekaligus mengakui yang global.

Sebagaimana diungkapkan oleh Immanuel Kant, Pendidikan adalah seni untuk menjadikan manusia sebagai manusia (Muhammad Khasib Amin Murtadlo & Abdul Khobir, 2023:7). Dalam kalimat ini tersirat peran mendasar guru sebagai pembentuk nilai dan karakter cosmopolitan, membimbing manusia menjadi makhluk sadar akan keberadaan dan tanggung jawabnya di tengah sesama. Di ranah lokal, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa, "Guru itu digugu dan ditiru," sebuah pesan bahwa setiap tindakan dan ucapan

guru adalah teladan mencerminkan nilai yang mereka ajarkan, termasuk nilai-nilai keberagaman dan keterbukaan (Vena Ayunda Ramadhani Putri & Akhwani, 2023:157). Sementara itu, Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brasil, memandang bahwa Pendidikan bukanlah transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar membebaskan (Paul Suparno, 2001:26). Kosmopolitanisme menuntut kebebasan berpikir dan kesadaran kritis atas keberagaman dunia, dan guru menjadi fasilitator utama dalam proses tersebut. Dengan demikian, guru memiliki posisi yang tidak bisa digantikan dalam pembentukan watak kosmopolitan peserta didik. Mereka bukan hanya pengantar kurikulum, lebih dari itu penjaga nilai kemanusiaan inklusif. Penerapan nilai-nilai kosmopolitan di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kapasitas guru dalam memahami dan menginternalisasi nilai tersebut ke dalam praktik pengajaran sehari-hari.

Berikut tiga peran substansial guru dalam implementasi nilai-nilai kosmopolitan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat secara umum:

A. Sebagai pendidik multikultural dan inklusif

Guru menjadi ujung tombak dalam membentuk cara pandang siswa yang terbuka terhadap perbedaan. Dengan mengintegrasikan nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam proses pembelajaran, guru menanamkan sikap kosmopolitan sejak dini. Peran guru dalam pendidikan tidak berhenti pada penyampaian materi pelajaran, tetapi meluas pada pembentukan watak dan kesadaran sosial peserta didik. Dalam dunia majemuk dan terhubung secara global, guru dituntut menjadi pendidik multikultural dan inklusif. Artinya, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru harus melampaui batas-batas sektoral dan mono-perspektif. Seorang guru yang memahami nilai-nilai kosmopolitan mengajarkan kepada peserta didik cara hidup berdampingan dalam keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial, peran ini bukanlah hal sepele. Guru harus menjadikan ruang kelas sebagai cerminan dari masyarakat global, di mana setiap individu dihargai dan diakui keberadaannya. Pendidikan sebagai proses membentuk cara pandang lintas batas. Dalam konteks ini, integrasi ilmu pengetahuan dengan pemahaman multikultural dan kesadaran inklusif menjadi keniscayaan. Guru berperan menyampaikan konsep,

menanamkan nilai, dan menyadarkan (Dwi Wahyu Ningtyas, 2024:2).

Melalui pendekatan multikultural dan inklusif, guru membimbing peserta didik agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang rasis, intoleran, atau bahkan ekstrem dalam cara berpikir dan bertindak. Sebaliknya, peserta didik diarahkan menjadi generasi pembawa rahmat bagi semesta (*rahmatan lil alamin*), menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persaudaraan kemanusiaan. Fenomena kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga sikap-sikap intoleran kini kian marak, sesungguhnya mencerminkan kekosongan kesadaran multikultural dan inklusif dalam diri mereka. Jika peserta didik telah dibekali sejak dini dengan pemahaman beragam identitas dan perspektif yang semuanya layak dihormati, maka perilaku menyimpang itu tidak akan mudah terjadi. Di sinilah letak pentingnya peran guru, bukan saja sebagai pengarah dalam bentuk teks dan teori karena semua itu bisa mereka baca di buku dan internet melainkan sebagai penyadar. Artinya, guru harus hadir secara nyata dalam kehidupan peserta didik, membangun kedekatan, menjadi teladan, dan bagian dari dinamika keseharian mereka.

Tugas utama guru hari ini adalah membentuk generasi mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Ini bisa dilakukan jika guru menjiwai nilai-nilai kosmopolitan, menghidupkan semangat multikulturalisme, dan mempraktikkan inklusivitas dalam interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan. Membumikan nilai-nilai kosmopolitan dalam dunia pendidikan bukan sekadar menyampaikan teori mengenai keberagaman atau toleransi, melainkan menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata di dalam dan luar kelas. Kosmopolitanisme sejati tidak berhenti pada kesadaran intelektual, tetapi menjadi etos hidup membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Guru memegang peran sentral sebagai fasilitator, mediator, sekaligus agen perubahan. Maka, diperlukan strategi yang konkret agar nilai-nilai kosmopolitan benar-benar meresap dan hidup dalam diri peserta didik (Angga Teguh Prastyo, 2022:3):

- *Pertama*, internalisasi nilai melalui keteladanan. Strategi paling mendasar adalah guru sebagai teladan dalam bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan bersikap adil dalam memperlakukan peserta didik tanpa diskriminasi. Keteladanan adalah bahasa moral yang paling kuat. Ketika peserta didik melihat guru memperlakukan semua siswa penuh penghargaan, terlepas dari

latar belakang mereka, maka perlahan nilai-nilai kosmopolitan terinternalisasi (Indra Gunawan dkk, 2019:2).

- *Kedua*, integrasi nilai kosmopolitan dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, keadilan global, dan empati terhadap sesama bisa dimasukkan dalam mata pelajaran. Dalam pelajaran sejarah, guru bisa mengangkat kisah tokoh-tokoh perdamaian dunia. Dalam pelajaran bahasa, peserta didik bisa diperkenalkan pada budaya lain melalui teks sastra. Dalam pelajaran sains atau sosial, siswa bisa diajak berdiskusi tentang isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau migrasi. Semua ini membuka wawasan dan membentuk kesadaran lintas batas (Endang Yulianti, 2015:12).

Melalui strategi tersebut, membentuk karakter global yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun peran guru sangat strategis dalam membumikan nilai-nilai kosmopolitan, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan kompleks. Guru bekerja dalam sistem sosial, budaya, dan institusi pendidikan yang terkadang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai keterbukaan, keberagaman, dan inklusivitas:

- *Pertama*, kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kosmopolitan. Tidak semua guru memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam isu-isu multikultural, inklusif, dan global. Akibatnya, pemahaman mereka sering kali terbatas pada wacana formal tanpa mentransformasikannya dalam strategi pembelajaran aplikatif. Ketika guru belum memiliki pemahaman utuh tentang makna kosmopolitanisme, maka sulit menjadikannya sebagai proses yang hidup dan menyentuh (Kevin Aldoni Hartono dkk, 2024:1).
- *Kedua*, kentalnya budaya homogenitas dan resistensi terhadap keberagaman. Beberapa lingkungan, terutama yang sangat religius atau etnis tertentu, keberagaman sering kali dianggap sebagai ancaman, bukan potensi. Guru bisa saja menghadapi tekanan dari masyarakat, bahkan dari institusi pendidikan itu sendiri, ketika memperkenalkan nilai-nilai kosmopolitan yang dianggap "asing" atau bertentangan dengan nilai local (Indah Kusuma Wardani dkk, 2024:3).
- *Ketiga*, tantangan teknologi dan arus informasi global. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan media sosial membuka peluang besar mengenalkan dunia global kepada peserta didik. Namun di sisi

lain, arus informasi yang tak tersaring juga menyebarkan paham-paham sempit, radikal, dan intoleran. Dalam situasi ini, guru menghadapi tantangan menyaring informasi dan membimbing siswa agar bersikap kritis terhadap konten digital yang mereka terima (Agus Samsul Bassard kk, 2021:63).

- *Keempat*, beban administratif dan keterbatasan waktu. Dalam praktik sehari-hari, guru sering kali dibebani dengan berbagai urusan administratif, penilaian, serta target capaian akademik. Akibatnya, waktu dan energi membina nilai-nilai kosmopolitan, yang membutuhkan dialog, refleksi, dan pendekatan emosional, sangat terbatas.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, guru harus cerdas, juga tangguh secara moral dan sosial. Mereka harus terus belajar, beradaptasi, dan membangun jejaring sesama pendidik untuk menguatkan. Sebab, perjuangan menerapkan nilai-nilai kosmopolitan dalam pendidikan bukan tugas instan, membutuhkan proses jangka panjang yang menuntut komitmen dan konsistensi. Penerapan nilai-nilai kosmopolitan dalam lingkungan diperlukan dukungan struktural dan kebijakan berpihak pada penguatan nilai keberagaman, keterbukaan, dan inklusivitas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peran penting dalam menciptakan iklim pendukung pembentukan karakter kosmopolitan. Tanpa kebijakan yang jelas dan komprehensif, guru kesulitan menjalankan peran transformasi maksimal. Dukungan kebijakan dan lembaga adalah fondasi memperkuat peran guru dan memberi arah jelas bagi pendidikan kosmopolitan. Tanpa itu, usaha guru berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, dengan kebijakan inklusif dan dukungan kelembagaan yang kuat, sekolah menjadi ladang tumbuhnya generasi berpikiran terbuka dan hidup berdampingan dalam masyarakat global.

B. Penjembatan Pengetahuan Global dan Lokal

Guru sebagai jembatan penghubung dua kutub penting, pengetahuan global dan kearifan lokal. Keduanya harus disinergikan agar peserta didik memiliki pandangan luas, dan berpijak pada akar budayanya sendiri. Di sinilah letak pentingnya peran guru dalam menyelaraskan nilai-nilai universal dengan konteks komunitas dan budaya lokal. Istilah "hidup di lingkungan kecil tetapi berpikir global"

slogan, sebagai tuntutan nyata di era keterhubungan global. Peserta didik harus dibekali pemahaman terhadap realitas global seperti isu perubahan iklim, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan teknologi namun pada saat yang sama, mereka tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi antarkomunitas, dan etika tradisional yang membentuk identitas mereka. Dengan demikian, mereka tumbuh menjadi pribadi utuh, modern dalam pemikiran, bijak dalam akar budaya. Guru memainkan peran sentral dalam menjembatani dua dunia ini. Melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, guru mengaitkan isu-isu global dengan kehidupan sehari-hari siswa (Salehuddin dkk, 2023:2).

Mengapa ini penting? Karena peserta didik hari ini adalah para pemimpin, penggerak, dan pembentuk masa depan. Jika mereka dibekali wawasan lokal, maka langkah mereka akan terbatas, tertinggal dari dinamika global. Sebaliknya, jika mereka hanya dijejali gagasan global tanpa fondasi lokal, maka mereka akan kehilangan jati diri, menjadi generasi terombang-ambing tanpa arah (Sabrina Anggun Kusuma & Taqiyyah Karimah, 2025:215). Maka, strategi pendidikan membangun keseimbangan ini merupakan keharusan. Guru hadir sebagai penyambung antara dunia-dunia ini menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang arif, memperkenalkan horizon berpikir global progresif. Peserta didik akan tumbuh sebagai manusia kosmopolitan beradaptasi dengan perubahan global, juga memberikan kontribusi unik dari kearifan lokal mereka kepada dunia.

C. Teladan dalam Sikap

Salah satu bentuk kuat dalam penerapan nilai-nilai kosmopolitan di lingkungan pendidikan adalah keteladanan. Guru sebagai figur konkret mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Guru harus menjadi cermin hidup dari nilai-nilai cosmopolitan, keterbukaan, keadilan, anti-diskriminasi, serta kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan global. Keteladanan guru bukanlah sekadar simbol atau slogan, merupakan pendidikan hidup paling cepat diserap peserta didik. Anak didik belajar bukan apa yang mereka dengar, tetapi apa yang mereka lihat dan alami secara langsung. Mereka menjadikan guru sebagai panutan, sebagai model perilaku yang layak diikuti. Jika guru menampilkan sikap terbuka terhadap perbedaan, adil dalam memperlakukan peserta didik dari berbagai latar belakang, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-

isu global seperti krisis kemanusiaan, lingkungan, atau ketimpangan sosial, maka peserta didik meniru dan menginternalisasi nilai-nilai itu secara alamiah (Rizky Aviatin dkk, 2023:262).

Peran keteladanan ini bukan pada maknanya, melainkan pada realisasinya. Sebab, nilai-nilai kosmopolitan akan menjadi abstrak dan hampa jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru berbicara toleransi, namun bersikap diskriminatif, justru akan merusak nilai itu sendiri di mata peserta didik. Sebaliknya, guru yang bersikap adil di kelas, memberi ruang bicara pada siswa yang berbeda pendapat, dan menghargai latar belakang setiap murid, akan meninggalkan jejak mendalam dalam kesadaran anak-anak. Tentunya, menjalankan peran ini, guru harus terlebih dahulu memahami dan menyadari realitas sosial majemuk. Tanpa pemahaman atas keragaman budaya, agama, suku, dan latar sosial hidup di tengah masyarakat, guru kesulitan menjadi teladan efektif. Sebab sikap kosmopolitan bukan tentang "menerima perbedaan", tetapi menghargai perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan Bersama (Reski Puspita dkk, 2023:369).

Lebih dari itu, guru harus peka terhadap dinamika global. Ketika dunia dihadapkan pada konflik kemanusiaan, bencana, atau ketidakadilan, guru dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai bahan diskusi dan refleksi moral di kelas. Melalui cara ini, siswa dibentuk menjadi manusia cerdas, juga manusia peka sosial dan etis. Guru menjadi teladan dalam sikap melahirkan generasi berpikir lokal atau nasional, juga memiliki empati dan tanggung jawab sebagai warga dunia. Ini adalah esensi dari pendidikan cosmopolitan, membentuk manusia peduli, adil, dan siap hidup berdampingan dalam masyarakat global.

Sebagai konsekuensi moral, guru harus menjadi teladan utuh dan konsisten. Ketika seorang guru gagal merepresentasikan nilai-nilai kosmopolitan dalam kehidupan sehari-harinya, maka tanggung jawab moralnya rusak. Ini bukan hanya soal integritas pribadi, menyangkut kepercayaan dan wibawa profesi pendidik itu sendiri. Guru adalah figur sentral dalam pembentukan karakter peserta didik, mereka bukan sekadar pengajar, tetapi pendidik tugasnya menanam, menumbuhkan, dan merawat nilai-nilai kehidupan. Keteladanan dalam pendidikan bukanlah pilihan tambahan, melainkan pondasi utama. Moralitas guru adalah akar dari semua keberhasilan pendidikan. Jika moralitas ini rapuh atau tercemar oleh perilaku tidak adil, diskriminatif, atau intoleran, maka apa pun yang diajarkan akan

kehilangan maknanya. Sebaliknya, jika moralitas guru terjaga ditunjukkan melalui sikap terbuka, adil, penuh kasih, dan bijaksana maka peserta didik secara alami meneladaninya (Asri Ashari Syam & Rustan Santaria, 2020:297).

Keteladanan guru merupakan jantung dari pendidikan kosmopolitan. Guru yang baik akan membentuk peserta didik yang baik, guru yang memiliki kesadaran multikultural dan inklusif akan mencetak generasi berjiwa besar, toleran, dan hidup berdampingan dengan damai di tengah masyarakat global. Begitu pula sebaliknya, jika guru abai terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan, maka peserta didik pun berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang sempit, eksklusif, bahkan ekstrem. Oleh karena itu, menjaga moralitas guru bukan sekadar menjaga nama baik profesi, melainkan menjaga masa depan bangsa. Sebab dari tangan dan teladan para guru, akan lahir generasi yang cerdas, arif dalam bersikap, adil dalam bertindak, dan luhur dalam memandang sesama manusia.

BAB VI

RELEVANSI PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Pemikiran kosmopolitan Gus Dur, merupakan salah satu warisan intelektual penting di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin visioner, Gus Dur selalu menekankan toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, pemikiran ini semakin relevan, terutama di era digital interaksi antarbudaya terjadi sangat cepat, di era digital, informasi mudah diakses dan disebarluaskan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam memahami dan menghargai perbedaan. Gus Dur mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak dihargai dan dipahami, terlepas dari latar belakang budaya atau agama. Pemikiran kosmopolitan Gus Dur menjadi pedoman bagi masyarakat membangun hubungan harmonis. Relevansi pemikiran Gus Dur menjangkau ruang lokal, dan ruang global. Dalam dunia yang terhubung, nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur membantu menciptakan dialog antarbudaya yang lebih baik.

Kosmopolitanisme adalah pandangan mengenai keterhubungan antarindividu di seluruh dunia. Kosmopolitanisme bukan soal teori, tapi cara hidup mencerminkan sikap saling menghargai. Manusia harus dilandasi sikap saling menghargai dan memahami perbedaan dalam lintasan majemuk. Dengan adanya internet dan media sosial, konsep kosmopolitanisme semakin mudah diterapkan. Individu dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain dengan cara yang

belum pernah terjadi sebelumnya (Vera Dwi Apriliani dkk, 2023:1). Namun, tantangan muncul ketika perbedaan tersebut justru menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur tentang toleransi dan saling menghargai sangat relevan dalam konteks ini. Kosmopolitanisme juga mengajak kita melihat diri sebagai bagian komunitas global. Dalam era digital, kita terhubung dengan individu dari belahan dunia lain. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kosmopolitan, kita dapat berkontribusi terciptanya dunia lebih damai dan harmonis.

Adapun relevansi pemikiran cosmopolitan Gus Dur di era kontemporer dalam Pendidikan Islam dapat ditampilkan dalam bentuk kerangka berikut:

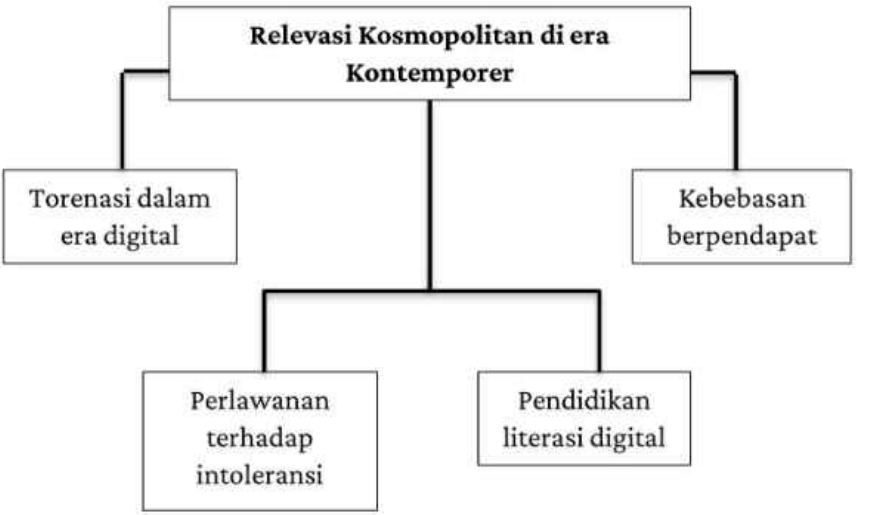

Gambar. 6.1 Relevansi pemikiran kosmopolitan gus dur di era kontemporer

A. Toleransi dalam Era Digital

Di tengah arus deras perkembangan teknologi informasi, interaksi manusia telah mengalami pergeseran besar. Dunia maya, khususnya media sosial, menjadi ruang baru di mana individu dari berbagai latar belakang saling berinteraksi tanpa batas geografis. Namun, kemudahan komunikasi membawa tantangan baru, meningkatnya sikap intoleransi justru lahir dari ruang-ruang digital. Dalam konteks ini, pemikiran kosmopolitan sangat relevan sebagai dasar membangun sikap toleransi di era digital. Nilai-nilai

keterbukaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas global sangat urgen. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan membentuk perilaku bermedia sosial yang sehat dan beretika. Di era ini, seseorang tak perlu berhadapan langsung menjatuhkan atau merendahkan orang lain cukup melalui satu unggahan, komentar, atau video, informasi bisa tersebar luas dan menimbulkan dampak besar, bahkan dalam hitungan detik.

Platform digital seringkali menjadi arena terbuka bagi sikap rasis, ujaran kebencian, stereotip negatif, hingga hoaks yang memicu polarisasi dan konflik. Banyak dari reaksi ekstrem muncul di media sosial sesungguhnya bukan semata karena kebencian yang dalam, tetapi minimnya kesadaran hidup dalam perbedaan. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan sempitnya pemahaman atas keberagaman. Pemikiran kosmopolitan menjadi kerangka moral, juga menjadi kompas etik bagi warga digital. Kosmopolitan mendorong setiap individu berpikir melampaui batas-batas kelompoknya sendiri, menyadari bahwa apa yang kita bagikan di ruang publik digital berdampak pada orang lain yang berbeda latar belakangnya. Oleh karena itu, setiap aktivitas digital, seperti mengunggah konten edukatif, religius, atau humoris, harus mempertimbangkan sensitivitas publik. Konten-konten yang tidak layak atau bersifat provokatif perlu dihindari karena dapat memicu reaksi keras dan memperuncing perpecahan (Muhammad Ma'shum dkk, 2023:9-10).

Nilai-nilai kosmopolitan menjadi landasan penting menanamkan kesadaran digital yang toleran. Sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan memiliki peran vital sebagai agen perubahan. Melalui kurikulum, pelatihan literasi digital, dan pembiasaan sikap multikultural, dapat membentuk generasi cakap teknologi, juga bijak dalam menggunakannya. Generasi inilah nantinya menjadi warga digital beretika, menghargai perbedaan, dan membangun ruang interaksi damai. Dengan begitu, pendidikan kontemporer membentuk karakter kosmopolitan yang memahami toleransi di ruang digital. Inilah tugas kita Bersama membentuk generasi pintar berpikir, juga luhur dalam bersikap di dunia digital yang kompleks dan terus berkembang. Manuel Castells dalam bukunya *The Rise of the Network Society* (1996), masyarakat saat ini hidup dalam "*network society*" sebuah masyarakat yang jaringannya dibentuk oleh arus informasi global melalui teknologi digital. Identitas budaya dan sosial

saling bertemu dan sering kali bertabrakan (Deyisnil Fariadi, 2023:189). Di sinilah letak urgensi toleransi digital, individu harus belajar hidup berdampingan dalam ruang yang tidak lagi homogen. Tanpa kesadaran kosmopolitan, ruang ini mudah diwarnai oleh konflik identitas, polarisasi, dan intoleransi.

Zygmunt Bauman dalam konsep *liquid modernity*, di mana kehidupan manusia menjadi cair dan tidak menentu akibat modernitas yang terus bergerak. Nilai-nilai bisa dengan mudah dilonggarkan, norma dapat dikaburkan, dan batas-batas moral bisa lenyap jika tidak dibarengi dengan fondasi etika (Ryan Kurniawan, 2024:193). Maka, toleransi di era ini harus berbasis kesadaran etis yang kuat, bukan hanya formalitas digital. Pendidikan kontemporer harus memainkan peran sebagai penuntun moral di tengah arus teknologi yang serba cepat. Clay Shirky, menjelaskan media sosial mengubah cara orang berpartisipasi dan mengekspresikan diri dalam komunitas global (Khoirul Huda dkk, 2024:15).

Pendidikan kontemporer, sebagai wadah pembentukan karakter, perlu memanfaatkan pemikiran kosmopolitan untuk membangun kesadaran digital yang toleran. Kurikulum harus memasukkan pendidikan multikultural, literasi media, serta etika digital. Guna menciptakan generasi cakap teknologi, juga kepekaan sosial dan empati terhadap keberagaman global. Lebih jauh lagi, para pendidik perlu menyadari bahwa peserta didik hari ini adalah warga digital global. Mereka terhubung dengan dunia secara *real-time*. Maka, tugas guru membimbing mereka menjadi manusia cosmopolitan yang tidak terjebak pada fanatisme identitas, tapi mampu berdialog dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Salah satu ironi besar era digital adalah meningkatnya kesadaran akan kebebasan berekspresi yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab sosial. Masyarakat digital hari ini sangat aktif menulis, mengunggah, berkomentar, dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Namun seringkali, terlupakan adalah pertimbangan etis dan kesadaran sosial dari apa yang mereka lakukan. Unggahan-unggahan yang bersifat vulgar, tidak edukatif, bahkan menjurus pada pelecehan nilai agama dan norma sosial, semakin hari semakin marak.

Salah satu krisis utama juga mesti disoroti di era digital saat ini adalah menguatnya ekspresi tanpa etika. Masyarakat digital semakin aktif bersuara, namun minim kesadaran konsekuensi etis dari setiap perkataan, unggahan, dan interaksi daring. Inilah titik kritis yang harus dibaca melalui lensa kesadaran etis. Emmanuel

Levinas, seorang filsuf etika asal Prancis, bahwa kesadaran etis lahir dari perjumpaan dengan "yang Lain" (*the Other*). Siapa pun yang berinteraksi dengan kita, netizen lain, pengikut, bahkan mereka yang tidak kita kenal namun menerima dampak dari unggahan kita. Tanggung jawab etis tidak datang dari hukum atau aturan, tapi dari kesadaran akan keberadaan orang lain (John C. Simon, 2018:149). Maka, ketika seseorang mengunggah konten yang menjatuhkan, membuli, atau merendahkan, ia sebenarnya telah mengabaikan keberadaan "yang Lain" sebagai subjek yang memiliki martabat.

Jürgen Habermas menjelaskan diskursus etis dalam masyarakat modern. Dalam *Theory of Communicative Action*, menyebut bahwa komunikasi yang sehat harus didasari oleh kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dalam ruang digital, komunikasi semestinya menjadi alat membangun pengertian bersama (*mutual understanding*), bukan ajang saling menjatuhkan. Namun, ketika media sosial hanya dijadikan alat ekspresi diri yang egoistik, nilai-nilai diskursus ini hilang (Muhammad Ersyad Muttaqien & Deden Ramdan, 2023:58). Maka, pendidikan kontemporer harus mengajarkan etika komunikasi digital, bukan monolog yang penuh emosi. Dari perspektif psikologi moral, Lawrence Kohlberg bahwa kesadaran etis merupakan bagian dari perkembangan moral seseorang. Dalam tahap tertinggi perkembangan moral (tahap post-konvensional), seseorang mampu berpikir universal, menghargai nilai-nilai keadilan dan hak asasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari tindakannya (Fatimah Ibda, 2023:63). Sayangnya, sebagian besar netizen berhenti pada tahap konvensional atau bahkan pra-konvensional bertindak hanya untuk kepentingan pribadi atau karena mengikuti arus massa. Maka dari itu, pendidikan perlu mendorong peserta didik untuk melampaui kepatuhan formal, menuju kesadaran moral yang reflektif dan transformatif.

Kosmopolitanisme sendiri secara moral sejalan dengan pemikiran para filsuf di atas. Menjadi warga dunia bukan sekadar mengenal banyak budaya atau berbicara banyak bahasa, tetapi memiliki tanggung jawab moral terhadap seluruh umat manusia, termasuk dalam tindakan sekecil apa pun di ruang digital. Pemikiran Kwame Anthony Appiah, seorang pemikir kontemporer kosmopolitan, menyebutkan bahwa *"cosmopolitanism is about universality plus difference"*. Artinya, kita menjunjung nilai-nilai universal (seperti etika dan tanggung jawab), sembari menghargai

keberagaman. Ketika kesadaran etis melekat dalam jiwa digital seorang individu, ia tidak akan sembarangan menyebarkan kebencian, mencaci, atau mempermalukan orang lain. Ia akan menimbang efek sosial dan moral dari setiap konten atau komentar yang dibuat. Inilah bentuk nyata dari etika kosmopolitan dalam praktik digital.

B. Kebebasan Berpendapat

Gus Dur adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan kebebasan berpendapat. Bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan reperkusi. Di era digital, kebebasan ini sering kali disalahgunakan, dengan banyaknya konten yang bersifat provokatif atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga etika berkomunikasi. Kebebasan berpendapat di dunia digital memberikan ruang bagi individu berbagi pandangan mereka. Namun, tantangan muncul adalah cara menyampaikan pendapat dengan konstruktif. Gus Dur selalu menekankan pentingnya dialog yang sehat, di mana pendapat yang berbeda dapat dibahas tanpa mengarah pada konflik. Dalam konteks ini, etika berkomunikasi menjadi sangat penting. Sebagai masyarakat digital, kita harus memahami bahwa kebebasan berpendapat datang dengan tanggung jawab. Gus Dur mengajarkan bahwa kita harus menghormati hak orang lain untuk berpendapat, bahkan jika kita tidak setuju. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan setiap individu merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya dan berkontribusi pada diskusi yang lebih luas.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari fitrah manusia. Bagian dari hakikat eksistensi manusia sebagai makhluk berpikir dan bernalar. Sejak lahir, manusia diberi potensi akal dan rasa menjadikannya mampu menyuarakan pendapat, mengutarakan isi hati, dan menyampaikan gagasan. Karena itu, kebebasan berpendapat adalah fitrah, sebagaimana halnya kemurnian, kesucian, dan kejujuran. Negara kita pun menjamin kebebasan ini secara hukum. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pemerintah secara konstitusional mengakui dan melindungi hak warga negara untuk berpendapat, termasuk melalui media sosial yang hari ini menjadi panggung

terbuka dalam menyampaikan pikiran. Namun kebebasan ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 juga diatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, nilai-nilai moral, dan ketertiban umum. Ini menunjukkan kebebasan berpendapat memiliki rambu dan batas jelas, yaitu tidak merusak atau menyinggung kemanusiaan dan kedamaian sosial.

Filsuf Jerman Immanuel Kant pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional, dan kebebasannya harus digunakan secara bertanggung jawab. Maka, kebebasan berpendapat harus dibingkai dalam sistem berpikir yang logis, sistematis, dan etis. Pendapat yang baik adalah membangun, bukan menjatuhkan. Membawa ide, bukan hanya celaan. Di era digital, kebebasan berpendapat bukan lagi konsep, tetapi telah berubah menjadi produk sosial, berupa konten, narasi, atau opini yang bisa disebar ke mana-mana dalam waktu singkat. Tokoh postmodern seperti Jürgen Habermas menyoroti pentingnya *ruang publik* (*public sphere*) yang sehat dalam demokrasi, yaitu ruang orang bisa menyampaikan pendapat kritis juga etis. Ini selaras dengan prinsip kosmopolitan, yang mengajarkan bahwa setiap orang adalah warga dunia yang memiliki hak untuk bersuara, selama suara itu tidak mencederai hak orang lain. Dalam Islam sendiri, prinsip kebebasan berpendapat diakui. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 125: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini mengajarkan bagaimana menyampaikan gagasan dan pendapat dengan cara yang beradab, bukan kasar dan merusak.

Konsekuensi logis dari kebebasan berpendapat adanya dua reaksi: dukungan dan penolakan. Di sinilah pentingnya kesadaran etis dan moral, agar setiap pendapat yang kita lontarkan tidak berhenti di ruang ego pribadi, tetapi dipikirkan pula dampaknya secara sosial. Pendapat yang baik bisa membangun bangsa, sedangkan pendapat yang tanpa tanggung jawab bisa merusak tatanan sosial bahkan menyulut konflik. Karena itu, dalam konteks kosmopolitanisme, kebebasan berpendapat adalah bagian dari upaya membentuk warga dunia berpikir kritis, adil, dan bertanggung jawab. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat sejatinya telah ikut serta memperkuat nilai-nilai cosmopolitan, bahwa setiap manusia berhak bersuara, namun suaranya harus diarahkan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Sebaliknya, ketika kebebasan disalahgunakan

untuk menebar kebencian, hoaks, atau bahkan penghinaan, maka itu bukan lagi kebebasan berpendapat. Itu adalah kedustaan dalam berpikir, mengabaikan akal sehat dan nurani sosial.

C. Pendidikan Literasi Digital

Pendidikan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan beradab. Literasi digital menjadi kunci untuk memahami informasi yang beredar. Dalam konteks ini, pendidikan menyoroti kemampuan menilai dan memfilter informasi yang di terima. Literasi digital mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang cara menggunakan teknologi hingga kemampuan mengenali berita palsu. Dalam arus zaman yang terus bergerak cepat, pendidikan literasi digital sebuah keharusan yang tak bisa ditunda. Dunia hari ini telah masuk dalam babak baru, hampir semua aspek kehidupan manusia komunikasi, transaksi ekonomi, pendidikan, hingga birokrasi berbasis pada sistem digital. Dalam konteks ini, literasi digital sebagai kemampuan teknis untuk menggunakan gawai atau aplikasi, kecakapan berpikir kritis, bersikap etis, dan mampu menciptakan serta memfilter informasi di tengah lautan data berseliweran. Doug Belshaw, seorang pemikir pendidikan digital abad ke-21, menyebut literasi digital sebagai kemampuan multi-dimensional mencakup aspek kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, konfidensial, kreatif, dan kritis (Haickal Attallah Naufal, 2021:1).

Generasi yang lahir di tahun 2025 adalah generasi digital *native* tumbuh bersama dengan algoritma, kecerdasan buatan, dan *cloud system*. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi secara tidak langsung dibentuk oleh teknologi itu sendiri. Dalam pidato wisuda tahun 2024, Prof. Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa generasi hari ini perlu mengembangkan tiga bentuk literasi utama: literasi manusia, literasi digital, dan literasi wirausaha. Hal ini menguatkan gagasan bahwa literasi digital bagian inti dari pembangunan kapasitas manusia modern. Tanpa penguasaan terhadap literasi digital, seseorang bisa tertinggal atau bahkan terjajah dalam sistem peradaban digital yang terus berkembang ini. Dalam perspektif kosmopolitanisme, pendidikan literasi digital menjadi instrumen penting membentuk pribadi yang sadar global, inklusif, dan berpikir terbuka. Literasi digital dalam kerangka kosmopolitan sebagai kecakapan mengakses teknologi, dan menjadi warga dunia yang memelihara nilai-nilai kemanusiaan di tengah

hiruk-pikuk digitalisasi. Seorang warga kosmopolitan digital harus bisa bersikap kritis terhadap konten, menghargai keberagaman budaya dalam komunikasi daring, serta membangun kesadaran etis dalam menyikapi informasi yang tersebar luas (Az Zahrawaani Purba & Siti Quratul Ain, 2024:1-2).

Maka dari itu, pendidikan kontemporer harus meletakkan literasi digital sebagai kurikulum inti, bahkan menjadi pijakan dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam dunia yang digerakkan oleh data dan kecerdasan buatan, pertarungan ke depan bukan lagi soal kekuatan otot atau senjata, tetapi kekuatan algoritma dan penguasaan atas informasi. Literasi digital menjadi bekal utama untuk menghadapi tantangan itu. Pendidikan literasi digital berjiwa kosmopolitan adalah jembatan menuju masa depan, tempat lahirnya manusia-manusia berdaya, beradab, dan mampu menjadikan digitalisasi sebagai alat kebaikan bersama, bukan alat kehancuran moral dan sosial.

D. Perlawanan terhadap Intoleransi

Di era digital, intoleransi sering kali muncul dalam bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi. Pemikiran Gus Dur tentang toleransi dapat menjadi panduan dalam melawan sikap tersebut. Ia selalu menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlawanan terhadap intoleransi di dunia maya memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Setiap individu, komunitas, dan organisasi bersatu dalam mengatasi isu ini. Melalui kampanye kesadaran dan pendidikan, kita dapat mengurangi penyebaran ujaran kebencian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman (Sandriansyah, 2020:261). Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi untuk melawan intoleransi. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mendidik masyarakat pentingnya toleransi.

Gagasan kosmopolitanisme sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif, terbuka, dan berkeadaban sangat strategis dijadikan kerangka pendidikan, terutama menghadapi tantangan intoleransi dan ideologi-ideologi destruktif. Dalam lanskap sosial-politik yang semakin terfragmentasi, pemikiran kosmopolitan menawarkan kerangka berpikir logis dan mendalam melawan paham-paham eksklusif dan destruktif seperti intoleransi, radikalisme, rasisme, komunisme otoriter, hingga bias orientalis yang

merendahkan nilai-nilai lokal. Kosmopolitanisme, dalam esensinya, mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari komunitas global yang saling terhubung oleh kemanusiaan universal, bukan dibatasi oleh sekat-sekat primordial (Firmansyah dkk, 2022:97). Dalam konteks pendidikan kontemporer, penguatan pemahaman kosmopolitan menjadi semakin mendesak. Pendidikan menjadi medan pertempuran ideologis menentukan arah peradaban suatu bangsa. Tanpa fondasi kosmopolitan yang kuat, peserta didik rentan terseret dalam arus propaganda sektarian dan eksklusivisme identitas yang mengoyak kohesi sosial.

Pemikiran kosmopolitan membentuk daya kritis dan empati lintas batas. Mendorong individu berpikir global namun bertindak local menghargai keberagaman. Inilah tameng intelektual dan moral melawan ideologi yang merusak keberagaman, seperti radikalisme yang menjanjikan surga dengan kekerasan, atau intoleransi yang menafikan eksistensi "yang lain". Lebih dari itu, pemikiran kosmopolitan menjadi pilar dalam menjaga integrasi nasional. Di tengah banyaknya kelompok yang mencoba memecah belah bangsa melalui wacana polarisasi agama, politik, dan budaya, kosmopolitanisme justru meneguhkan semangat persatuan dalam keberagaman. Bagaimana mungkin kita mampu menangkal paham-paham destruktif jika tidak memiliki basis epistemik yang kuat untuk memahami dunia secara lebih terbuka, humanis, dan reflektif? Karena itu, pendidikan harus menjadi arena pembudayaan nilai-nilai kosmopolitan. Membentuk kesadaran akan keterhubungan manusia dalam satu tatanan dunia yang saling membutuhkan.

BAB VII

PENUTUP

Kosmopolitanisme merupakan fondasi etis sangat diperlukan dalam merancang sistem pendidikan berorientasi pada kemanusiaan universal. Dalam dunia yang sarat konflik identitas, pendidikan menjadi instrumen penguasaan pengetahuan, dan transformasi dalam arena pembentukan kesadaran moral baik lokal maupun global. Di titik inilah, pendidikan Islam memiliki potensi besar memperkuat nilai-nilai kosmopolitan seperti dignity (martabat manusia), reciprocity (saling menghormati), dan universality (kesamaan hak asasi). Ketika nilai-nilai ini tertanam kuat dalam sistem pendidikan, akan terbentuk individu yang intelektual, dan bijak secara moral dalam menavigasi dunia yang kompleks.

Namun, nilai-nilai tersebut tak bermakna tanpa pengakuan keberagaman sebagai realitas dasar manusia. Keberagaman adalah fakta antropologis tak terbantahkan, tetapi sering menjadi sumber konflik akibat kurangnya pemahaman lintas budaya. Di sinilah pentingnya pendidikan kosmopolitan dirancang untuk membongkar stereotip, mendorong dialog antar identitas, dan menciptakan ruang perjumpaan otentik antar perbedaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pertukaran budaya, kurikulum multikultural, serta pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman sosial yang kontekstual dan reflektif.

Lebih jauh lagi, pendekatan kosmopolitan juga menjawab kegagalan kohesi sosial yang menjadi tantangan nyata di era kontemporer. Polarisasi politik, konflik antaragama, serta maraknya ujaran kebencian telah membelah ruang publik . Dalam konteks inilah, pendidikan kosmopolitan bergerak dalam landasan etis, antropologis dan sosiologis sebagai strategi menumbuhkan solidaritas lintas komunitas dan identitas. Pendidikan harus melatih

peserta didik melihat masyarakat sebagai jaringan sosial kompleks dan terhubung, bukan sebagai entitas homogen. Kesadaran ini menjadikan mereka aktor-aktor perdamaian yang menjembatani konflik dan merajut keutuhan sosial.

Kekuatan pendidikan kosmopolitan juga terletak pada kemampuannya dalam mengelola dan memaknai transformasi budaya di tengah arus globalisasi. Budaya hari ini tidak lagi bersifat statis, melainkan terus berinteraksi, bertransformasi, dan bernegosiasi di berbagai ruang sosial. Kosmopolitanisme budaya mengajarkan untuk menjadi warga dunia tak berarti meninggalkan akar lokal. Sebaliknya, pendidikan justru memiliki peran strategis dalam mentransformasikan identitas budaya lokal menjadi narasi global yang bermakna bukan sekadar tontonan eksotis, tetapi sebagai nilai hidup yang ditawarkan pada dunia. Inilah esensi dari cultural literacy, yakni kemampuan melestarikan warisan budaya, dan menghidupkannya kembali melalui inovasi kearifan lokal.

Semua aspek kajian nilai kosmopolitan harus diintegrasikan dalam ekosistem pendidikan digital yang kini menjadi lanskap utama pembelajaran. Era digital membawa disrupsi besar dalam cara belajar, membangun nilai sosial, dan bahkan membentuk identitas. Dalam ruang ini, kosmopolitanisme digital menuntut kecakapan berpikir kritis terhadap informasi, empati terhadap perbedaan, serta tanggung jawab atas dampak sosial dari aktivitas daring. Prinsip freedom of responsibility sangat penting, kebebasan berekspresi harus selalu disertai dengan kesadaran sosial dan etika digital. Oleh karena itu, pendidikan harus melahirkan warga digital yang mahir teknologi, beretika dan inklusif secara nilai. Di sinilah kosmopolitanisme menemukan relevansi mutakhirnya sebagai panduan moral, sosial, dan budaya untuk membentuk manusia pembelajar yang mampu hidup bersama dalam keberagaman dunia yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Said Al-Qadri, *"Implementasi Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan Islam Kosmopolitan di Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur'an Immim Tamalanrea Makassar,"* Skripsi, Pallangga Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2020.

Abdullah Sajad, *"Pendidikan Pesantren Dan Islam Kosmopolotan,"* LPM Institut, 30 April 2016.

Arthur Aritonang, *"Bangkitnya Islam Radikal Dan nasionalisme: Studi Tentang Gerakan Islam Wahabi"*, Jurnal Efata No. 2, Vol. 6 September 2020.

Ajahari, *"Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun,"* Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, No. 2, Volume 12, Desember, 2016.

Abdul Mujib, *"Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam"*, SKRIPSI, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Abdul Zubaidi, *"Sejarah Pendidikan Agama Islam Di Pulau Jawa Pada Abad XIII-XVI Masehi: Kajian Historis Tentang Proses Dan Perkembangan Pendidikan Islam,"* SKRIPSI, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Abdul Mujib, *"Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam,"* SKRIPSI, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Ahmad Rifki Fuada, *"Konsep Pendidikan Perdamaian Kh. Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam,"* SKRIPSI, Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2022.

Amin Maghfuri, *"Islam Cosmopolitan Dalam Padangan Kh. Abdurrahman Wahid Dan Implikasinya Terhadap Konsep Pendidikan Islam Indonesia,"* SKRIPSI, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Alfiyyah Nur Lailiyya, *"Konsep Toleransi Dalam Pendidikan Islam Presp ektif Kh.Abdurrahman Wahid,"* SKRIPSI, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan,* Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural And Peaceful Islam, 2007.

Arif Rahman, Diyah Mintasih, Dkk, *Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0,* Depok: Komojoyo Press, 2019.

Aryanti Dwiyani, Eva Sofia Sari, *"Pembentukan Sikap Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural di SMAN 2 Mataram"* Darajat, Jurnal PAI No. 1, Volume 4, Maret 2021.

Nasri Kurnialoh Dan Sri Suharti, *"Pendidikan Islam Berbasis Inklusifisme Dalam Kehidupan Multikultur"*, Jurnal Penelitian, , No. 1, Vol. 10 (Februari 2016), 213

Aridlah Sendy Robikhah, "Paradigma Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam" IQ (Ilmu Al-Qur'an), Jurnal Pendidikan Islam, No. 01, Volume, 1 (2018), 6.

Bahrul Ulum, Siti Raudhatul Jannah, *Kosmopolitanisme Di Persimpangan Jalan: Hegemoni Sosial-Politik Putra Daerah* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.

Coki Siadari, *Konsep Menurut Para Ahli,* dalam https://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertian-konsep-menurut-para-ahli.html, diakses tanggal 21 April 2022.

Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor, SYGMA Examedia Arkanleema,2007.

Dina Purnama Sari, *"Peningkatan Keterampilan Menelaah Dan Merevisi Teks Cerpen Dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition (Circ) Berbantuan Media Potel Pada Siswa Kelas Vii-E Smp Negeri 1 Ampelgading Kabupaten Pemalang,"* SKRIPSI, Semarang: UNNES, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta, Bumi Restu, 1971.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional: Perguruan Agama Islam,* Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.

Dodik Kariadi, *"Harmonisasi Nilai Kosmopolitan Dan Nasionalisme Melalui Pkn Untuk Pendidikan Berwawasan Global Berkarakter Lokal",* Jurnal Bina Gokik, No. 2, Vol, 3, September, 2016.

Dr. Abdul Syukur Abu Bakar, *"Sistem Pendidikan Islam"* Jurnal Pendidikan Islam, No. 1, Volume, 1, Juni2020.

Dyah Ayu Maharani, *"Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Mengena i Tujuan Pendidikan IslamaRelevansinya Dengan Tujuan Pendid ikan Nasional,"* SKRIPSI, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Endang Yulianti, "*Tinjauan Tentang Pendidikan Berbasis Kosmopolitan Dalam Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial Di Indonesia,*" Syariati Jurnal Studi Al-Quran dan Hokum, No. 2, Volume I November, 2015.

Fatmawatun, "*Kritik Terhadap Teolologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Aid Aqil Siradj*", SKRIPSI, Ciputan : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Haerul Min Wahyu, "*Pembelajaran Menelaah Struktur Teks Eksplanasi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Salomekko Kabupaten Bone,*" SKRIPSI, Makassar : UNM, 2019.

Hamadi B. Husain, *"Islam Dan Kosmopolitanisme Budaya,"* Islamica Jurnal Studi KeIslaman, No. 1, Volume 2, Januari, 2014.

Henny Yusalia, *"Pluralisme Beragama Di Indonesia : Studi Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid,"* Tesis, Palembang : Uin Raden Fatah, 2008.

Husna Izzati, Dkk, *"Akulturasi Lintas Budaya Islam, Barat, Dan Nusantara Di Masjid Cipaganti Bandung,"* Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, No. 2, Vol. 16, Desember, 2021.

Imran khan, *Uniknya Pesantren Sains Salman Cirebon*, dalam https://panduanterbaik.id/pesantren-sains-salman-cirebon/#Alamat_Pesantren_Sains_Salman_Assalam, diakses tanggal 19 Agustus 2022.

Iji Kurniawan, *"Pemikiran Abdurrahman Wahid (1940-2009) Tentang Islam Keindonesiaan,"* SKIRPSI, Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin : Upaya Menghidupkan Ilmu Agama,* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2007.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, PT. Pantja Cemerlang, 2020.

Koko Adya Winata, Dkk, *"Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Pprinsip Prinsip Multikultural Di Sekolah,"* Atta'dib Jurnal Pendidikan Islam, No. 1, Volume 1 Juni 2020.

Masykur, Siti Solekhah, *"Tafsir Qur'an Surah Al-'Alaq Ayat 1 Sampai 5 : Perspektif Ilmu Pendidikan,"* Jurnal Studi KeIslam, No. 2, Volume 2 Juli, 2021.

Muhammad Ridho Agung, *"Strategi Pemasaran Ideologi Gerakan Wahabi Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,"* SKRIPSI, Yogyakarta : UGM sunan kalijaga, 2018.

M. Nur Fauzi, *"Jejak Pemikiran Kosmopolitan Gus Dur: Antara Universalitas Islam dan Partikularitas Kearifan Lokal,"* Jurnal Transformatif, No. 2, Volume 3 Oktober, 2019.

Muhammad Said, *"Nalar Islam Kosmopolitan (Studi Pemikiran Fethullah Gulen 1990-2004)"*, SKRIPSI : UIN Yogyakarta, 2016.

Mudjia Rahardjo, *"Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis Dalam Penelitian,"* Malang, 2018.

Mokh. Iman Firmansyah, *"Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi,"* Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim No. 2, Volume, 17 2019.

M. Habibullah, *"Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam,"* As-Shuffah Jurnal Of Islamic Studies, No. 2, Volume 1 Desember 2019.

M. Siswanto, *"Gagasan Islam Kosmopolitan Abdurrahman Wahid Terhadap Konteks Sosial-Keagamaan Di Indonesia,"* SKRIPSI, Ciputat : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Miftahus Sa'diyah, M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, *"Islam Kosmopolitan Di Masa Pandemi: Telaah Pemkiran Islam Kosmpolitan Gus Dur Di Masa Pandemi Covid-19,"* Prosiding Jurnal Muktamar Pemikiran Dosen Pmii, No. 1, Volume 1, Juli, 2021.

Machrus Ali, *"Kontribusi Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan Islam Di Idonesia,"* SKRIPSI, Malang : UIinN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2018.

Muhammad Aras, *"Konsep Pendidikan Islam Pembebasan: Perspektif K. H. Abdurrahman Wahid,"* SKRIPSI, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017.

Nurchalish Madjid, *KeIslaman, Keindonesiaan dan Kemodernan* Jakarta : Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019.

Nurul Farida, *"Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Perspektif Al-Quran"*, SKRIPSI, Metro: IAIN Metro, 2018.

Puji Gusri Handayani, Verlanda Yuca, *"Kontribusi Culture Shock Terhadap Self Adjustment Mahasiswa Kelas Internasional Universitas Negeri Pa dang"* Jurnal Neo Konseling, No. 3, Volume, 1, Oktober 2019.

Purnomo dan Putri Irma Solikhah, *"Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, No. 2, Vol. 7, Januari-Juni 2021.

Robiatul Awwaliyah, Hasan Baharun, *"Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional : Telaah Epistemologi Terhadap*

Problematika Pendidikan Islam," Didaktika Jurnal Ilmiah No. 1, Volume 19 Agustus, 2018.

Resiana, *"Analisis Nilia-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surah Al-Lukman"*, SKRIPSI, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Sri Mulya Nurhakiky, Muhammad Naelul Mubarok, *"Pendidikan Agama Islam Penangkalradikalisme,"* Jurnal Pendidikan Islam, No. 1, Volume 2 2019.

Sri Agustini, *"Pendidikan Multikultural Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar : Studi Komparatif Surah Al-Hujurat Ayat 13,"* Tesis, Palangka Raya : Iain Palangka Raya, 2019.

Sholihudin Al Ayubi, *"Hubungan Filsafat Dan Bahasa Arab : Studi Tentang Keterkaitan Filsafat dan Bahasa Arab,"* Firkoh Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, No. 1, Volume 12, 2019.

Suwardiyamsyah, *"Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama"*, Al-Irsyad Jurnal Pendidikan Dan Konseling, No. 1, Vol. 7, Juni, 2017.

Septi herliana, *"Pendidikan Islam Menurut Muhammad Nastir Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia Saat Ini,"* SKRIPSI, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Warko Triono, *"Pribumisasi Islam : Studi Analisis Pemikiran Gus Dur,"* Tesis, Palembang : UIN Raden Fatah, 2015

Welly Angela Riry, DKK, *"Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, Balobe Law Jurnal Lisensi Creative Commons Atribusi-Noncommercial 4.0 Internasiona, No. 1, Vol, 1, April 2021.

Yudi Setiadi, *"Gagasan Pluralisme Gus Dur Dan Cak Nur Untuk Menangkal Gagasan Radikalisme,"* Jurnal Pemikiran KeIslaman No. 1, Vol, 2, 2019.

Zulfani, *"Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menangkal Paham Radikalisme Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Siak Hulu Kabupaten Kampar"*, SKRIPSI, Pekanbaru Riau : UI Riau, 2019.

Zaenal Abidin, *"Wahabisme, Transanionalisme Dan Gerakan-Gerakan Radikalismen Di Indonesia"*, Tasamuh Jurnal Pendidikan Islam, No. 2, Volume. 12, Juni 2015.

Zainal Abidin, *"Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Dan Pluralitas,"* Binus Jurnal Publishing, No. 2, Volume 3, Oktober 2021.

. Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka,* (Bandung: Mizan, 1999)

Putra, Heddy Shri Ahimsa Paradigma Profetik Islam: Epistemologi Etos Dan Model, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2016.

Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin (Buku Kelima: Pergaulan, Uzlah, Adab Musafir, Musik dan Ekstase, Kitab Amar Ma"ruf dan Nahi Munkar, Adab dan Akhlak Nabi, trans. oleh Al-Haj Maulana Fazlul-Karim*, (Bandung: Marja, 2014), 128.

Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civi Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 239.

PROFIL PENULIS

Adi Haryanto adalah nama penulis buku ini. Penulis lahir dari orang tua, Ibu Nurhayati Binti Mansur dengan Bapak Mahmud Bin Ali sebagai anak ke-tiga dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Dusun Langgentu, Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima pada tanggal 31 Juli 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Kala Donggo lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi di SMPN 1 Donggo lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Donggo lulus pada tahun 2017, kemudian menempuh pendidikan tinggi di STIT Sunan Giri Kota Bima meraih gelar sarjana pada tahun 2022, hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan lanjut di program Magister di Kampus STAI Al-Furkan Makassar tahun 2023, dan meraih gelar magister tahun 2024.

Penulis juga pernah aktif di dunia organisasi. Secara nasional penulis terlibat dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan secara lokal penulis terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Donggo Soromandi. Penulis juga pernah mengikuti Madrasah Kader Nahdhatul Ulama (MKNU) tahun 2020 yang diagendakan oleh Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Kota Bima (ISNU).

Sementara saat ini penulis dalam kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Donggo. Penulis juga aktif di Laskar Bima Craft (LBC) STIT Bima sejak 2018 sampai saat ini. Penulis pernah ikut pelatihan dakwah yang diadakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM NU) Kabupaten Bima tahun 2021. Penulis pernah ikut lomba MTQ cabang Kaligrafi golongan dekorasi meraih juara I di tingkat Kecamatan Rasa Na,e Barat tahun 2019/2021 dan tingkat Kota Bima meraih juara III tahun 2019/2023.

Hermawansyah adalah seorang akademisi, penulis, dan aktivis budaya yang lahir di Desa Labuan Kananga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN 2 Labuan Kananga, yang ia tamatkan pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan ke MTs Muhammadiyah Tolobali Kota Bima dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan menengah atas ia selesaikan di SMA Muhammadiyah Kota Bima pada tahun 2026 (terdapat kemungkinan penulisan tahun yang tidak konsisten dan bisa dikoreksi jika diperlukan). Pendidikan tinggi ia tempuh di dua kampus, yaitu IAI Muhammadiyah Kota Bima (lulus 2010) dan Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 2013). Saat ini, ia sedang menyelesaikan studi S3 di UIN Alauddin Makassar.

Kini, Hermawansyah aktif sebagai dosen tetap di STIT Sunan Giri Bima. Selain mengajar, ia juga dikenal sebagai penulis produktif yang rutin menulis di jurnal-jurnal nasional serta menerbitkan berbagai buku, baik dalam bentuk fiksi maupun nonfiksi. Ketertarikannya pada dunia literasi telah membawanya menjadi salah satu intelektual lokal yang aktif menyuarakan isu-isu pendidikan, kebudayaan, dan kewirausahaan.

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

Sunan Giri

BIMA – NUSA TENGGARA BARAT

www.stitbima.ac.id

KONSEP KOSMOPOLITAN PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

(Relevansi Kekinian dan Implementasi Dalam Dunia Pendidikan Islam)

Konsep kosmopolitan dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menawarkan pandangan inklusif yang menekankan pada pluralisme, penghargaan terhadap keberagaman, dan perdamaian antarumat beragama. Gus Dur berpendapat bahwa umat Islam harus mampu berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama di dunia, tanpa kehilangan identitas Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep kosmopolitan ini relevan dengan upaya membangun pendidikan yang inklusif, mengajarkan toleransi, serta menghargai perbedaan. Implementasi pemikiran Gus Dur dalam dunia pendidikan Islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, mengurangi radikalisasi, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal, yang pada gilirannya membentuk karakter generasi muda yang lebih adaptif dan berwawasan global.

Diva! Pustaka
www.divapustaka.co.id
divapustaka@gmail.com
@divapustaka
@divapustaka
IKAPI
ISBN 978-623-8795-74-5
9 786238 795765
Harga P. Jawa Rp92.000